



PEMERINTAH KABUPATEN  
PAMEKASAN



RENCANA  
PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG  
DAERAH  
**(RPJPD)**

Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2025-2045

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pengampu kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan tujuan Pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
- b. untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. sebagai pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi dan misi Kepala Daerah; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD.

### Pasal 4

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### Pasal 5

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
  - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah
  - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
  - f. BAB IV : Penutup
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. guncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran Daerah; atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14) berlaku sampai 31 Desember 2024.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Oktober 2024



Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Oktober 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 252-7/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun 2005-2025.

RPJPD Kabupaten Pamekasan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pamekasan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Pamekasan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pamekasan pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Pamekasan sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Pamekasan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.



## ***Kata Pengantar***

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan kerunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya Sekretaris Daerah, Bapperida dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 memiliki tujuan untuk memenuhi dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pamekasan agar terarah dan sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Akhir kata, kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Pamekasan, 29 Oktober 2024



## ***Daftar Isi***

<b>Kata Pengantar</b>		<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>		<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b>		<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar</b>		<b>xxii</b>
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3	Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-8
1.4	Maksud dan Tujuan	I-11
1.5	Sistematika Penulisan	I-12
<b>BAB II</b>	<b>Gambaran Umum Kondisi Daerah</b>	<b>II-1</b>
2.1.	Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1.	Letak, Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.2	Kondisi Topografi	II-5
2.1.1.3	Kondisi Geologi	II-9
2.1.1.4	Kondisi Hidrologi	II-10
2.1.1.5	Daya Dukung Dan Daya Tampung	II-12
2.1.1.6	Potensi Pengembangan Wilayah	II-25
2.1.1.7	Wilayah Rawan Bencana	II-27
2.1.2	Aspek Demografi	II-33
2.1.2.1	Jumlah Penduduk	II-33
2.1.2.2	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-36
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37



2.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-37
2.2.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-37
2.2.1.2	Indeks Gini	II-38
2.2.1.3	Angka Kemiskinan	II-39
2.2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-41
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	II-42
2.2.1.6	Nilai Tukar Petani	II-47
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya	II-48
2.2.2.1	Indeks Kesehatan	II-48
2.2.2.2	Indeks Keluarga Sehat	II-49
2.2.2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-50
2.2.2.4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-51
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-51
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-51
2.3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto	II-51
2.3.1.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Non Makanan	II-53
2.3.1.3	Penanaman Modal	II-54
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-55
2.3.2.1	Indeks Pendidikan	II-55
2.3.2.2	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	II-56
2.3.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-57
2.3.2.4	Rasio Ketergantungan	II-57
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-58
2.3.3.1	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	II-58
2.3.3.2	Kondisi Jalan Mantap Kabupaten	II-60
2.3.3.3	Jembatan Dalam Kondisi Baik	II-61
2.3.3.4	Rasio Jaringan Irigasi	II-62
2.3.3.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-64



2.3.4	Daya Saing Iklim Invetasi	II-65
2.3.4.1	Nilai Investasi	II-65
2.3.4.2	Indeks Daya Saing Daerah	II-66
2.3.4.3	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-66
2.3.4.4	Indeks Resiko Bencana	II-68
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-69
2.4.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-69
2.4.1.1	Pendidikan	II-69
2.4.1.2	Kesehatan	II-75
2.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-81
2.4.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-88
2.4.1.5	Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-90
2.4.1.6	Sosial	II-92
2.4.2	Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-101
2.4.2.1	Ketenagakerjaan	II-101
2.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-102
2.4.2.3	Pangan	II-106
2.4.2.4	Pertanahan	II-107
2.4.2.5	Lingkungan Hidup	II-108
2.4.2.6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-115
2.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-118
2.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-121
2.4.2.9	Perhubungan	II-127
2.4.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-131
2.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-134
2.4.2.12	Penanaman Modal	II-137
2.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-141
2.4.2.14	Statistik	II-145
2.4.2.15	Persandian	II-146



2.4.2.16	Kebudayaan	II-147
2.4.2.17	Perpustakaan	II-150
2.4.3	Fokus Urusan Pilihan	II-155
2.4.3.1	Pariwisata	II-155
2.4.3.2	Pertanian	II-163
2.4.3.3	Kehutanan	II-167
2.4.3.4	Perdagangan	II-168
2.4.3.5	Perindustrian	II-168
2.4.3.6	Transmigrasi	II-171
2.4.3.7	Kelautan dan Perikanan	II-172
2.4.4	Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	II-175
2.4.4.1	Sekretariat Daerah	II-175
2.4.4.2	Sekretariat DPRD	II-178
2.4.4.3	Perencanaan	II-180
2.4.4.4	Keuangan	II-181
2.4.4.5	Kepegawaian	II-182
2.4.4.6	Pengawasan	II-185
2.4.5	Indeks Reformasi Birokrasi	II-186
2.4.6	Indeks Inovasi Daerah	II-187
2.4.7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-187
2.4.8	Standar Pelayanan Minimum	II-188
2.5.	Evaluasi Hasil Rpjpd Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025	II-189
2.5.1	Evaluasi Indikator Makro	II-189
2.5.2	Rekomendasi dalam Penyusunan RPJPD 2025-2045	II-192
2.6.	Tren Demografi Dan Kebutuhan Saranan Prasarana Pelayanan Publik	II-193
2.6.1	Proyeksi Kondisi Demografi Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-193
2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kabupaten	



	Pamekasan Tahun 2025-2045	II-199
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-205
2.7.1	Telaah Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah RPJPN	II-205
2.7.2	Telaah Arah Kebijakan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur	II-210
2.7.3	Telaah Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045	II-215
2.7.4	Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Pamekasan	II-219
2.7.4.1	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	II-219
2.7.4.2	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten	II-224
2.7.4.3	Kawasan Strategis Kabupaten	II-225
2.7.4.3.1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	II-225
2.7.4.3.2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	II-227
2.7.4.3.3	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung	II-228
2.7.4.4	Kawasan Rawan Bencana	II-232
<b>BAB III</b>	<b>Permasalahan dan Isu Strategis</b>	<b>III-1</b>
3.1	Permasalahan	III-1
3.2	Isu Strategis Daerah	III-5
3.2.1	Isu Strategis Global	III-5
3.2.2	Isu Strategis Nasional	III-9
3.2.3	Isu Strategis Provinsi Jawa Timur	III-14
3.2.4	Isu strategis dalam KLHS RPJPD Kabupaten Pamekasan	III-20
3.2.5	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	III-20



<b>Bab IV</b>	<b>Visi dan Misi Daerah</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Telaah terhadap Visi dan Misi RPJPN 2025-2045	IV-1
4.2	Telaah Visi dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 -2045	IV-11
4.3	Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 – 2045	IV-15
<b>Bab V</b>	<b>Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok</b>	<b>V-1</b>
5.1	Arah Kebijakan	V-1
5.2	Sasaran Pokok	V-16
<b>Bab VI</b>	<b>Penutup</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Pedoman Transisi	VI-1
6.2	Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.3	Pengendalian dan Evaluasi	VI-2



## ***Daftar Tabel***

Tabel 2.1	Luas Daerah dan Nama Ibukota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023	II-3
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-4
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-5
Tabel 2.5	Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-7
Tabel 2.6	Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-9
Tabel 2.7	Nama, Panjang, dan Menara Sungai Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-10
Tabel 2.8	Nama-Nama Dam/Bendungan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-11
Tabel 2.9	Tabel Hitung Koefisien Daya Dukung Pangan Kabupaten Pamekasan	II-15
Tabel 2.10	Hasil Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2045	II-17
Tabel 2.11	Rumus Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air	II-20
Tabel 2.12	Nilai Koefisien Limpasan Kabupaten Pamekasan	II-21
Tabel 2.13	Tabel Hitung Daya Dukung Tempat Tinggal Kabupaten Pamekasan	II-24
Tabel 2.14	Rekapitulasi Hasil Kajian Bahaya	II-28
Tabel 2.15	Tingkat Bahaya Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	II-29



Tabel 2.16	Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pamekasan (IRB) Tahun 2021-2023 Menurut Dokumen IRBI	II-30
Tabel 2.17	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-30
Tabel 2.18	Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2019–2023	II-32
Tabel 2.19	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2021	II-32
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2019–2023	II-34
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 2023	II-35
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	II-36
Tabel 2.23	Persentase Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Pamekasan Tahun 2019–2023	II-40
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Madura dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2023 (ribu)	II-40
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019–2023	II-41
Tabel 2.26	Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023	II-45
Tabel 2.27	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2023	II-50
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023	II-50



Tabel 2.29	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-51
Tabel 2.30	PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2.31	Kontribusi PDRB Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha	II-52
Tabel 2.32	Kontribusi PDRB Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran	II-53
Tabel 2.33	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan	II-54
Tabel 2.34	Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan	II-55
Tabel 2.35	Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2.36	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2023	II-58
Tabel 2.37	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Pamekasan	II-61
Tabel 2.38	Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2022	II-65
Tabel 2.39	Indeks Daya Saing Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dan Nasional	II-66
Tabel 2.40	Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-67
Tabel 2.41	Indeks Pendidikan Tahun 2019–2023	II-69
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019–2023	II-72
Tabel 2.43	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019–2023	II-72
Tabel 2.44	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2019–2023	II-73



Tabel 2.45	Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik Tahun 2019–2023	II-73
Tabel 2.46	Rasio Guru terhadap Murid menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019–2023	II-74
Tabel 2.47	Kesehatan Bayi tahun 2019–2023	II-76
Tabel 2.48	Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019 –2023	II-77
Tabel 2.49	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019–2023	II-77
Tabel 2.50	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	II-78
Tabel 2.51	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	II-78
Tabel 2.52	Tenaga Kesehatan 2019–2023	II-79
Tabel 2.53	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2019–2023	II-81
Tabel 2.54	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	II-81
Tabel 2.55	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Tahun 2019–2023	II-84
Tabel 2.56	Panjang Jalan per Kecamatan Tahun 2019–2023	II-85
Tabel 2.57	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2019 – 2023	II-85
Tabel 2.58	Proporsi Jembatan dalam Keadaan Baik Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.59	Panjang Jalan (km) yang Memiliki Trotoar dan Drainase	II-86
Tabel 2.60	Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023	II-87
Tabel 2.61	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW Tahun 2019 – 2023	II-87
Tabel 2.62	Rumah Layak Huni (unit) Tahun 2018–2023	II-88
Tabel 2.63	Kawasan Kumuh Tahun 2022–2023	II-88
Tabel 2.64	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2020–2023	II-89



Tabel 2.65	Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020–2023	II-89
Tabel 2.66	Linmas dan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2.67	Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Tahun 2019–2023	II-91
Tabel 2.68	Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam	II-91
Tabel 2.69	Indeks Kapasitas Bencana Tahun 2020–2023	II-92
Tabel 2.70	Capaian SPM Urusan Bencana Tahun 2020–2022	II-92
Tabel 2.71	Indikator Urusan Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2.72	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-95
Tabel 2.73	Jumlah TAGANA, TAGANA yang Ditingkatkan Kemampuan dan Kapasitasnya, serta TAGANA Bersertifikat di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-100
Tabel 2.74	Hasil Capaian Fokus Ketenagakerjaan Tahun 2019–2023	II-101
Tabel 2.75	Capaian Kinerja terkait Perempuan dan Anak Tahun 2019–2023	II-103
Tabel 2.76	Tingkat Kerawanan Kekerasan pada Perempuan Tahun 2019–2023	II-104
Tabel 2.77	Ketersediaan Cadangan Pangan Tahun 2019–2023	II-105
Tabel 2.78	Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2022	II-106
Tabel 2.79	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Pamekasan 2017-2023	II-106
Tabel 2.80	Skor AKG Tahun 2021–2022	II-106



Tabel 2.81	Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan menurut Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 – 2022	II-107
Tabel 2.82	Penanganan Sampah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023	II-113
Tabel 2.83	Tingkat Kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tahun 2019–2023	II-115
Tabel 2.84	Tingkat Kepemilikan KIA Tahun 2019–2023	II-116
Tabel 2.85	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019–2023	II-117
Tabel 2.86	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	II-117
Tabel 2.87	Klasifikasi Status Desa Dalam Indeks Desa Membangun (IDM)	II-118
Tabel 2.88	Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2019–2023	II-119
Tabel 2.89	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2019 – 2023	II-119
Tabel 2.90	Persentase PKK Aktif Tahun 2019–2023	II-120
Tabel 2.91	Posyandu Aktif Tahun 2019–2023	II-120
Tabel 2.92	Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023	II-121
Tabel 2.93	Tingkat Kelahiran Tahun 2019–2023	II-121
Tabel 2.94	Rasio Akseptor KB Tahun 2019–2023	II-122
Tabel 2.95	Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif Tahun 2019–2023	II-122
Tabel 2.96	Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Peserta Keluarga Berencana Tahun 2019-2023	II-123
Tabel 2.97	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Tahun 2019–2023	II-123
Tabel 2.98	Persentase Pencapaian Peserta KB Tahun 2019–2023	II-123



Tabel 2.99	Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana	II-124
Tabel 2.100	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	II-124
Tabel 2.101	Tingkat Pengguna Kontrasepsi Tahun 2019–2023	II-125
Tabel 2.102	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluhan Keluarga Berencana (LKB/ PKB) Tahun 2019–2023	II-125
Tabel 2.103	Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2019–2023	II-126
Tabel 2.104	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2019 – 2023	II-126
Tabel 2.105	Angka Kecelakaan Tahun 2019–2023	II-127
Tabel 2.106	Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2019–2023	II-127
Tabel 2.107	Jumlah Angkutan Darat Tahun 2019–2023	II-128
Tabel 2.108	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang Tahun 2019–2023	II-128
Tabel 2.109	Persentase Sarana/Prasarana Penerangan Jalan Umum yang Layak Fungsi Tahun 2019–2023	II-129
Tabel 2.110	Kapasitas Jalan Tahun 2019–2023	II-129
Tabel 2.111	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Parkir Berlangganan Tahun 2019–2023	II-130
Tabel 2.112	Tingkat Keterhubungan Antar Moda Transportasi Tahun 2019–2023	II-130
Tabel 2.113	Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Kabupaten Pamekasan	II-131
Tabel 2.114	Layanan Informasi Tahun 2019–2023	II-131
Tabel 2.115	Jaringan Internet Pemerintah Tahun 2019–2023	II-132
Tabel 2.116	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018–2022	II-133

Tabel 2.117	Layanan Publik secara Online Tahun 2019–2023	II-133
Tabel 2.118	Penyebaran Informasi Publik Tahun 2019–2023	II-134
Tabel 2.119	Kondisi Koperasi Tahun 2019–2023	II-134
Tabel 2.120	Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2019–2023	II-135
Tabel 2.121	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-137
Tabel 2.122	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) Kabupaten pamekasan Tahun 2017-2023	II-139
Tabel 2.123	Perkumpulan Olahraga Tahun 2019–2023	II-141
Tabel 2.124	Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2019–2023	II-141
Tabel 2.125	Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2019–2023	II-142
Tabel 2.126	Prestasi Dalam Event Olahraga Nasional dan Internasional	II-142
Tabel 2.127	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2019–2023	II-143
Tabel 2.128	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2019–2023	II-143
Tabel 2.129	Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Tahun 2019–2023	II-143
Tabel 2.130	Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial	II-144
Tabel 2.131	Pengelolaan Data Statistik Tahun 2019–2023	II-145
Tabel 2.132	Pengelolaan Data Statistik Sektoral Tahun 2019–2023	II-146
Tabel 2.133	Keamanan Informasi Tahun 2019–2023	II-146
Tabel 2.134	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal	II-147
Tabel 2.135	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	II-147
Tabel 2.136	Jumlah Lembaga Seni Tahun 2019 – 2023	II-147
Tabel 2.137	Jumlah Tenaga Seni Tahun 2019 – 2023	II-148



Tabel 2.138	Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Tahun 2018 – 2022	II-149
Tabel 2.139	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	II-149
Tabel 2.140	Jumlah Kesenian yang dibina dan dikembangkan	II-149
Tabel 2.141	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan Tahun 2019 – 2023	II-150
Tabel 2.142	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	II-153
Tabel 2.143	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2019-2023	II-153
Tabel 2.144	Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku	II-154
Tabel 2.145	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	II-154
Tabel 2.146	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Baku Tahun 2019 – 2023	II-154
Tabel 2.147	Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2018 – 2022	II-155
Tabel 2.148	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2019 – 2023	II-155
Tabel 2.149	Jumlah Destinasi Wisata Tahun 2018 – 2022	II-155
Tabel 2.150	Objek Wisata Tahun 2023	II-156
Tabel 2.151	Jumlah Pengunjung Domestik Destinasi Wisata di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 – 2023	II-160
Tabel 2.152	Data SDM pelaku/pengelola pariwisata yang bersertifikat	II-161
Tabel 2.153	Kontribusi Bidang Pariwisata terhadap PAD	II-162
Tabel 2.154	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	II-162
Tabel 2.155	Data Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	II-163



Tabel 2.156	Produksi Padi, Produksi Jagung dan Kedelai dan Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-164
Tabel 2.157	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-164
Tabel 2.158	Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	II-165
Tabel 2.159	Jumlah Produksi Tanaman Buah di Kabupaten Pamekasan 2023	II-165
Tabel 2.160	Produksi Menurut Jenis tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim tanaman di Kabupaten Pamekasan (kuintal) Tahun 2019 – 2023	II-166
Tabel 2.161	Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2023	II-167
Tabel 2.162	Jumlah Sarana Perdagangan di Pasar Menurut Lokasi Pasar di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023	II-168
Tabel 2.163	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-168
Tabel 2.164	Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-169
Tabel 2.165	Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan	II-169
Tabel 2.166	Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-170
Tabel 2.167	Persentase Kerjasama Produksi Antar IKM yang Telah Dibina Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-170
Tabel 2.168	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Pamekasan	II-170



Tabel 2.169	Jumlah Sentra Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-171
Tabel 2.170	Tenaga Kerja Industri Unggulan Batik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-171
Tabel 2.171	Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2022	II-171
Tabel 2.172	Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-172
Tabel 2.173	Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-172
Tabel 2.174	Jumlah dan persentase Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-173
Tabel 2.175	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-173
Tabel 2.176	Banyaknya Desa Perikanan dan RTP di Kabupaten Pamekasan	II-173
Tabel 2.177	Produksi Perikanan Tangkap dan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-174
Tabel 2.178	Produksi Ikan Olahan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-174
Tabel 2.179	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-175
Tabel 2.180	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 – 2023	II-176
Tabel 2.181	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-176
Tabel 2.182	Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 dan 2023	II-177



Tabel 2.183	Nilai LPPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2022	II-177
Tabel 2.184	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	II-177
Tabel 2.185	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023	II-178
Tabel 2.186	Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-179
Tabel 2.187	Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2019 – 2023	II-179
Tabel 2.188	Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan Tahun 2019 – 2023	II-180
Tabel 2.189	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023	II-180
Tabel 2.190	Persentase SP2D yang Terbit Kurang dari 2 Hari Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023	II-181
Tabel 2.191	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-181
Tabel 2.192	Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis AkruaI Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023	II-182
Tabel 2.193	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, Jabatan Struktural dan Indeks Indeks Profesionaliras ASN di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-182
Tabel 2.194	Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-184



Tabel 2.195	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-184
Tabel 2.196	Realisasi Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2021	II-185
Tabel 2.197	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2023	II-187
Tabel 2.198	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-188
Tabel 2.199	Capaian SPM Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023	II-189
Tabel 2.200	Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Pamekasan dalam Indikator Makro	II-190
Tabel 2.201	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-196
Tabel 2.202	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-197
Tabel 2.203	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-198
Tabel 2.204	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-199
Tabel 2.205	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-200
Tabel 2.206	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-201
Tabel 2.207	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-202
Tabel 2.208	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-203

Tabel 2.209	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	II-204
Tabel 2.210	Pembagian Kawasan Strategis	II-230
Tabel 4.1	Lima Sasaran Utama Visi Jawa Timur 2045	IV-13
Tabel 4.2	Pokok-Pokok Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 -2045	IV-17
Tabel 4.3	Keselarasan sasaran utama visi Pembangunan Kabupaten Pamekasan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur	IV-21
Tabel 4.4	Target Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan	IV-21
Tabel 4.5	Delapan Misi (Agenda) RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	IV-23
Tabel 5.1	Arah Kebijakan berdasarkan Misi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	V-4
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Pamekasan	V-8
Tabel 5.3	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 – 2045	V-17



## ***Daftar Gambar***

Gambar 1.1	Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	I-9
Gambar 2.1	Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	II-2
Gambar 2.2	Matriks Bencana Prioritas di Kabupaten Pamekasan	II-31
Gambar 2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023	II-34
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan	II-37
Gambar 2.5	Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023	II-38
Gambar 2.6	Perbandingan IPM Jawa Timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun 2019–2023	II-44
Gambar 2.7	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019	II-47
Gambar 2.8	Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023	II-48
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2018 – 2022	II-56
Gambar 2.10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-57
Gambar 2.11	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 (Km)	II-59
Gambar 2.12	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Pamekasan	II-60

Gambar 2.13	Jembatan dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pamekasan	II-62
Gambar 2.14	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.16	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-68
Gambar 2.17	Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019–2023	II-70
Gambar 2.18	Angka Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2019–2023	II-71
Gambar 2.19	Angka Melek Huruf tahun 2019–2023	II-75
Gambar 2.20	Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2023	II-76
Gambar 2.21	Peta Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten Pamekasan	II-83
Gambar 2.22	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 (Orang)	II-94
Gambar 2.23	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 (Persen)	II-97
Gambar 2.24	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2023 (Persen)	II-98
Gambar 2.25	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan menurut Sumber Dana	II-99

Gambar 2.26	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan	II-103
Gambar 2.27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019–2023	II-108
Gambar 2.28	Indeks Kualitas Air Tahun 2019–2023	II-109
Gambar 2.29	Indeks Kualitas Udara Tahun 2019–2023	II-110
Gambar 2.30	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018–2022	II-111
Gambar 2.31	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023	II-112
Gambar 2.32	Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023	II-114
Gambar 2.33	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 (Persen)	II-138
Gambar 2.34	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-141
Gambar 2.35	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun Tahun 2019 – 2023	II-151
Gambar 2.36	Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 – 2023	II-152
Gambar 2.37	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Tahun 2019 – 2023	II-152
Gambar 2.38	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019–2023	II-186
Gambar 2.39	Integrasi Functional Region dan Backbone System Sumatra-Jawa	II-206
Gambar 2.40	Kebijakan Pengembangan Wilayah Fungsional Jawa Timur	II-207
Gambar 2.41	Kata Kunci Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur	II-208

Gambar 2.42	Transformasi dan Game Changer pada Functional Region Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu dan Kawasan Afirmasi Madura	II-209
Gambar 2.43	Desain Integrated Blue Economy Lintas Selatan Wilis	II-212
Gambar 2.44	Desain Agriculture Tapal Kuda	II-213
Gambar 2.45	Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur	II-214
Gambar 2.46	Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur	II-216
Gambar 2.47	Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur	II-217
Gambar 2.48	Tema Pengembangan Wilayah Prioritas Provinsi Jawa Timur	II-223
Gambar 2.49	Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Prioritas Provinsi Jawa Timur	II-223
Gambar 2.50	Peta Rencana Struktur Ruang	II-225
Gambar 2.51	Peta Sistem Pusat Permukiman	II-229
Gambar 2.52	Peta Rencana Pola Ruang	II-232
Gambar 4.1	Kerangka Pikir RPJP Nasional	IV-2
Gambar 4.2	Visi Indonesia Emas 2045	IV-3
Gambar 4.3	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	IV-8
Gambar 4.4	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Indonesia Emas 2045	IV-9
Gambar 4.5	Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur	IV-11
Gambar 4.6	Visi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	IV-16
Gambar 4.7	Keselaran Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur	IV-20
Gambar 5.1	Milestone Pembangunan Jangka Panjang Nasional	V-2
Gambar 5.2	Tahapan Pembangunan Lima tahunan RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045	V-3

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

##### *A. Pengertian dan Lingkup RPJPD*

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode jangka panjang. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perodesasi RPJPD adalah dua puluh tahun. Terdapat tiga tingkatan pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, *pertama* yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode dua puluh tahun. *Kedua adalah* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode lima tahun dan *ketiga* Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memiliki periode satu tahun. Mengacu pada tingkatan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan patokan / jangkar (*Anchor*) arah kebijakan dan sasaran pokok dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. daerah (RPJMD). Arah Kebijakan RPJPD tersebut selanjutnya menjadi patokan dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah (RPJMD).

##### *B. Proses Penyusunan RPJPD;*

Proses penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyalarsan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN). Inmendagri dan SEB tersebut diterbitkan sebagai pedoman penyusunan RPJPD sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Pilkada serentak bertujuan agar perodesasi RPJPD dan RPJMD seragam secara nasional, sehingga memperkuat keselarasan perencanaan antara nasional dengan daerah. Sedangkan hal-hal yang tidak diatur secara spesifik, tetap mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dimana pada Pasal 16 diterangkan bahwa RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

*C. Alasan yang Mendasari Penyusunan RPJPD,*

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) harus tersedia dan sangat penting keberadaannya, karena untuk menetapkan tujuan pembangunan jangka panjang. Tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan tujuan jangka menengah (RPJMD) dan tujuan jangka pendek / tahunan dalam dokumen RKPD. Mengacu pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan dokumen RPJPD sangat penting karena berkaitan dengan kesinambungan tujuan pembangunan daerah.

Beberapa regulasi yang merupakan landasan hukum dalam penyusunan dokumen RPJPD, yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 12 ayat 2 yang mengharuskan Perangkat Daerah penunjang urusan perencanaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atas nama kepala daerah untuk menyusun RPJPD. Selain itu, pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 14 juga diterangkan bahwa Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atas nama kepala daerah untuk menyusun RPJPD. Arahan penyusunan RPJPD terhadap Perangkat Daerah pengampu penunjang urusan perencanaan tersebut menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang ini sangat penting dan dalam prosesnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*D. Resiko Jika Tidak Tersedia RPJPD,*

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 2 ayat 4, jika dokumen RPJPD tidak tersedia, maka akan menimbulkan beberapa resiko sebagai berikut; (1) Adanya hambatan dalam menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (2) Tidak adanya tujuan pembangunan jangka Panjang daerah, yang selanjutnya akan berdampak pada tidak adanya acuan dalam perumusan tujuan pembangunan jangka menengah dan tujuan pembangunan jangka pendek; (3) Adanya hambatan dalam koordinasi antarpelaku pembangunan; (4) Adanya hambatan dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan (5) Adanya hambatan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

*E. Pendekatan dalam Penyusunan RPJPD.*

Berdasarkan kaidah dan pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

3. Pendekatan politis, RPJPD merupakan dokumen perencanaan 20 tahun yang telah dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional

Pada sisi lain sebagai upaya untuk menjamin keselarasan antara sektoral dan spasial, maka terdapat pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif* dan *Spasial* (THIS). Melalui pendekatan ini diharapkan perencanaan dapat menjamin manajemen pembangunan lebih efektif dan efisien.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

- 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042 Setneg);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
  16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841)
  17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

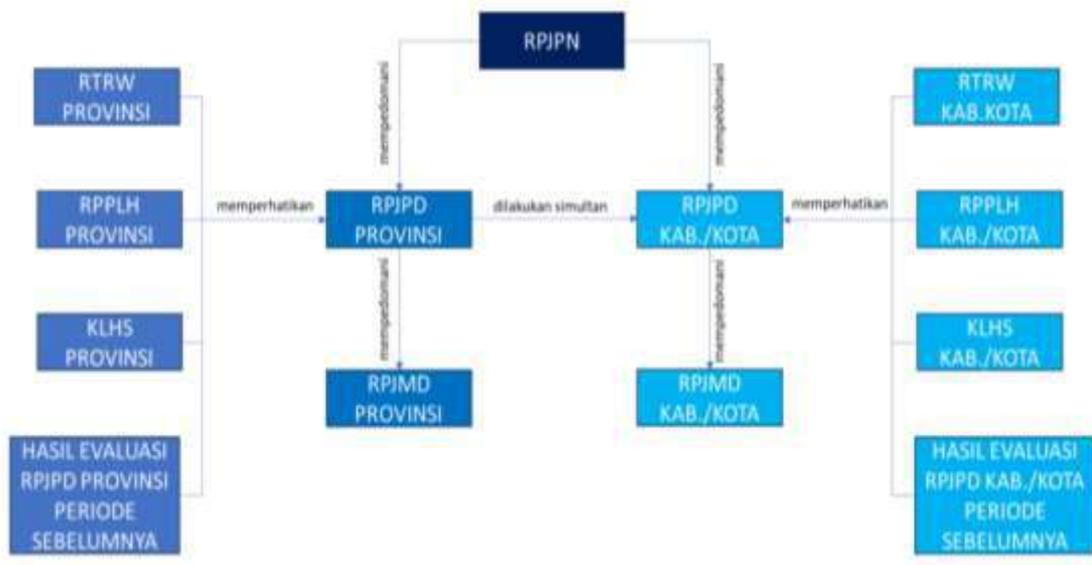
- Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 459);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 2).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri nomor 86 Tahun 2017, maupun Inmendagri Nomor 1 tahun 2024 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN maupun RPJPD pemerintahan daerah di level yang lebih atas. RPJPD pun harus memperhatikan rencana pembangunan (khususnya jangka panjang) yang lain yang tersedia, sehingga memastikan keterpaduan antar dokumen rencana dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional. Secara terperinci, Inmendagri tahun 2024 Menyebutkan bahwa dokumen rencana yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten, dan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten periode sebelumnya (**Gambar 1.1**). Penyusunan RPJPD Kabupaten Pamekasan 2025-2045 ini pun menelaah, memperhatikan, dan mengacu pada arahan dokumen-dokumen tersebut.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional**



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

RPJPN Tahun 2025-2045 telah menguraikan permasalahan dan isu strategis, visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk memastikan keselarasannya, perumusan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 dapat mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang relevan dengan kondisi serta kewenangan kabupaten. Visi, misi dan pentahapan pembangunan (arah kebijakan serta sasaran pokok) pembangunan Kabupaten Pamekasan juga bisa menyelaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok. Bagaimana pun, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 akan menjadi isu eksternal dan strategis nasional bagi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Pamekasan juga harus terkait dan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Timur pada periode yang bersesuaian. Kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 juga akan menjadi isu eksternal dan strategis regional bagi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pamekasan harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Timur yang

mencakup Kabupaten Pamekasan dan telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Dokumen lain yang harus diacu oleh RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 adalah RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032 yang saat ini sedang diproses review dan direvisi menjadi RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2040. Inmendagri tahun 2024 menjelaskan bahwa penyusunan RPJPD kabupaten Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau “revisi” RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah. Dengan demikian, meskipun sedang dalam proses revisi, substansi RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2022-2042 lebih relevan dibandingkan dengan RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032. Amanah RTRW, khususnya yang terkait dengan pengembangan kawasan strategis, baik untuk kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup atau pun lainnya harus diperhatikan. Dalam perencanaan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, pengembangan kawasan-kawasan strategis ini dapat menjadi arah kebijakan pengembangan kewilayahan kabupaten. Pun demikian dengan pengaturan zonasi di RTRW memberikan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan penyediaan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan tata ruang wilayah kabupaten.

Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 600.11.2/8755/Bangda tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam RPJPD/RPJMD, tanggal 7 Agustus 2023, menyebutkan bahwa penyusunan RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 harus memperhatikan dokumen KLHS yang sedang disusun dalam rangka penyusunan RPJPD. Subtansi KLHS RPJPD Kabupaten Pamekasan lebih fokus pada evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Pamekasan. Dokumen KLHS tersebut juga memuat isu strategis KLHS serta berbagai rekomendasi pembangunan ramah lingkungan dan rencana kerja/program lainnya dalam rangka pencapaian TPB yang telah

dikomitmenkan. Karenanya, isu-isu strategis serta rekomendasi KLHS akan menjadi isu yang harus diperhatikan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045. Rekomendasi KLHS tentang sasaran dan strategi pembangunan masa mendatang pun akan diacu dalam penetapan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD. Selain itu, jika tersedia RPPLH Kabupaten Pamekasan, khususnya pada periode yang bersesuaian dengan periode RPJPD, maka isu-isu strategis maupun rekomendasi arah kebijakan maupun strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi masukan dalam menyusun permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045.

Dokumen lain yang juga harus dipertimbangkan atau diacu dalam menyusun RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 adalah Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD kabupaten Tahun 2005-2045. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang faktor penghambat maupun pendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang periode sebelumnya sekaligus rekomendasi bagi penyusunan RPJPD Kabupaten periode selanjutnya. Informasi dan rekomendasi tersebut menjadi masukan juga saat merumuskan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pamekasan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045 adalah;

- a) Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;

- b) Merumuskan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang yang berpijak pada isu strategis jangka Panjang;
- c) Merumuskan Arah Kebijakan pembangunan jangka Panjang berdasarkan fokus pembangunan lima tahunan sebagai acuan menyusun RPJMD;
- d) Merumuskan Sasaran Pokok pembangunan jangka Panjang sebagai penjabaran dari Arah Kebijakan daerah.
- e) Menetapkan Indikator dan Target Sasaran Pokok pembangunan jangka Panjang sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya.

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi.

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sesuai dengan arahan kementerian dalam negeri, maka perlu disajikan data dan informasi mengenai;

- a) Proyeksi demografi (kependudukan) hingga tahun 2045 sebagai pijakan dalam perumusan kebutuhan layanan umum yang harus disediakan.
- b) Indikasi Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) jangka Panjang yang diselaraskan dengan kinerja sectoral.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan arahan kementerian dalam negeri, maka perlu disajikan data dan informasi mengenai proyeksi perkembangan sectoral, termasuk adanya kemungkinan pergeseran sectoral (*Sectoral Shifting*) pada periode pembangunan jangka Panjang hingga tahun 2045.

## 2.3. Aspek Daya Saing

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan arahan kementerian dalam negeri, maka perlu disajikan data dan informasi mengenai proyeksi kebutuhan sarana prasarana dan infrastruktur pembangunan pada periode pembangunan jangka Panjang hingga tahun 2045.

#### 2.5. Evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045

Bagian ini menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai dasar untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

#### 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Bagian ini menjelaskan kondisi kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) dari kementerian / lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi; rumah tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan dan pendidikan.

#### 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah ini harus selaras dengan kebijakan kewilayahan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

### 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

### 3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian.

## **BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH**

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

### 4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

### 4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan

bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok.

## **BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi / misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

### **5.1. Arah Kebijakan**

Pada tahap ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

#### **1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I**

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

#### **2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II.**

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode kedua RPJPD.

#### **3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III.**

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode ketiga RPJPD.

#### **4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV**

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode keempat RPJPD.

## 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.

## **BAB VI. PENUTUP**

Pada bagian penutup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045, menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan, aturan peralihan dan pengendalian – evaluasi.

### 6.1. Kaidah Pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan menjabarkan mengenai berbagai petunjuk, prosedur atau kebijakan dalam rangka penerapan / implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045.

### 6.2. Aturan Peralihan.

Aturan Peralihan menjabarkan mengenai berbagai kebijakan atau catatan penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun periode selanjutnya.

### 6.3. Pengendalian dan Evaluasi.

Memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Aspek Geografi dan aspek Demografi merupakan salah satu gambaran karakter suatu daerah sehingga sangat penting aspek ini sebagai dasar untuk melaksanakan analisis sehingga di harapkan menjadi sebuah objektivitas penilaian untuk mengembangkan wilayah, dan juga bisa mengantisipasi ketika wilayah tersebut berada dalam wilayah rawan bencana.

##### **2.1.1 ASPEK GEOGRAFI**

###### **2.1.1.1. LETAK, LUAS, DAN BATAS WILAYAH**

Madura merupakan suatu kepulauan yang berada di wilayah territorial administrasi Provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten yang bernama Pamekasan memiliki potensi jangka Panjang dalam rencana pembangunan yang Panjang, karena memiliki luas wilayah yang besar, sebesar 79.516 ha pada koordinat 6051'-7031' Lintang selatan dan 113019' – 113058' bujur timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang.



Tercatat secara administrasi yang memasuki wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri sejumlah tiga belas kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Ditinjau dari luas wilayah kecamatan, yang paling kecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luasan 26.47 ha atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan sedangkan yang paling besar ada di Kecamatan Batumarmar seluas 97.05 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan Berikut luas daerah:

**Tabel 2.1**  
**Luas Daerah dan Nama Ibukota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (km2)
Tlanakan	Branta Tinggi	48.10
Pademawu	Bunder	71.90
Galis	Galis	31.86
Larangan	Larangan Luar	40.86
Pamekasan	Patemon	26.47
Proppo	Proppo	71.49
Palengan	Palengan Laok	88.4
Pegantenan	Pegantenan	86.04
Kadur	Kadur	52.43
Pakong	Pakong	30.71
Waru	Waru Barat	70.03
Batumarmar	Tamberu	97.05
Pasean	Tlontoraja	76,88

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2024

Adapun rincian jumlah Desa/Kelurahan pada kecamatan di Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023**

KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
Tlanakan	17	17	17	17	17
Pademawu	22	22	22	22	22
Galis	10	10	10	10	10
Larangan	14	14	14	14	14
Pamekasan	18	18	18	18	18
Proppo	27	27	27	27	27
Palengaan	12	12	12	12	12

KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
Pegantenan	13	13	13	13	13
Kadur	10	10	10	10	10
Pakong	12	12	12	12	12
Waru	12	12	12	12	12
Batumarmar	13	13	13	13	13
Pasean	9	9	9	9	9
<b>Kabupaten Pamekasan</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2024

Informasi tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang menunjukkan angka yang sama dari tahun 2019 – 2023, tidak ada jumlah Desa/Kelurahan yang berkurang maupun yang bertambah jumlahnya. Dengan jumlah Desa/Kelurahan yang paling banyak pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan desa/Kecamatan yang paling banyak pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Proppo yaitu 27 Desa/Kecamatan. Sedangkan yang paling sedikit Pasean yaitu 9 Desa/Kelurahan.

**Tabel 2.3**  
**Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2023**

KECAMATAN	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK DARI IBUKOTA KAB	PERSENTASE TERHADAP LUAS KAB/KOTA
		(km)	
Tlanakan	22	7	6.1
Pademawu	7	9	9.1
Galis	6	9.1	4.0
Larangan	36	12.5	5.2
Pamekasan	15	2	3.3
Proppo	47	10	9.0
Palengaan	77	15.5	11.2
Pegantenan	312	15.6	10.9
Kadur	140	15.5	6.6
Pakong	250	24	3.9
Waru	159	34	8.8
Batumarmar	16	47	12.2
Pasean	50	40.3	9.7

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2024

Jika dilihat dari gambaran tabel di atas masing-masing tinggi wilayah kecamatan, Kecamatan yang menunjukkan angka yang paling rendah adalah Kecamatan Gelis dengan tinggi wilayah 6 m, sementara Kecamatan Pegantenan menunjukkan angka yang paling tinggi yaitu 312 m. Sedangkan jarak wilayah Kecamatan terjauh dari Pusat kota Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Batumarmar, yakni 47.0 km sementara jarak kecamatan yang paling dekat dengan ibukota Kabupaten Pamekasan. Letak Kabupaten Pamekasan juga berada pada  $6^{\circ}57-7^{\circ}31$  lintang selatan dan  $113^{\circ}19 - 113^{\circ}58$  bujur timur. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 79.230 ha<sup>2</sup>.

### 2.1.1.2 KONDISI TOPOGRAFI

#### A. Kemiringan Lahan

Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah yang tersebar pada berbagai kelas lereng, Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan  $0-15^{\circ}$  dengan luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan  $15-25^{\circ}$  dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan  $25-40^{\circ}$  dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu  $>40^{\circ}$  dengan luas areal sebesar 2.722.ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha. Distribusi Kemiringan lereng seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	KEMIRINGAN LAHAN (ha)				JUMLAH
		0-15°	15-25°	25-40°	>40°	
1	Tlanakan	4.810	-	-	-	4.810
2	Pademawu	7.189	-	-	-	7.189
3	Galis	3.186	-	-	-	3.186
4	Larangan	3.841	245	-	-	4.086
5	Pamekasan	2.647	-	-	-	2.647
6	Proppo	6.882	267	-	-	7.149
7	Palangaan	6.830	1.880	138	-	8.848
8	Pegantenan	5.733	1.873	513	485	8.604

NO	KECAMATAN	KEMIRINGAN LAHAN (ha)				JUMLAH
		0-15°	15-25°	25-40°	>40°	
9	Kadur	3.376	272	638	956	5.242
10	Pakong	1.993	532	113	433	3.071
11	Waru	4.774	1.509	-	720	7.003
12	Batumarmar	3.308	5.808	463	128	9.707
13	Pasean	5.395	1.905	388	-	7.688
<b>JUMLAH</b>		<b>59.964</b>	<b>14.291</b>	<b>2.253</b>	<b>2.722</b>	<b>79.230</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Jika di ukur secara kuantitatif luas lahan yang berada pada kelas lereng antara 0-15% mendominasi kondisi lahan di Pamekasan, yaitu 59,96 ha sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha. Kondisi topografi yang demikian perlu dikelola dengan baik karena menempatkan wilayah Pamekasan sebagai daerah rawan bencana alam, terutama tanah longsor.

## **B. Ketinggian Tempat**

Ditinjau dari ketinggian tempat pada tabel 2.5, 9 kecamatan wilayah Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-50 mdpl atau pada kelompok dataran rendah sampai sedang. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian gambaran umum kondisi geografis Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari luas wilayah.

**Tabel 2.5**  
**Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut**  
**Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (ha)	PERSENTASE (%)	TINGGI DARI PERMUKAAN
				LAUT (m)
1	Tlanakan	4.810,00	6,10%	22
2	Pademawu	7.189,00	9,10%	7
3	Galis	3.186,00	4,00%	6
4	Larangan	4.086,00	5,20%	36
5	Pamekasan	2.647,00	3,30%	15
6	Proppo	7.149,00	9,00%	47
7	Palengaan	8.848,00	11,20%	77
8	Pegantenan	8.604,00	10,90%	312
9	Kadur	5.242,00	6,60%	140
10	Pakong	3.071,00	3,90%	250
11	Waru	7.003,00	8,80%	159
12	Batumarmar	9.707,00	12,30%	16
13	Pasean	7.688,00	9,70%	50
	<b>JUMLAH/TOTAL</b>	<b>79.230,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.137</b>

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Ditinjau dari ketinggian tempat pada tabel 2.5, 9 kecamatan wilayah Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-50 mdpl atau pada kelompok dataran rendah sampai sedang. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut:

1. Ketinggian 0-50 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan sebanyak 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo sebanyak 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha.
2. Ketinggian 50-100 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50 -100 m yaitu 17.192,9 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan seluas 48,10 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pademawu seluas 71,90 km<sup>2</sup>,



- Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 Ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.759,3 Ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha;
3. Ketinggian 100 – 150 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100 - 150 m yaitu seluas 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.943,2 ha;
  4. Ketinggian 150-200 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150 - 200 m yaitu seluas 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha, Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha;
  5. Ketinggian 200-250 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200 - 250 m yaitu seluas 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru seluas 601,1 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha;
  6. Ketinggian 250-300 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu seluas 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha;

7. Ketinggian 300 – 350 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300 - 350 m yaitu seluas 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha;
8. Ketinggian 350 – 396 m: total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350 - 396 m yaitu seluas 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha.

### 2.1.1.3 KONDISI GEOLOGI

#### A. Struktur Dan Karakteristik Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan berdasarkan tekstur dan jenis tanah. Menurut tekstur tanahnya, Kabupaten Pamekasan terbagi kedalam tiga wilayah. Wilayah yang termasuk tekstur sedang seluas 90,5 persen, wilayah dengan tekstur halus sekitar 8,3 persen, dan 1,2 persen sisanya tergolong wilayah yang tanahnya bertekstur kasar. di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kelompok jenis tanah yaitu Kompleks Mediteran Merah, Kompleks Brown Forest, Kompleks Mediteran, Litosol, Aluvial Kelabu Kekuningan, Grumosol Kelabu, Kompleks Grumosol Kelabu, Asosiasi Hidromorf Kelabu, Asosiasi Litosol, dan Aluvial Hidromorf. Jenis tanah yang banyak terdapat di Kabupaten Pamekasan ini yaitu jenis tanah regosol sebesar 36. 063 ha.

**Tabel 2.6**  
**Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

KECAMATAN	KEDALAMAN TANAH EFEKTIF				JUMLAH
	30 cm	30-60 cm	60-90 cm	> 90 cm	
Tlanakan	-	-	60.67	5,231.46	5,292.13
Pademawu	-	5.11	-	6,632.73	6,637.84
Galis	-	351.86	-	3,061.74	3,413.60
Larangan	208.37	2,303.67	1,019.91	549.98	4,081.93
Pamekasan	-	95.90	-	2,590.82	2,686.72
Proppo	273.86	14.40	-	7,147.66	7,435.92
Palengan	969.54	678.50	556.72	5,586.42	7,791.18

KECAMATAN	KEDALAMAN TANAH EFEKTIF				JUMLAH
	30 cm	30-60 cm	60-90 cm	> 90 cm	
Pegantenan	1,028.77	1,714.23	4,247.02	2,088.97	9,078.99
Kadur	2,457.61	133.56	2,889.70	-	5,480.87
Pakong	665.78	2,140.80	493.37	-	3,299.95
Waru	2,116.59	697.37	4,265.76	-	7,079.72
Batumarmar	5,027.08	823.47	4,002.62	10.26	9,863.43
Pasean	2,422.33	771.72	4,443.44	-	7,637.49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

## B. Potensi Geologi

Kabupaten Pamekasan secara geologi memiliki potensi kekayaan mineral bukan logam serta batuan, dengan jumlah terbatas yaitu sekitar 2.773,72 Ha. Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Pengelolaan yang baik dapat berkontribusi dalam upaya penunjang pelaksanaan pembangunan agar tercipta pencapaian tujuan pembangunan. Namun, selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal.

### 2.1.1.4 KONDISI HIDROLOGI

Di Kabupaten Pamekasan terdapat sungai sebanyak 13 yang melintasi beberapa wilayah kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Nama, Panjang, dan Menara Sungai Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

No	Nama Sungai	Wilayah Kecamatan	Panjang Sungai (Km)	Muara
1	Kloang	Kadur/Pamekasan	6	Selat Madura
2	Lembun Bunter	Palengaan/Proppo/Pamekasan	11	Selat Madura
3	Sbr. Payung	Proppo/Pamekasan	10	Selat Madura
4	Semajid	Pamekasan/Pademawu	16	Selat Madura
5	Jombang	Pamekasan	4	Selat Madura
10	Lesong	Batumarmar	6	Laut Jawa

No	Nama Sungai	Wilayah Kecamatan	Panjang Sungai (Km)	Muara
11	Tamberu	Batumarmar	5	Laut Jawa
12	Angsokah	Pasean	6	Laut Jawa
13	Pasean	Pasean	8	Laut Jawa

Sumber: Dinas Pengairan UPTD Pamekasan, 2024

Berikut dibawah ini jumlah sumber mata air dan bendungan yang merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari:

**Tabel 2.8**  
**Nama-Nama Dam/Bendungan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

No	Dam /Bendungan	Areal (Ha)	DEBIT L/det.		Lokasi
			Penghujan (Max)	Kemarau (Min)	
1	Dam Samiran	2.462	2.200	700	Ds.Kodik Kec. Proppo
2	Dam Klampar	189	147	38	Ds. Klampar – Proppo
3	Dam Toronan	53	40	19	Ds. Toronan – Pamekasan
4	Dam Blumbungan	121	137	37	Ds. Kowel – Pamekasan
5	Dam Grujugan	98	58	22	Ds. Grujugan – Larangan
6	Dam Bulay	238	185	23	Ds. Bulay – Galis
7	Dam Polagan	321	220	30	Ds. Polagan – Galis
8	Dam Duko I	98	60	5	Ds. Duko – Larangan
10	Dam Duko II	33	24	5	Ds. Duko – Larangan
11	Dam Lancar	138	69	3	Ds. Lancar – Larangan
12	Dam Taman Pakong	30	52	6	Ds. Seddur – Pakong
13	Dam Cenlece	51	43	8	Ds. Cenlece – Pakong
14	Dam Batu Kerbuy	190	136	25	Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
15	Dam Angsoka	3	3	1	Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
16	Dam Batu Bintang	100	136	25	Ds. Bt. Bintang- Batumarmar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

### 2.1.1.5 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

Daya dukung lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu lingkungan/bumi dalam mendukung makhluk hidup yang berada di atasnya baik dari sisi ekonomi, lingkungan, budaya, dan demografi, dalam hal ini daya dukung memiliki batas maksimal dalam mendukung kebutuhan makhluk hidup. Konsep utama dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Hal ini sangat penting untuk dikaji karena ketersediaan (*supply*) jumlahnya terbatas dan kebutuhan (*demand*) jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai swasembada beras. Untuk dapat hidup layak manusia memerlukan kurang lebih 2100 kalori/hari/kapita. Standar yang digunakan untuk hidup layak ini dinamakan dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). KFM merupakan nilai yang menunjukkan seseorang dapat hidup secara normal, sehingga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Pada perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan yang mengakomodir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memuat substansi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Jasa Ekosistem. Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan antara jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk (Cloud, (dalam Soerjani, dkk., 1987)). Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) diperoleh dari pendekatan kuantitatif melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norviani, 2016). Dalam hal mengukur daya tampung, Kabupaten Pamekasan memiliki tiga muatan daya dukung antara lain daya dukung pangan, daya dukung limpasan air dan daya dukung tempat tinggal hidup. Ketiga daya dukung tersebut mengukur

bagaimana kebutuhan atas dasar pangan, kebutuhan air dan lahan dengan daya topang atau ambang batas lahan hidup.

Ambang batas merupakan ukuran atau tingkatan yang masih dapat diterima dan/ atau ditoleransi. Dalam konteks jasa ekosistem, ambang batas merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai kondisi ekosistem dan jasanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Dalam pengembangan wilayah, pendekatan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah KLHS RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 – 2045 dan pertumbuhan penduduk (Muta'ali, 2012). Persebaran populasi merupakan parameter penting untuk analisis ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Populasi menentukan *demand* atau kebutuhan maupun konsumsi atas jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan.

#### **A. Daya Dukung Pangan**

Semakin lama masyarakat mendiami suatu wilayah dalam rangka mencukupi kebutuhan untuk kelangsungan hidup maka dibutuhkanlah sumberdaya-sumberdaya khususnya pangan. Jumlah penduduk yang semakin banyak adalah nilai multiplier bagi sumberdaya pangan yang mengalami surplus maupun defisit bergantung pada pola pangan dan tingkat ketahanan pangan suatu daerah. Semakin jumlah penduduk memiliki implikasi terhadap tingkat konsumsi pangan dan memiliki pengaruh terhadap luasan produksi pangan.

Secara umum analisis daya dukung dan daya tampung kebutuhan pangan tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur, apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri, karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Dalam KLHS ini kajian daya dukung dan daya tampung ketersediaan pangan di Kabupaten Pamekasan masih didasarkan pada sektor pertanian, khususnya pada luas lahan pertanian untuk tanaman pangan (padi, jagung, dan ketela).

Daya dukung lahan pertanian merupakan perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Untuk itu perlu diketahui berapa luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per kepala keluarga, potensi lahan yang tersedia dan



penggunaannya untuk kegiatan pertanian. Perhitungan daya dukung pangan memiliki berbagai pendekatan dalam rangka mengukur kemampuan ekosistem memproduksi pangan untuk kehidupan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi nilai daya dukung. Dari Hasil perhitungan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 pendekatan dihitung dari pendekatan odum, christeleiler, Howard dan Issar dengan membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan pangan. Indikator ketersediaan dicerminkan oleh luas lahan pertanian dan produktivitasnya. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya beras. Odum, Christeleiler, Howard dan Issar menjelaskan rumus perhitungan daya tampung pangan pada sektor pertanian dihitung melalui rumus berikut :

Dimana :

t = Daya dukung wilayah

$$\frac{Lp/Pd}{KPB/(Pr \times 0,632)} = t$$

pertanian Lp = Luas Panen (ha)

Pd = Jumlah Penduduk (Jiwa)

KPB = Kebutuhan Pangan Beras Perkapita 154,1kg/tahun/kapita (BKN)

Pr = Produksi Lahan Rata-Rata per Hektar

0,632 = Konstanta Ubah Padi ke Beras

Dari Skor Perhitungan tersebut maka akan menghasilkan ouput skor dengan nilai :

<1 : Menunjukkan daerah/ wilayah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan Pangan

1 : Menunjukkan daerah/ wilayah memiliki kesetimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan

>1 : Menunjukkan daerah/ wilayah memiliki ketersediaan melebihi kebutuhan.

Dari hasil perhitungan daya dukung pangan pertanian Kabupaten Pamekasan tahun 2022 maka dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.9**  
**Tabel Hitung Koefisien Daya Dukung Pangan Kabupaten Pamekasan**

Kecamatan	Penduduk (2022)	KPB	Hasil Padi ke Beras	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kg)	Produksi Lahan Sawah (Kg/ Ha)	Daya Dukung	Luas panen yang dibutuhkan	KLP2B
Tlanakan	65.988	154,1	0,632	1.505	10.620.000	7.056,48	0,66	3.137,85	1.045,90
Pademawu	86.188	154,1	0,632	5.922	36.051.000	6.087,64	1,7155	4.110,42	1.370,10
Galis	30.492	154,1	0,632	957	5.925.000	6.191,22	0,7969	1.416,84	472,3
Larangan	58.339	154,1	0,632	498	3.051.000	6.126,51	0,2145	2.704,99	901,7
Pamekasan	90.782	154,1	0,632	1.488	8.679.000	5.832,66	0,3921	4.756,97	1.585,70
Proppo	89.544	154,1	0,632	4.661	26.941.000	5.780,09	1,2339	3.969,22	1.323,10
Palengaan	84.185	154,1	0,632	2.081	11.225.000	5.394,04	0,5468	5.480,57	1.826,90
Pegantenan	75.591	154,1	0,632	2.386	13.118.000	5.497,90	0,7117	3.524,27	1.174,80
Kadur	49.511	154,1	0,632	1.117	6.942.000	6.214,86	0,575	2.236,63	745,5
Pakong	37.697	154,1	0,632	1.978	11.661.000	5.895,35	1,2687	1.779,35	593,1
Waru	66.897	154,1	0,632	2.983	17.145.000	5.747,57	1,0511	3.314,27	1.104,80
Batumarmar	76.696	154,1	0,632	1.739	10.213.000	5.872,92	0,5461	4.477,43	1.492,50
Pasean	57.801	154,1	0,632	1.589	9.205.000	5.792,95	0,6531	2.557,33	852,4
Kabupaten Pamekasan	869.711	154,1	0,632	28.905	170.773.000	5.908,08	0,8053	43.474,35	14.491,50

Sumber : Dokumen Daya Dukung DayaTampung Kabupaten Pamekasan 2018, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Pamekasan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pamekasan, 2023 (diolah)

Keterangan : perhitungan menggunakan data padi sawah dan ladang Estimasi Panen 3 kali dalam setahun

Dari hasil perhitungan tabel Daya Dukung dan daya tampung Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki skor 0,8053. Angka tersebut memiliki skor  $<1$  dengan mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh sawah dan ladang padi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Dari 13 Kecamatan yang dihitung secara umum memiliki skor indikasi  $<1$  dan hanya pada Kecamatan Pademawu, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Waru yang memiliki skor  $>1$ . Hal Ini menunjukkan bahwa 4 dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan cukup mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri. Pademawu mempunyai lahan panen komoditas padi terluas dan produksi tertinggi se-kabupaten sehingga berdampak terhadap ketersediaan pangan.

Kecamatan dengan daya dukung rendah mempunyai tingkat produksi rendah sedangkan jumlah penduduknya relatif tinggi. Kondisi tersebut merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan. Karakteristik wilayah Pamekasan mempunyai pengaruh terhadap daya dukung pangan. Jenis tanah, kandungan zat hara dan ketersediaan air tercermin dari karakteristik fisiknya. Indikator - indikator tersebut syarat utama kesesuaian untuk lahan pangan. Kecamatan yang memiliki daya dukung tinggi berada di dataran rendah dengan bentuklahan aluvial. Kondisi geografis bentuk lahan tersebut mendukung pengembangan pertanian lahan basah sepanjang tahun. Kondisi berbeda kecamatan yang berada di pegunungan sebelah utara, seperti : Kecamatan Larangan, Kecamatan Pangelaan, dan Kecamatan Batumarmar. Karakteristik fisiknya kurang sesuai untuk pertanian sepanjang tahun dan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air. Sebagian besar lahan pertanian di bagian utara merupakan sawah tadah hujan. Hal ini akan menyebabkan produksi lahan lebih rendah dibandingkan dataran bagian selatan.

Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ideal yang dibutuhkan di Kabupaten Pamekasan sebesar 14.491,5 hektar. Hasil tersebut berdasarkan asumsi kebutuhan ideal dengan jumlah penduduk tahun 2017. Jumlah eksisting lahan pertanian di kabupaten ini lebih besar dibandingkan luas ideal. Hanya saja

yang perlu diperhatikan adalah produksi panen sawah tadah hujan. Tidak setiap tahun sawah jenis tersebut mampu panen seperti di Kecamatan Larangan. Luas sawah tadah hujan di Larangan sebesar 357 hektar tetapi menurut data tahun 2017 tidak ada panen di kecamatan tersebut. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan (Sumber : Laporan Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Pamekasan 2018).

Bila dilakukan proyeksi terhadap Daya Dukung Pangan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2045 dengan menggunakan asumsi jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2045 yang mencapai 1.251.263 jiwa, luas panen sebesar 54.547 hektar, jumlah produksi padi mencapai 295.520 Ton per Tahun, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebesar 264 kg beras/ kapita/ tahun, dan Konstanta Ubah Padi ke Beras sebesar 0,632, maka dapat diketahui bahwa Daya Dukung Pangan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2045 masih defisit dengan nilai skor hitung t mencapai 0,895. Untuk mengetahui hasil proyeksi daya dukung pangan pertanian Kabupaten Pamekasan tahun 2045 maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Hasil Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2045**

Kecamatan	Penduduk (2045)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kg)	Produksi Lahan Sawah (Kg/ Ha)	KFM	Daya Dukung	Ket.
Tlanakan	65.046	2.077	62.532.000	30.106,88	264	1,846	SURPLUS
Pademawu	74.087	13.004	402.000	30,91	264	0,010	DEFISIT
Galis	25.631	986	11.761.000	11.927,99	264	0,881	DEFISIT
Larangan	50.721	465	5.373.000	11.554,84	264	0,203	DEFISIT
Pamekasan	71.072	1.063	188.000	176,86	264	0,005	DEFISIT
Proppo	117.460	8.778	632.000	72,00	264	0,010	DEFISIT
Palengaan	112.309	6.636	22.980.000	3.462,93	264	0,393	DEFISIT
Pengantenan	102.220	7.478	20.523.000	2.744,45	264	0,385	DEFISIT
Kadur	48.247	772	19.016.000	24.632,12	264	0,757	DEFISIT
Pakong	36.796	3.017	20.760.000	6.881,01	264	1,083	SURPLUS
Waru	86.152	3.823	45.489.000	11.898,77	264	1,014	SURPLUS

Kecamatan	Penduduk (2045)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kg)	Produksi Lahan Sawah (Kg/ Ha)	KFM	Daya Dukung	Ket.
Batumarmar	150.748	2.135	31.873.000	14.928,81	264	0,406	DEFISIT
Pasean	63.048	4.313	53.991.000	12.518,20	264	1,644	SURPLUS
<b>Kabupaten Pamekasan</b>	<b>1.003.538</b>	<b>54.547</b>	<b>295.520.000</b>	<b>5.417,713</b>	<b>264</b>	<b>0,895</b>	<b>DEFISIT</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pamekasan, 2023 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kecamatan setelah diproyeksi mengalami penurunan dan kenaikan daya dukung pangan dari kondisi saat ini. Dari beberapa kecamatan tersebut terdapat 4 kecamatan yang mengalami perubahan, yaitu pertama di Kecamatan Tlanakan, yang sebelumnya mengalami defisit, menjadi surplus dikarenakan luas panen atau luas lahan yang cenderung mengalami peningkatan. Kecamatan kedua adalah Kecamatan Pademawu, yang sebelumnya mengalami surplus, menjadi defisit dikarenakan produktifitas padi di kecamatan tersebut cenderung mengalami penurunan. Kecamatan ketiga adalah di Kecamatan Proppo yang sebelumnya mengalami surplus, menjadi defisit dikarenakan luas panen cenderung mengalami penurunan dari sebelumnya sehingga produksi beras juga ikut mengalami penurunan. Kecamatan terakhir adalah Kecamatan Pasean dimana kecamatan tersebut mengalami perubahan status yaitu dari yang sebelumnya defisit menjadi surplus karena luas panen yang cenderung mengalami peningkatan sehingga produksi beras juga mengalami peningkatan. Untuk lainnya diperkirakan pada tahun 2045 kondisinya masih sama dengan kondisi saat ini, dimana untuk Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru masih menunjukkan Surplus, sedangkan 7 kecamatan lainnya menunjukkan kondisi Defisit.

## **B. Daya Dukung Air Limpasan**

Air bersih adalah air yang kualitasnya memenuhi persyaratan untuk kegiatan domestik (mandi, cuci dan sanitasi). Untuk dimanfaatkan sebagai air minum, air bersih umumnya perlu pengolahan tambahan. Beberapa sumber air bersih di alam, seperti mata air, kualitasnya sering kali memenuhi sebagai air minum. Sumber air

baku untuk air bersih dapat diperoleh dari air permukaan maupun air tanah. Sumber air baku yang diperoleh dari air permukaan memerlukan pengolahan lengkap dan biaya cukup tinggi. Sumber air baku yang diperoleh dari air tanah, baik dari sumur bor dan mata air, umumnya tidak diperlukan pengolahan lengkap, bahkan sering kali dapat digunakan langsung.

Penentuan status daya dukung lingkungan terhadap pengelolaan serta penggunaan aspek air dilakukan dengan membandingkan total ketersediaan air dan total kebutuhan air. Perhitungan daya dukung air menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Penataan Ruang Wilayah. Status daya dukung lingkungan berbasis neraca air menggambarkan ketersediaan air hujan yang meresap untuk memenuhi seluruh kebutuhan air untuk manusia (water footprint) pada suatu wilayah.

Pengukuran daya dukung air memiliki teknik yang bervariasi dalam menentukan jumlah ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan air. Dalam kajian Daya Dukung Daya tampung Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dianalisis tentang daya dukung air menggunakan sistem perhitungan limpasan. Menurut Asdak, 2007 pengertian limpasan air adalah air yang bersumber dari hujan yang melimpas dari permukaan tanah yang akan mengisi suatu Daerah Aliran Sungai. Sehingga dapat diartikan bahwa pengertian limpasan adalah koefisien nilai suatu daratan/ wilayah untuk melimpas air hujan kepada suatu wadah air dimana dalam kasus ini adalah DAS atau CAT. Pengukuran koefisien limpasan diukur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 melalui rumus berikut.

**Tabel 2.11**  
**Rumus Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air**

Ketersediaan Air	Kebutuhan Air
$C = \frac{\sum (C_i \times A_i)}{\sum A_i} \quad (3)$ $R = \frac{\sum R_i}{m} \quad (4)$ $S_A = 10 \times C \times R \times A \quad (5)$ <p>Keterangan:</p> <p><math>S_A</math> = ketersediaan air (m<sup>3</sup>/tahun)  <math>C</math> = koefisien limpasan tertimbang  <math>C_i</math> = Koefisien limpasan penggunaan lahan i (lihat Tabel 9)  <math>A_i</math> = luas penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN)  <math>R</math> = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait setempat.  <math>R_i</math> = curah hujan tahunan pada stasiun i  <math>m</math> = jumlah stasiun pengamatan curah hujan  <math>A</math> = luas wilayah (ha)  <math>10</math> = faktor konversi dari mm.ha menjadi m<sup>3</sup></p>	$D_A = N \times KHL_A$ <p>Keterangan:</p> <p><math>D_A</math> = Total kebutuhan air (m<sup>3</sup>/tahun)  <math>N</math> = Jumlah penduduk (orang)  <math>KHL_A</math> = Kebutuhan air untuk hidup layak            = 1600 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun,            = 2 x 800 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun, dimana:</p>
<p align="center">             Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (<math>S_A</math>) dan kebutuhan air (<math>D_A</math>).               Bila <math>S_A &gt; D_A</math>, daya dukung air dinyatakan surplus.              Bila <math>S_A &lt; D_A</math>, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.           </p>	

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009

Pengukuran limpasan air mengukur antara koefisien kemampuan daya serap air dengan kondisi faktual permukaan wilayah yang tertutup. Koefisien limpasan merupakan pengaruh penggunaan tata guna lahan dalam aliran permukaan, yakni bilangan yang menampilkan perbandingan antara besaran aliran permukaan dan besarnya nilai hujan. Koefisien limpasan (C) dihitung dari angka 0-1 dimana angka 0 mengartikan bahwa semua air hujan terinsepsi dan terinfiltrasi kedalam tanah, sebaliknya untuk nilai koefisien limpasan (C) mendekati satu menunjukkan bahwa air hujan yang mengalir ke DAS yang disebabkan karena kemampuan jenis permukaan tanah maupun tertutup penampang bangunan. Pada DAS yang baik maka koefisien nilai C akan mendekati 0.

Penghitungan angka koefisien Limpasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana dalam hasil kajian Daya Dukung Daya Tampung pada tahun 2018 yang telah dihitung menghasilkan angka sebagai berikut :

**Tabel 2.12**  
**Nilai Koefisien Limpasan Kabupaten Pamekasan**

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Konstanta*	Perhitungan
Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	196,48	0,9	176,83
Bangunan Non-Permukiman Lain	36,59	0,6	21,95
Bangunan Permukiman Desa (Berasosiasi dengan Vegetasi Pekarangan)	16.488,33	0,6	9.893,00
Bangunan Permukiman Kota	773,34	0,6	464,01
Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Rendah	456,17	0,18	82,11
Hutan Rakyat	8.778,92	0,18	1.580,21
Kebun Campuran	1.549,41	0,1	154,94
Ladang/ Tegalan dengan Palawija	21.001,83	0,3	6.300,55
Lahan Terbuka Lain	45,8	0,1	4,58
Penambangan Terbuka Lain	255,27	0,4	102,11
Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/ Bera	23.136,81	0,3	6.941,04
Sawah dengan Padi Terus Menerus	600,76	0,3	180,23
Semak	1.506,70	0,35	527,34
Semak Belukar	2.922,37	0,35	1.022,83
Total	77.748,78		27.451,73
Koefisien Limpasan			0,35

Sumber : Dokumen Daya Dukung DayaTampung Kabupaten Pamekasan 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai koefisien limpasan Pamekasan berdasarkan penggunaan lahan terbaru adalah 0,35. Nilai tersebut relatif kecil karena sebagian besar lahan masih berupa ladang serta sawah. Luas permukiman dan bangunan lain hanya sekitar 15% sehingga lahan yang mempunyai kemampuan penyerapan air yang baik masih luas. Curah hujan rata - rata Pamekasan berdasarkan data BPS adalah 2.428 mm3 selama 2017. Ketersediaan air kabupaten ini berdasarkan hasil perhitungan sebesar 666.527.992 m3 per tahun.

Kebutuhan air penduduk Pamekasan mencapai 1.380.806.400 m3 per tahun dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk tahun 2017. Hasil antara ketersediaan dan kebutuhan air akan dibandingkan untuk mengetahui kondisi daya dukung eksisting. Jumlah kebutuhan lebih besar dibandingkan ketersediaan sehingga daya dukung air Kabupaten Pamekasan defisit. Hal yang harus menjadi perhatian bahwa perhitungan ini hanya melihat sudut pandang penyerapan air

hujan. Padahal sumber air masyarakat tidak hanya mengandalkan air tanah dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, sumber air di Pamekasan tidak hanya berasal dari wilayahnya sendiri tetapi bisa dari daerah lain. Walaupun begitu, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan dalam rangka penyediaan air.

### **C. Daya Dukung Tempat Hidup**

Pertambahan jumlah penduduk mengindikasikan naiknya demand terhadap kebutuhan sumber daya hidup. konteks sumberdaya hidup yang dimaksud lebih merujuk kepada kebutuhan pangan hidup, sumber air bersih dan tempat tinggal. Bertambahnya jumlah keluarga dan kepala keluarga mengharuskan setiap orang untuk dapat hidup dan tinggal. Meluasnya permukiman dan perumahan akan mendegradasi lahan suatu wilayah. Kondisi ini perlu untuk diproyeksi dan diperhitungkan untuk mempertimbangkan kepadatan, distribusi serta kebijakan dalam pemusatan suatu wilayah. Untuk mengetahui ambang batas wilayah hidup suatu tempat perlu diproyeksi terlebih dahulu tingkat pertumbuhan pada tahun yang akan dicapai. Pada kasus daya dukung tempat tinggal perlu diproyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045.

Perhitungan tersebut diukur dari jumlah pertumbuhan penduduk secara series dan mengitung proyeksi berdasarkan rumus geometrik sebagaimana yang digunakan oleh BPS.

$$P_n = P_0 (1 + r)^{n-o}$$

Dimana :

- P<sub>n</sub> = Jumlah Penduduk
- P<sub>0</sub> = Jumlah Penduduk pada tahun awal
- r = Laju Pertumbuhan Penduduk
- n-o = Selisih tahun hitung

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 adalah sejumlah 859.711 Jiwa, sementara untuk laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pamekasan dari tahun 2018 - 2022 adalah

sejumlah 1,41% atau 0,0141. Sehingga apabila diproyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut :

$$P_n = 859.711(1 + 0,01415)^{2045-2022}$$

$$= 1.187.408$$

Sehingga dapat diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2045 adalah sejumlah 1.201.376 penduduk. Selanjutnya untuk menghitung ambang batas tempat tinggal hidup adalah mengukur berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk RTH dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Kemudian dengan asumsi 1 KK yang terdiri dari 5 orang memerlukan lahan seluas 100 m<sup>2</sup>. Sebagai perbandingan akan dihitung pula ambang batas jumlah daya tampung penduduk dengan persentase luas wilayah yang layak dihuni adalah 30%.

Model rumus hitung dalam mengukur daya dukung permukiman secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{Daya dukung permukiman (n)} = \frac{50\% [n\% \times \text{luas lahan (m}^2\text{)}]}{100} \times 5(\text{jiwa})$$

Maka dapat diperoleh daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan ini sebagai berikut :



**Tabel 2.13**  
**Tabel Hitung Daya Dukung Tempat Tinggal Kabupaten Pamekasan**

Kecamatan	Luas (Km2)	Luas (m2)	Jumlah Penduduk 2022	Proyeksi Penduduk 2045	50% Areal Threshhold	30% Areal Threshhold	Daya Tampung (50%)		Daya Tampung (30%)	
Tlanakan	48,1	48.100.000	64.382	88.642	24.050.000	14.430.000	1.202.500	7,40%	721.500	12,33 %
Pademawu	71,9	71.900.000	85.147	117.231	35.950.000	21.570.000	1.797.500	6,54%	1.078.500	10,91 %
Galis	31,86	31.860.000	29.891	41.154	15.930.000	9.558.000	796.500	5,18%	477.900	8,64%
Larangan	40,86	40.860.000	56.783	78.179	20.430.000	12.258.000	1.021.500	7,68%	612.900	12,80 %
Pamekasan	26,47	26.470.000	89.379	123.058	13.235.000	7.941.000	661.750	18,66 %	397.050	31,10 %
Proppo	71,49	71.490.000	85.208	117.315	35.745.000	21.447.000	1.787.250	6,59%	1.072.350	10,98 %
Palengaan	88,48	88.480.000	82.935	114.185	44.240.000	26.544.000	2.212.000	5,18%	1.327.200	8,63%
Pegantenan	86,04	86.040.000	73.985	101.863	43.020.000	25.812.000	2.151.000	4,75%	1.290.600	7,92%
Kadur	52,43	52.430.000	48.154	66.299	26.215.000	15.729.000	1.310.750	5,08%	786.450	8,46%
Pakong	30,71	30.710.000	36.966	50.895	15.355.000	9.213.000	767.750	6,65%	460.650	11,09 %
Waru	70,03	70.030.000	64.655	89.017	35.015.000	21.009.000	1.750.750	5,10%	1.050.450	8,50%
Batu Marmar	97,05	97.050.000	79.842	109.927	48.525.000	29.115.000	2.426.250	4,55%	1.455.750	7,58%
Pasean	76,88	76.880.000	56.180	77.349	38.440.000	23.064.000	1.922.000	4,04%	1.153.200	6,73%
Kab Pamekasan	792,3	792.300.000	859.507	1.187.408	396.150.000	237.690.000	19.807.500	5,99%	11.884.500	9,99%

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Pamekasan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pamekasan, 2023 (diolah)

Berdasarkan dari hasil hitung daya dukung kemampuan lahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan semua kecamatan mengindikasikan kecukupan daya tampung hingga tahun 2045 baik pada ambang batas 50% maupun ambang batas 30%. Dari hasil hitung daya tampung yang dikomparasikan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk kecamatan dengan proyeksi kepadatan tinggi berada pada Kecamatan Pamekasan dengan angka ambang batas 31,10% dan Kecamatan dengan kepadatan rendah atau kecamatan dengan daya tampung yang lebih lega terdapat pada Kecamatan Batu Marmar dengan tingkat daya tampung 7,58%.

Perhitungan ini mengasumsikan bahwa luas wilayah layak huni memiliki koefisien 50% dan 30% sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa konfigurasi 50% terdiri atas 30% area merupakan Ruang Terbuka Hijau dan 20% merupakan areal Prasarana Utilitas Umum. Dengan belum memperhatikan luas areal konservasi hutan serta wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Namun pada koefisien *threshold* 30% sangat mungkin bahwa selisih 20% tersebut merupakan wilayah konservasi hutan dan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Meskipun dengan ambang batas 30% dari total luas wilayah, Kabupaten Pamekasan masih cukup ideal untuk dapat menampung daya dukung tempat tinggal.

#### **2.1.1.6 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH**

Potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sebagaimana hasil kajian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan pada bagian deskripsi karakteristik wilayah, pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten. Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian

peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Pamekasan tahun 2023 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari:

- 1) Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah permukiman terluas adalah Kecamatan Larangan 584,6 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2007).
- 2) Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean.
- 3) Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas 32.966,34 hektar. Kawasan ini tersebar merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar.
- 4) Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar, Kecamatan Galis 285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan Kecamatan Batumarmar 102,3 hektar.
- 5) Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga kecamatan

yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis.

- 6) Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 360 hektar dan terkecil di Kecamatan Pakong seluas 11,0 hektar.
- 7) Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar.
- 8) Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya

#### **2.1.1.7 WILAYAH RAWAN BENCANA**

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana yang berbeda, termasuk Kabupaten Pamekasan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi tiga wilayah. Yaitu wilayah tengah, Selatan dan daerah perkotaan, sehingga masyarakat yang berada di daerah tersebut harus waspada. Wilayah tengah itu diantaranya Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Waru, Pakong dan Kecamatan Kadur. Sementara wilayah selatan adalah Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan dan sebagian Kecamatan Proppo. wilayah tengah yang dipetakan tersebut cenderung berpotensi rawan longsor, dan wilayah selatan berpotensi puting beliung. Sementara wilayah perkotaan adalah rawan banjir saat musim hujan terutama di wilayah aliran sungai Kali Jombang dan Kali Semajid.

Hasil kajian potensi bahaya di Kabupaten Pamekasan berpotensi terdampak 12 jenis bencana, namun potensi, luas, dampak dan tingkat bahayanya berbeda-beda. Kelas bahaya **TINGGI** terlihat pada bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, likuifaksi, GEA, Kegagalan Teknologi, dan EWP. Kelas bahaya **SEDANG** terlihat pada bencana karhutla dan COVID-19. Adapun kelas bahaya **RENDAH** terlihat pada bencana gempa bumi dan tsunami. Hasil kajian bahaya untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Rekapitulasi Hasil Kajian Bahaya**

JENIS BAHAYA	TINGKAT RESIKO (Ha)			TOTAL LUAS (Ha)	KELAS BAHAYA
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Banjir	68,99	6.520,36	10.559,39	17.148,75	Tinggi
Kekeringan	-	64.018,84	15.674,07	79.692,90	Tinggi
Cuaca Ekstrem	24.775,63	35.673,91	19.332,60	79.782,14	Sedang
Karhutla	1.181,45	3.872,08	-	5.053,53	Sedang
Tanah Longsor	1.009,10	1.090,21	4.094,70	6.194,01	Tinggi
Gempa Bumi	77.580,28	-	-	77.580,28	Rendah
Likuifaksi	3.003,04	6.336,32	544,52	9.883,89	Tinggi
GEA	105,65	357,07	372,71	835,43	Tinggi
Tsunami	406,55	-	-	406,55	Rendah
Kegagalan Teknologi	624,42	46.514,95	32.688,94	79.828,31	Tinggi
EWP	8.710,55	622,70	319,00	9.652,25	Tinggi
COVID-19	59.200,46	16.038,16	-	75.238,62	Sedang

Sumber : Kajian Resiko Bencana 2023-2028 Kabupaten Pamekasan

Kajian bahaya tingkat kecamatan diperoleh dari rekapitulasi kajian tingkat desa. Penentuan kelas bahaya tingkat kecamatan menggunakan kelas bahaya maksimal dari tingkat desa. Penjabaran tingkat potensi bahaya untuk setiap bencana per kecamatan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Tingkat Bahaya Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan**

KECAMATAN	JENIS BAHAYA											
	BANJIR	TANAH LONGSOR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	GEA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	EWP	KEGAGALAN TEKNOLOGI	KARHUTLA	COVID- 19	LIKUIFAKSI
Batumarmar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Galis	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	-	Sedang	Tinggi
Kadur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Rendah	-	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	-
Larangan	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	-	Sedang	-
Pademawu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Tinggi
Pakong	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	-	Rendah	-	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	-
Palengaan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Rendah	-	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	-
Pamekasan	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	-	Rendah	-	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	-
Pasean	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Pegantenan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	-	Rendah	Tinggi	-	Sedang	-
Proppo	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	-	Rendah	-	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Tlanakan	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Waru	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Rendah	-	Rendah	-	Sedang	Sedang	-

Sumber : Kajian Resiko Bencana 2023-2028 Kabupaten Pamekasan

**Tabel 2.16**  
**Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pamekasan (IRB)**  
**Tahun 2021-2023 Menurut Dokumen IRBI**

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	Poin	95,9 (Sedang)	94,05 (Sedang)	92,09 (Sedang)

Sumber : Dokumen IRBI Tahun 2023

Dari tabel di atas, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pamekasan menurut dokumen IRBI dalam jangka tiga tahun terakhir mengalami penurunan, namun masih tetap dalam kategori predikat sedang. Pada Tahun 2021 sebesar 95,9 menurun menjadi 92,09 pada tahun 2023.

**Tabel 2.17**  
**Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,20 (Rendah)	0,30 (Rendah)	0,63 (Sedang)	0,79 (Sedang)	0,79 (Sedang)

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2024

Pada Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,60 dengan kategori kelas rendah, terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 0,79 dengan kategori sedang.

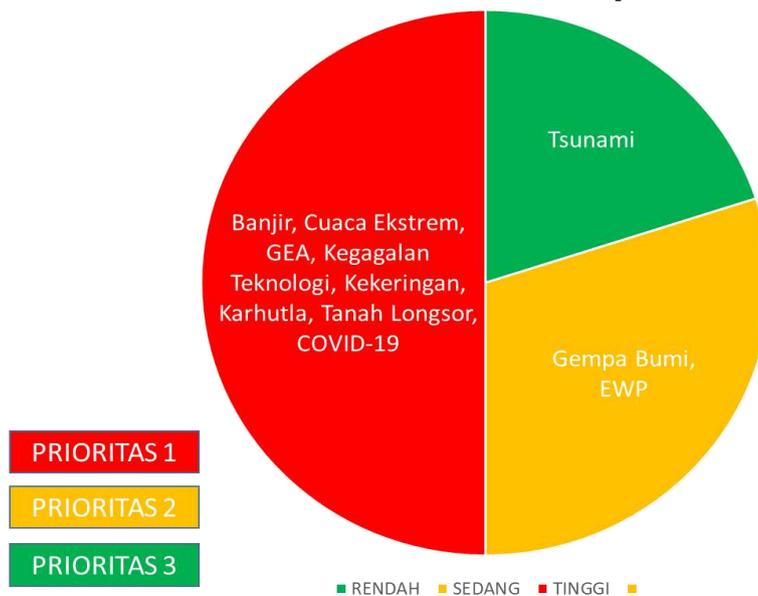
Keterbatasan sumber daya kabupaten dalam mengelola risiko bencana, mendorong perumusan bencana prioritas yang perlu ditangani di Kabupaten. Dalam melakukan perumusan tersebut, dilakukan pengkajian berbasis matriks antara tingkat risiko dan kecenderungan risiko. Adapun kecenderungan risiko pada sebagian besar bencana di Kabupaten Pamekasan adalah meningkat, kecuali bencana likuifaksi dan tsunami, termasuk dalam kategori tetap karena tidak ada histori kejadian bencana.

Berdasarkan kelas risikonya, terdapat 3 kelas risiko di Kabupaten Pamekasan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kelas Risiko Tinggi : Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, dan Kegagalan Teknologi;
- 2) Kelas Risiko Sedang : Kebakaran hutan dan lahan, Epidemii Wabah Penyakit, dan COVID-19;
- 3) Kelas Risiko Rendah : Gempa Bumi dan Tsunami

Dengan demikian, diperoleh matriks bencana prioritas seperti pada Gambar 2.2 dibawah ini, dengan rincian bencana pada masing-masing prioritas sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Matriks Bencana Prioritas di Kabupaten Pamekasan**



Sumber : Kajian Resiko Bencana 2023-2028 Kabupaten Pamekasan

- **Prioritas 1:** Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, Kegagalan Teknologi, GEA, Karhutla, Likuifaksi, COVID-19;
- **Prioritas 2:** Gempa Bumi, EWP;
- **Prioritas 3:** Tsunami.



**Tabel 2.18**  
**Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Data kejadian bencana alam (kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dsb)	kejadian	396	407	293	615	398
Angka korban bencana alam (jiwa)	jiwa	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Data kejadian bencana alam mulai dari kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang, gempa bumi, kekeringan dsb yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sangat fluktuatif. Hal ini terlihat dari data kejadian bencana di tahun 2019 terdapat 396 kejadian, sedangkan pada tahun 2020 mengalami 407 kejadian bencana, dan pada tahun 2021 turun menjadi 293 kejadian, namun 2022 meningkat sebesar 615 kejadian, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 398 kejadian.

**Tabel 2.19**  
**Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2021**

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alam (Desa/Kelurahan)	Desa/kelurahan	65	68	70	43

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari tahun 2021 sejumlah 43, angka ini lebih kecil dari tahun sebelumnya di tahun 2020 yakni sebesar 70 Hal ini karena meningkatnya kesadaran Masyarakat/Lembaga dalam penanggulangan bencana.



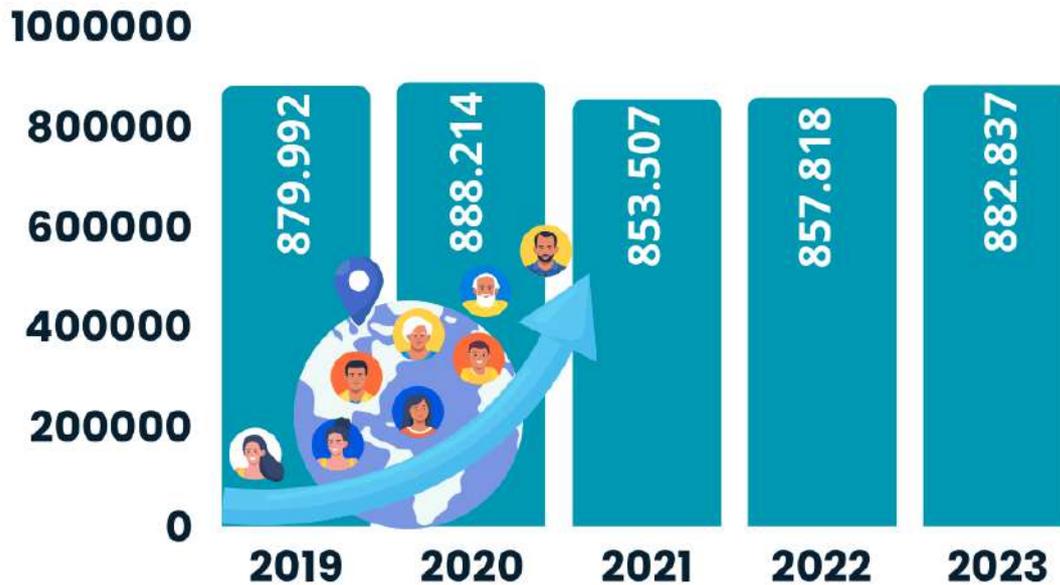
## **2.1.2 ASPEK DEMOGRAFI**

### **2.1.2.1 Jumlah Penduduk**

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Pamekasan menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Pamekasan tahun 2019 sebesar 879,99 ribu jiwa, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 888,21 ribu jiwa. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga menjadi 853,51 ribu jiwa. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Pamekasan sebesar 857.818 ribu jiwa. Kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 882.837 ribu jiwa. Berikut grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan:

**Gambar 2.3**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019–2023**



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

**Tabel 2.20**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten**  
**Pamekasan tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk	Jiwa	879.992	888.214	853.507	857.818	882.837
Laki-laki	Jiwa	427.801	416.961	418.577	420.612	431.891
Perempuan	Jiwa	452.191	433.096	434.930	437.206	450.946
Rasio Jenis Kelamin	%	94,61	94,62	96,24	96	95,77

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk jika didasarkan ada kategori gender, maka perempuan memiliki jumlah lebih besar dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2021 hanya berjumlah 418.577 orang sedangkan perempuan berjumlah 434.930 orang.

Pertumbuhan penduduk jika didasarkan ada kategori gender, maka perempuan memiliki jumlah lebih besar dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk



laki-laki pada tahun 2022 hanya berjumlah 420.612 orang sedangkan perempuan berjumlah 437.206 orang. Perkembangan jumlah rasio jenis kelamin bergerak naik secara perlahan. Pada tahun 2022 adalah 96 yang berarti setiap 10 orang wanita terdapat 96 laki-laki. Sedangkan, pertumbuhan penduduk Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2022, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	4,92	-2,54	3,41	4,66	4,96

Sumber Data: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2024

Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,92%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -2,54%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,41%, dan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 4,66% serta pada tahun 2023 meningkat menjadi 4,96%. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2021.

### 2.1.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	36.687	34.899	71.586
2	05-09	38.399	36.240	74.639
3	10-14	34.365	32.990	67.649
4	15-19	24.683	22.836	47.519
5	20-24	35.426	35.006	70.432
6	25-29	36.058	35.322	71.380
7	30-34	31.214	31.418	62.632
8	35-39	31.502	34.211	65.713
9	40-44	31.928	35.806	67.734
10	45-49	30.910	34.314	65.224
11	50-54	27.423	28.811	56.234
12	55-59	22.018	25.666	47.684
13	60-64	18.458	21.604	40.062
14	65-69	13.123	15.185	28.308
15	70-74	9.299	10.553	19.852
16	75+	10.104	16.085	26.189
<b>Jumlah Total</b>		<b>431.891</b>	<b>450.946</b>	<b>882.837</b>

Sumber Data: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2024

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan secara perlahan hingga berada di 0,93% pada tahun 2020, jika dilihat berdasarkan tabel di atas tidak terdapat data pada tahun 2021. Kedaaan tersebut menunjukkan pengendalian penduduk sudah berhasil dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,45 persen.

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

#### 2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

**Gambar 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019–2023**



Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2019 sebesar 4,92%, namun pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai -2,54% hal ini dikarenakan terjadi pandemi covid-19 sehingga banyak aktifitas yang terhambat, pada tahun 2021 kembali meningkat dengan mencapai 3,41%, dan

mulai meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 4,66%. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 4,96%.

### 2.2.1.2 Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah masalah pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan dalam hal ini Kabupaten Pamekasan.

**Gambar 2.5**  
**Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang



dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa indeks gini di Kabupaten Pamekasan selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,32-0,36). Pada tahun 2019 sebesar 0,34, pada tahun 2020 menurun 0,32, kemudian pada tahun 2021 sebesar 0,323. Tahun 2022 indeks gini Kabupaten Pamekasan sebesar 0,305. Sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,348.

Apabila peningkatan gini rasio terus dibiarkan tentunya bisa berdampak kurang baik. Ketimpangan pendapatan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah perlu menjadi perhatian, karena ada kecenderungan meningkat. Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019-2023 selalu lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Keadaan ini tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan, namun dengan peningkatan masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan kelompok ekonomi menengah ke atas.

### **2.2.1.3 Angka Kemiskinan**

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Salah satu isu utama yang harus diperhatikan dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.



**Tabel 2.23**  
**Persentase Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Pamekasan**  
**Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	%	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36
Provinsi Jawa Timur	%	10,37	11,09	11,40	10,38	10,35
Kabupaten Pamekasan	%	13,95	14,6	15,3	13,93	13,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase penduduk miskin adalah rasio perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan total keseluruhan jumlah penduduk suatu daerah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan sebesar 14,6% pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 15,30 % dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 13,93%. Kemudian kembali turun pada tahun 2023 menjadi 13,85%. Capaian ini masih berada di atas capaian nasional dan provinsi Jawa Timur sehingga ke depan Kabupaten Pamekasan harus terus memperbaiki kinerja di penurunan pengantasan kemiskinan.

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Madura dan Provinsi**  
**Jawa Timur Tahun 2020–2023 (ribu)**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			
	2020	2021	2022	2023
Bangkalan	204	215,97	196,11	196,66
Sampang	224,74	237,23	217,97	221,71
Pamekasan	129,41	137,12	126,02	126,43
Sumenep	220,23	224,73	206,2	206,10
<b>Jawa Timur</b>	<b>4.419,10</b>	<b>4.572,73</b>	<b>4.181,29</b>	<b>4.188,81</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Tabel tersebut berisi data kondisi kemiskinan di 4 (empat) wilayah Kabupaten/Kota Pulau Madura berdasarkan informasi badan pusat statistik Jawa Timur pada tahun 2020 – 2023. Kabupaten Bangkalan tahun 2020 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 204,00 ribu, 215,97 ribu dan pada tahun 2022



menurun menjadi 196,11 ribu, sedangkan tahun 2023 naik menjadi 196,66 ribu. Kabupaten Sampang memiliki sebanyak 224, 74 ribu penduduk miskin di tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 237,23 ribu, hingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 217,97, kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 221,71 ribu. Kabupaten Sumenep memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 220,23 ribu dengan kenaikan pada tahun 2021 menjadi 224,73 ribu, hingga tahun 2022 mengalami penurunan menjacapai 206,2 ribu dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 206,10 ribu. Sedangkan, Kabupaten Pamekasan memiliki angka penduduk miskin sebanyak 129,41 ribu pada tahun 2020 dan cenderung naik menjadi 137,12 ribu, hingga mengalami penurunan drastis yaitu 126,02 ribu tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 kembali terjadi kenaikan menjadi 126,43 ribu.

**2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan trend yang fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019, TPT menunjukkan angka 2,32%, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai 3,49% dan menurun kembali pada tahun 2021 sebesar 3,1%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,4%. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 1,74%.

**Tabel 2.25**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019–2023**

<b>INDIKATOR</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	669.080	687.890	695.930	703.830	675.641
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,13	69,82	65,88	73,59	77,14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan	Persen	2,26	3,49	3,10	1,40	1,74
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur	Persen	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88



INDIKATOR	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional	Persen	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pamekasan secara kumulatif lebih baik dari TPT Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian TPT Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sebesar 2,26. Sedangkan TPT Jawa Timur sebesar 3,82 dan Nasional sebesar 5,23. Capaian tersebut terus meningkat hingga tahun 2023 untuk Jawa Timur dan Nasional secara berturut-turut sebesar 4,88 dan 5,32. Sementara pada Kabupaten Pamekasan terjadi penurunan menjadi 1,74.

### 2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 pembangunan manusianya semakin baik.

UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di negara tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.



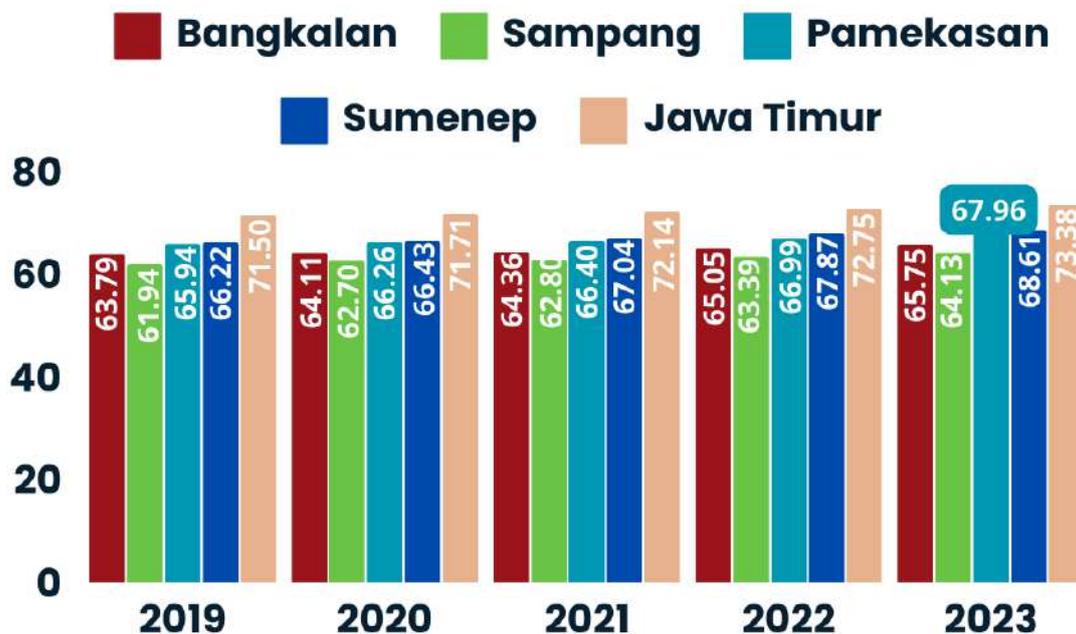
IPM juga dapat menjadi tolak ukur pada level Provinsi, Kabupaten atau Kota termasuk Kabupaten Pamekasan. Hal-hal yang mendorong pentingnya peningkatan IPM, diantaranya:

- 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- 3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada kondisi saat ini, IPM Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 65,94 poin, dan terus meningkat menjadi 66,26 poin pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 IPM Kabupaten Pamekasan sebesar 66,40 poin. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 66,99 poin dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 67,96 poin, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6

Perbandingan IPM Jawa Timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun 2019–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

IPM Jawa Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 IPM Provinsi Jawa Timur mencapai angka 71,50 poin dan terus meningkat hingga mencapai 73,38 poin pada tahun 2023. Kabupaten Bangkalan menunjukkan capaian IPM yang juga meningkat, pada tahun 2019 capaian IPM sebesar 63,79 poin, pada tahun 2020 mencapai 64,11 poin, pada tahun 2021 mencapai 64,36 poin dan mengalami peningkatan sebesar pada tahun 2022 yakni 65,05 poin. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 65,75 poin.

IPM Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dapat ditingkatkan dengan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Sampang mencapai 61,94 poin dan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 64,13 poin. Selanjutnya, IPM Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 65,94 poin, dan terus meningkat menjadi 66,26 poin pada tahun 2020, pada tahun 2021 juga mengalami



peningkatan sebesar 66,40, dan kemudian mengalami peningkatan sebesar 66,99 pada tahun 2022. Kemudian kembali naik pada tahun 2023 menjadi 67,96 poin. Berikutnya, IPM Kabupaten Sumenep, mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilainya mencapai angka 66,22 poin dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 hingga mencapai 68,61 poin.

**Tabel 2.26**  
**Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	-	72,93	73,00	73,28	73,51
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63	13,64	13,65	13,67	13,68
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,4	6,69	6,7	6,88	7,15
Pengeluaran Perkapita/Thn Disesuaikan	(Ribu Rp)	8.834	8.739	8.804	8.967	9.420
Indeks Kesehatan	Indeks	0,73	0,73	0,73	0,74	0,82
Indeks Pendidikan	Indeks	0,59	0,6	0,6	0,61	0,62
Indeks Daya Beli (PPP)	Indeks	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68
Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Indeks	-	68,85	68,78	69,35	70,32
Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,05	86,17	86,5	86,83	86,97
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,13	53,01	52,44	54,44	55,85

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Usia harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu wilayah maka semakin baik pula pelayanan kesehatan dan kesejahterannya. UHH Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan hingga mencapai 73,51 tahun pada tahun 2023.

Sedangkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur



tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023 hingga mencapai 13,68 tahun pada tahun 2023.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian RLS Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023 hingga mencapai 7,15 tahun pada tahun 2023.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Capaian pengeluaran perkapita Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2019- 2023 hingga mencapai Rp 9.420 pada tahun 2023.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023 hingga mencapai 0,63 pada tahun 2023. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023 hingga mencapai 70,32 pada tahun 2023.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023 hingga mencapai 86,97 pada tahun 2023. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

adalah sebuah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2019-2023 hingga mencapai 55,85 pada tahun 2023.

#### **2.2.1.6 Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani atau (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani di Kabupaten Pamekasan.

**Gambar 2.7**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019**



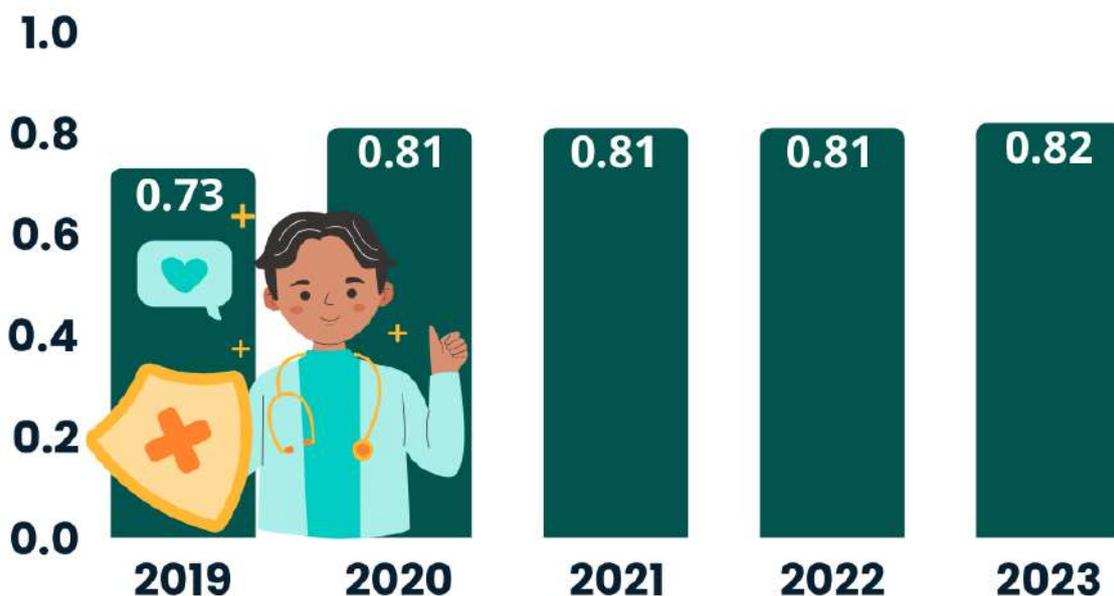
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan

## 2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

### 2.2.2.1 Indeks Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus Balita Gizi Buruk (BGB), Balita Kurang Gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Oleh karena itu, AHH memiliki korelasi yang sangat erat dengan Angka Kematian Bayi atau infant mortality rate (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatal dan status gizi bayi (0-11 bulan).

**Gambar 2.8**  
**Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan gambar diatas Indeks Kesehatan mengalami stagnan di tahun 2019 sebesar 0,73%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun



2022 Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan stagnan sebesar 0,81%. Namun pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,01% dan menjadi 0,82%.

### **2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat**

Keluarga sehat adalah keluarga yang setiap anggotanya berada dalam kondisi sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mencapai keluarga sehat, yakni kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan jiwa dan raga, serta gaya hidup. Kementerian Kesehatan telah merumuskan 12 indikator yang dipakai untuk menentukan suatu keluarga itu tergolong sehat atau tidak. Ke 12 (dua belas) indikator tersebut adalah :

1. Keluarga mengikuti program KB;
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat ASI eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN;
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;



**Tabel 2.27**  
**Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2023**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,16	0,181	0,204	0,217

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,16 meningkat hingga 0,217 pada tahun 2023.

**2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

**Tabel 2.28**  
**Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,05	86,17	86,50	86,83	86,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 – 2023 pada tahun 2019 IPG Kabupaten Pamekasan sebesar 86,05, meningkat pada tahun 2020 menjadi 86,17, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 86,50, serta IPG Kabupaten



Pamekasan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 86,83 dan 86,97.

#### **2.2.2.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Indeks Ketimpangan Gender adalah Indeks yang menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan serta akses dalam pasar tenaga kerja.

**Tabel 2.29**

**Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,64	0,627	0,66	0,644	0,601

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Dari informasi tabel di atas, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pamekasan dalam kurun lima tahun terakhir berfluktuasi namun tidak signifikan. Pada tahun 2019 IKG Kabupaten Pamekasan sebesar 0,640 menurun pada tahun 2023 hingga menjadi 0,601.

### **2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

#### **2.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH**

##### **2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PDRB Kabupaten Pamekasan selalu mengalami peningkatan.

**Tabel 2.30**  
**PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (miliar rupiah)	17.042,90	16.793,85	17.659,22	19.263,35	20.881,25
PDRB ADHK (miliar rupiah)	11.408,40	11.117,62	11.496,24	12.031,56	12.628,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Sektor utama penopang ekonomi Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan berkisar 31-32,5 %, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkisar 20-21%, serta Jasa Konstruksi berkisar 10,2 - 10,8%

**Tabel 2.31**  
**Kontribusi PDRB Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,32	32,5	32,27	32,43	31,69
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,09	20,17	20,72	21,19	21,43
Jasa Konstruksi	10,83	10,45	10,29	10,3	10,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pamekasan didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga cenderung fluktuatif setiap tahunnya, sedangkan pembentukan modal tetap bruto cenderung menurun tiap tahun nya. Pada tahun 2020 sebesar 30,92% menjadi 29,70% pada tahun 2023.



**Tabel 2.32**  
**Kontribusi PDRB Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	71,41	72,18	70,84	70,67	71,10
PMTB		30,92	30,03	30,09	29,70

### 2.3.1.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Non Makanan

Di rentan tahun 2019 – 2022 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Pamekasan mengalami naik turun dari Rp 706.967 menjadi Rp 743.663. Bila dilihat proporsi pengeluaran penduduk, persentase pengeluaran untuk makanan mengalami kenaikan dari 57,52 persen pada tahun 2019 menjadi 60,16 persen pada tahun 2022. Sebaliknya, proporsi pengeluaran bukan makanan menurun dari 42,48 persen menjadi 39,84 persen. Jika dilihat pada kategori penyusunnya, penurunan proporsi pengeluaran pada kategori bukan makanan terjadi hanya pada kelompok barang tahan lama saja yang turun dari 5,54 persen menjadi 2,31 persen.

Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari Rp.406.615 menjadi Rp.447.395 perkapita sebulan. Sementara itu pada pengeluaran bukan makanan, terjadi penurunan dari Rp.300.352 pada tahun 2019 menjadi Rp.296.268 per kapita.

**Tabel 2.33**  
**Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan							
	Nominal (Rp)				Presentase (%)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Makanan	406.615	417.229	393.798	447.395	57,52	58,39	58,03	60,16
Bukan Makanan	300.352	297.369	284.785	296.268	42,48	41,61	41,97	39,84
Perumahan	145.999	138.216	133.268	144.097	20,65	19,34	19,64	19,38
Barang dan Jasa	69.950	68.203	69.793	73.137	9,89	9,54	10,29	9,83
Pakaian	19.660	22.320	20.778	22.869	2,78	3,12	3,06	3,08
Barang Tahan Lama	39.145	26.549	32.473	17.181	5,54	3,72	4,79	2,31
Lainnya	25.599	42.082	28.473	38.984	3,62	5,89	4,2	5,25
<b>JUMLAH</b>	706.967	714.598	678.583	743.663	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2023

### 2.3.1.3 Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Pamekasan cenderung berfluktuasi. Nilai Realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 257.169.190.437. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 jumlah investor meningkat drastis dari tahun tahun sebelumnya dengan total investor mencapai 247 investor.



**Tabel 2.34**  
**Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
PMA	Rupiah	-	-	-	15.321.994.871	709.189.489
PMDN	Rupiah	13.340.000.000	18.631.328.775	142.799.228.246	241.856.195.566	162.398.047.145
Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rupian	13.340.000.000	18.631.328.775	142.799.228.246	257.169.190.437	163.107.236.634

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, 2024

## 2.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

### 2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

**Tabel 2.35**  
**Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	Poin	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2024

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Realisasi Indeks Pendidikan di Kabupaten Pamekasan sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan sehingga berdampak produktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

### **2.3.2.2 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Kabupaten Pamekasan dapat di lihat memiliki persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2018-2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 mencapai 97,08% kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 mencapai 97,68%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 96,51% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 96,90% yang angkanya tidak lebih besar dari tahun 2019. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) merupakan indikator pokok kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Dari grafik berikut ini dapat diketahui komposisi persentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah.

**Gambar 2.9**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2018 – 2022**

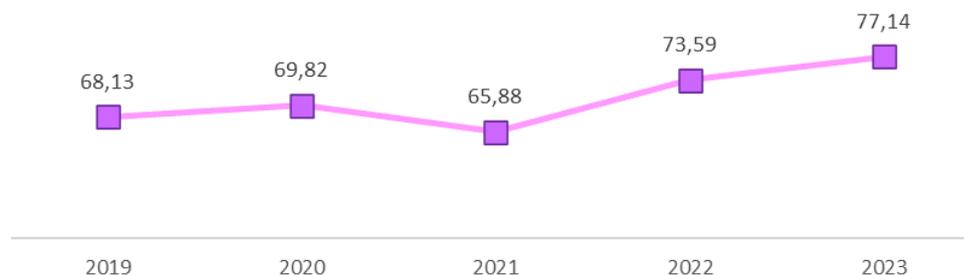


Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2023

### 2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. Berikut merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan.

**Gambar 2.10**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, 2024

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pamekasan selama periode 5 tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mulai meningkat selama periode 2 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.

### 2.3.2.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum



produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi >64 tahun). Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

**Tabel 2.36**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2023**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	Jiwa	195,982	194,792	194,008	213.874
2.	Jumlah penduduk usia > 65 tahun	Jiwa	59,778	46,358	65,979	74.349
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	Jiwa	255,76	241,15	259,987	288.223
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	Jiwa	493,589	595,914	597,831	594.614
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	Rasio	51,82	40,47	43,49	48,47

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Jika melihat data tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan yang semula 51,82 pada tahun 2020 menjadi 40,47 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 naik kembali menjadi 43,49. Namun pada tahun 2023 kembali naik menjadi 48,47. Di dalam tabel angka tersebut menunjukkan bahwa ada beban tinggi dan harus ditanggung penduduk yang produktif di Kabupaten Pamekasan untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif bahkan tidak produktif lagi.

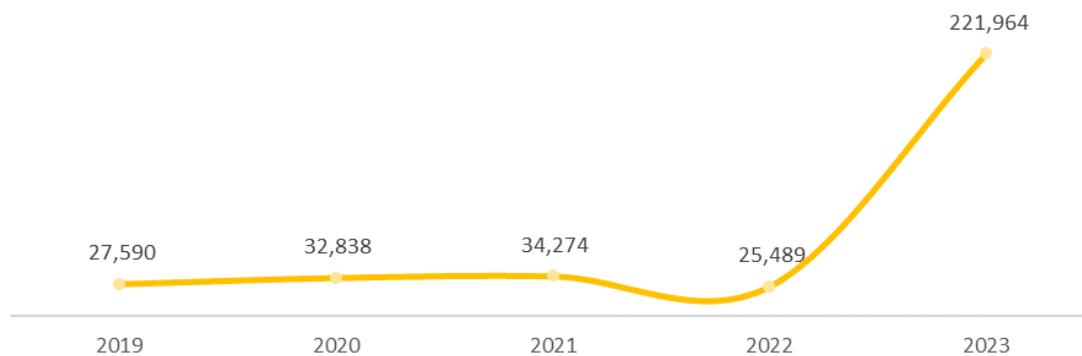
### **2.3.3 DAYA SAING FASILITAS/INFRASTRUKTUR WILAYAH**

#### **2.3.3.1 Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik**

Panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 hingga 2021 cenderung stabil kemudian pada tahun 2022 jalan kota dalam kondisi baik menurun menjadi 25,489 km. Kemudian dilakukan rehabilitasi sehingga panjang jalan kota dalam kondisi baik meningkat cukup signifikan pada

tahun 2023 mencapai 221,964 km. Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi. Berikut di bawah ini merupakan capaian jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pamekasan di tahun 2019-2023:

**Gambar 2.11**  
**Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019-2023 (Km)**



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

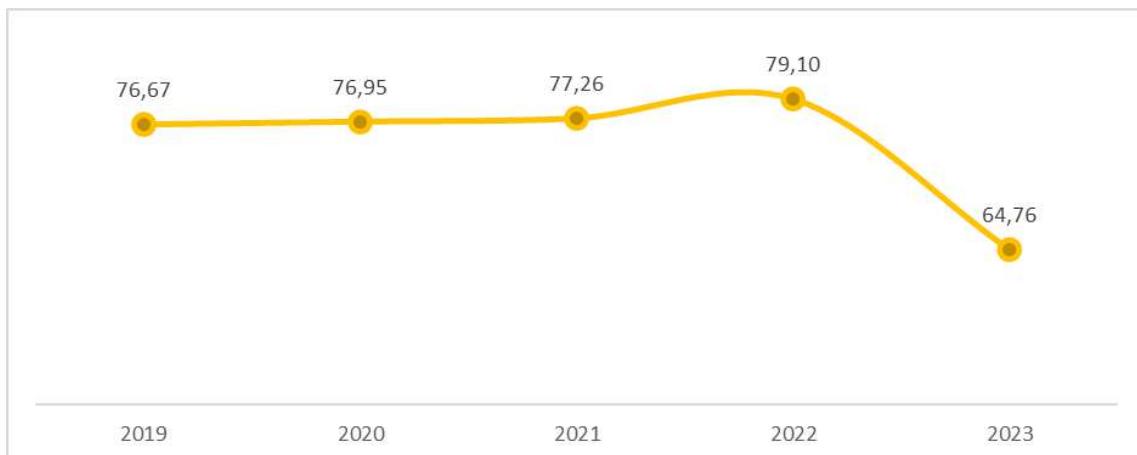
Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pamekasan juga tidak lepas dari permasalahan dan kendala pada penyediaan dan pemeliharaan jalan. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mempertahankan laju pemeliharaan jalan yang apabila dibandingkan dengan kerusakan jalan cenderung lebih cepat. Hal ini juga didasari dari panjang jalan kota yang memiliki kenaikan secara signifikan di tahun 2023 yakni sebesar 221.964 km yang sebelumnya hanya sebesar 25.489 km, hal inilah yang memberikan tekanan berat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat lebih cepat dalam memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Akan tetapi untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan beberapa strategi yakni menetapkan skala prioritas pemeliharaan jalan, meningkatkan koordinasi ditingkat provinsi dan kementrian serta

mempertimbangkan untuk pembatasan muatan barang kendaraan yang melintas jika diperlukan.

### 2.3.3.2 Kondisi Jalan Mantap Kabupaten

Kondisi jalan mantap kabupaten merupakan jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Semakin baik tingkat kemantapan jalan kabupaten mengindikasikan adanya penyediaan atau perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi jalan yang membaik berimplikasi pada peningkatan aksesibilitas masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Berikut merupakan tingkat kemantapan jalan Kabupaten Pamekasan.

**Gambar 2. 12 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Pamekasan**



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024



**Tabel 2.37**  
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Pamekasan**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Baik	Km	279,887	286,435	358,203	320,075	221,964
Sedang	Km	112,926	107,846	37,650	85,221	109,836
Rusak	Km	30,268	76,028	106,556	50,065	117,804
Rusak Berat	Km	89,278	42,050	9,950	56,998	62,755
Jumlah	Km	512,359	512,359	512,359	512,359	512,359

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

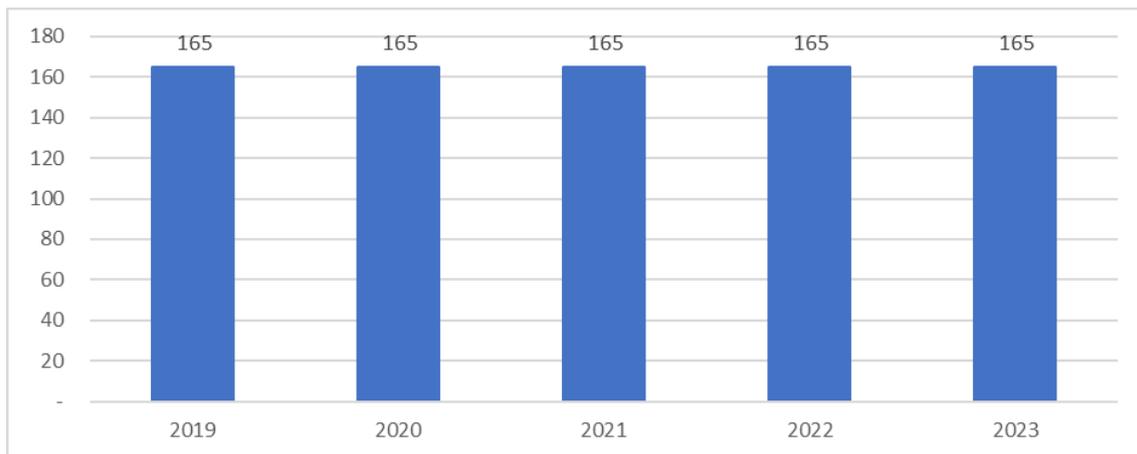
Hasil diatas menunjukkan bahwa kondisi jalan mantap di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa persentase kondisi jalan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 64,76 persen dari 512,359 km. Jika dilihat bahwa kondisi jalan yang rusak dan rusak berat bertambah pada tahun 2023. Kondisi jalan rusak meningkat dari 50,065 km pada tahun 2022 menjadi 117,805 km pada tahun 2023. Kemudian, kondisi jalan rusak berat meningkat dari 56,998 km pada tahun 2022 menjadi 62,755 km pada tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mempertahankan laju pemeliharaan jalan berbanding kerusakan jalan yang lebih cepat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu mengupaya melakukan rekontruksi untuk jalan yang rusak parah, memperkuat struktur jalan dengan menambah lapisan baru atau memperlebar jalan, membatasi beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut, membuat saluran drainase yang baik karena saluran drainase yang baik dapat mencegah air menggenang di jalan dan merusak struktur jalan, menetapkan skala prioritas jalan, serta meningkatkan koordinasi di tingkat provinsi dan kementerian dengan mempertimbangkan pembatasan muatan barang kendaraan ketika melintas apabila diperlukan.

### 2.3.3.3 Jembatan Dalam Kondisi Baik

Penyediaan infrastruktur jembatan yang baik penting untuk mendukung aktivitas masyarakat. Ketersediaan jembatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk bergerak lebih mudan dan efisien anantara dua wilayah

sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pergerakan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Berikut merupakan jumlah jembatan dengan kondisi yang baik di Kabupaten Pamekasan.

**Gambar 2.13 Jembatan dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pamekasan**



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

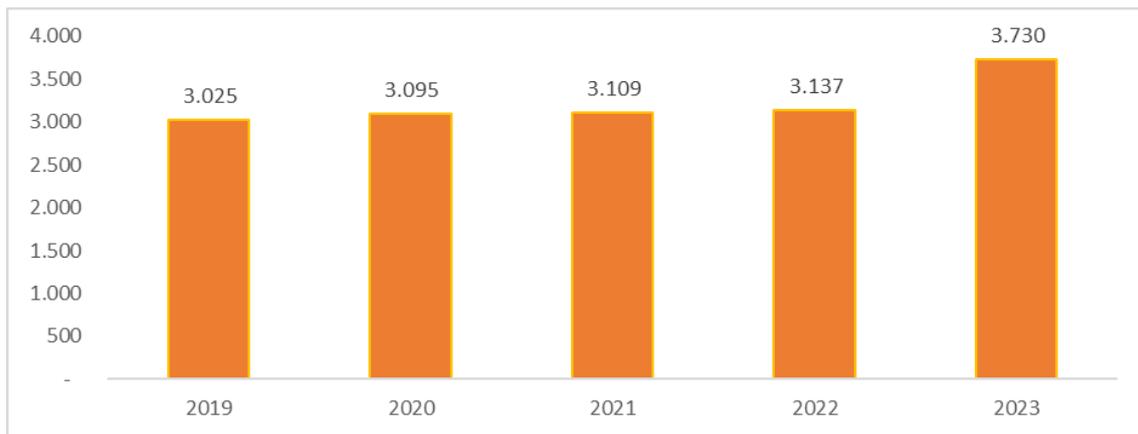
Jumlah jembatan dalam kondisi baik dari tahun 2019 hingga 2023 stagnan atau tidak ada penambahan ataupun penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan pemeliharaan secara rutin sehingga jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik tidak berkurang.

#### **2.3.3.4 Rasio Jaringan Irigasi**

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi teradap luas lahan budidaya. Derajat rasio jaringan irigasi berdampak pada peningkatan produksi padi sawah dan pendapatan petani. Irigasi sendiri merupakan upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian serta pembuangan air buatan dari sumber air yang tersedia ke suatu lahan dengan tujuan mengalurkannya secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat suplai infiltrasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 menyatakan irigasi atau pengelolaan irigasi merupakan segala upaya

pemanfaatan air irigasi, termasuk pengoprasian dan pemeliharaan, pengamanan, pemulihan dan peningkatan jaringan irigasi. Berikut merupakan rasio jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

**Gambar 2.14 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**



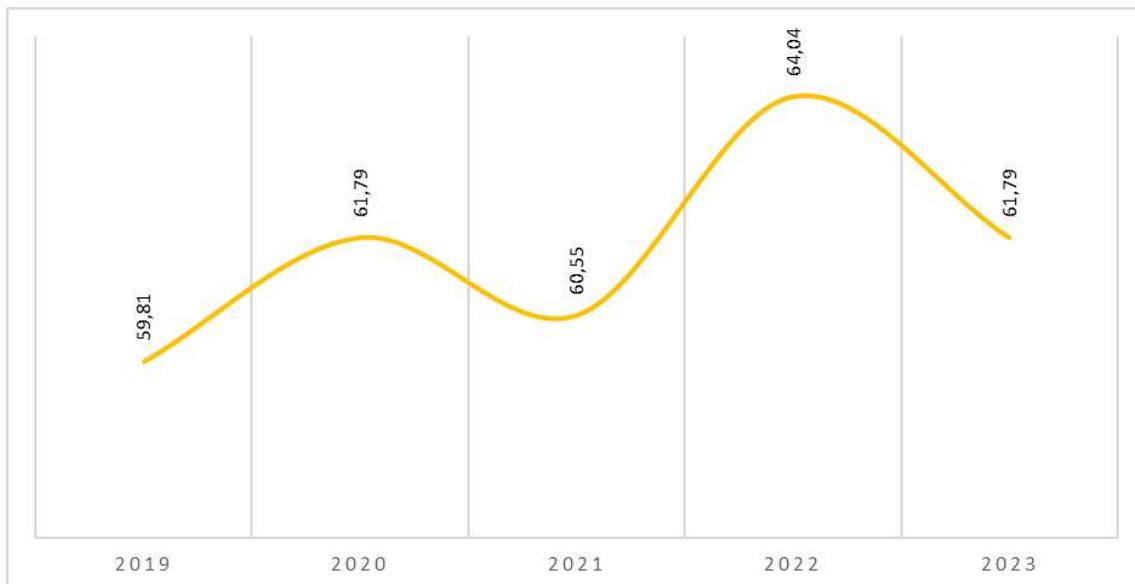
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan,2024

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Pamekasan mengalami tren meningkat setiap tahunnya mencapai 3.730 Ha pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki infrastruktur irigasi yang bertambah setiap tahunnya untuk mendukung kegiatan pertanian. Akan tetapi, saat ini masyarakat masih banyak mengeluhkan terkait kualitas infrastruktur pengairan yang ada. Oleh karena itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak hanya menambah jumlah jaringan irigasi yang ada akan tetapi juga meningkatkan kualitas jaringan irigasi tersebut. Selain dapat meningkatkan kepuasan masyarakat juga dapat mempertahankan kualitas serta masa guna jaringan irigasi yang ada.

### 2.3.3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dikategorikan menjadi 5 antara lain : Skala  $0 \leq x < 25$  masuk kategori Sangat Kurang; Skala  $25 \leq x < 50$  masuk kategori Kurang; Skala  $50 \leq x < 70$  masuk kategori Sedang; Skala  $70 \leq x < 90$  masuk kategori Baik; skala  $90 \leq x \leq 100$  masuk kategori Sangat Baik.

**Gambar 2. 15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2024

Capaian IKLH di Kabupaten Pamekasan mengalami perubahan fluktuatif selama periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 capaian IKLH sebesar 61,79 berada diinterval  $50 \leq \text{IKLH} < 70$  masuk kategori Sedang. Hal ini menunjukkan



bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pamekasan tergolong Sedang. Kategori Sedang menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, masih diperlukan perhatian lebih dalam upaya tersebut. Capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, serta faktor alamiah seperti perubahan iklim. Untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan kesadaran lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi langkah-langkah yang diambil untuk mencapai peningkatan capaian IKLH yang lebih baik di masa mendatang.

**2.3.4 DAYA SAING IKLIM INVETASI**

**2.3.4.1 Nilai Investasi**

Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah nilai investasi yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 – 2021. Pada tahun 2019 nilai investasi Kabupaten Pamekasan senilai Rp 29.425.820.412 sementara pada tahun 2020 nilai investasi Kabupaten Pamekasan meningkat hingga mencapai angka Rp 29.778.930.257. Nilai investasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak Rp 30.136.277.420.

**Tabel 2.38**  
**Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2022**

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jumlah Nilai Investasi (Juta Rp)	34.940.102.058	29.425.820.412	29.778.930.257	30.136.277.420	3.653.321.823.364

Sumber: DPMPTSP Nakertrans Kabupaten Pamekasan, 2023



Jumlah nilai investasi Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2020. Pada tahun 2019 nilai investasi Kabupaten Pamekasan adalah Rp. 120.131.2108.238 sementara pada tahun 2020 nilai investasi Kabupaten Pamekasan meningkat hingga mencapai angka Rp. 525.084.334.577. Nilai investasi tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 354.871.848.648. Kemudian meningkat sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 3.653.321.823.364.

**2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif dan dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran indeks daya saing daerah mulai Tahun 2022 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 (dua belas) pilar daya saing. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 dan 2023 masih dibawah Indeks Daya Saing nasional dan Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.39**

**Indeks Daya Saing Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dan Nasional**

No	Indeks Daya Saing Daerah	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1	Jawa Timur	Indeks	3,74	3,78
2	Nasional	Indeks	3,26	3,44
3	Kabupaten Pamekasan	Indeks	2	3,2

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

**2.3.4.3 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (disingkat Ketertiban Umum) adalah konsep yang mencakup upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib. Ketertiban Umum berfokus pada penegakan hukum, pengaturan perilaku masyarakat, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat



secara umum. Dalam konteks pemerintahan, Ketertiban Umum adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik. Upaya-upaya untuk mencapai Ketertiban Umum meliputi penegakan peraturan, pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi norma-norma sosial dan hukum.

Perlindungan Masyarakat juga menjadi bagian integral dari Ketertiban Umum. Ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, keamanan pribadi, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan masyarakat, seperti kejahatan, bencana alam, dan konflik sosial. Dalam keseluruhan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berdaya guna. Dengan menjaga Ketertiban Umum, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, nyaman, dan sejahtera. Untuk melihat capaian indikator dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.40 Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Limnas Per Jumlah 10.000 Penduduk	Orang	62	69	52	41	44
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Persen	53	50	51	47	46
Peningkatan Kasus Kebakaran yang Direspon Kurang 15 Menit	Persen	50	94	90	80	82,5
Tingkat Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)	Persen	100	42	100	100	59
Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	Persen	70	28	94	100	86,5
Tingkat Penyelesaian Trantibum	Persen	92	76	100	100	100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Persen	100	100	100	72	72

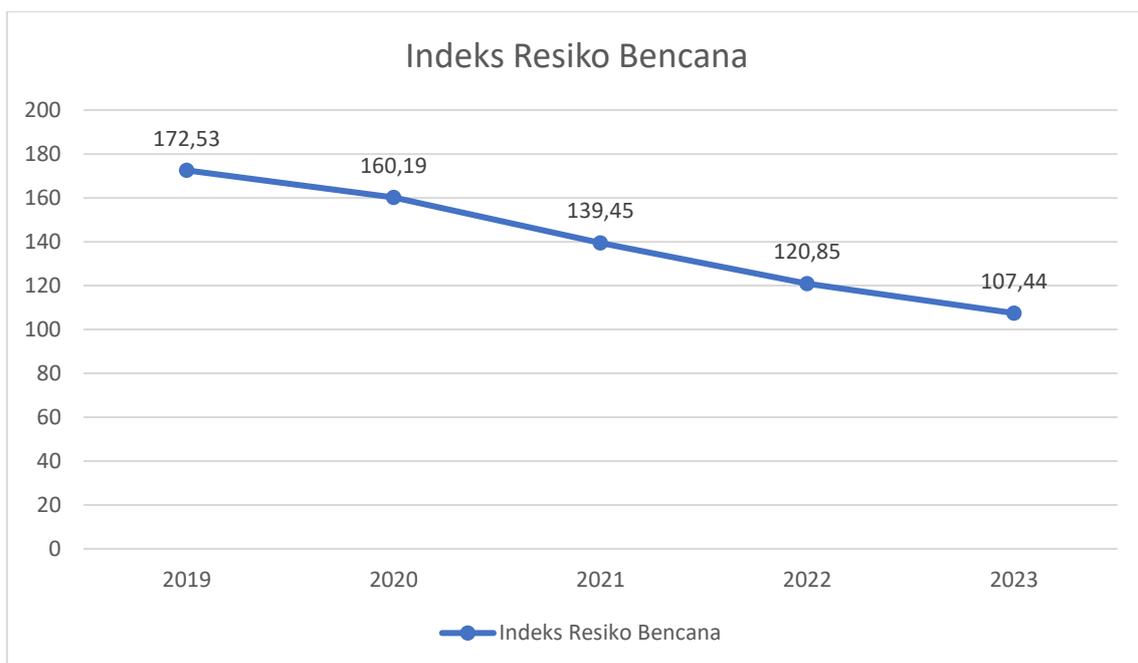
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Penanganan Kebakaran	Persen	50	92	90	100	82,5

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, 2024

#### 2.3.4.4 Indeks Resiko Bencana

Indeks Rawan Bencana (IRB) adalah suatu alat analisis bencana berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat kejadian bencana yang pernah terjadi di wilayah tertentu. Semakin Kecil Nilai Indeks, semakin baik penanganan risiko bencana pada wilayah tersebut. Berikut dibawah ini merupakan capaian indeks risiko bencana yang ada di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

**Gambar 2. 16 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan

Capaian Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pamekasan selama periode 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Indeks Risiko Bencana tercatat sebesar 172,53 menurun menjadi 107,44 artinya penanganan bencana di Kabupaten Pamekasan semakin baik. Namun masih diperlukan upaya-



upaya tertentu untuk membuat capaian IRB semakin rendah. Upaya tambahan yang diperlukan untuk menurunkan IRB seperti penguatan infrastruktur tahan bencana; peningkatan sistem peringatan dini; edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat; pengelolaan lingkungan; peningkatan kapasitas respon darurat; dan perencanaan tata ruang yang tepat. Dengan menerapkan upaya tersebut, IRB di Kabupaten Pamekasan dapat terus menurun dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

## **2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**

#### **2.4.1.1 Pendidikan**

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mengelola potensi yang ada pada anak usia sekolah melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, penduduk non usia sekolah juga mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non formal. Gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang Kelas yang berkondisi baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase kualifikasi Guru berpendidikan minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan.

#### **A. Indeks Pendidikan**

**Tabel 2.41**  
**Indeks Pendidikan Tahun 2019–2023**

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indeks Pendidikan	Poin	0.59	0.60	0.60	0.61	0.62

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2024

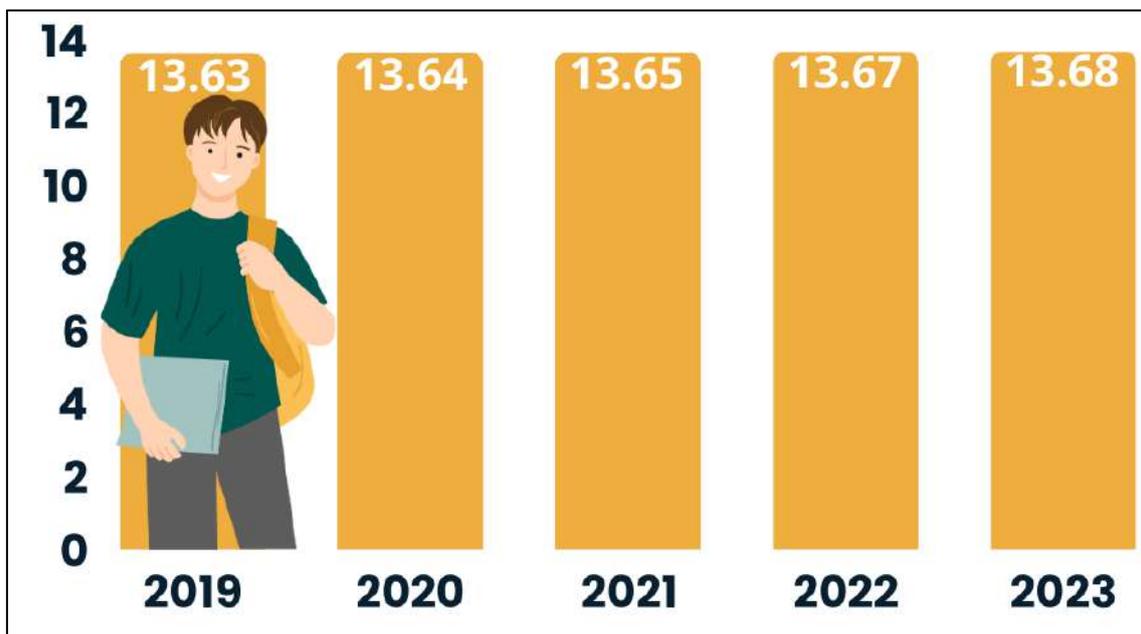
Berdasarkan data di atas, Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengalami stagnan pada tahun 2020 dan 2021 yakni sebesar 0,60%, lalu meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,01% menjadi 0,62%.

## **B. Angka Harapan Lama Sekolah**

Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan suatu negara. Di Indonesia, perkembangan pendidikan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

**Gambar 2.17**

**Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019–2023**

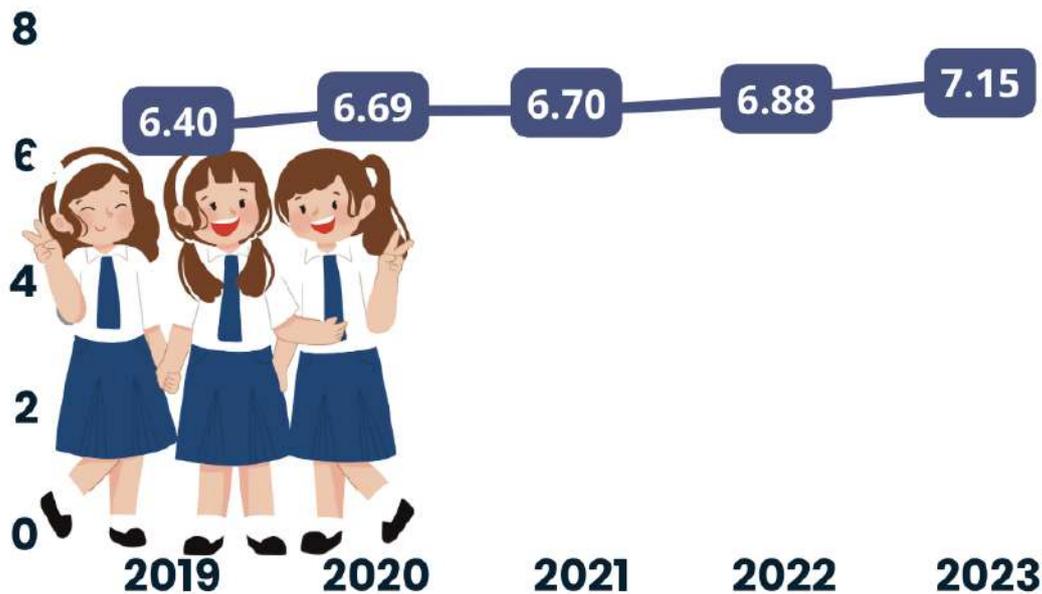


Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Berdasarkan gambar di atas Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sejak 2019 – 2021 naik 0,01 per tahun. Tahun 2021 sebesar 13,65, namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,02 poin menjadi 13,67. Kemudian pada tahun 2023 kembali naik sebesar 0,01 poin sehingga menjadikan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pamekasan menjadi 13,68

### C. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

**Gambar 2.18**  
**Angka Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2019–2023**



Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Jika melihat gambar diatas Angka rata-rata lama sekolah cenderung fluktuatif dari tahun 2019 – 2023. Tahun 2019 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pamekasan sebesar 6,4, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6,96, namun di tahun 2021 menurun menjadi 6,7 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 6,88. Kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7,15. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Pamekasan rata-rata menempuh pendidikan sekitar 7 tahun yang berarti setara dengan kelas 7 SMP/MTs.



### D. Angka Partisipasi Kasar

**Tabel 2.42**  
**Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2019–2023**

Jenjang Pendidikan	APK					
	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	Persen	108,57	108,76	107,74	106,87	104,04
SLTP	Persen	84,04	87,38	92,52	88,03	94,65
SLTA	Persen	80,06	80,27	80,84	88,99	89,05

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Angka partisipasi kasar pada jenjang Pendidikan SD mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2023, pada tahun 2023 sejumlah 104,04%. Pada jenjang SLTP cukup fluktuatif yang mana pada tahun 2023 sebesar 94,65%. Sedangkan untuk jenjang SLTA tercatat pada tahun 2023 sebesar 89,05%.

### E. Angka Partisipasi Murni

**Tabel 2.43**  
**Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2019–2023**

Jenjang Pendidikan	Satuan	APM				
		2019	2020	2021	2022	2023
SD	Persen	97,53	97,66	97,27	97,4	97,26
SLTP	Persen	75,27	76,07	78,14	78,05	80,33
SLTA	Persen	60,06	60,88	62,52	62,05	50,72

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Angka Partisipasi Murni SD menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 sejumlah 97,53%, kemudian terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2023 mencapai 97,26%. Pada jenjang SLTP menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 sebesar 75,27% dan terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2023 mencapai 80,33%. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SLTA, pada tahun 2019 sebesar 60,06%, hingga pada tahun 2023 menjadi 50,72%.



## F. Angka Partisipasi Sekolah

**Tabel 2.44**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2019–2023**

Angka Partisipasi Sekolah	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
SD	Persen	94,85	97,3	70,13	95,86	98,82
SLTP	Persen	85,45	94,85	54,4	99,08	97,08
SLTA	Persen	73,16	69,81	n.a.	n.a	75,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SD mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 mencapai 98,82%. Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SLTP mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 sebesar 85,45 naik pada tahun 2020 menjadi 94,85 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 54,4, APS SLTP pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 99,08 dan turun Kembali tahun 2023 sebesar 97,08. Sedangkan APS pada jenjang SMA juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 APS jenjang SLTA sebesar 73,16 menurun pada tahun 2020 menjadi 69,81, pada tahun 2023 meningkat menjadi 75,13. Di tahun 2021 dan 2022 data tidak diketahui.

## G. Kondisi Bangunan Sekolah

**Tabel 2.45**  
**Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik Tahun 2019–2023**

Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	Unit	3128	3188	3322	3400	3471
SMP/MTs	Unit	867	889	978	1033	1078

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2024

Kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik pada jenjang SD/MI mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023 sejumlah

3471. Pada jenjang SMP/MTs kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik juga terus meningkat sampai tahun 2023 mencapai 1078 bangunan.

**H. Rasio Guru terhadap Murid**

**Tabel 2.46**  
**Rasio Guru terhadap Murid menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2019–2023**

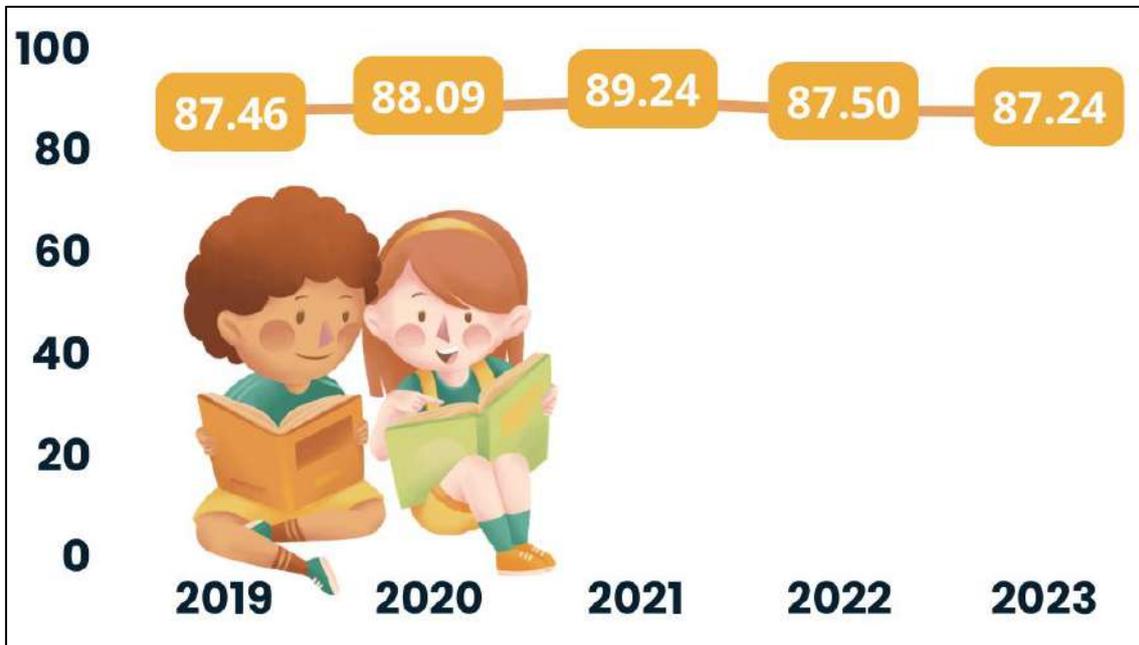
Jenjang Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Sekolah Dasar (SD)	Guru/ Murid	10,7	10,39	11,05	12,39	12,18
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Guru/ Murid	8,3	7,62	6,9	-	-
Sekolah Menengah Pertama	Guru/ Murid	7,2	9,75	10,4	11,71	11,10
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Guru/ Murid	11,9	7,55	7,2	-	-
Sekolah Menengah Atas	Guru/ Murid	5,36	12,16	12,36	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2024

Rasio guru terhadap murid pada jenjang SD mengalami fluktuasi, di tahun 2021 sebesar 11,05. Pada jenjang MI juga mengalami fluktuatif, di tahun 2021 sebesar 6,9. Pada jenjang SMP mengalami turut mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,2, kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menjadi 10,4. Pada jenjang MTs, di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 11,9 kemudian menurun hingga tahun 2021 menjadi sebesar 7,2. Sedangkan untuk jenjang SMA mengalami kenaikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, berada pada angka 12,36.

## I. Angka Melek Huruf

**Gambar 2.19**  
**Angka Melek Huruf tahun 2019–2023**



Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, 2024

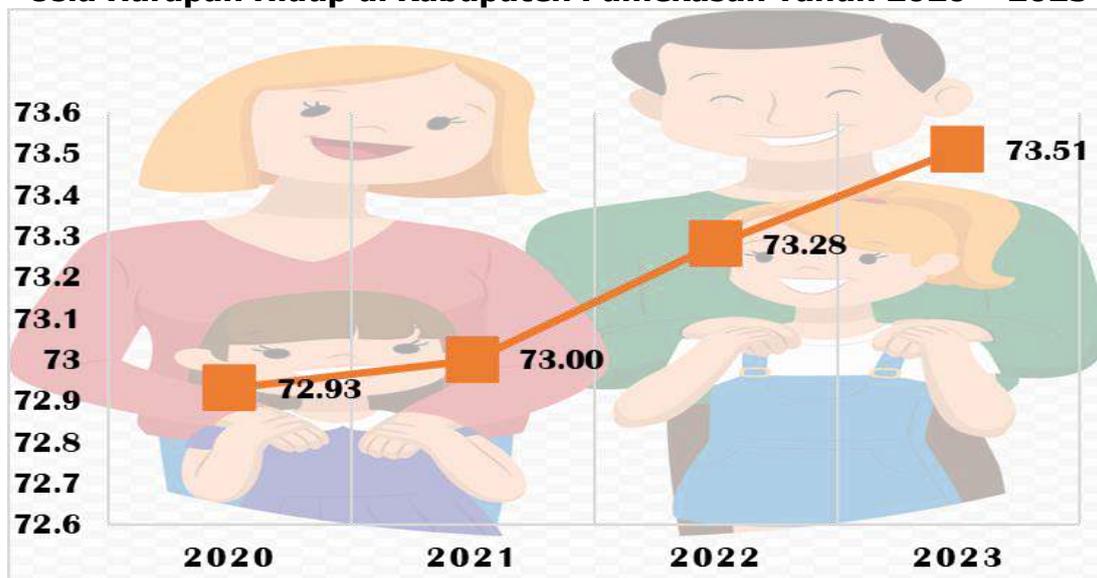
Jika melihat grafik diatas, Angka Melek Huruf mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan sebesar 87,46%. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 88,09 dan 89,24. Namun angka tersebut menurun di tahun 2022 menjadi 87,50. Sementara pada tahun 2023 indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,26 sehingga menjadi 87,24.

### 2.4.1.2 Kesehatan

#### A. Perbandingan Usia Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM.

**Gambar 2.20**  
**Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan semenjak tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 sebesar 72,93, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 73,00 tahun, dan tahun 2022 meningkat sebesar 73,28 tahun. Sementara pada tahun 2023 Usia Harapan hidup Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 73,51 tahun. Semakin meningkatnya UHH di Kabupaten Pamekasan mengindikasikan bahwa derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pamekasan semakin membaik.

## B. Kesehatan Bayi

**Tabel 2.47**  
**Kesehatan Bayi tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Orang	416	436	384	199	410
Gizi Buruk	Orang	0	0	0	2	3
Cakupan Kunjungan Bayi	Orang	13.470	10.670	n.a.	17.053	12.528
Ibu Hamil Kunjungan K1	Orang	14.648	14.544	14.338	14.497	14.320
Ibu Hamil Kunjungan K4	Orang	13.497	13.259	12.375	12.621	13.148

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024



Berdasarkan tabel kesehatan bayi, bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) mengalami fluktuasi. Hal tersebut juga terjadi pada Ibu Hamil Kunjungan K4. Gizi buruk pada tahun 2022 sebanyak 2 dan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 3 orang. Sedangkan pada Cakupan Kunjungan Bayi berfluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, namun tidak terdapat data di tahun 2021. Sedangkan pada kolom Ibu Hamil Kunjungan K1 terdapat penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, pada tahun 2021 berjumlah 14.338 orang, dan Kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 14.497 orang dan menurun pada tahun 2023 menjadi 14.320 orang.

**C. Angka Kematian Bayi (AKB)**

**Tabel 2.48**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2019 –2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi	Per Seribu	1,3	-	3,7	4	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024

Angka kematian bayi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 1,3, meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,7. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 4 dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3.

**D. Angka Kematian Ibu (AKI)**

**Tabel 2.49**  
**Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu	Per Seribu	102	101	220	236	30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten Pamekasan, didapatkan angka kematian ibu di tahun 2019 sebesar 102, namun mengalami penurunan



pada tahun 2020 menjadi sebesar 101, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 220 dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 236. Sementara pada tahun 2023 turun drastis menjadi 30 kasus kematian ibu. Hal ini menandakan adanya kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta kesadaran para ibu hamil dalam memperhatikan kondisi kehamilan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus kematian ibu.

**E. Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas**

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**

Nama Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Tlanakan	2	3
Pademawu	2	4
Galis	1	1
Larangan	2	2
Pamekasan	2	6
Proppo	2	4
Palengaan	2	4
Pegantenan	2	1
Kadur	1	4
Pakong	1	2
Waru	2	1
Batumarmar	1	1
Pasean	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>36</b>

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Puskesmas di Kabupaten Pamekasan berjumlah 21 unit, sedangkan puskesmas pembantu berjumlah 36 unit.

**Tabel 2.51**  
**Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas**

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit	Unit	7	7	7	7	8
Puskesmas	Unit	20	22	21	21	21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024



Dikutip dari data dinas kesehatan kabupaten Pamekasan, pada tahun 2019 jumlah rumah sakit di kabupaten Pamekasan terhitung sejumlah 7 unit dan puskesmas sebanyak 20 unit. Pada tahun 2023 jumlah unit rumah sakit bertambah menjadi 8 unit dan puskesmas juga bertambah menjadi 21 unit.

**F. Tenaga Kesehatan**

**Tabel 2.52  
Tenaga Kesehatan 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perawat	Orang	588	1145	957	788	1.233
Jumlah Bidan	Orang	528	665	549	735	764
Jumlah Farmasi	Orang	15	50	BR	167	110
Jumlah Ahli Gizi	Orang	25	46	46	58	61
Jumlah Dokter Spesialis	Orang	55	66	83	61	59
Jumlah Dokter Gigi	Orang	23	24	42	38	28
Jumlah Dokter Umum	Orang	123	133	140	143	118

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perawat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Dari tahun 2019 sejumlah 588 orang, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2020 sejumlah 1.145 orang, pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 957 orang, pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 788 orang. Kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.233 orang.

Jumlah bidan cenderung fluktuatif dari tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2019 sejumlah 528 orang, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 665 orang, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah menjadi 549 orang, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 735 orang. Kemudian pada tahun 2023 menjadi 764 orang.

Jumlah farmasi di Kabupaten Pamekasan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun tahun 2019 sejumlah 15 orang dan pada tahun 2023 jumlah



farmasi meningkat cukup drastis sebesar 110 orang. Jumlah ahli gizi di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan sebagai bukti upaya pemerintah daerah untuk terus berusaha menyediakan sumber daya bagi tenaga kesehatan. Pada tahun 2019 sebanyak 25, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sejumlah 46 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 58 dan meningkat menjadi 61 orang pada tahun 2023.

Dari tabel tersebut di atas juga menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan terhadap jumlah Dokter spesialis, dokter gigi dan dokter umum. Jumlah dokter spesialis dari tahun 2019 – 2023 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 55 orang, meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 66 orang, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 83 orang, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 61 orang. Kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 59 orang. Jumlah dokter gigi juga mengalami fluktuasi dari tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2019 dokter gigi di Kabupaten Pamekasan berjumlah 23 orang, kemudian meningkat menjadi 24 orang, dan meningkat lagi menjadi 42 orang pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 38 orang. Kemudian turun kembali pada tahun 2023 menjadi 28 orang.

Jumlah dokter umum di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi juga. Tahun 2019 sebanyak 123 orang. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 133 orang, kemudian meningkat menjadi 140 orang pada tahun 2021, dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 143 orang. Kemudian turun kembali pada tahun 2023 menjadi 118 orang. Penurunan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pamekasan bisa disebabkan karena pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan banyak tenaga Kesehatan yang meninggal dunia.

**G. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

**Tabel 2.53**  
**Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Orang	2.632	2.808	2.688	2.573	2.560

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebanyak 2.632 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 2.808 orang. Pada tahun 2021 sampai 2023 kembali mengalami penurunan sebanyak 2.633 orang, 2.573 orang, dan 2.560 orang.

**H. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan**

**Tabel 2.54**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Orang	13.586	13.496	13.111	13.299	13.118

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2024

Cakupan pertolongan persalinan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan sebanyak 13.586 orang, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebanyak 13.496 orang dan 13.111 orang, sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 13.299 orang dan tahun 2023 menurun menjadi 13.118 orang.

**2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan bidang yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan



infrastruktur dan tata ruang suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan upaya yang penting dalam membangun kualitas standar kehidupan masyarakat terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan potensial dan strategis suatu wilayah. Selain itu, penyediaan infrastuktur dampak menciptakan kesejahteraan dengan meningkatkan aksesibilitas untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas masyarakat.

Ketidaksediaan dan ketidakmerataan infrastruktur dapat menyebabkan kesenjangan antara wilayah dan membuat wilayah tersebut menjadi daerah tertinggal. Keterbatasan sarana dan parasarana publik menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam memajukan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pembangunan wilayah dengan mengembangkan infrastruktur agar dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan wilayah, pemerintah perlu memperhatikan penataan ruang. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan perencanaan tata ruang dapat menimbulkan masalah yang kompleks dalam jangka panjang.

Pelayanan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada urusan pekerjaan umum dan tata ruang diimplementasikan melalui pemenuhan indikator-indikator yang digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja pemerintah dalam bidang terkait. Indikator-indikator tersebut dicapai melalui penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah secara konkret. Berikut merupakan capaian indikator urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

## **A. Panjang Jalan**

Mengacu kepada Keputusan Menteri PUPR nomor: 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, panjang jalan Nasional yang melintasi Kabupaten Pamekasan adalah sepanjang

84,35 km. Sedangkan Jalan Provinsi yang melintasi Kabupaten Pamekasan jika mengacu kepada Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/210/KPTS/0.13/2023 adalah sepanjang 54,95 km. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.21**  
**Peta Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten Pamekasan**



Sumber: Bapperida Kabupaten Pamekasan (diolah)



**Tabel 2.55**  
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Tahun 2019–2023**

Kondisi Jalan	Satuan	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Baik	Km	279.889	286.435	365.360	320.075	221,96
Sedang	Km	112.926	107.846	33.530	85.221	109,84
Rusak	Km	30.268	76.028	48.830	50.065	117,80
Rusak Berat	Km	89.278	42.050	64.650	56.998	62,76
<b>Jumlah</b>	Km	<b>512.36</b>	<b>512.36</b>	<b>512.36</b>	<b>512.36</b>	<b>512,36</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan mantap di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa persentase kondisi jalan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 64,76 persen dari 512,359 km. Jika dilihat bahwa kondisi jalan yang rusak dan rusak berat bertambah pada tahun 2023. Kondisi jalan rusak meningkat dari 50,065 km pada tahun 2022 menjadi 117,805 km pada tahun 2023. Kemudian, kondisi jalan rusak berat meningkat dari 56,998 km pada tahun 2022 menjadi 62,755 km pada tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mempertahankan laju pemeliharaan jalan berbanding kerusakan jalan yang lebih cepat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu mengupaya melakukan rekontruksi untuk jalan yang rusak parah, memperkuat struktur jalan dengan menambah lapisan baru atau memperlebar jalan, membatasi beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut, membuat saluran drainase yang baik karena saluran drainase yang baik dapat mencegah air menggenang di jalan dan merusak struktur jalan, menetapkan skala prioritas jalan, serta meningkatkan koordinasi di tingkat provinsi dan kementerian dengan mempertimbangkan pembatasan muatan barang kendaraan ketika melintas apabila diperlukan. Sedangkan panjang jalan kabupaten dan kondisi jalan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 – 2023 sangatlah beragam pada setiap kecamatan. Selama enam tahun panjang jalan pada 11 kecamatan tidak berubah. Realiasi selama enam tahun tersebut masih sama seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.56**  
**Panjang Jalan per Kecamatan Tahun 2019–2023**

Kecamatan	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Batumarmar	Km	44,020	44,020	44,020	44,020	44,020
Galis	Km	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
Kadur	Km	20,461	20,461	20,461	20,461	20,461
Larangan	Km	46,725	46,725	46,725	46,725	46,725
Pademawu	Km	56,751	56,751	56,751	56,751	56,751
Pakong	Km	27,127	27,127	27,127	27,127	27,127
Palengaan	Km	48,303	48,303	48,303	48,303	48,303
Pamekasan	Km	83,969	83,969	83,969	83,969	83,969
Pasean	Km	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350
Pegantenan	Km	26,763	26,763	26,763	26,763	26,763
Proppo	Km	38,335	38,335	38,335	38,335	38,335
Tlanakan	Km	41,025	41,025	41,025	41,025	41,025
Waru	Km	43,730	43,730	43,730	43,730	43,730
Jumlah	Km	512,359	512,359	512,359	512,359	512,359

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

Jika dilihat panjang jalan di Kabupaten Pamekasan yang paling panjang terletak di Kecamatan Pamekasan sebesar 83,969 km kemudian diikuti oleh Kecamatan Pademawu sebesar 56.751 km. Secara data, panjang jalan kabupaten pada setiap kecamatan tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 5 tahun belakang yakni di tahun 2019-2023. jika dilihat dari data di atas maka dapat panjang jalan kabupaten paling pendek berada pada Kecamatan Pasean dengan panjang sebesar 16.350 km.

**Tabel 2.57**  
**Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Km	27.590	32.838	34.274	25.489	221.964

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Panjang jalan kota dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan, sebesar 27.590 km, 32.832 km, dan 34.274 km. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 25.489 km, dan meningkat secara drastis pada tahun 2023 menjadi 221.964 km.

## B. Proporsi Jembatan

**Tabel 2.58**  
**Proporsi Jembatan dalam Keadaan Baik Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Jembatan dalam keadaan baik	Unit	165	165	165	165	165

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah jembatan dalam kondisi baik dari tahun 2019 hingga 2023 stagnan atau tidak ada penambahan ataupun penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan pemeliharaan secara rutin sehingga jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik tidak berkurang.

## C. Panjang Jalan (km) yang Memiliki Trotoar dan Drainase

**Tabel 2.59**  
**Panjang Jalan (km) yang Memiliki Trotoar dan Drainase**  
**Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	22.258	22.258	31.828	50.335	n.a
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pamekasan	Km	512.359	512.359	512.359	512.359	512.359

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

Di Kabupaten Pamekasan, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada tahun 2020 yaitu 22.258 km. Namun pada tahun 2021 naik menjadi 31.828. Pada tahun 2022 meningkat secara drastis di angka 50.335. Sedangkan perkembangan kondisi jalan dan jembatan stagnan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu 512.359 km.



**D. Kondisi Jaringan Irigasi**

**Tabel 2.60**  
**Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Jaringan Irigasi	Ha	3.025	3.095	3.109	3.317	3.730
Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	81,09	82,96	83,34	84,09	88

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

Rasio jaringan irigasi mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 sebesar 3.025 Ha, di tahun 2020 sebanyak 3.095 Ha, pada tahun 2021 di angka 3.109 Ha dan terus bertambah pada tahun 2022 sebesar 3.317 Ha serta di tahun 2023 menjadi 3.730 Ha. Sedangkan persentase irigasi juga mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 irigasi dalam kondisi baik sebesar 81,09, di tahun 2020 sebanyak 82,96, di tahun 83,34 dan terus bertambah sebanyak 84,09 di tahun 2022. Pada tahun 2023 sebesar 88 persen kondisi irigasi baik yang ada di Kabupaten Pamekasan.

**E. Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai Dengan RTRW**

**Tabel 2.61**  
**Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	Persen	87	98	99,86	99,94	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase luas Kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 presentase RTRW sebanyak 87%, pada tahun 2020 sebanyak 98%, 99,86% pada

tahun 2021, dan 99,94 pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 persentase kesesuaian tata ruang sesuai RTRW mencapai 100%.

**2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**A. Ketersediaan Rumah Layak Huni**

**Tabel 2.62**  
**Rumah Layak Huni (unit) Tahun 2018–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Ketersediaan Rumah layak huni (unit)	Unit	210.976	211.620	212.468	214.210	214.814

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, 2024

Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 sebanyak 210.976 unit, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 211.620 unit, pada tahun 2021 sebanyak 212.467 unit. Ketersediaan rumah layak huni terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 214.814 unit.

**B. Persentase Kawasan Kumuh**

**Tabel 2.63**  
**Kawasan Kumuh Tahun 2022–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	10,41	127,25	127,25	101,31	74,53
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Ha	10,41	0	25,94	26,78	37,26
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100%	0	20,38%	26,43%	50,48%

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase kawasan kumuh yang ditangani mulai tahun 2020 meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021 kawasan kumuh yang ditangani sebesar 20,38%, kemudian pada tahun 2022 yang ditangani menjadi sebesar 26,43%. Pada tahun 2022, dari jumlah luasan kumuh dibawah 10 ha sebesar 101,31 ha, yang ditangani seluas 26,78 ha. Pada tahun 2023 persentase luas kawasan kumuh yang tertangani sebesar 50,48%, angka ini meningkat cukup signifikan mengingat capaian ini terbilang tinggi.

**Tabel 2.64**  
**Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2020–2023**

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum	Persen	78,87	94,53	98,33	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Persentase rumah tangga pengguna air minum di kabupaten pamekasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai 78,87%, tahun 2021 mencapai 94,53% dan tahun 2022 mencapai 98,33%.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020–2023**

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase rumah tinggal Bersanitasi	Persen	91,24	93,68	94,94	95,35

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Persentase rumah tinggal bersanitasi di kabupaten pamekasan setiap tahun selalu mengalami peningkatan, dimana pada pada tahun 2023 mencapai 95,35%, meningkat 0,41% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 94,94%.



### 2.4.1.5 Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### A. Perlindungan Masyarakat dan Pamong Praja

**Tabel 2.66**  
**Linmas dan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023**

Keterangan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang	62	69	52	41	44
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Persen	0,57	0,57	0,51	0,47	0,46
Jumlah Satpol PP	Orang	53	50	51	47	46
Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspon Kurang 15 menit	Persen	61	92	90	80	82.5

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah Linmas dan kasus kebakaran yang direspon mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Jumlah Linmas per tahun 2019 sebanyak 62 orang, pada tahun 2020 sebanyak 69 orang, pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga di angka 52 (per 10.000 penduduk), dan pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi hingga di angka 41 orang, pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 44 orang. Pada tahun 2019 rasio satpol PP sebesar 0,57 persen dengan jumlah 53 orang. Pada tahun 2020 rasio satpol PP stagnan namun jumlahnya mengalami penurunan hingga 50 orang. Pada tahun 2021 rasio satpol PP sebesar 0,51 persen dengan jumlah 51 orang. Pada tahun 2022 rasio satpol PP menurun hingga di angka 0,47 persen dengan jumlah 47 orang. Pada tahun 2023 rasio satpol pp Kembali mengalami penurunan menjadi 0,46 persen dengan jumlah satpol pp sebanyak 46 orang.

Kasus kebakaran yang direspon pada tahun 2019 sebanyak 61 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 92 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi hingga pada angka 90 persen, dan cenderung konsisten menurun pada tahun 2022 hingga 80 persen, dan Kembali meningkat menjadi 82,5 persen pada tahun 2023.

**B. Persentase Penegakan PERDA**

**Tabel 2.67**  
**Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda	Persen	100	42	100	100	72
Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	Persen	70	28	94	100	100

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, 2024

Tingkat penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2019 adalah 100%, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 42%, dan kembali naik di tahun 2021 dan 2022 menjadi 100%. Namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 72%. Sedangkan penurunan gangguan ketertiban umum mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 70%, di tahun 2020 menurun menjadi 28%, dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 94% dan di tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 100%.

**Tabel 2.68**  
**Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Data kejadian bencana alam (kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dsb)	Kejadian	396	407	293	615	398
Angka korban bencana alam	Jiwa	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Data kejadian bencana alam mulai dari kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang, gempa bumi, kekeringan dsb yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sangat fluktuatif. Hal ini terlihat dari data kejadian bencana di tahun 2022 sebesar 615 kejadian, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2021 sebesar 293



kejadian. Pada tahun 2023 data kejadian alam kembali mengalami penurunan sebesar 398 kejadian.

### **C. Indeks Kapasitas Bencana**

**Tabel 2.69**  
**Indeks Kapasitas Bencana Tahun 2020–2023**

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indeks kapasitas bencana	Indeks	0.20	0.63	0.79	0.79

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Indeks kapasitas bencana tahun 2020 berada pada angka 0.20, angka tersebut naik pada tahun 2021 menjadi 0.63. Di tahun 2022 dan 2023, naik menjadi 0.79.

**Tabel 2.70**  
**Capaian SPM Urusan Bencana Tahun 2020–2022**

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persen	n.a	90.89	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM urusan bencana tahun 2021 sebesar 90.89 Persen. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan menjadi 100 Persen.

#### **2.4.1.6 Sosial**

Urusan sosial merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam urusan sosial Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam mengatur beberapa aspek yang masuk dalam ranah sosial seperti pelayanan sosial, penanggulangan masalah sosial, dan urusan wajib yang ada dalam bidang sosial lainnya. Urusan sosial juga mengarah pada pemenuhan kesejahteraan sosial bagi masyarakat seperti pendistribusian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana serta hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial lainnya.



Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakan urusan sosial sebagai bagian dari pelayanan wajib dasar yang telah diturunkan dari Pemerintah Pusat. Adapun beberapa indikator yang diampu oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Sosial beserta dengan capaiannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

**Tabel 2.71**  
**Indikator Urusan Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)	Orang	83.691	115.212	104.749	118.077	116.568
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100	100	100	95,68	96,48
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan	Orang	592.487	595.059	529.000	584.328	653.124
Jumlah TAGANA	Orang	42	46	47	46	58
Jumlah TAGANA yang ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya	Orang	39	40	45	40	41
Jumlah TAGANA bersertifikat	Orang	1	40	45	40	41

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 2024

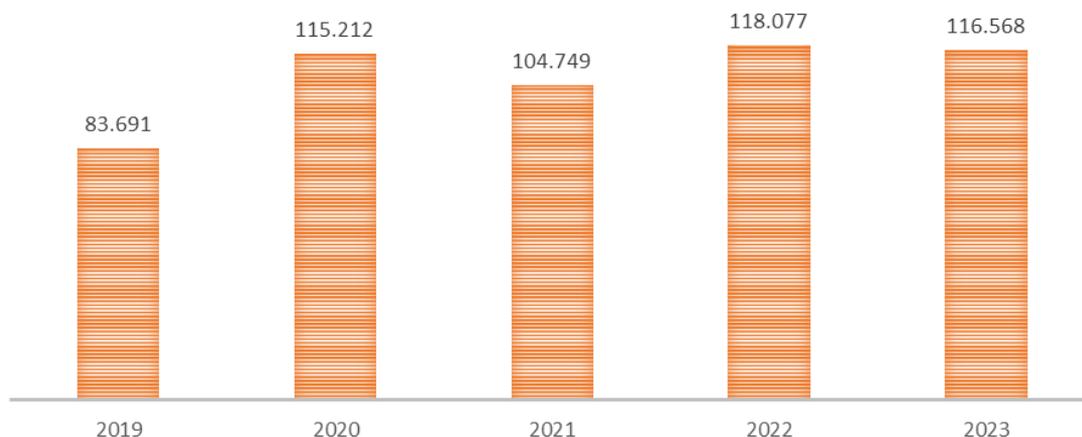
Dalam 5 tahun terakhir permasalahan sosial di Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan meningkatnya jumlah PPKS yang disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 sehingga jumlah PPKS pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan juga mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan keluarga dalam memenuhi pendapatan yang mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Selain itu jumlah penerima bantuan jaminan Kesehatan juga menjadi salah satu masalah yang sering terjadi, hal ini

dikarenakan masih adanya masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBIJK) .

### **A. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Indikator Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) sendiri merupakan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 yang diarahkan harus menjadi indikator kinerja dari tujuan OPD pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023. Untuk melihat jumlah PPKS di Kabupaten Pamekasan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Gambar 2.22**  
**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 (Orang)**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah PPKS di Kabupaten Pamekasan selama periode 5 tahun terakhir mengalami cenderung meningkat dimana pada tahun 2017 tercatat jumlah PPKS sebanyak 82.785 orang menjadi 116.568 orang pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tingginya kemiskinan dan kesenjangan sosial di



Kabupaten Pamekasan. Peningkatan jumlah PPKS ini disebabkan karena data faktual belum dapat disajikan, kemudian saat terjadinya pandemic Covid-19 terdapat penambahan atau perluasan penerima dan berbagai jenis Bantuan Sosial sehingga jumlah penerima bantuan sosial atau DTKS menjadi indikator jumlah PPKS mengalami kenaikan. Disamping itu, kurangnya akses terhadap layanan kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperkuat program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial, serta memberdayakan PPKS agar dapat hidup mandiri.

**Tabel 2.72**  
**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

Sub Elemen	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anak Balita Telantar	Orang	-	1	-	1	-
Anak Terlantar	Orang	446	792	1139	899	829
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang	18	19	22	39	22
Anak Jalanan	Orang	-	11	11	11	0
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Orang	-	29	29	29	55
Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Orang	38	57	79	83	11
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	176	307	497	497	22
Lanjut Usia Telantar	Orang	-	662	662	500	6318
Penyandang Disabilitas	Orang	-	429	429	584	275
Tuna Susila	Orang	-	-	-	-	-
Gelandangan	Orang	-	-	-	-	-
Pengemis	Orang	10	10	42	63	40
Pemulung	Orang	-	-	-	-	-
Kelompok Minoritas	Orang	-	-	-	-	-
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	-	-	-	-	-
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	-	-	-	-	-



Sub Elemen	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	45	50	50	280	71
Korban Trafficking	Orang	-	-	-	-	-
Korban Tindak Kekerasan	Orang	-	-	-	-	-
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	-	-	-	-	-
Korban Bencana Alam	Orang	177	425	373	529	463
Korban Bencana Sosial	Orang	23	29	8	15	41
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	-	-	-	-	-
Fakir Miskin	Orang	82.758	112.391	101.408	114.547	108.421
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	Orang	-	-	-	-	-
Komunitas Adat Terpencil	Orang	-	-	-	-	-

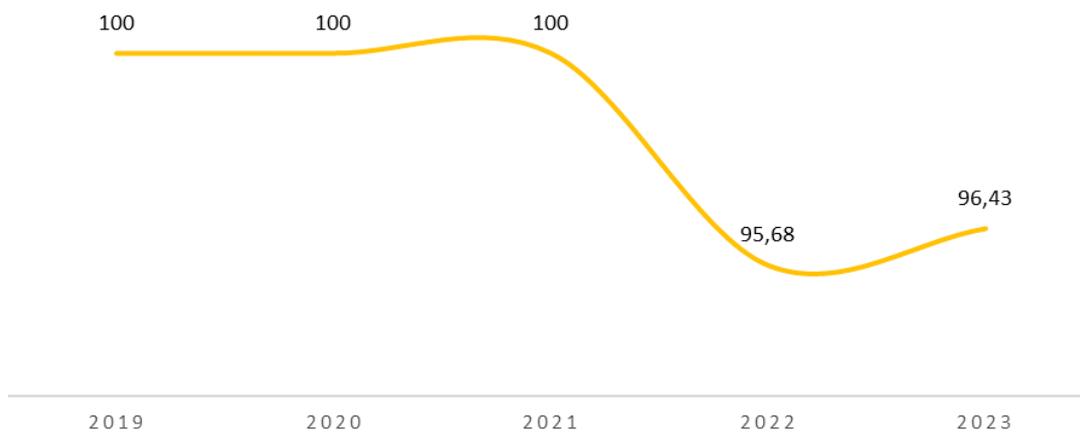
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 2024

Adapun kelompok PPKS paling banyak di Kabupaten Pamekasan adalah kelompok fakir miskin dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai 108.421 orang pada tahun 2023. Disamping itu, ada kelompok lanjut usia terlantar dimana tercatat sejak tahun 2020 sebanyak 662 orang meningkat menjadi 6.318 orang pada tahun 2023.

**b. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti**

Kebutuhan dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis seperti a) Penyediaan makanan, sandang; b) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; c) Penyediaan alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial; d) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat; e) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; f) Pemberian layanan data dan pengaduan; pemberian layanan rujukan.

**Gambar 2.23**  
**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 (Persen)**



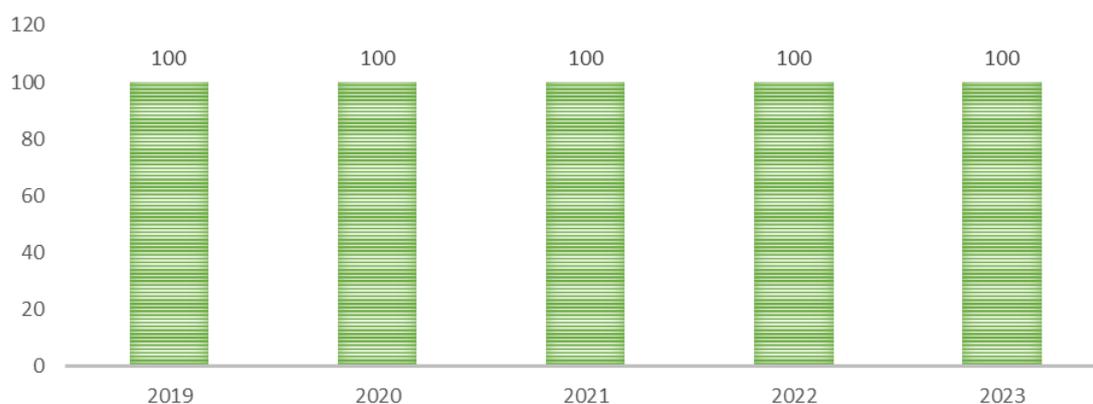
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 2024

Selama tahun 2019 hingga 2021 keseluruhan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Dalam 2 tahun terakhir, kebutuhan dasar tersebut belum menjangkau keseluruhan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. Hal ini perlu adanya koordinasi antar 97ocial97 terkait masih perlu diperkuat untuk memastikan semua kelompok rentan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Disamping itu, Pemerintah dapat membuat 97ocial informasi terpadu untuk memudahkan pendataan dan monitoring kelompok rentan, mengembangkan program inovatif untuk membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti program *home care* berfokus pada pemenuhan kebutuhan medis dan non medis di rumah pasien dan *community-based rehabilitation* untuk membantu penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup mandiri.

### **C. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah**

Bencana alam memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat yang terlibat di dalamnya, tidak sedikit masyarakat yang bahkan sampai kehilangan harta benda dikarenakan wilayahnya terkena bencana alam. Oleh karena itu korban bencana alam merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kebutuhan dasar sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana maka pemerintah biasanya memberikan bantuan berupa tempat tinggal sementara, makan dan pakaian untuk digunakan. Adapun dibawah ini merupakan capaian persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah yang ada di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut:

**Gambar 2.24**  
**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2023 (Persen)**



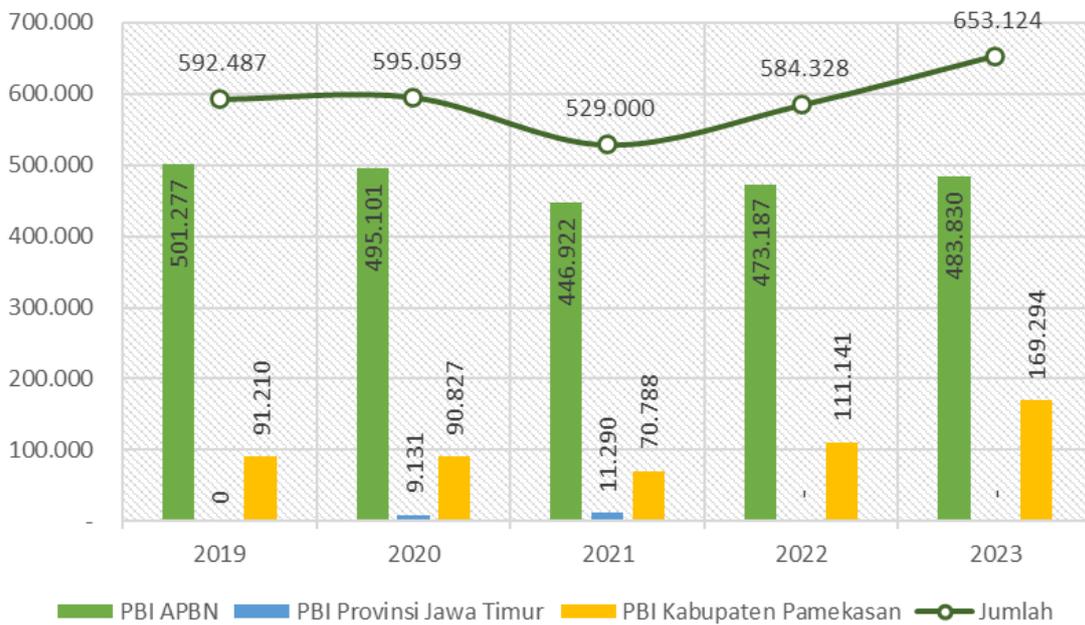
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 2024

Secara keseluruhan korban bencana alam dan masyarakat di daerah Kabupaten Pamekasan sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal perlindungan dan jaminan masyarakat selama periode 5 tahun terakhir.

**D. Jumlah Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan**

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan iuran kepada masyarakat kurang mampu agar dapat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

**Gambar 2.25**  
**Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan menurut Sumber Dana**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah penerima iuran bantuan jaminan kesehatan di Kabupaten Pamekasan melonjak cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 653.124 orang. Adapun jenis jaminan kesehatan yang paling banyak diterima bersumber dari PBI APBN mencapai 483.830 orang pada tahun 2023. Meskipun demikian, persentase penerima bantuan jaminan Kesehatan masih perlu ditingkatkan dan diharapkan semua masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan dapat terdaftar sebagai penerima PBI JK dan mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas.



### E. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah sebuah wadah bagi para relawan sosial yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

**Tabel 2.73**  
**Jumlah TAGANA, TAGANA yang Ditingkatkan Kemampuan dan Kapasitasnya, serta TAGANA Bersertifikat di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**

Sub Elemen	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah TAGANA	Orang	42	46	47	46	58
Jumlah TAGANA yang ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya	Orang	39	40	45	40	41
Jumlah TAGANA bersertifikat	Orang	1	40	45	40	41

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah keseluruhan TAGANA di Kabupaten Pamekasan selama periode 5 tahun mengalami peningkatan menjadi 58 orang pada tahun 2023 dimana 41 diantaranya sudah bersertifikat. Adapun upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah adalah mendukung upaya peningkatan jumlah TAGANA bersertifikat melalui kebijakan dan pendanaan. Dinas Sosial memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan TAGANA, dan BPBD membantu dalam proses sertifikasi TAGANA.



## 2.4.2 Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 2.4.2.1 Ketenagakerjaan

**Tabel 2.74**  
**Hasil Capaian Fokus Ketenagakerjaan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	669.078	687.887	695.933	703.829	675.641
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,13	69,82	65,88	73,59	75,81
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	57,12	59,42	53,77	65,15	68,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,32	3,49	3,1	1,4	1,74
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,68	96,51	96,9	98,56	98,26
Upah Minimum Kabupaten	(Ribu Rp)	1.763	1.913	1.938	2.133	2.135
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	tenaga kerja	n.a	n.a	n.a	4.403	6.433

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Penduduk usia kerja mengalami peningkatan dari tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 675.641 jiwa. Hal tersebut juga sama dengan upah minimum kabupaten, yang meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022, dari 1.763 hingga 2.133 (Ribu Rp). Sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesempatan kerja mengalami fluktuatif. Tingkat partisipasi Angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 75,81%. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan dalam 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 57,12% kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 68,10%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 1,74%, dan tingkat kesempatan



kerja tahun 2023 sebesar 98,26. Pada Tahun 2022, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebanyak 4.403 tenaga kerja terus meningkat di tahun 2023 menjadi 6.433 tenaga kerja.

## **2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungannya.

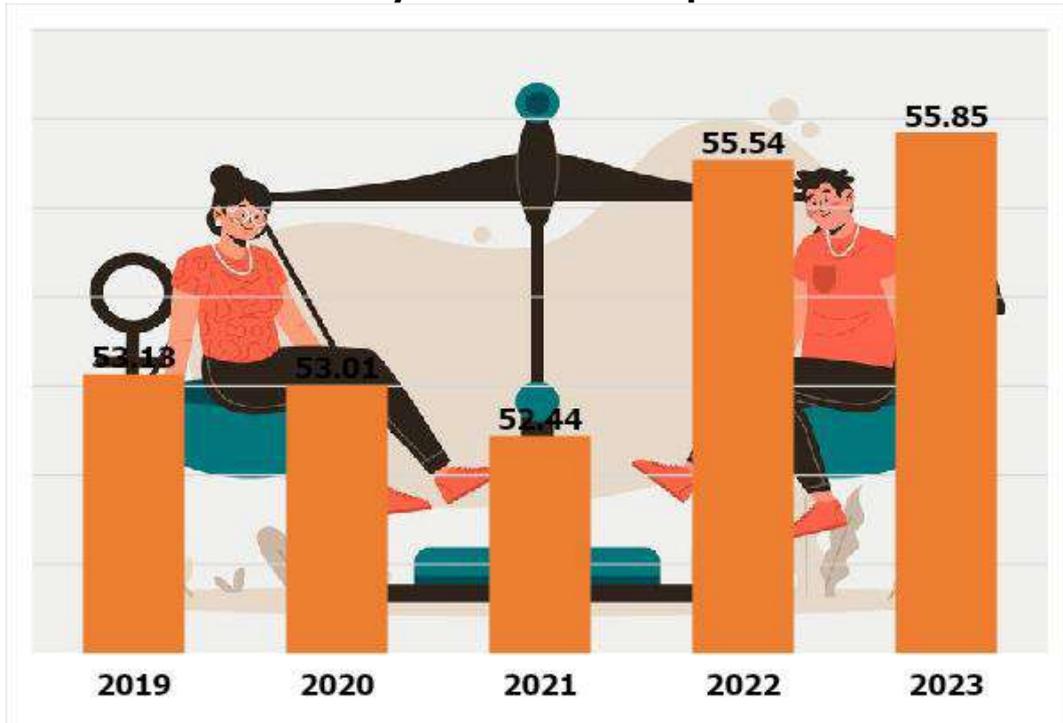
Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

### **A. Indeks Pemberdayaan Gender**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan penyetaraan gender perlu adanya peningkatan SDM perempuan, sehingga menjadi insan yang mandiri agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Selain itu perlu partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, serta peran lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan terutama organisasi perempuan.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan keterlibatan wanita secara aktif dapat berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG ini menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

**Gambar 2.26**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan gambar diatas, Indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019 sampai 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 53,13, kemudian turun menjadi 53,01 pada tahun 2020, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 52,44. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 55,54 dan kembali meningkat pada tahun 2023 sampai 55,85.

## B. Capaian Kinerja terkait Perempuan dan Anak

**Tabel 2.75**  
**Capaian Kinerja terkait Perempuan dan Anak Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Keterlibatan perempuan di parlemen	%	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44

Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan, 2024

Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2019 sampai tahun 2023 sebesar 4,44%.



**C. Tingkat Kerawanan Kekerasan pada Perempuan**

**Tabel 2.76**  
**Tingkat Kerawanan Kekerasan pada Perempuan Tahun 2019–2023**

<b>Keterangan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten Pamekasan	Persen	0,008	0,009	0,07	0,005	0,008
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	Jumlah	19	24	17	14	19
Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 Tahun) Kabupaten Pamekasan	Jumlah	245.068	260.982	240.022	257.232	239.000
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	6,04	4,39	6,49	7,31	9,38
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Jumlah	28	19	28	32	42
Rasio KDRT	Persen	6,04	4,39	6,49	7,31	9,38

Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 0,008, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,009, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 0,07, sedangkan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 0,005 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,008. Jumlah anak korban kekerasan juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 sejumlah 19 anak, meningkat di tahun 2020 yakni 24 anak, dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 17 anak kemudian pada 2022 juga mengalami penurunan menjadi 14 anak. Sedangkan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 19 anak. Pada jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) kabupaten pamekasan kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 jumlah anak mengalami penurunan menjadi 239.000 dari tahun sebelumnya sebesar 257.232. Rasio Kekerasan terhadap perempuan,



termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun sebesar 9,38, angka ini meningkat dari 4 tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan paling tinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 42 perempuan. Pada rasio KDRT angka yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 9,38%, rasio ini juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

**2.4.2.3 Pangan**

**A. Ketersediaan Cadangan Pangan**

**Tabel 2.77**  
**Ketersediaan Cadangan Pangan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	190	189	190	170	16.2
Jumlah cadangan pangan	Ton	129.756	128.934	129.740	113.952	2.521
Jumlah kebutuhan pangan	Ton	68.208	68.216	68.224	67.224	15.552

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Persentase ketersediaan pangan mengalami fluktuatif pada tahun 2019 hingga 2023. Yang mana di tahun 2019 sejumlah 190 mengalami penurunan di tahun 2020 sejumlah 189, di tahun 2021 mengalami kenaikan 190, dan di tahun 2022 mengalami penurunan 170 serta mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 16,2. Sama halnya dengan jumlah cadangan pangan dan kebutuhan pangan. Dengan jumlah cadangan pangan di tahun 2019 jumlah cadangan pangan sebesar 129.756 begitu juga jumlah kebutuhannya sebesar 68.208, di tahun 2020 jumlah cadangan pangan mengalami penurunan sebesar 128.934 namun jumlah kebutuhannya meningkat sebesar 68.216, di tahun 2021 jumlah cadangan pangan mengalami peningkatan lagi sebesar 129.740 namun jumlah kebutuhannya meningkat sebesar 68.224, dan di tahun 2022 jumlah cadangan pangan mengalami penurunan lagi sebesar 113.952

namun jumlah kebutuhan panganya menurun sebesar 67.224. Pada tahun 2023 jumlah cadangan menurun drastis menjadi 2.521 dengan jumlah kebutuhan pangan sebesar 15.552.

**Tabel 2.78**  
**Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2022**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Skor PPH	kcal/kap/hari	68.2	70.5	67.4	71.7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Skor pola pangan harapan tahun 2019 – 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 skor PPH berada pada angka 68.2 kkal/kap/hari, mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 70.5 kkal/kap/hari. Namun kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 67.4 kkal/kap/hari dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 71.7 kkal/kap/hari.

**Tabel 2.79**  
**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Pamekasan 2017-2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Pamekasan	Persen	9,29	9,83	11,88	12,63	9,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan kabupaten pamekasan pada tahun 2023 mencapai 9,43 Persen, angka ini berada dibawah capaian pada tahun 2022 yang mencapai 12,63 Persen dengan selisih 3,2 Persen.

**Tabel 2.80**  
**Skor AKG Tahun 2021–2022**

Indikator	Satuan	2021	2022
Angka Kecukupan Energi (AKE)	Persen	89.4	85.1
Angka Kecukupan Protein (AKP)	Persen	94.6	88.8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2021 sebesar 89.4%, dan tahun 2022 sebesar 85.1%. Sedangkan untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2021 sebesar 94.6.

#### 2.4.2.4 Pertanian

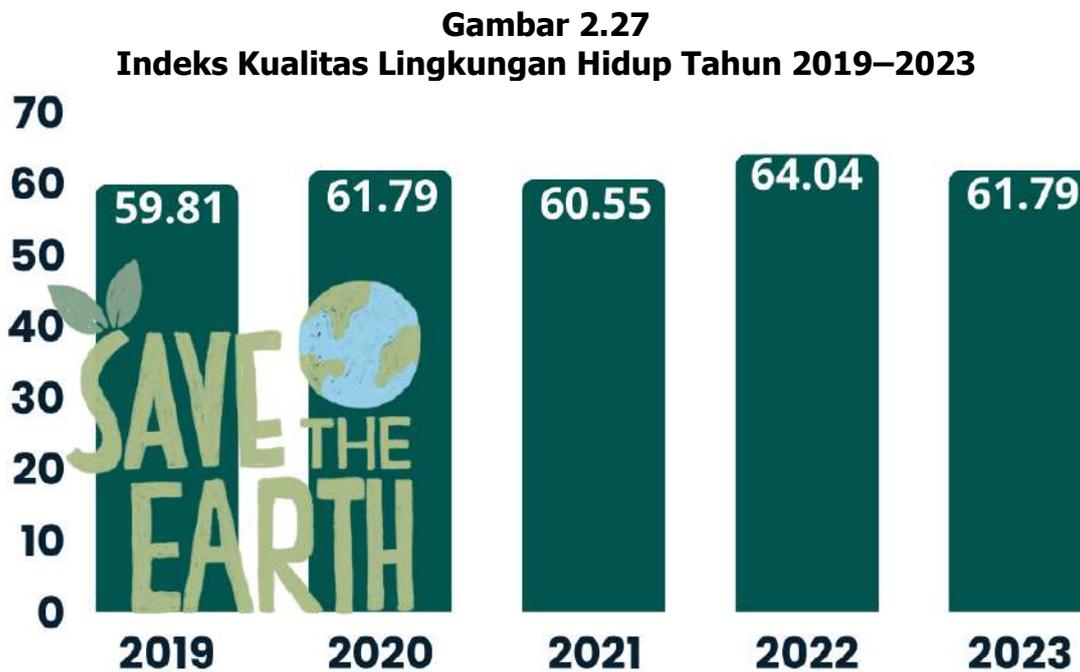
**Tabel 2.81**  
**Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan menurut Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 – 2022**

Uraian	Satuan	2021	2022
Hak Milik	Sertifikat	26.934	15.607
Hak Guna Bangunan	Sertifikat	84	322
Hak Guna Usaha	Sertifikat	-	-
Hak Pakai	Sertifikat	250	303
Jumlah	Sertifikat	27.268	16.232

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2023

Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan menurut status kepemilikan hak milik pada tahun 2021 sebanyak 26.934 sertifikat. Tahun 2022 sebanyak 15.607 sertifikat. Untuk hak guna bangunan pada tahun 2021 sebanyak 84 sertifikat, naik di tahun 2022 menjadi 322 sertifikat. Sedangkan untuk hak pakai di tahun 2021 sebesar 250 sertifikat, di tahun 2022 sebanyak 303 sertifikat.

#### 2.4.2.5 Lingkungan Hidup



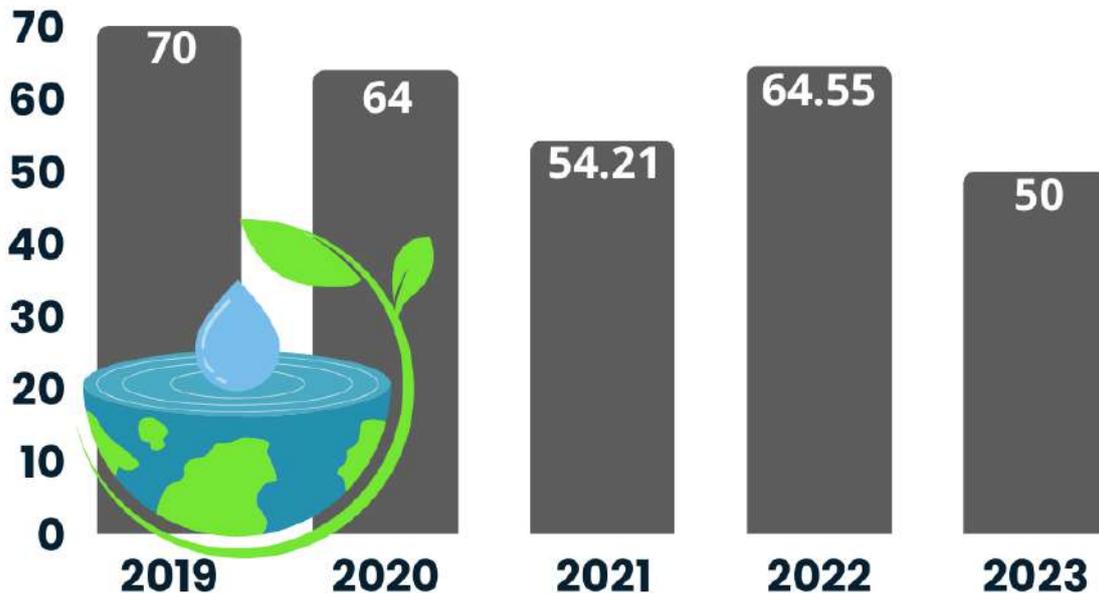
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup, data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pamekasan pada tahun 2019 mencapai 59,81. Sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 61,79, namun kembali menurun di tahun 2021 menjadi 60,55. Di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 64,04. Sayangnya pada tahun 2023 turun menjadi 61,79.

##### A. Indeks Kualitas Air

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas air ini menurut Lampiran Permendagri 86/2017 didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks pencemaran. Hal tersebut sama dengan data yang ada di Kabupaten Pamekasan, tetapi data indeks kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan telah diolah dan menggunakan formula dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai dengan indikator indeks kualitas air pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Oleh karena itu, satuan pada indikator ini disesuaikan dengan data yang ada.

**Gambar 2.28**  
**Indeks Kualitas Air Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan data yang ada Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 yaitu mencapai 70, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 64, dan pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 54,21, sedangkan naik drastis pada tahun 2022 menjadi 64,55. Sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 50 poin.

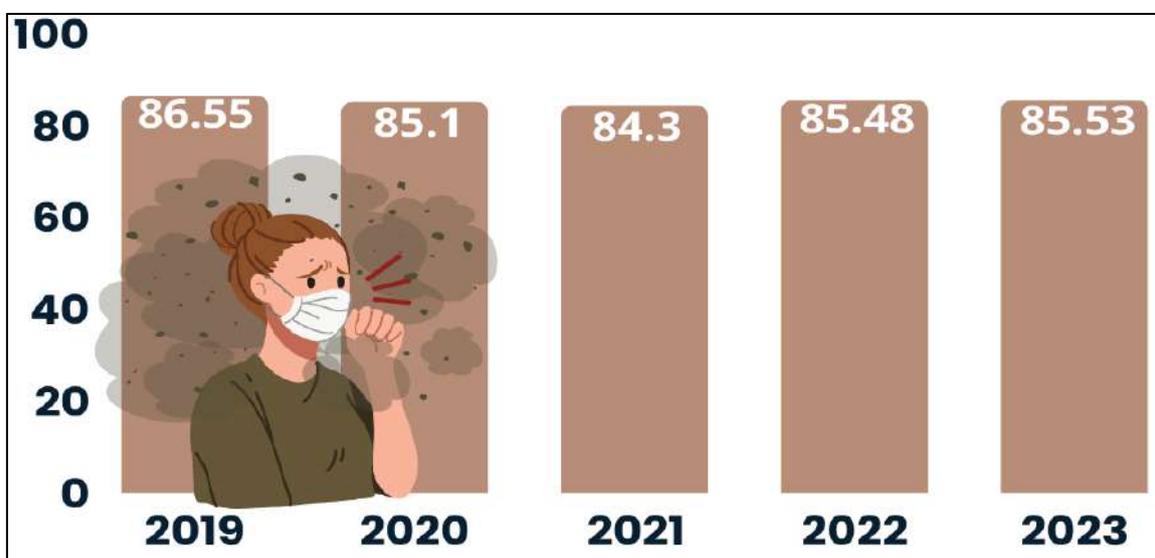
Penyebab menurunnya Indeks Kualitas Air disebabkan karena masih tingginya beban pencemaran disungai disebabkan banyak UMKM di Kabupaten Pamekasan yang belum mempunyai IPAL. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 7 titik pencemaran lingkungan di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu, Upaya yang dapat dilakukan dengan membentuk komunitas peduli sungai yang melibatkan masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.

## **B. Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara disuatu daerah. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat pencemaran udara berdasarkan sejumlah parameter seperti konsentrasi

polutan udara seperti Particulate Matter (PM10 dan PM2.5), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), dan ozon (O<sub>3</sub>). Melalui pengukuran IKU, dapat diketahui apakah kualitas udara tersebut memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Jika IKU menunjukkan nilai yang tinggi, hal ini dapat mengindikasikan adanya pencemaran udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

**Gambar 2.29**  
**Indeks Kualitas Udara Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2024

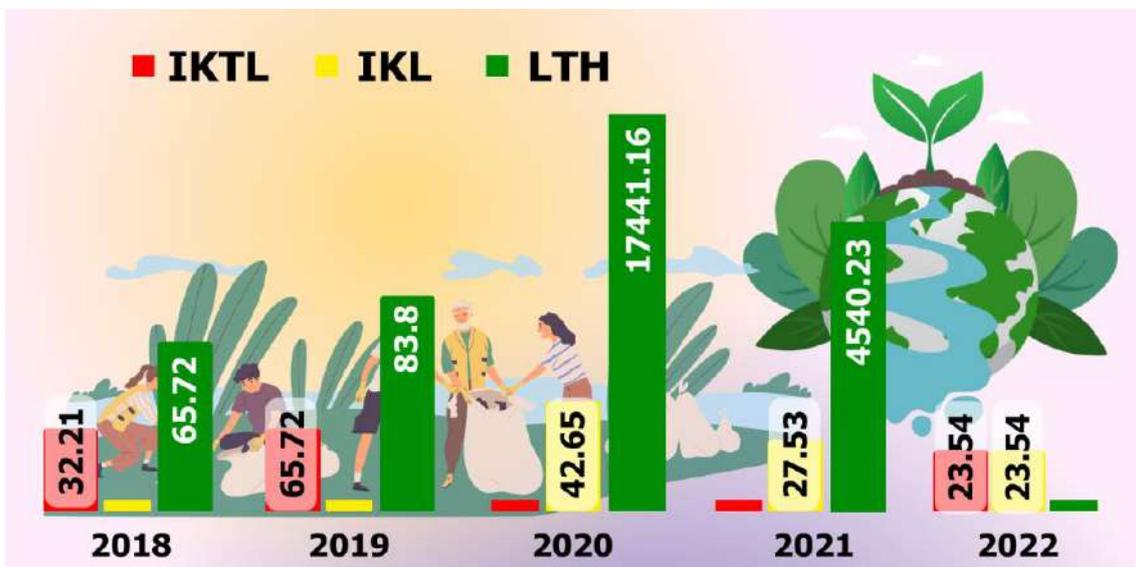
Capaian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan sebesar 85,53 masuk kategori Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Pamekasan masih dalam kondisi baik. Upaya untuk menjaga kualitas udara yang baik di Kabupaten Pamekasan meliputi pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengelolaan limbah industri, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kualitas udara di

Kabupaten Pamekasan dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan dan lingkungan.

### C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH) adalah indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan, termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial.

**Gambar 2.30**  
**Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018–2022**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2023

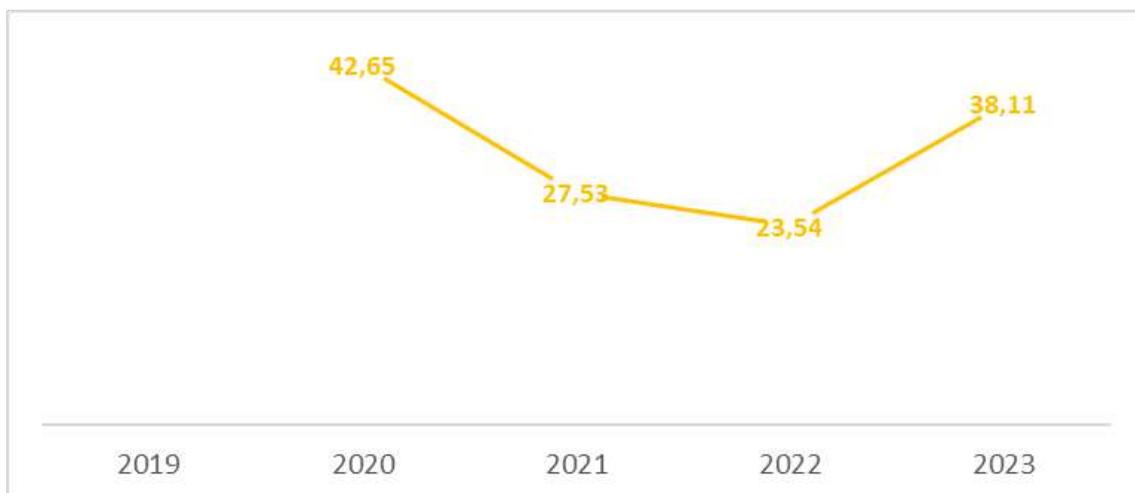
Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami stagnan yaitu 32.32, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 23.54. Indeks Kualitas Lahan mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 sebesar 42.65, disusul dengan 2021 sebesar 27.53, dan 23.54 pada tahun 2022. Sedangkan untuk Luas Tutupan Lahan mengalami peningkatan sejak 2018 hingga 2020, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 4.540,23 ha. Rendahnya capaian ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan sehingga berkurangnya tutupan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu melakukan pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan secara up to date untuk mengetahui kondisi lahan di Kabupaten Pamekasan. Perlu dilakukan

langkah-langkah untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan, seperti penegakan peraturan terkait penggunaan lahan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan ruang terbuka hijau, serta penerapan tata ruang yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan capaian IKTL di Kabupaten Pamekasan dapat meningkat sehingga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Penggunaan IKL sangat penting dalam perencanaan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengetahui kualitas lahan, pengambil kebijakan dapat merencanakan penggunaan lahan yang tepat sesuai dengan potensinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan penggunaan lahan tersebut.

**Gambar 2. 31**  
**Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2024

Capaian Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Pamekan selama periode 4 tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2023 capaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 38,11 masuk kategori Buruk. Rendahnya



capaian ini disebabkan karena banyaknya pengurangan tutupan lahan sehingga berkurangnya tutupan ruang terbuka hijau. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan terhadap perubahan tutupan lahan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ruang terbuka hijau, serta penerapan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan lahan.

**E. Persampahan**

**Tabel 2.82**  
**Penanganan Sampah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Target Jakstrada</b>						
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	98.305,04	99.622,33	100.957,27	102.310,10	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	Persen	80	75	74	73	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	78.644,03	74.716,75	74.708,38	74.686,37	
<b>Kinerja persampahan Kabupaten Pamekasan</b>						
Volume sampah yang ditangani	Ton/Tahun	25.902,84	32.815,89	202.588,76	230.177,40	246.418,72
Volume produksi sampah	Ton/Tahun	98.305,04	99.350,12	403.829	404.562,20	404.624,40
Persentase penanganan sampah	Persen	26,35	33,03	50,17	56,9	60,90
Jumlah TPA	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah TPS	Unit	25	25	17	17	14

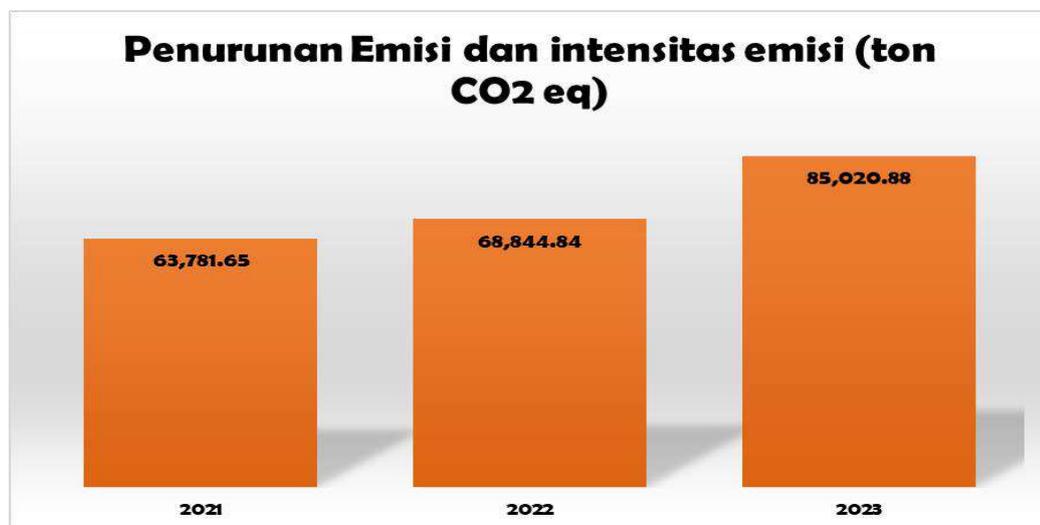
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah TPS 3R	Unit	4	11	17	18	21
Jumlah daya tampung TPA	Unit	150	150	150	150	150
Jumlah daya tampung TPS	Unit	3	3	3	3	3
Jumlah daya tampung TPS 3R	Unit	10	10	10	10	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2024

Untuk volume produksi sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 98.305,04 dan terus meningkat sampai di tahun 2023 sebesar 404.624,40. Sedangkan untuk volume sampah yang ditangani jika dilihat pada tabel di atas juga terus mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 25.902,84 sampai pada tahun 2023 sebesar 246.418,72. Penanganan sampah ini sudah di atas target penanganan sampah pada Jakstrada Kabupaten Pamekasan. Namun penanganan sampah terus perlu ditingkatkan mengingat volume produksi sampah yang lebih tinggi dari volume sampah yang ditangani.

## F. Emisi Gas Rumah Kaca

**Gambar 2.32**  
**Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, 2024



Dari Grafik di atas, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar 65,781 ton meningkat menjadi 85,020 ton pada tahun 2023. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau Business As Usual (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Kabupaten Pamekasan.

**2.4.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**A. Tingkat Kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk)**

**Tabel 2.83**  
**Tingkat Kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perekaman KTP Elektronik	Persen	95.26	96.12	99.53	99.07	98,96
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Orang	637.361	624.811	680.017	625.820	643.482
Jumlah penduduk 17 tahun keatas	Orang	624.133	611.622	614.148	631.906	641.416

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase perekaman KTP Elektronik mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 sebesar 95.26%. Tahun 2020 mencapai 96.12%, 2021 meningkat lagi di angka 99.53% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99.07%, dan kembali mengalami penuruna pada tahun 2023 menjadi 98.96%. Sebaliknya, jumlah penduduk yang memiliki KTP mengalami

penurunan pada tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019 sebanyak 637.361 dan tahun 2020 624.811, namun terjadi kenaikan yang cukup drastis pada tahun 2021 menjadi 680.017 orang dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 625.820 orang. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 643.482. Hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah penduduk berusia 17 tahun ke atas, pada tahun 2019 sebanyak 624.133, menurun hingga tahun 2020 sehingga menjadi 611.622, dan kembali naik pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 614.148 dan 631.906 orang. Pada tahun 2023 sebanyak 641.416 orang yang berusia 17 tahun keatas.

**B. Tingkat Kepemilikan KIA**

**Tabel 2.84**  
**Tingkat Kepemilikan KIA Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	6.60	2.90	6.91	16.25	17.95
Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Jiwa	12.523	6.015	15.557	37.640	42.276
Jumlah anak usia 0-17 tahun	Jiwa	189.648	207.456	225.106	236.096	235.572

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah kepemilikan KIA mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2019 persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki kia sebesar 6.60%, pada tahun 2020 menurun drastis hingga menjadi 2.90%, dan pada tahun 2021 dan 2022 meningkat lagi hingga menjadi 6.91% dan 16.25% serta kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 17.95%.

**C. Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran**

**Tabel 2.85**  
**Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen	84.47	93.15	89.33	92,29	91,71
Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Jiwa	182.634	201.411	213.558	217.900	229.482
Jumlah anak usia 0-18 tahun	Jiwa	216.221	216.221	239.064	236.096	250.219

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah kepemilikan akta kelahiran mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 sejumlah 84.47%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 93.15%, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 89,33%, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 92,29% serta terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 91,71%.

**D. Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan oleh PD**

**Tabel 2.86**  
**Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0	0	6.98	2	1
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	0	0	3	1	1
Jumlah OPD	OPD	0	0	43	43	42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, 2024



Tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh OPD tahun 2019 hingga 2020 belum terdapat data sehingga dapat diartikan bahwa belum ada pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2017 hingga 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 telah terdapat data sebesar 6.98%. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama yaitu 3 orang dari jumlah OPD 42 orang, dan pada tahun 2022 sejumlah 2% dan menurun pada tahun 2023 sebanyak 1%.

### 2.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### A. Klasifikasi Status Desa

**Tabel 2.87**  
**Klasifikasi Status Desa Dalam Indeks Desa Membangun (IDM)**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Rata-rata IDM Kab/Kota	Indeks	0,66	0,68	0,69	0,72	0,73
Status IDM Kab./Kota	Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju
Jumlah Desa Mandiri	Desa	n.a.	3	5	17	21
Jumlah Desa Maju	Desa	n.a.	15	40	65	78
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	n.a.	160	133	0	0
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	n.a.	0	0	0	0
Jumlah Desa	Desa	n.a.	0	0	178	178

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2024

Klasifikasi Status Desa Dalam Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun 2019 – 2021 cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 di angka 0,6606 dan pada tahun 2020 sebanyak 0,68 hingga 2021 angkanya mencapai 0,69. Persentase tersebut menjadikan Pamekasan sebagai Kab/kota berkembang. Di sisi lain, terdapat peningkatan pada jumlah desa mandiri dan desa maju. Masing-masing pada tahun 2021 sebanyak 5 desa dan 40 desa. Sedangkan pada tahun 2023 Jumlah Desa Mandiri sebanyak 21 desa dan Desa Maju sebanyak 78 desa. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan. Semula 160 desa pada tahun 2020 menjadi 133 desa pada tahun 2021.

**Tabel 2.88**  
**Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lembaga	1.398	2.511	2.518	2.519	2.520
Rukun Tetangga	Lembaga	n.a	777	777	777	777
Rukun Warga	Lembaga	n.a	333	333	333	333
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Lembaga	203	203	203	203	203
Karang Taruna	Lembaga	34	36	36	36	36
Pos Pelayanan Terpadu	Lembaga	983	984	991	992	993
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga	178	178	178	178	178

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa mengalami kenaikan dari tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2019 sebanyak 1.398 dan terus mengalami kenaikan hingga menjadi 2.520 pada tahun 2023. Kenaikan tersebut juga sama seperti kenaikan pos pelayanan terpadu. Terdapat 983 pos pada tahun 2019 dan menjadi 993 pada tahun 2023. Jumlah rukun tetangga, rukun warga, PKK, dan LPM mengalami stagnan sejak 2019 hingga 2023.

### **B. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

**Tabel 2.89**  
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Persen	0,08	0,08	0,08	0,45	0.45
Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	17	17	17	91	80

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK serta jumlah kelompok binaan PKK berada pada tahun 2019 – 2021 berada pada nilai konstan yaitu pada angka 0.08% dan 17 kelompok. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar

0,45 di rata-rata jumlah kelompok binaan, dengan jumlah kelompok binaan PKK sebesar 91 kelompok binaan, serta pada tahun 2023 rata-rata kelompok binaan sebesar 0,45% dengan jumlah kelompok binaan sebesar 80.

**C. Persentase PKK Aktif**

**Tabel 2.90**  
**Persentase PKK Aktif Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah PKK	Organisasi	203	203	203	203	203

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Jika melihat tabel diatas, Persentase PKK aktif dan jumlah PKK pada tahun 2019–2023 berada pada nilai konstan yaitu pada angka 100% dan sebanyak 203 organisasi.

**D. Posyandu Aktif**

**Tabel 2.91**  
**Posyandu Aktif Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	983	984	991	992	993
Jumlah Posyandu	Organisasi	983	984	991	992	993

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Jumlah posyandu sama dengan jumlah posyandu aktif, yaitu 983 pada tahun 2019, naik menjadi 984 pada tahun 2020, dan 991 pada tahun 2021, lalu mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 992. Kemudian pada tahun 2023 bertambah menjadi 993 posyandu.

## E. Indeks Desa Mandiri

**Tabel 2.92**  
**Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023**

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Indeks Desa Mandiri	Indeks	2,8	9,55	11,79

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 2024

Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IDM Kabupaten Pamekasan sebesar 2,8 meningkat menjadi 11,79 pada tahun 2023.

### 2.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### A. Tingkat Kelahiran

**Tabel 2.93**  
**Tingkat Kelahiran Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	1.97	2.1	1.95	2.16	2.16

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Tingkat Kelahiran Tahun 2019 hingga tahun 2023 fluktuatif, pada tahun 2019 berada di angka 1.97%, pada tahun 2020 angka tersebut naik menjadi 2.1%. Kemudian pada tahun 2021 kembali turun menjadi 1.95%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi 2.16%. Pada tahun 2023 Angka Kelahiran Total Kabupaten Pamekasan stagnan sebesar 2.16%.

**B. Rasio Akseptor KB**

**Tabel 2.94**  
**Rasio Akseptor KB Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Akseptor KB	Persen	72.91	76.47	77.85	76.56	71.41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Rasio akseptor KB dari tahun 2019 sampai dengan 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 72.91% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 76.47%, serta kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 77.85%. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 76.56% dan 71.41%.

**Tabel 2.95**  
**Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengguna Akseptor (PA)	PA	136.651	143.554	150.596	127.287	118.038
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	PUS	187.430	187.719	193.432	166.260	165.288
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	72.91	76.47	77.85	76.56	71.41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, 2024

Pada tabel di atas, jumlah pengguna akseptor dan jumlah pasangan subur selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2019, pengguna akseptor sejumlah 136.651. Kenaikan juga terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 menjadi 150.596. Sementara itu pada tahun 2022 dan tahun 2023 Pengguna Aseptor mengalami penurunan hingga 118.038 pada tahun 2023. Jumlah pasangan usia subur juga berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 187.430 dan 187.719 pada tahun 2020. Kemudian naik drastis di tahun 2021 menjadi 193.432. Pada tahun 2023 turun menjadi 165.288 orang. Sedangkan persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi



mengalami fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019 sebesar 72.91% menurun menjadi 71.41% pada tahun 2023.

**Tabel 2.96**  
**Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Peserta Keluarga Berencana Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)	Faskes	33	33	33	33	34
Persentase Pencapaian Peserta KB	Persen	72.91	76.47	77.85	76.56	71.41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024  
Persentase pencapaian peserta KB pada tahun 2019 sebesar 72.91%, meningkat menjadi 76.47% pada tahun 2020, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 77.85%. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 76.56% dan 71.41%.

**Tabel 2.97**  
**Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)	Unit	33	33	33	33	34

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024  
Jumlah klinik keluarga berencana pada tahun 2019-2022 cenderung konstan sebanyak 33 unit dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 34 unit.

**Tabel 2.98**  
**Persentase Pencapaian Peserta KB Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pencapaian Peserta KB	Persen	72.91	76.47	77.85	76.56	71.41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Jika melihat tabel diatas, Persentase pencapaian peserta KB pada tahun 2019 sebesar 72.91%, meningkat menjadi 76.47% pada tahun 2020, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 77.85%. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 76.56% dan 71.41%.

**Tabel 2.99**  
**Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan	Paguyuban	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana pada tahun 2019 – 2023 sebanyak 13 paguyuban.

**C. Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

**Tabel 2.100**  
**Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi**  
**Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	72.91	76.47	77.85	74.98	71.4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 72.91%. Sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 71.4%



**Tabel 2.101**  
**Tingkat Pengguna Kontrasepsi Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Persen	72.91	76.47	77.85	74.98	71.4
Jumlah peserta KB Aktif Modern	Orang	136.661	143.554	150.596	127.287	118.030
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	12.32	6.94	6.43	7.41	7.26
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetap tidak terlayani	PUS	n.a	n.a	12.477	12.323	12.001
Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	187.430	187.430	187.719	166.325	165.288

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

**D. Cakupan Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana**

**Tabel 2.102**  
**Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana (LKB/ PKB) Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan (orang)	Orang	54 PKB	54 PKB	54 PKB	54 PKB	38 PKB

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Rasio petugas lapangan keluarga berencana dari tahun 2019 hingga 2022 stagnan sejumlah 54 penyuluh keluarga berencana, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 38 penyuluh keluarga berencana.

**E. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)**

**Tabel 2.103**  
**Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	PPKBD	189	189	189	189	189

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Jumlah Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada tahun 2019 sampai dengan 2023 stagnan sebesar 189 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

**F. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi**

**Tabel 2.104**  
**Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi (Penerimaan)	Unit	199.241	146.974	276.041	276.041	253.501
Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi (Pengeluaran)	Unit	193.716	144.782	258.943	230.457	202.069

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2024

Jumlah alat kontrasepsi baik penerimaan maupun pengeluaran terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 2020, namun angka tersebut kembali naik pada tahun 2021. Penerimaan sebesar 276.041 unit dan pengeluaran sebesar 258.943 unit. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah alat kontrasepsi penerimaan stagnan dari tahun sebelumnya, jumlah alat kontrasepsi pengeluaran mengalami penurunan menjadi 230.457 unit. Pada tahun 2023 jumlah alat kontrasepsi dari sisi penerimaan dan pengeluaran kembali menurun menjadi 253.501 unit dan 202.069 unit.

**2.4.2.9 Perhubungan**

**A. Angka Kecelakaan**

**Tabel 2.105  
Angka Kecelakaan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	80	80	80
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	326	653	660	795	662

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jika melihat tabel diatas Rasio sarana prasarana dalam kondisi baik konstan, mulai tahun 2019 – 2023 yaitu 80%. Hal ini menandakan tersedianya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga tidak terjadi penurunan pada rasio sarana prasaran dalam kondisi baik. Sedangkan Angka kecelakaan lalu lintas naik dari tahun 2019-2022. Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2022, yakni sebanyak 795 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 662 kasus. Dari data tersebut di atas, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena dengan sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, dapat memperlancar dan memudahkan masyarakat dalam berlalu lintas.

**B. Uji Kir Angkutan Umum**

**Tabel 2.106  
Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan dan Penggunaan di Kab. ZPamekasan	Kendaraan	6,411	7,063	7,546	6,849	5,661

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah kendaraan motor wajib uji pada tahun 2019 sebesar 6,411, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021. Puncak tertinggi berada pada tahun 2021 sebanyak 7,546 kendaraan, dan pada 2022 mengalami penurunan di angka 6.849 dan kembali menurun menjadi 5,661 kendaraan.

**C. Layanan Angkutan Darat**

**Tabel 2.107**  
**Jumlah Angkutan Darat Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah angkutan darat (kendaraan)	Kendaraan	495	639	785	902	8.610
Jumlah penumpang angkutan darat (orang)	Orang	171	747	862	1.112	51.678
Persentase layanan angkutan darat	Persen	80	80	80	80	80

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah angkutan darat terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 di tahun 2019 sebanyak 495 kendaraan, sampai 2023 tercatat meningkat hingga 8.610 kendaraan. Untuk jumlah penumpang angkutan darat sendiri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yakni pada tahun 2019 sejumlah 171 orang dan terus meningkat daratis sampai pada tahun 2023 sebesar 51.678 orang. Untuk persentase layanan angkutan darat ada di kondisi stagnan sejak tahun 2019 sebesar 80%

**D. Pemasangan Rambu-Rambu**

**Tabel 2.108**  
**Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pemasangan rambu-rambu lalu lintas	Unit	285	322	322	322	101

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah rambu-rambu pada 2019 sebanyak 285 unit, pada tahun 2020 sampai 2023 berada pada kondisi stagnan sebanyak 322 unit. Namun di tahun

2023 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 101 unit rambu-rambu lalu lintas.

**Tabel 2.109**  
**Persentase Sarana/Prasarana Penerangan Jalan Umum yang Layak Fungsi Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Sarana / Prasarana Penerangan Jalan Umum yang layak fungsi	Persen	75%	80%	80%	80%	99%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase penerangan jalan umum tahun 2019 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 75% hingga pada tahun 2023 mencapai 99%.

**E. Rasio Panjang Jalan**

**Tabel 2.110**  
**Kapasitas Jalan Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Ratio jalan di kabupaten	Volume/kapasitas	0.26	0.27	0.29	0.29	0.22

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Rasio jalan di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 sampai dengan 2023 berfluktuasi, tahun 2019 rasio jalan di kabupaten sebesar 0.26, pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan menjadi 0.29, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 0.22.

## F. Kepatuhan Masyarakat terhadap Parkir Berlangganan

**Tabel 2.111**  
**Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Parkir Berlangganan**  
**Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Parkir Berlangganan	Persen	75	75	76	76	76

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase kepatuhan masyarakat terhadap parkir berlangganan berada pada angka konstan, kenaikan terjadi di tahun 2021 sampai 2023 menjadi 76%.

**Tabel 2.112**  
**Tingkat Keterhubungan Antar Moda Transportasi Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio konektivitas kabupaten	Persen	94%	94%	94%	94%	94%
Jumlah trayek perintis yang dilayani	Trayek	206	124	39	87	87
Jumlah trayek AKAP	Trayek	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah lintasan perintis	Lintasan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah lintasan komersil	Lintasan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, 2024

Rasio konektivitas kabupaten stagnan di angka 94% hingga 2023. Jumlah trayek perintis yang dilayani menurun drastis pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 sebanyak 39 trayek, tetapi di tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 87. Sedangkan jumlah trayek AKAP, lintasan perintis, dan lintasan komersil tidak terdapat data.

### 2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2.113**  
**Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Indeks	2.22	3.01	2.12	2.1	2.89
Predikat SPBE	Predikat	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Baik
Domain Kebijakan SPBE	Nilai	1.29	3.24	2.1	1.80	2.50
Kebijakan Tata Kelola SPBE	Nilai	1.29	3.43	2.1	1.80	2.50
Kebijakan Layanan SPBE	Nilai	1.3	3.1	1	-	-
Domain Tata Kelola	Nilai	1.43	2.71	1.5	1.6	2.70
Kelembagaan	Nilai	1.5	2.5	1	1.00	2.50
Strategi dan Perencanaan	Nilai	1.5	2.5	1.75	1.75	2.50
TIK	Nilai	1.33	3	1.5	1.75	3.00
Domain Layanan SPBE	Nilai	2.91	3.09	2.87	2.87	3.63
Administrasi Pemerintahan	Nilai	2.86	3.43	2.9	3.00	3.60
Pelayanan Publik	Nilai	3	2.5	2.83	2.67	3.67

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pamekasan, 2024

#### A. Cakupan Layanan Telekomunikasi

**Tabel 2.114**  
**Layanan Informasi Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	99.40	98.88	100	100	100
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Siaran	8	7	6	8	8
Jumlah Surat Kabar Lokal	Surat Kabar	16	2	2	2	7

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2024

Cakupan layanan telekomunikasi meningkat menjadi 100% pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Jumlah penyiaran radio/TV local menurun di setiap tahunnya hingga 2021 namun mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023



sebanyak 8. Sedangkan untuk surat kabar local menurun drastis pada tahun 2020, semula terdapat 16 surat kabar, menurun menjadi 2 hingga tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7 surat kabar.

**Tabel 2.115**  
**Jaringan Internet Pemerintah Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	87,03	90,74	100	100	100
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	47	49	42	42	42
Jumlah OPD	OPD	54	54	42	42	42

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pamekasan, 2024

Sejak tahun 2021 presentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet sebanyak 100%. Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Kominfo sebanyak 42 orang dari 42 OPD. Berdasarkan tabel di atas Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 cukup progresif dimana persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan internet selalu meningkat setiap tahunnya, khususnya mulai tahun 2019, dimana pada tahun tersebut berada di angka 87.03%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 90.74%, dan yang terakhir pada tahun 2023 berhasil mencapai angka 100%.

**Tabel 2.116**  
**Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018–2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Hasil Monev. Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	68,69	75,4	73	78,75	96,8
Menyediakan Informasi Publik	Bobot	30	45	45	20	20
Mengumumkan Informasi Publik	Bobot	15	10	10	25	25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2023

Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dari 68.69 di tahun 2018, 75.4 di tahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 73, di tahun 2021 mengalami kenaikan 78.75 hingga 2022 menjadi 96.8. Keterbukaan informasi publik dikategorikan rendah karena belum mencapai 50 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sejumlah 20. Di aspek mengumumkan informasi public mengalami naik turun di tahun 2018 sejumlah 15, di tahun 2019 dan 2020 nilainya 10, hingga mengalami kenaikan di tahun 2021, 2022 sejumlah 25.

**Tabel 2.117**  
**Layanan Publik secara Online Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	n.a	47,37	57,9	57,9	57,9
Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan	n.a	9	11	11	11
Jumlah layanan publik	Layanan	n.a	19	19	19	19

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online berbanding lurus dengan jumlah layanannya. Persentase pada tahun 2020 sebesar 47.37%, dan 57.9% sampai tahun 2023. Untuk jumlah layanan, pada tahun 2020 terdapat

9 layanan dan 11 layanan di tahun 2021 hingga 2023. Sedangkan jumlah layanan publik sebanyak 19 layanan di tahun 2020, 2021 hingga 2023.

**Tabel 2.118**  
**Penyebaran Informasi Publik Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	91%	100%	91.92%	87.49%	80.22%
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jiwa	727,838	745,267	784,517	750,000	688,141
Jumlah Penduduk	Jiwa	795,918	850,057	853,507	857,264	857,818

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2024

Penyebaran informasi publik dalam kurun 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 80,22% dengan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public sebanyak 688,141 jiwa.

#### 2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

**Tabel 2.119**  
**Kondisi Koperasi Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	19,33	18,44	14,65	14,55	17,31
Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	127	123	101	107	137
Jumlah Koperasi yang dibina	Koperasi	392	414	448	459	531
Persentase Koperasi yang dibina	Persen	58,77	60,08	60,86	62,44	67.13
Jumlah koperasi aktif	Koperasi	-	412	459	458	513
Jumlah Koperasi	Koperasi	657	667	689	735	791



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi yang mempunyai NIB	Persen	-	5,24	7,14	8,72	10,36

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan, 2024

Kondisi koperasi pada tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, persentase koperasi berkualitas sebanyak 19.33%, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 127 koperasi, koperasi yang dibina sebanyak 392, terdapat 58.77% koperasi yang dibina, serta jumlah koperasi sebanyak 657 koperasi, Pada tahun 2020, persentase koperasi berkualitas sebanyak 18,44%, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 123 koperasi, koperasi yang dibina sebanyak 414, terdapat 60.08% koperasi yang dibina, serta jumlah koperasi sebanyak 667 koperasi, Pada tahun 2021, persentase koperasi berkualitas sebanyak 14.65%, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 101 koperasi, koperasi yang dibina sebanyak 448, terdapat 60.86% koperasi yang dibina, serta jumlah koperasi sebanyak 689 koperasi, dan pada tahun 2022, persentase koperasi berkualitas sebanyak 14.55%, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 107 koperasi, koperasi yang dibina sebanyak 459, terdapat 62.44% koperasi yang dibina, serta jumlah koperasi sebanyak 735 koperasi. Sementara data pada tahun 2023 yang tercatat jumlah koperasi berkualitas sebesar 17.31%, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 137, jumlah koperasi yang dibina 531 dengan persentase 67,13%, dengan jumlah koperasi keseluruhan sebanyak 791.

**Tabel 2.120**  
**Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persen	3,41	13,65	16,04	28,99	108,9
Persentase UMKM yang dibina	Persen	4.58	14.28	14.07	2,86	1,2
Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	432	1.532	1.753	460	210
Persentase UMKM yang mendapat bantuan modal	Persen	0,98	1,51	0,58	0,16	0,057



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan Modal	UMKM	93	163	123	27	10
Usaha mikro yang naik kelas	Persen	-	-	5	15	-
Jumlah UMKM	UMKM	9,441	10.730	12.452	16.062	33.550

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pamekasan selama periode 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan 108,9 persen dari tahun sebelumnya. Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah didukung semakin mudahnya akses pembiayaan dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Persentase UMKM yang dibina di Kabupaten Pamekasan selama periode 9 tahun terakhir mengalami tren menurun. Pada tahun 2019 tercatat UMKM yang dibina sebesar 4,58 persen, menurun menjadi 1,20 persen dari 33.550 unit pada tahun 2023. Penurunan ini bisa disebabkan karena faktor keterbatasan anggaran untuk membina UMKM serta kekurangan tenaga penyuluh dan pendamping UMKM yang berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pembinaan UMKM. Selain itu, masalah yang terjadi adalah belum terlembaganya kelompok/sentra UMKM, sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberikan informasi tentang program pembinaan UMKM secara efektif. Solusi yang diperlukan adalah mempermudah akses informasi tentang program-program pembinaan UMKM bagi UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti website dan media sosial.

Persentase UMKM yang mendapatkan bantuan modal pada 2019 hingga 2023 mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Capaian tertinggi UMKM yang mendapatkan bantuan modal pada tahun 2020 mencapai 1,51 persen, tahun berikutnya menurun menjadi 0,06 persen dair 33.550 unit. Hal ini

mengindikasikan bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM semakin menurun setiap tahunnya.

**2.4.2.12 Penanaman Modal**

**Tabel 2.121**  
**Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019-2023**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	-93	301	70	-48	2
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	131.010.645.738	525.084.334.545	892.937.465.832	461.034.264.395	471.563.182.983
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDA dan PMA)	323	422	2.510	2.592	10.388

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan, 2024

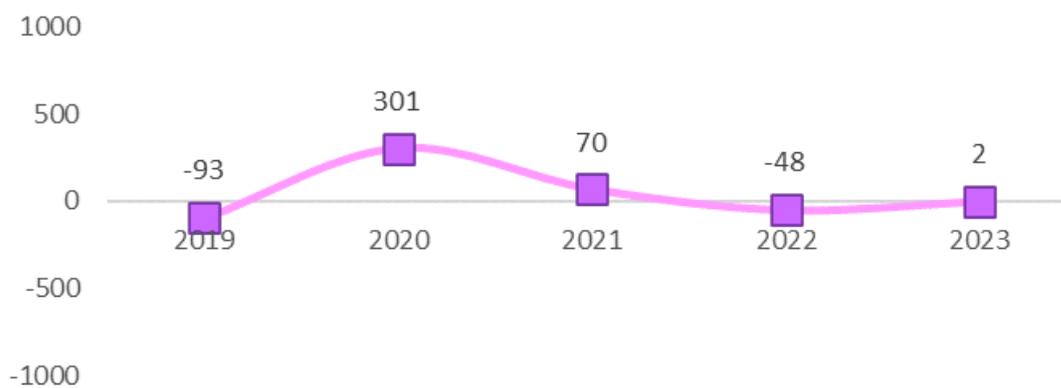
Pada tabel indikator urusan penanaman modal di atas terdapat capaian indikator pada urusan penanaman modal di rata-rata mengalami pertumbuhan. Pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan masalah pokok terkait penanaman modal yang ada di Kabupaten Pamekasan yakni Masih belum adanya investor asing yang menanamkan modal; pertumbuhan investasi yang belum maksimal. Untuk lebih jelasnya terkait indikator urusan penanaman modal serta

permasalahan yang ada dalam setiap indikator dapat dilihat pada rincian penjelasan masing-masing indikator berikut ini.

### **A. Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN**

Pertumbuhan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan indikator penting dalam mengukur aktivitas investasi di suatu negara. PMA adalah investasi yang berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN adalah investasi yang berasal dari dalam negeri. Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN menunjukkan seberapa besar minat investor, baik domestik maupun asing, dalam melakukan investasi di suatu negara. Pertumbuhan yang positif pada kedua jenis investasi ini dapat menjadi indikasi kondisi ekonomi yang baik, di mana investor merasa yakin untuk menanamkan modalnya. Berikut ini adalah grafik terkait persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pamekasan:

**Gambar 2.33**  
**Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 (Persen)**



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan, 2024

Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pamekasan selama periode 7 tahun terakhir mengalami tren fluktuatif setiap tahunnya. Pada



tahun 2018 pertumbuhan nilai PMA dan PMDN sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 93 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai PMA dan PMDN hingga minus juga terjadi pada tahun 2022 mencapai 48 persen. Kemudian pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan mencapai 2 persen. Fluktuasi pertumbuhan nilai PMA dan PMDN ini disebabkan karena beberapa pelaku usaha yang belum memahami pelaporan realisasi dari usahanya; dan Para pelaku usaha selalu melaporkan atau tidak melaporkan dengan realisasi 0.

**B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)**

Jumlah nilai investasi berskala nasional, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur aktivitas investasi di suatu negara. PMDN adalah investasi yang dilakukan oleh investor domestik, sementara PMA adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing. Adapun data terkait jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) dan PMDN di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

**Tabel 2.122**  
**Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) Kabupaten pamekasan Tahun 2017-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) (Rupiah)</b>	<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN (Rupiah)</b>	<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA (Rupiah)</b>
2019	131.010.645.738	131.010.645.738	-
2020	525.084.334.545	525.084.334.545	-
2021	892.937.465.832	892.937.465.832	-
2022	461.034.264.395	461.034.264.395	-
2023	471.563.182.983	471.563.182.983	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan, 2024

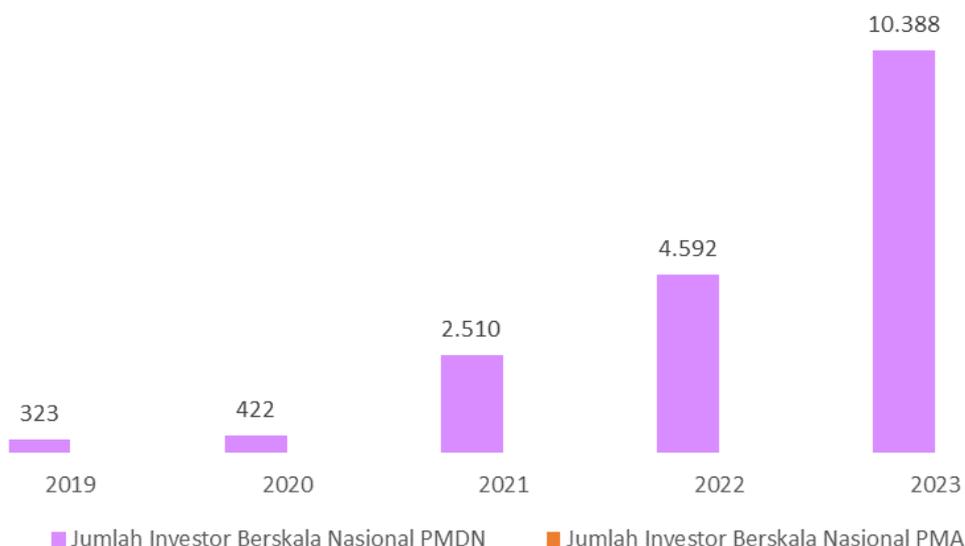


Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa keseluruhan investasi di Kabupaten Pamekasan berasal dari PMDN dan belum ada PMA yang berinvestasi di Kabupaten Pamekasan. Hal ini disebabkan kurangnya minat investor asing yang berinvestasi di daerah karena belum adanya peta potensi investasi di daerah.

### **C. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDA dan PMA)**

Jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Pamekasan selama periode tahun 2017 hingga 2023 mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ada sebanyak 5.935 investor PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Pamekasan, kemudian mengalami tren naik turun mencapai 10.388 investor pada tahun 2023. Tingginya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Pamekasan, salah satunya dipengaruhi oleh kenyamanan berinvestasi diantaranya kemudahan perijinan, tersedianya infrastruktur yang memadai, pasar yang bagus, serta insentif investasi.

**Gambar 2.34**  
**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan, 2024

#### 2.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

**Tabel 2.123**  
**Perkumpulan Olahraga Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Cabang Olahraga	Cabor	23	25	27	29	29

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Cabang olahraga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023 sebanyak 29 cabang olahraga.

**Tabel 2.124**  
**Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	260	260	268	353	360

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Jumlah organisasi olahraga tahun 2019-2021 konstan di angka 260 organisasi. Tahun 2022 naik menjadi 353 organisasi serta meningkat kembali



pada tahun 2023 menjadi 360 organisasi. Peningkatan jumlah organisasi olahraga ini tentunya merupakan hal yang baik bagi pengembangan olahraga dan pembinaan atlit berprestasi ke depan.

**Tabel 2.125**  
**Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Gedung Olahraga	Unit	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Jumlah Gedung olahraga dari tahun ke tahun sebanyak 4 Gor. Sarana prasarana berupa GOR ini merupakan sarana prasarana olahraga resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**Tabel 2.126**  
**Prestasi Dalam Event Olahraga Nasional dan Internasional Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	22	121	135	209	43

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Perolehan medali pada tahun 2019 sejumlah 22 medali, dan kembali naik ditahun 2020-2022. Tahun 2022 jumlah medali sebanyak 209. Peningkatan prestasi olahraga ini dikarenakan adanya event olahraga tingkat provinsi Jawa Timur yaitu Porprov tahun 2022 di Jember, Situbondo, dan Lumajang. Pada tahun 2023 tercatat perolehan medali pada prestasi dibidang olahraga sebanyak 43 medali dari target 70 medali.



**Tabel 2.127**  
**Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Olahraga	Kegiatan	8	4	10	9	4

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Jumlah kegiatan olahraga menurun di tahun 2020, kembali pulih di tahun 2021 menjadi 10 kegiatan. Namun pada tahun 2022 kembali berkurang sehingga terdapat 9 kegiatan. Serta pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 4 kegiatan.

**Tabel 2.128**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	9	3	7	5	6

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Jumlah kegiatan kepemudaan mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 terdapat 9 kegiatan, namun turun di tahun 2020 menjadi 3 kegiatan. Kembali naik di tahun 2021 sebanyak 7, dan turun kembali menjadi 5 kegiatan di tahun 2022. Serta pada tahun 2023 meningkat menjadi 6 kegiatan.

**Tabel 2.129**  
**Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n.a	n.a	1,5	0,4	0,41
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha	Pemuda	n.a	n.a	2,855	758	813
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)	Pemuda	n.a	190,986	187,755	190,066	192,227

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi tahun 2021 yakni 1.5%, menurun di tahun 2022 menjadi 0,4% dan meningkat di tahun 2023 menjadi



0.41%. Untuk jumlah pemuda yang berwirausaha sebanyak 2.855 orang pada tahun 2021, namun menurun di tahun 2022 menjadi 758 pemuda dan kembali naik pada tahun 2023 sebesar 813 pemuda. Sedangkan jumlah pemuda mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebanyak 190.986 orang, tahun 2021 sebanyak 187.755, dan 190.066 di tahun 2022 serta 192.227 di tahun 2023.

**Tabel 2.130**  
**Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial**  
**Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	n.a	47.9	53.16	3,84	3,87
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Pemuda	n.a	91.604	99.818	7.295	7.455

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2020 yakni 47.9%, naik di tahun 2021 menjadi 53.16%. Namun, menurun drastis pada tahun 2022 menjadi 3,84% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,87%. Sedangkan jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif organisasi pada tahun 2020 sebanyak 91.604 orang, naik di tahun 2021 menjadi 99.818 orang. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama dikarenakan terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 7.295 orang dan kembali naik namun tidak signifikan di tahun 2023 menjadi 7.455 pemuda.



### 2.4.2.14 Statistik

#### A. Pengelolaan data Statistik

**Tabel 2.131**  
**Pengelolaan Data Statistik Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	54	45	42	42	42
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan Evaluasi pembangunan daerah	OPD	54	45	42	42	42

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2024

Pengelolaan data statistik mengalami angka yang konstan di setiap tahunnya. Tidak terdapat perubahan yang signifikan.

**B. Pengelolaan Data Statistik Sektoral**

**Tabel 2.132  
Pengelolaan Data Statistik Sektoral Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Sistem informasi Statistik Sektoral	Ada/ Tidak	n.a	n.a	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Daftar Data Statistik Sektoral	Ada/ Tidak	n.a	n.a	Tidak Ada	Ada	Ada
Tersedianya Metadata Statistik Sektoral	Ada/ Tidak	n.a	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Tingkat ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	n.a	n.a	n.a	35.1	95.46
Jumlah Elemen Data Statistik Sektoral	Elemen	n.a	n.a	106	982	1167
Jumlah Elemen Data yang terkumpul sesuai Daftar Data Statistik Sektoral	Elemen	n.a	n.a	n.a	134	1113
Tersedianya Forum Satu Data	Ada/Tidak	n.a	n.a	Ada	Ada	Ada
Jumlah Survey Statistik Sektoral yang dilaksanakan	Survey	n.a	1	26	23	18

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka pada tahun 2023 terdapat sistem informasi statistik sektoral, tersedianya daftar data statistic serta tersedianya metadata statistik sektoral. Tingkat ketersediaan data statistik sebesar 95.46%, dengan jumlah elemen data statistic sektoral sejumlah 1167 elemen, serta terdapat 1113 elemen data yang terkumpul sesuai daftar data statistic sektoral. Forum satu data tersedia. Jumlah survei statistik yang dilaksanakan sebanyak 26 18 survei.

**2.4.2.15 Persandian**

**Tabel 2.133  
Keamanan Informasi Tahun 2019–2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	n.a	0	0	0	0
Jumlah nilai per area keamanan informasi	Nilai	n.a	0	0	0	0
Jumlah area penilaian	Area	n.a	0	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2024

Keamanan informasi masih belum dinyatakan aman sebab tingkat kemanan informasi pemerintah dan jumlah nilai per area 0. Jumlah area penilaian sebanyak 1 area.

**Tabel 2.134**  
**Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal**

Indikator	Satuan	2021	2022
Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal	Indeks	2	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2023

Tingkat kematangan indeks aspek kebijakan internal tahun 2021 berada pada angka 2, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi angka 1.

**Tabel 2.135**  
**Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK**

Indikator	Satuan	2021	2022
Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	Indeks	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, 2023

Tingkat kematangan indeks aspek audit TIK tahun 2021 dan 2022 berada pada angka 1.

#### 2.4.2.16 Kebudayaan

**Tabel 2.136**  
**Jumlah Lembaga Seni menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2023**

Kecamatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pamekasan	Lembaga	31	33	34	44	48
Proppo	Lembaga	8	8	8	11	13
Tlanakan	Lembaga	8	8	8	14	20
Pademawu	Lembaga	10	10	11	16	17
Galis	Lembaga	2	2	2	2	2
Larangan	Lembaga	9	10	10	10	13
Kadur	Lembaga	1	1	1	1	2
Pakong	Lembaga	1	1	1	2	3



Kecamatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pegantenan	Lembaga	-	-	-	-	n.a
Palengaan	Lembaga	3	3	5	5	7
Waru	Lembaga	3	3	3	3	3
Batumarmar	Lembaga	-	-	-	-	n.a
Pasean	Lembaga	2	2	2	5	6
<b>Total</b>	<b>Lembaga</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>113</b>	<b>134</b>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah lembaga seni mengalami peningkatan di setiap tahun. Tahun 2019 sebanyak 78 lembaga meningkat pada tahun 2020 menjadi 81 lembaga hingga mencapai 134 lembaga seni pada tahun 2023.

**Tabel 2.137**  
**Jumlah Tenaga Seni menurut kecamatan Tahun 2019 – 2023**

Kecamatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pamekasan	Orang	490	520	555	940	1061
Proppo	Orang	135	135	135	316	351
Tlanakan	Orang	182	182	182	449	562
Pademawu	Orang	276	276	301	448	463
Galis	Orang	30	30	30	30	30
Larangan	Orang	260	275	275	337	402
Kadur	Orang	25	25	25	25	55
Pakong	Orang	20	20	20	42	77
Pegantenan	Orang	-	-	-	-	-
Palengaan	Orang	64	64	64	206	268
Waru	Orang	70	70	70	70	70
Batumarmar	Orang	-	-	-	-	-
Pasean	Orang	32	32	32	207	237
<b>Total</b>	<b>Orang</b>	<b>1584</b>	<b>1629</b>	<b>1763</b>	<b>3070</b>	<b>3576</b>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah tenaga seni tahun 2023 sebanyak 3.576 seniman. Angka tersebut merupakan angka kenaikan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.138**  
**Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pagelaran festival seni dan budaya	pagelaran	10	2	2	3	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Jumlah pagelaran seni dan budaya pada tahun 2019 sebanyak 10 pagelaran, menurun di tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi sebanyak 2 pagelaran. Sedangkan pada tahun 2023 hanya 1 pagelaran.

**Tabel 2.139**  
**Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu (unit)	13	13	13	13	14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Jumlah cagar budaya tahun 2018 – 2022 sebanyak 13 unit. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 14 cagar budaya.

**Tabel 2.140**  
**Jumlah Kesenian yang dibina dan dikembangkan**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Seni yang Dibina	Lembaga	72	72	72	72	72
Jumlah SDM yang dibina	Orang	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Jumlah kesenian yang dibina dan dikembangkan selama lima tahun terakhir 2019-2023 cenderung konstan, yaitu sebanyak 72 lembaga seni dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 2.327 orang anggota.



### 2.4.2.17 Perpustakaan

**Tabel 2.141**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan**  
**Perpustakaan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	Indeks	85.09	83.96	84.13	87.49	87.94

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

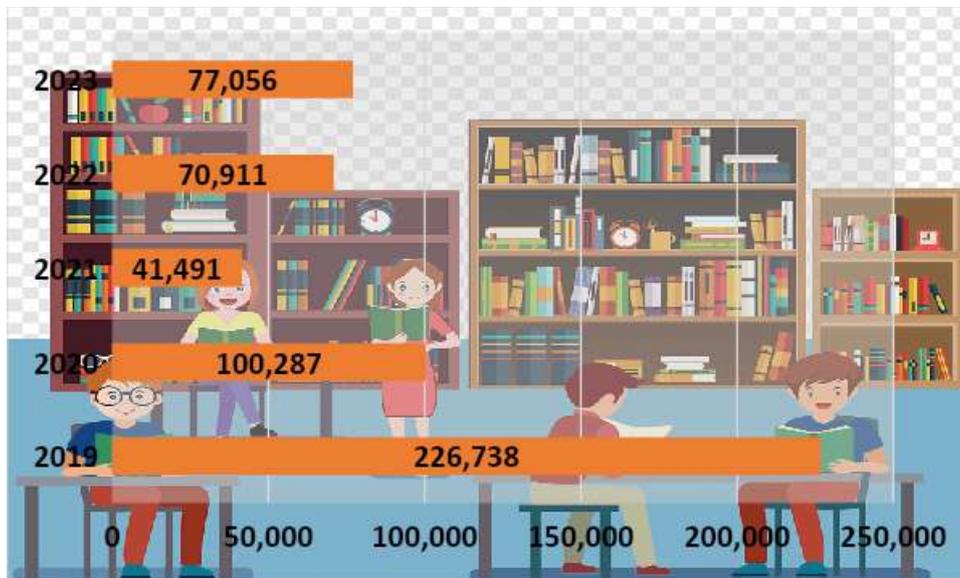
Nilai IKM terhadap pelayanan perpustakaan mengalami fluktuatif, namun angkanya tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2019 sebesar 85.09, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 83.96, sedangkan di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 84.13, dan pada tahun 2022 serta 2023 sebesar 87.49 dan 87.94.

Dalam perkembangan kehidupan dewasa ini masyarakat desa pada umumnya telah terbuka dan terjamah oleh pengaruh era informasi, meskipun belum merata. Untuk merespon hal itu perpustakaan desa seharusnya dibina dan dikembangkan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Eksistensi perpustakaan desa diharapkan dapat mencerminkan kemajuan dan merefleksikan kehidupan budaya masyarakat. Hal itu ditengarahi oleh pemanfaatan perpustakaan cara berdaya guna. Perpustakaan desa mengemban sebuah misi untuk menanamkan pengertian dan pemahaman yang utuh dan lengkap tentang pentingnya penguasaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi tugas dan fungsi perpustakaan desa sebagai sumber ilmu pengetahuan / belajar, sarana pengembangan kemampuan, keterampilan dan wawasan setiap untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mempererat kesatuan dan persatuan.

Oleh karena itu, perkembangan perpustakaan di desa seharusnya memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dampak langsung itu berupa kedewasaan dalam pola pikir yang berkaitan dengan etika, nilai, moral, adat dan kebiasaan dalam bermasyarakat.

## A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

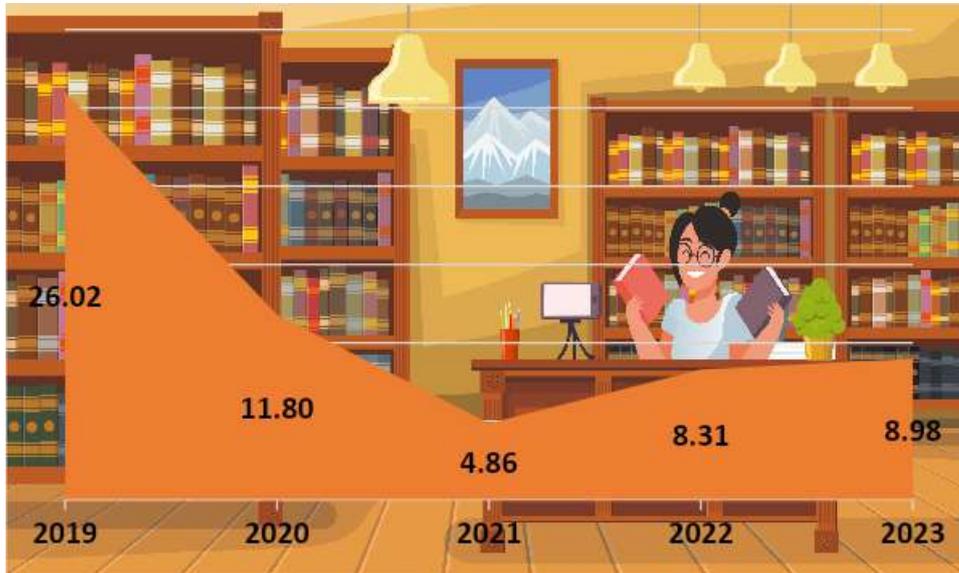
**Gambar 2.35**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab. Pamekasan, 2024

Jika melihat gambar diatas, Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami puncaknya di tahun 2019 yaitu sejumlah 226.738, namun menurun di tahun 2020 mencapai 100.287 hal ini dikarenakan adanya wabah covid-19 di Indonesia sehingga membuat aktifitas apapun terbatas, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan mencapai 41.491 hal ini dikarenakan adanya kemudahan teknologi untuk membaca buku dan adanya pembatasan aktifitas sehingga masyarakat memilih untuk membaca lewat internet, aplikasi, sedangkan kembali naik di tahun 2022 menjadi 70.911 orang. Kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan kunjungan menjadi 77.056 orang pengunjung.

**Gambar 2.36**  
**Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019 – 2023**

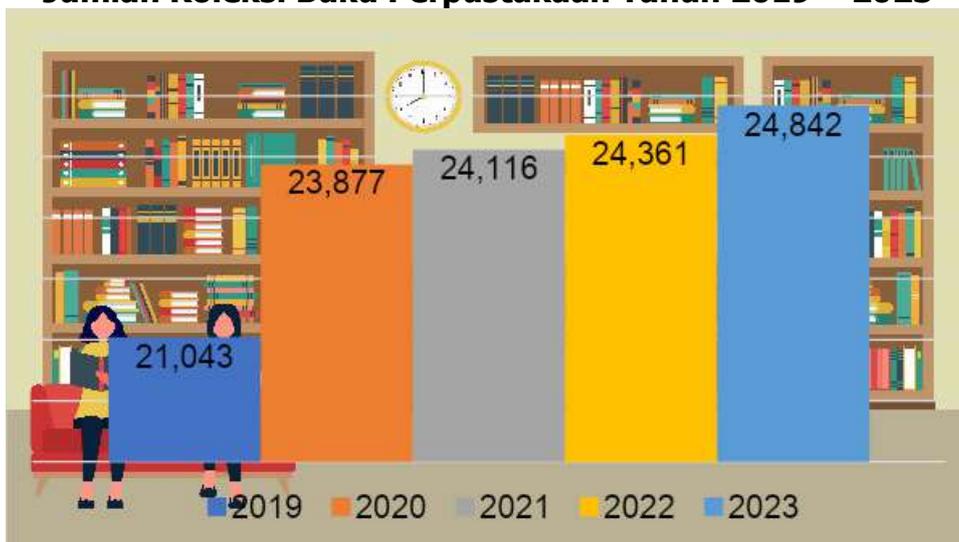


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Dalam gambar diatas, Persentase pengunjung perpustakaan pada tahun 2019 mencapai 26.02%, Kemudian menurun menjadi 11.80% di tahun 2020 dan 4.86% di tahun 2021. Namun kembali naik di tahun 2022 menjadi 8.31%, serta naik kembali menjadi 8.98% pada tahun 2023.

**B. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan**

**Gambar 2.37**  
**Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024



Jumlah koleksi buku perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019– 2023. Pada tahun 2019 terdapat 21.043 buku, pada tahun 2020 meningkat menjadi 23.877, di tahun 2021 mencapai 24.116 judul buku, dan pada tahun 2022 mencapai 24.361 judul buku. Serta kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 24.842 buku.

**Tabel 2.142**  
**Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	45.65	46.27	47.12	47.31	46.56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan kearsipan, 2024

Persentase koleksi buku mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 sebesar 45.65%, naik sebesar 46.27% di tahun 2020, 47.12% di tahun 2021, dan 47.31% di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 turun menjadi 46.56%

**C. Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat**

**Tabel 2.143**  
**Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki**  
**Sertifikat Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	5	6	6	12	9

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2022 sebanyak 12 orang. Hal tersebut merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 9 orang.



### 2.4.2.18 Kearsipan

**Tabel 2.144**  
**Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku**  
**Tahun 2019– 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	60	60	60	71	71

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Persentase perangkat daerah pengelola arsip baku cenderung stagnan dari tahun 2019 sampai 2021 yaitu sebesar 60%, dan meningkat pada tahun 2022 sampai 2023 menjadi 71%.

**Tabel 2.145**  
**Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku**  
**Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	SKPD	33	33	33	30	30

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku dari tahun 2019 sampai 2021 sebanyak 33 OPD, pada tahun 2022 sampai 2023 , menurun menjadi 30 OPD.

**Tabel 2.146**  
**Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Baku Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku (%)	Persen	60	70	70	71	71

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Persentase penerapan pengelolaan arsip baku naik dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 sebesar 60% kemudian naik pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 70%, kembali naik pada tahun 2022 sampai 2023 menjadi 71%.



**Tabel 2.147**  
**Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	n.a	1	2	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2019 berjumlah 1 kegiatan, 2020 tidak ada, dan kembali ada di tahun 2021 sebanyak 1 kegiatan, tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan dan meningkat menjadi 4 kegiatan di tahun 2023.

### 2.4.3 Fokus Urusan Pilihan

#### 2.4.3.1 Pariwisata

**Tabel 2.148**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	55.012	49.579	242.665	188.409	153.819

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah kunjungan wisata mengalami fluktuatif. Puncak kunjungan berada di tahun 2021 sebanyak 242.665 orang. Akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 188.409 orang. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 153.819 orang.

**Tabel 2.149**  
**Jumlah Destinasi Wisata Tahun 2018 – 2022**

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Destinasi Wisata	Unit	3	5	7	14	30

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, 2023

Jumlah destinasi wisata pada tahun 2018-2020 dapat dikatakan stagnan. Angka tersebut naik dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi 14 destinasi. Pada

tahun 2023 mengalami kenaikan Kembali yakni menjadi 30 lokasi. Berikut adalah daftar destinasi wisata di Kabupaten Pamekasan:

**Tabel 2.150**  
**Objek Wisata Tahun 2023**

<b>Jenis Wisata</b>	<b>Obyek Wisata</b>	<b>Keterangan</b>
Wisata Pantai	Pantai Talang Siring	10 Km Kearah Timur dari Kota Pamekasan
	Pantai Jumiang	Mudah dijangkau kendaraan roda dua dan 4 dengan jarak 15 Km dari pusat kota
	Pantai Batu Kerbuy	Terletak di Kecamatan Pasean dengan luas 5 Ha dengan keindahan alam pantainya yang menarik. Nama Batu Kerbuy diambil dari sebuah batu yang berbentuk seperti kerbau yang terletak 8 Km dari pantai
	Pantai The Legend	Berlokasi di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, pantai yang dijuluki "The Legend" oleh masyarakat sekitar ini, memiliki sejumlah spot foto yang sangat instagramable. Diinisiasi oleh Pemuda Anzor Desa Padelegan bersama Perhutani, pantai yang sebelumnya kotor dan tidak terawat ini, kini bisa menjadi jujukan wisata baru di Kabupaten Pamekasan.
Wisata Alam	Api tak Kunjung Padam	Biasa disebut dengan Jangka, terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan yang berjarak 4 Km dari pusat kota dengan prasarana jalan yang cukup baik. Juga telah tersedia kios dan warung souvenir
	Ekowisata Mangrove Lembung	Terletak di desa Lembung, dilengkapi dengan jalur trek mangrove sehingga pengunjung dapat menyisir kawasan mangrove dengan leluasa dan beristirahat di Gazebo-gazebo yang disediakan di beberapa titik di dalam kawasan Ekowisata Mangrove Lembung.
	Puncak Ratu	Lokasinya berjarak 20 Km dari pusat kota, berada di ketinggian sekitar 200 MDPL membuat kita bisa menikmati pemandangan yang menyegarkan mata dari atas. Di puncak ini juga menyediakan spot selfie menarik dan juga ada kafe dengan arsitektur unik untuk melepas penat.
	Bukit Kehi	Berjarak 22 Km dari Kota Pamekasan, Bukit Kehi menawarkan panorama alam yang indah dengan perbukitan yang mengelilingi destinasi wisata ini. Dilengkapi dengan adanya spot selfie dan kolam renang dan lapangan futsal. Selain itu pengunjung juga bisa menikmati suguhan khas berupa minuman dan buah legen yang menyegarkan.



Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan
	Bukit Brukoh	Bukit Brukoh menjadi salah satu destinasi wisata Pamekasan yang cocok untuk anda kunjungi ketika liburan akhir pekan. Panorama alam terbaik dengan suasana mendamaikan akan menghilangkan stres dengan bisingnya perkotaan. Banyak spot foto menarik dari Bukit Brukoh dengan landscape perbukitan hijau, nikmati kesegaran alamnya bersama keluarga. Liburan menjadi aktivitas menarik ketika menghabiskan akhir pekan, rasakan keseruannya untuk kembali ke rutinitas yang membosankan.
	Lembah Sempir	Tempat wisata itu pertama kali ditemukan Mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, satu bulan yang lalu. Pemandangan menawan yang disuguhkan Lembah Sempir menjadi alasan utama Mahasiswa STAIN untuk mengajak kepala desa Tlontoh Dajeh dan masyarakat setempat untuk membangun tempat tersebut untuk dijadikan tempat wisata baru.
	Goa Emas	Berlokasi di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kec. Batu Marmar, Pamekasan. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, gua ini ditemukan secara tidak sengaja oleh salah satu warga Dusun Rojing, Desa Blaban yang pada waktu itu tengah berupaya untuk menggali sumur.
Wisata Ziarah	Makam Keramat Pasarean Batuampar	Makam para ulama yang memiliki Karomatullah yang besar setara denganpara Waliyulloh atau Wali Songo. Terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo sekitar 15 Km dari pusat kota.
	Vihara alokites vara	Berada di Kampung Candi Desa Monto' Kecamatan Galis (14 Km dari Kota Pamekasan), berdekatan dengan Pantai Talangsiring. Vihara terbesar kedua di Pulau Jawa. Salah satu keunikannya, yaitu di dalam kompleks Terdapat Musholla, Gereja dan Pura yang Melambangkan kerukunan beragama
	Situs Pangeran Ronggo Sukowati	Terletak di Kelurahan Kolpajung Kabupaten Pamekasan kira-kira 1 Km sebelah utara alun-alun Kota Pamekasan. Situs ini merupakan kompleks makam Pangeran Ronggo Sukowati dan Keluarganya, merupakan raja Islam pertama dan pendiri Kabupaten Pamekasan. Situs Pangeran Ronggo Sukowati merupakan kompleks pemakaman Islam tertua di Pamekasan termasuk juga di wilayah Madura



Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan
	Pasarean Joko Tarub	Makam ini memang tidak begitu populer tapi memiliki cerita dan keunikan tersendiri. Sejarahnya, Ki Ageng Joko Tarub berasal dari Banten bersama ayahnya Syeh Maulana Maulidi menyebarkan agama Islam ke Madura. Dalam menjalankan misinya, kemudian Ki Ageng Joko Tarub menikah dengan Nawang Wulan dan memiliki anak bernama Nawang Sari. Di Lokasi pemakaman ini, juga terdapat kolam yang dianggap sebagai taman pemandian bidadari dan surau (langgar) yang konon ada dengan sendirinya.
Wisata Budaya	Sapi sonok	Merupakan kontes Merupakan kontes pasangan sapi betina yang terdiri dari jenis ras Madura, dengan kriteria penilaian : kecantikan, penampilan, dan kekompakan dalam berlaga di arena kontes. di Kabupaten Pamekasan, lokasi kontes sapi sonok terletak di Desa Waru Barat Kecamatan Waru ± 34Km arah utara dari Kota Pamekasan, dengan kondisi jalan aspal dapat ditempuhdengan menggunakan sarana transportasi mobil angkutan umum.
	Upacara Petik Laut	Merupakan pesta rakyat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas keberhasilannya dalam mengarungi lautan, dalam kegiatannya diawali dengan acara keagamaan dan diakhiri dengan pagelaran seni dan Budaya setempat. Lokasi kegiatannya terletak di DesaPadelegan Kecamatan Pademawu ± 16 Km arah tenggara dari Kota Pamekasan, dapat ditempuh dengan sarana mobil angkutan umum/ojek dengan kondisi jalan aspal
	Karapan Sapi	Perlombaan sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar sepuluh detik sampai satu menit. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun, dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di eks Kota Karesidenan, Pamekasan untuk memperebutkan Piala Bergilir Presiden.
	Ul Daul	Ul daul pada awalnya hanya sebatas tongtong (gentongan) yang di pukul mengelilingi desa oleh sekelompok warga untuk membangunkan masyarakat desa pada waktu sahur. Namun lama kelamaan semakin berkembang dengan ditambahkan alat musik baru seperti gong, kenong, gendang, rebana, kereta dorong sebagai alat penggeraknya, dll. Ul daul diminati oleh masyarakat selain karena kekhasan dalam perpaduan instrumennya, juga karena dekorasi kereta dorongnya yang indah dan artistik.



Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan
	Museum Mandhilaras	Museum Mandhilaras terletak berdekatan dengan Monumen Arek Lancor tepatnya disebelah utara. Memiliki koleksi benda-benda bersejarah, berupa keris, dan senjata mulai berkuasanya Sultan Agung Mataram dan VOC, zaman Pangeran Jokotole, dan Penembahan Ronggosukowati. Selain itu museum Mandhilaras juga menyimpan Kitab Kuno yang terbuat dari daun lontar, batik terpanjang, uang kuno dan banyak benda bersejarah lain
	kampoeng Toron Samalem	Lokasinya berjarak 5.5 Km dari pusat kota. Tempat wisaa ini memiliki keunikan tersendiri karena dibangun di atas bekas penambangan batu. Mengambil bentuk bangunan khas Papua membuat destinasi wisata toron samalem mempunyai ke khasan tersendiri. Selain itu ada juga kolam renang bagi anak-anak yang ingin bermain air.
	Kampung Durian	Wisata Kampung Durian ini ada sebanyak 50 pohon durian itu yang dipenuhi dengan buah durian dengan berbagai ukuran. Kampung durian yang menawarkan berbagai macam durian mulai dari durian Montong, Blimbing, dan Kasor, sangatlah cocok untuk dijadikan tempat liburan.
	Taneyan Lanjheng	Merupakan sebuah struktur khas hunian masyarakat madura yang dapat dijumpai di Dusun Budhagan, Larangan Luar. Disini pengunjung dapat mengetahui dan mempelajari struktur rumah adat asli madura, selain itu pengunjung dapat menginap di rumah adat yang ada dilokasi.
	Pasar Batik 17 Agustus	Sentra batik tradisional Madura yang berlokasi di Jalan Pintu Gerbang ini menyajikan berbagai macam pilihan jenis batik Madura, khususnya pamekasan dengan berbagai macam corak dan motif dalam bentuk kain maupun pakaian jadi. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah.
	Cafe Sawah	Di kafe yang terletak di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan ini wisatawan bisa bersantai sekaligus menikmati pemandangan alam pertanian. Nantinya pengunjung akan merasakan dua nuansa sekaligus, nuansa pegunungan sekaligus sawah yang menghampar
	Eduwisata Garam	Wisata ini terletak di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Selain berswafoto, para pengunjung juga bisa menikmati susur sungai di hutan mangrove menggunakan sebuah perahu yang telah disiapkan oleh pengelola, serta bisa melihat langsung proses produksi garam secara tradisional.



Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan
	Kampung Batik Klampar	Merupakan salah satu senta batik tulis yang letaknya kurang lebih 7 km dari pusat kota Pamekasan. Di Kampung Batik Klampar ini terdapat setidaknya 300 pengrajin batik yang meneruskan usaha keluarga hingga saat ini.
	Masjid Agung Asy Syuhada	Menilik catatan sejarah, Masjid Agung Asy-Syuhada' Kabupaten Pamekasan bermula dibangun di tempat yang sama yaitu tempat Masêghit Rato atau masjid raja karena yang mendirikan masjid yang mula-mula tersebut adalah Raja Ronggosukowati. Raja Ronggosukowati memang merupakan raja Pamekasan yang pertama beragama Islam. Dengan demikian masjid yang ada saat ini merupakan pengembangan dari Masêghit Rato tersebut.
	Kawasan Sae Salera	Kawasan Sae Salera merupakan tempat kuliner segala macam masakan khas madura dan luar daerah buka dari sore dan malam hari. Lokasi yang berada di jantung kota menjadikan lokasi ini tempat favorit untuk berkuliner bersama teman dan keluarga. Bagi anda wisatawan daerah dan lokal mampirlah ke tempat ini untuk menikmati masakan khas daerah terutama segala jenis sate dan Sate Lalat (Sebutan sate karena ukuran yang kecil)

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Pamekasan, 2024

**Tabel 2.151**  
**Jumlah Pengunjung Domestik Destinasi Wisata di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 – 2023**

NAMA DESTINASI WISATA	2021	2022	2023
Pantai Jumiang	16.710	16.025	10.274
Pantai Talang Siring	21.622	28.260	30.000
Eko Wisata Mangrove Lembung	6.857	5.363	2.674
Kampoeng Toron Samalem	11.788	4.648	3.823
Puncak Ratu	18.541	30.611	37.417
Kampung Durian	9.730	20.318	16.771
Api Tak Kunjung Padam***	5.900	-	



<b>NAMA DESTINASI WISATA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bukit Kehi	13.606	9.526	7.414
Bukit Brukoh *	1.043	-	
Museum Mandhilaras	213	3.601	5.905
Vihara Avalokitesvara	180	-	
Pasarean Batu Ampar	128.374	-	
Wisata Sawah**	2.947	2.416	
Eduwisata Garam****	5.154	-	1.027
Pantai The Legend		51.083	12.443
Wisata Terpadu Bhurunan Murtajih		1.997	755
Wisata Taman Edukasi Titik Sejuta Warna		24.287	24.344
<b>Jumlah</b>	<b>242.665</b>	<b>198.135</b>	<b>152.847</b>

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung destinasi pada tahun 2021 berjumlah 242.665 orang dan 198.135 orang di tahun 2022. Dapat diketahui bahwa terjadi penurunan secara drastis pada tahun 2022. Penurunan disebabkan terjadi penurunan animo kunjungan masyarakat terhadap beberapa lokasi wisata. Sementara pada tahun 2023 tercatat sebanyak 152.847 orang pengunjung.

**Tabel 2.152**  
**Data SDM pelaku/pengelola pariwisata yang bersertifikat**

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jumlah SDM pelaku/pengelola pariwisata yang bersertifikat.(peserta)	Orang	-	-	50	39

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Pamekasan, 2023

Berdasarkan data di atas Jumlah SDM pelaku/pengelola pariwisata yang bersertifikat pada tahun 2021 berjumlah 50 peserta dan 39 peserta di tahun

2022. Dapat diketahui terjadi penurunan jumlah peserta dikarenakan menurunnya minat masyarakat untuk mengikuti pembekalan dan sertifikasi untuk sektor kepariwisataan.

**Tabel 2.153**  
**Kontribusi Bidang Pariwisata terhadap PAD**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Data Kontribusi Bidang pariwisata terhadap PAD	Persen	0.000912	0.000938	0.00046	0.01901	3.001

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Pamekasan, 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa data kontribusi bidang pariwisata terhadap PAD terus mengalami kenaikan. Kenaikan drastis terjadi di tahun 2022. Pada tahun 2021 kontribusi sebesar 0.01901, sedangkan tahun 2022 sebesar 3.001.

**Tabel 2.154**  
**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	412	445	482	534	548

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Pamekasan, 2023

Dari tahun ke tahun jumlah pelaku ekonomi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebanyak 412 orang. Naik di tahun 2019 menjadi 445 orang. Pada tahun 2020 menjadi 482, dan pada tahun 2021 naik menjadi 534, hal ini menunjukkan kenaikan terus dirasakan hingga tahun 2022, menjadi 548 orang.



### 2.4.3.2 Pertanian

**Tabel 2.155**  
**Data Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan**  
**Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi/Provitas sub sektor tanaman pangan	Ton	274.372	206.368	199.735	209.853	266.724
Produksi/Provitas sub sektor tanaman hortikultura	Ton	50.792	80.440	65.971	62.008	100.826
Produksi/Provitas sub sektor tanaman perkebunan	Ton	n.a	n.a	n.a	19.098	11.273
Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya	Ton	274.372	206.368	209.606	209.853	107.649
Produksi/Provitas sub sektor peternakan	Ton	n.a	10.149	10.534	10.338	8.854

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pamekasan 2023

Produksi tanaman pangan cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali menaik dan produksi sebanyak 209853 di tahun 2021 dan 266724 di tahun 2022. Untuk produksi tanaman hortikultura naik pada tahun 2019 yaitu sebanyak 80440 ton, dan menurun hingga tahun 2021. Akan tetapi di tahun 2022 meningkat drastis sehingga mencapai 100826 ton. Produksi tanaman perkebunan tahun 2021 sebesar 19098 ton, namun menurun di tahun 2022 menjadi 11273 ton. Produksi padi atau bahan lokal lainnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 sebanyak 274.372 ton, menurun di tahun 2019 menjadi 206.368 ton. Kemudian stagnan di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 209.606 ton dan 209.853 ton. Produksi padi atau bahan lokal lainnya menurun drastis di tahun 2022 menjadi 107.649 ton. Sedangkan untuk produksi peternakan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 10534 ton. Namun menurun pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing pada angka 10338 ton dan 8854 ton.

**Tabel 2.156**  
**Produksi Padi, Produksi Jagung dan Kedelai dan Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Jagung di Kabupaten Pamekasan	Ton	91.101	86.423	84.194	151.432	89.023
Produksi Kedelai di Kabupaten Pamekasan	Ton	321	n.a	n.a	241	1.527
Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya	Ton	206.368	209.606	209.853	310.258	296.638
Produksi Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman	Ton	354.783	377.761	301.723	314.768	30.936

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka, 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa produksi padi, kedelai, dan jagung, serta tanaman sayuran mengalami fluktuasi. Pada produksi jagung, puncak produksi berada di tahun 2022 yakni sebesar 151.432 ton. Untuk tanaman kedelai, puncaknya berada di tahun 2023 yakni sebesar 1.527 ton. Sedangkan pada tanaman padi produksi tertinggi di tahun 2022 sebesar 310.258 ton, dan tanaman sayuran produksi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 377.761 ton.

**Tabel 2.157**  
**Luas Panen Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Tanaman Buah di Kabupaten Pamekasan (ton)	Mangga	142.023	6.667	9.161	16.236	22.741
	Durian	4.591	685	1.084	922	919
	Pisang	24.850	10.594	9.100	9.297	9.191
	Jeruk	27.143	1.566	1.665	1.663	1.651
	Pepaya	150.027	1.093	1.010	1.176	1.424
	Salak	2	1	1	3	3
Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha)	Bawang Merah	2.287	2.726	2.736	2.581	2.447
	Cabe Rawit	2.465	2.587	2.051	2.490	2.558

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2024

Luas panen tanaman sayuran dalam hal ini bawang merah dan cabe rawit mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019, luas panen bawang merah sebanyak

2.287, pada tahun 2023 menjadi 2.447. Sedangkan untuk cabe rawit, pada tahun 2019 sebanyak 2.465, dan menjadi 2.558 di tahun 2023.

**Tabel 2.158**  
**Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**di Kabupaten Pamekasan**

<b>Uraian</b>	<b>Komoditi</b>
Padi dan Palawija	Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Kedelai
Buah -buahan	Jeruk, Mangga, Jambu, Rambutan, Pisang, Alpukat, Durian, Pepaya, Sawo, Nanas dan Salak
Sayur - sayuran	Bawang Merah, Bawang Daun, Kacang Panjang, Lombok, Tomat, Buncis, Terong, Ketimun, Kangkung, dan Bayam
Perkebunan semusim	Tembakau, Tebu, Cabe Jamu
Perkebunan (Tanaman Keras)	Kelapa, Jambu Mete, Kapuk Randu

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2023

**Tabel 2.159**  
**Jumlah Produksi Tanaman Buah di Kabupaten Pamekasan 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Hasil Produksi</b>
Mangga	Kuintal	235.137
Durian	Kuintal	9.192
Pisang	Kuintal	91.909
Jeruk	Kuintal	16.509
Pepaya	Kuintal	14.235
Salak	Kuintal	30

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Jumlah produksi tanaman buah tahun 2023 tertinggi diraih oleh Buah Mangga yaitu sebanyak 235.137 kuintal sedangkan terendah yakni Buah Salak yaitu sebanyak 30 kuintal.



**Tabel 2.160**  
**Produksi Menurut Jenis tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim**  
**tanaman di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Jenis Tanaman	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Bawang Daun	kuintal	1.284,00	1147	1.657	1.469	1.724
Bawang Merah	kuintal	157.113	197.910	191.866	185.671	177.696
Bawang Putih	kuintal	-	-	-	-	-
Bayam	kuintal	2.045,00	1.641,00	1 771	2 302	2.455
Blewah	kuintal	-	-	-	-	-
Buncis	kuintal	1.634,00	600	930	1 044	36
Cabai Besar	kuintal	15.624,00	14.507	7 252	16 810	28.482
Cabai Rawit	kuintal	156.211,00	130.004	65 437	82 119	78.395
Jamur	kuintal	-	-	-	-	-
Kacang Merah	kuintal	-	-	-	-	-
Kacang Panjang	kuintal	4.833,00	2.800,00	2 848	2 915	755
Kangkung	kuintal	3.737,00	3.035,00	2 953	3 300	4.224
Kembang Kol	kuintal	5	-	-	70	100
Kentang	kuintal	-	-	-	-	-
Ketimun	kuintal	2.522,00	2.679,00	8 615	5 789	4.646
Kubis	kuintal	10	205	-	210	200
Labu	kuintal	145	115	126	110	288
Lobak	kuintal	-	-	-	-	-
Melon	kuintal	-	1.045,00	340	370	220
Paprika	kuintal	-	-	-	-	-
Petsai	kuintal	1.005,00	909	2 220	3 040	2.085
Semangka	kuintal	10.731,00	9.732,00	9 135	6 152	4.426
Stoberi	kuintal	-	-	-	-	-
Terung	kuintal	3.373,00	2.693,00	2 946	857	1.045
Tomat	kuintal	5.242,00	5.158,00	2 544	1 854	2.415
Wortel	kuintal	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

**Tabel 2.161**  
**Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis**  
**Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 – 2023**

Kecamatan	Bawang Merah				Cabai Rawit			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tlanakan	2	2	-	2	327	340	340	330
Pandemawu	10	22	32	24	1	2	3	10
Galis	15	21	24	12	2	-	1	-
Larangan	2	4	3	7	58	70	70	65
Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	-
Proppo	9	9	4	11	21	62	24	112
Palengan	10	10	-	1	257	203	193	294
Pegantenan	4	4	11	-	354	312	280	65
Kadur	9	16	16	9	242	242	254	437
Pakong	2	3	2	2	5	2	2	2
Waru	320	302	260	265	358	175	455	455
Batumarmar	2.025	1.911	1.879	1.935	618	169	412	358
Pasean	318	383	350	179	350	475	456	430
<b>Kabupaten Pamekasan</b>	<b>2.726</b>	<b>2.736</b>	<b>2.581</b>	<b>2.447</b>	<b>2.887</b>	<b>2.051</b>	<b>2.490</b>	<b>2.558</b>

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2024

### 2.4.3.3 Kehutanan

Urusan Kehutanan merupakan urusan suatu daerah yang berhubungan dengan aset hutan. Adanya menjadi penting karena merupakan suatu penjamin secara hukum dalam hal penjagaan lingkungan dari polusi dan kerusakan lainnya. Kabupaten pamekasan sebagai salah satu kabupaten di kepulauan madura yang tidak memiliki aset hutan raya.

### 2.4.3.4 Perdagangan

**Tabel 2.162**  
**Jumlah Sarana Perdagangan di Pasar Menurut Lokasi Pasar di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pasar	unit	15	15	15	15	15
Toko	unit	614	614	614	614	585
Kios	unit	4.305	4.305	4.305	4.305	3.469
Warung	unit	989	989	989	989	1309
Jumlah	unit	5.923	5.923	5.923	5.923	5.378

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Jumlah sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 tercatat tetap. Jumlah pasar di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023 sebanyak 15 pasar. Jumlah toko tahun 2019 sebanyak 614 toko. Angka tersebut konstan hingga tahun 2022. Sedangkan pada tahun

2023 menurun menjadi 585 toko. Hal tersebut juga terjadi pada jumlah kios dan warung. Jumlah kios pada tahun 2022 sebanyak 4.305 kios menurun pada tahun 2023 menjadi 3.469, sedangkan jumlah warung yakni 989 warung, naik pada tahun 2023 menjadi 1.309.

### 2.4.3.5 Perindustrian

**Tabel 2.163**  
**Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Industri	Persen	0,93	11.55	8.35	19.91	38.81

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan, 2024

Pertumbuhan industri pada tahun 2019 hingga 2021 berfluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 0.93% kemudian naik pada tahun 2020 menjadi 11.55%, dan turun pada tahun 2021 menjadi 8.35%. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan menjadi 19.91% dan 38.81%.



**Tabel 2.164**  
**Banyaknya Perusahaan Industri, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi**  
**Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Unit Usaha (Unit)	14.792	16.500	17.877	21.437	29.756
Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	48.072	51.533	55.546	64.698	85.904
Jumlah Nilai Investasi (Juta Rp)	35.231.800.000	48.114.400.000	60.878.890.000	116.716.023.000	238.038.181.000

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2024

Jumlah unit usaha pada tahun 2019 sebanyak 14.792 unit, mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 16.500, kembali naik menjadi 17.877 unit pada tahun 2021 hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 29.756 unit. Untuk jumlah tenaga kerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023 masing-masing yakni 48.072, 51.533, 55.546, 64.698, dan 85.904 orang. Sedangkan jumlah nilai investasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni senilai 238.038.181.000 (Juta Rp).

**Tabel 2.165**  
**Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan	Unit	14.729	16.500	17.877	21.437	29.756

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Banyaknya perusahaan industri terus mengalami kenaikan. Terlihat pada tahun 2019 yakni sebanyak 14.729 unit, 16.500 di tahun 2020 unit, dan 17.877 unit pada tahun 2021, 21.437 di tahun 2022, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 29.756 perusahaan.



**Tabel 2.166**  
**Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk	Unit	260	315	95	120	140

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Jumlah IKM yang melakukan inovasi produk dengan unit tertinggi berada di tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 261 dan 315. Hal tersebut tidak bertahan lama, sebab terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 95 hingga 2023 tercatat terdapat 140 IKM yang melakukan inovasi produk.

**Tabel 2.167**  
**Persentase Kerjasama Produksi Antar IKM yang Telah Dibina**  
**Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kerjasama Produksi antar IKM yang Telah Dibina	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Persentase Kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina mencapai sebesar 100%.

**Tabel 2.168**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Kelompok	26,8	28,43	28,43	28,43	28,43

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2019 mencapai angka yang sama yakni 26,8%. Sedangkan untuk tahun hingga 2023 stagnan yakni 28,43%.

**Tabel 2.169**  
**Jumlah Sentra Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sentra industri di Kabupaten Pamekasan	Unit	286	286	287	287	287

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Jumlah sentra industri mengalami stagnan, yakni sebanyak 286 unit, namun bertambah 1 unit di tahun 2021 sampai 2023 sehingga total unit sebesar 287.

**Tabel 2.170**  
**Tenaga Kerja Industri Unggulan Batik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tenaga kerja industri unggulan batik	Orang	6.550	6.846	7.051	7.506	7.677

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Tenaga kerja industri unggulan batik pada tahun 2019 sebesar 6.550 orang, terjadi kenaikan di tahun 2020 menjadi 6.846 orang. Pada tahun 2021 sampai 2023 jumlah tenaga kerja industri unggulan batik terus mengalami peningkatan menjadi 7.677 orang.

#### 2.4.3.6 Transmigrasi

**Tabel 2.171**  
**Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2022**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Transmigran asal Pamekasan	KK/orang	8/27	0	0	6/23	3/8
Jumlah Transmigran di Pamekasan	KK/orang	0	0	0	0	0
Jumlah Kawasan Transmigran	Kawasan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024



Jumlah transmigran asal Pamekasan berjumlah 0 orang. Jumlah transmigran yang berada di Pamekasan berjumlah 0 orang. Jumlah kawasan transmigran sebanyak 0 kawasan.

### 2.4.3.7 Kelautan dan Perikanan

#### A. Produksi Perikanan

**Tabel 2.172**  
**Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan	ton	22.820,90	23.513,90	21.199,39	21.783,02	23.923,24
Perikanan Tangkap	ton	21.886,10	22.592,30	20.564,80	20.702,38	22.809,40
Perikanan Budidaya	ton	934,08	921,6	634,59	1.080,64	1.113,84
Produk Budidaya Tambak	ton	176,97	209,9	111,37	358,54	393,50
Produksi Budidaya Kolam	ton	634,61	702,1	523,22	722,11	720,34
Produksi Budidaya Laut	ton	122,50	9,6	n.a	n.a	n.a
Produksi Garam	ton	152.540,50	38.836,30	27.005,03	22.888,20	124.407,74

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2024

**Tabel 2.173**  
**Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Udang Vannamei	Ton	173,64	8,07	108,81	349,32	389,72
Bandeng	Ton	3,33	201,84	2,56	3,7	2,54
Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan (ton)	Ton	176,97	209,9	111,37	358,54	393,48

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah produksi ikan tambak menurut jenisnya pada tahun 2019 sebanyak 176,97 ton. Kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 209,9 ton, dan kembali mengalami penurunan menjadi 111,37 ton pada tahun 2021. Puncaknya pada tahun 2023 naik menjadi 393,48 ton.

**Tabel 2.174**  
**Jumlah dan persentase Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi ikan (Laut)	Ton	22.820,18	23.513,90	21.199,39	21.783,03	23.923,24
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/k pt /thn	41.29	46.07	57.89	64.42	n.a

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2024

## B. Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

**Tabel 2.175**  
**Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	128	137	137	139	95
Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Kelompok	49	53	47	52	59
Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR)	Kelompok	46	56	49	37	35
Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)	Kelompok	164	147	167	167	166
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	7	7	7	7	8
<b>Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan</b>	<b>Kelompok</b>	<b>394</b>	<b>400</b>	<b>457</b>	<b>402</b>	<b>363</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2024

**Tabel 2.176**  
**Banyaknya Desa Perikanan dan RTP di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Tangkap	Ton	2,632	2,632	2,632	2,530	2,530
Perikanan Budidaya	Ton	539	453	455	463	527
Perikanan Unit Pengolah Ikan (UPI)	Ton	365	389	420	457	591
Perikanan Pemasar/Pedagang Ikan	Ton	888	888	888	1.149	1.149

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah perikanan tangkap dari tahun 2019 sampai 2021 stagnan sebesar 2.632 orang, sedangkan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 2.530 orang. Sedangkan pada perikanan pemasar/pedagang ikan pada tahun 2019 sampai 2021 stagnan sebanyak 888 orang, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.149 orang.

### C. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

**Tabel 2.177**  
**Produksi Perikanan Tangkap dan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tlanakan	Ton	11.487,70	14.981,33	12.877,33	12.905,41	14.568,78
Pademawu	Ton	4.545,20	3.490,50	2.657,89	2.788,52	2.919,44
Galis	Ton	673	488,25	636,88	536,45	822,39
Larangan	Ton	1.502,60	658,73	521,29	491,29	540,10
Kadur	Ton	224	90,95	66,79	76,19	86,68
Pasean	Ton	2.860,30	1.950,28	2.987,12	2.687,18	2.911,01
Batumarmar	Ton	593,3	1.032,26	817,5	1.217,34	960,80

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2024

**Tabel 2.178**  
**Produksi Ikan Olahan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun**  
**2019 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tlanakan	Ton	3.930,24	2.203,41	2.156,01	2.236,51	2.809,33
Pademawu	Ton	3.534,98	3.571,19	1.922,22	1.663,23	2.480,25
Galis	Ton	505,79	255,38	248,24	208,63	447,16
Larangan	Ton	1.359,30	259,75	308,75	395,87	571,93
Pakong	Ton	n.a	4,43	0,49	0,24	600,00
Pasean	Ton	453,39	441,57	326,83	387,04	505,75
Batumarmar	Ton	52,01	15,18	7,89	56,6	357,98
Pamekasan	Ton	59,08	18,62	32,36	109,16	69,84
Propopo	Ton	n.a	n.a	n.a	1,19	1.090
Palengaan	Ton	n.a	n.a	n.a	n.a	62,00



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Ikan Olahan dan Jenisnya di Kabupaten	Ton	9.894,79	6.769,53	5.002,79	5.057,28	7.842,24

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2024

Produksi ikan olahan lambat laun mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebanyak sebanyak 9.894,79 ton, menurun di tahun 2020 yakni 6.769,53 dan turun menjadi 5.002,79 di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 naik kembali menjadi 5.057,28 dan kembali naik menjadi 7.842,24 ton.

Sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Pamekasan, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan. hal tersebut juga selaras dengan prioritas nasional yaitu mengembangkan model ekonomi biru (blue economy) sebagai salah satu strategi utama dalam peningkatan ekonomi Nasional. Pelabuhan Perikanan yang terletak di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan telah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) untuk dikembangkan sebagai prasarana penunjang sektor perikanan.

## 2.4.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

### 2.4.4.1 Sekretariat Daerah

**Tabel 2.179**  
**Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	68,81	70,02	70,02	72,62	73,10

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2024

Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2021-2023 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Pada tahun tahun 2019 sebesar 68,81, tahun 2020 menjadi 70,02 dan pada tahun 2021



sebesar 70,02. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 72,62 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 73,10.

**Tabel 2.180**  
**Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,78 (C)	3,61 (C)	3,86 (B)

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2024

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mendapatkan indeks mencapai 2,78 dengan kategori Cukup, tahun 2022 mendapat nilai 3,61 dengan kategori Cukup, kemudian Pada tahun 2023 Indeks Pelayanan Publik mendapat nilai 3,86 meningkat dari tahun sebelumnya dengan kategori Baik. Berdasarkan hasil Indeks Pelayanan Publik yang didapatkan tersebut, perlu adanya peningkatan di tahun selanjutnya.

**Tabel 2.181**  
**Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Nilai	85,04 (Hijau)	n.a.	61,53 (Kuning)	76,39 (Kuning)	86,92 (Hijau)

Sumber: Ombudsman RI, 2024

Nilai Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 mendapat nilai 85,04 dengan predikat hijau. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 mencapai 61,53 dengan predikat kuning. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,39 namun masih dengan predikat yang sama yaitu kuning. Sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 86,92 dengan peredikat Hijau.



**Tabel 2.182**  
**Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 dan 2023**

Indikator	Satuan	2021	2023
Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	35,41	30,12

Sumber: Lembaga Administrasi Negara, 2024

Ket : penilaian dilaksanakan pada tahun ganjil

Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Pamekasan baru diadakan pada tahun 2021 mencapai 35,41

**Tabel 2.183**  
**Nilai LPPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai LPPD	Skor	3,163	n.a.	n.a.	n.a.	2.74

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten pamekasan, 2023

Nilai LPPD mengalami kenaikan pada 2018 menjadi 3,1630 dari tahun 2017 yang sebesar 2,665. Penyebab kenaikan nilai LPPD adalah ketepatan dan validitas dalam pelaporan data Perangkat Daerah. Sedangkan skor untuk 2019 dan 2020 berurutan-turut adalah N/A. Pada tahun 2022 nilai LPPD mencapai 2.74.

**Tabel 2.184**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	65.94	80,81	n/a	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, 2023

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Pamekasan tahun 2018 mencapai 85. Pada tahun 2020 mencapai 80,81. Faktor pendorong yang menyebabkan peningkatan IKM Kabupaten Pamekasan adalah karena pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan SKM, melakukan survei kepuasan secara periodik setiap tahun sekali terhadap unit-unit pelayanan publik. Faktor penyebab rendahnya IKM adalah karena Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

masih belum dilakukan secara periodik oleh masing-masing PD, sehingga mengandalkan survei bagian organisasi yang terbatas sampling dan waktunya, motivasi dan semangat perangkat daerah dalam melakukan inovasi pelayanan masih rendah, sehingga perubahan peningkatan kualitas pelayanan masih rendah dan berdampak terhadap nilai kepuasan masyarakat yang diperoleh, survei kepuasan masih menggunakan metode yang menggabungkan antara ilmiah dan regulasi, sehingga hasil survei belum tepat dan akurat untuk mengukur nilai sesungguhnya.

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan sangat baik.

**2.4.4.2 Sekretariat DPRD**

**Tabel 2.185**  
**Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
PPP	Orang	9	12	12	12	12
PKB	Orang	5	7	7	7	7
PBB	Orang	5	3	3	3	3
P. Demokrat	Orang	5	6	6	6	6
PAN	Orang	5	2	2	2	2
P. Golkar	Orang	4	3	3	3	3
P. Nasdem	Orang	4	2	2	2	2
PKS	Orang	3	5	5	5	5
P. Gerindra	Orang	3	4	4	4	4
PDIP	Orang	2	1	1	1	1
<b>Laki-laki</b>	<b>Orang</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>Perempuan</b>	<b>Orang</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2024

Jumlah anggota DPRD menurut partai politik di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan sebanyak 42/3 orang pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 sampai tahun 2023 perbandingannya sebanyak 43/2.



**Tabel 2.186**  
**Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Ketua	Orang	1	1	1	1	1
Wakil Ketua	Orang	3	3	3	3	3
Komisi I	Orang	10	10	9	9	9
Komisi II	Orang	10	10	11	10	10
Komisi III	Orang	11	11	11	11	11
Komisi IV	Orang	10	10	10	11	11

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2024

Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 – 2022 memiliki formasi yang sama. Tahun 2019 sampai dengan 2022 susunan pimpinan dan komisi DPRD memiliki formasi 45 Orang.

**Tabel 2.187**  
**Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan	Kegiatan	17	30	14	17	33

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2024

Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan menurut jenis kegiatan pada tahun 2019 jumlahnya yaitu 17 kegiatan. Pada 2020 meningkat sejumlah 30 kegiatan. Kemudian, di tahun 2021 menurun menjadi 14 kegiatan. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 17 kegiatan serta kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 33 kegiatan.

**Tabel 2.188**  
**Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Keputusan DPRD Kabupaten. Pamekasan	Keputusan	17	30	6	31	22

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2024

Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan menurut jenis keputusan realisasinya cenderung fluktuatif. Realisasi tertinggi adalah pada tahun 2022 sejumlah 30 keputusan dan yang terendah di tahun 2021 sejumlah 6 keputusan. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 22 keputusan.

**2.4.4.3 Perencanaan**

**Tabel 2.189**  
**Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten**  
**Pamekasan tahun 2019 – 2023**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2	2	1	1

Sumber: Bapperida Kabupaten Pamekasan, Tahun 2024

Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah menyusun dokumen perencanaan RPJPD kemudian sudah menyusun dokumen perencanaan berupa RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, kemudian Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga sudah menyusun dokumen

RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda. Terkait dengan sistem Informasi Manajemen Pemda jumlah laporan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penambahan satu angka di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sejumlah 1, di tahun 2020 menjadi 2, sampai pada tahun 2021 menjadi 2 dan 1 pada tahun 2022 dan 2023. Penambahan ini dilakukan karena untuk mengupayakan mampu memberikan pelayanan sistem informasi kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan memberikan hasil yang maksimal sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.

**2.4.4.4 Keuangan**

**Tabel 2.190**  
**Persentase SP2D yang Terbit Kurang dari 2 Hari Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari (%)	Persen	25	25	40	40	40

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari memiliki capaian yang cukup fluktuatif, Pada tahun 2019 capaiannya mencapai 25% sampai pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 sampai 2023 mecapai 40%.

**Tabel 2.191**  
**Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar	Persen	100	100	100	100	80

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024

Persentase penyajian laporan barang milik daerah (LBMD) di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 capaian Persentase penyajian laporan barang milik daerah (LBMD) sebesar 100% dan menurun pada tahun 2023 menjadi 80% .

Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual capaiannya stabil dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mencapai 100% Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual.

**Tabel 2.192**  
**Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024

#### 2.4.4.5 Kepegawaian

**Tabel 2.193**  
**Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, Jabatan Struktural dan Indkes Indeks Profesionaliras ASN di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	4.746	4.826	4.707	5.509	5.783
Jumlah Pemangku Jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah	Orang	1.419	1.255	1.099	1.008	909
Jumlah Pemangku Jabatan structural pada instansi pemerintah	Orang	678	636	711	409	429



Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	Orang	76,23	78	45,07	45,45	73,76

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah pada tahun 2021 sebesar 4.707 orang, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2020 yakni 4.826. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.509 orang dan kembali meningkat menjadi 5.783 orang pada tahun 2023. Jumlah pemangku jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah pada tahun 2021 sebesar 1.099, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2020 dengan jumlah sebesar 1.255 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.008 orang dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 909 orang. Jumlah pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah tahun 2021 sebesar 711 orang, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2020 sebanyak 636 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 409 orang dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 429 orang.

Sedangkan untuk indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Pamekasan cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, indeks profesionalitas ASN mendapatkan nilai 76,23 kemudian naik menjadi 78 pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 menurun drastis menjadi 45,07 dan naik tipis menjadi 45,45 di tahun 2022. Tetapi kemudian indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Pamekasan melonjak naik menjadi 73,76 di tahun 2023.



**Tabel 2.194**  
**Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi di**  
**Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis	Persen	86	85	85	85	64

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2024

Presentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Namun, jika dilihat pada tahun 2020 hingga 2022 sebesar 85% hal ini lebih rendah dari tahun 2019 yakni sebesar 86%. Tetapi, jika dilihat pada tahun 2020 yang sebesar 85%, kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 64%, artinya bahwa terdapat 15% ASN yang belum memenuhi persyaratan kompetensi teknis. Selain itu, juga masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan.

**Tabel 2.195**  
**Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan**  
**Kompetensi Manajerial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 – 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial	Persen	52	61	76	78	45

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2024

Presentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial dari tahun 2019 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sebesar 52%, tahun 2020 mencapai 61%, dan tahun 2021 mencapai 76%, pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 78%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 45% pada tahun 2023.

### 2.4.4.6 Pengawasan

**Tabel 2.196**  
**Realisasi Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2021**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	79.85	83.22	90,06	84,49
Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Pelanggaran	20	22	4	27

Sumber: Inspektorat Daerah, 2022

#### **A. Persentase Tindak Lanjut Temuan**

Persentase tindak lanjut temuan menunjukkan pergerakan yang terbilang cukup fluktuatif dari tahun 2018 mengalami penurunan menjadi kembali hingga mencapai presentase 79.85%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 83.24%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 90,00%. Faktor pendorong yang menyebabkan meningkatnya persentase tindak lanjut temuan adalah adanya upaya dalam meningkatkan koordinasi dengan tim auditor terkait temuan yang belum sesuai rekomendasi dan belum ditindaklanjuti, asistensi/pendampingan atas hambatan dalam tindak lanjut temuan, penyusunan rencana aksi tindak lanjut dan pemantauan progress rencana aksi.

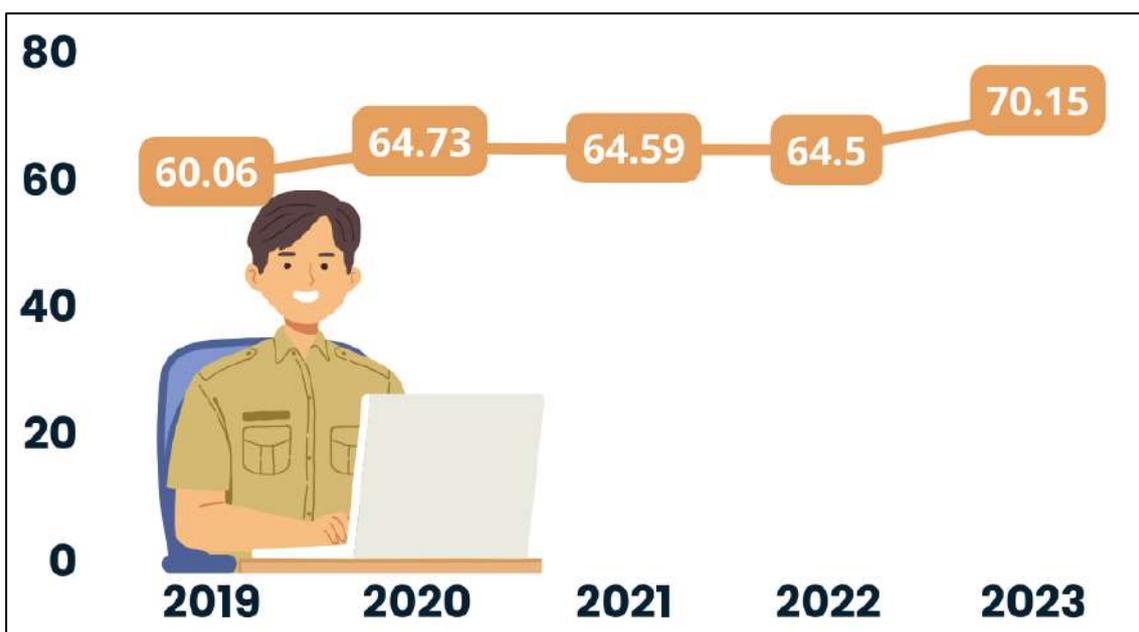
#### **B. Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai**

Kasus pelanggaran disiplin pegawai mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 20 kasus. Pada tahun 2019 mencapai 22 kasus. Pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebanyak 4 kasus. Faktor pendorong adalah telah terdapat pemberian reward dan punishment meskipun belum sepenuhnya berbasis individu, disamping itu faktor pendorongnya karena belum teroptimalnya budaya pengawasan berjenjang pada masing-masing Perangkat Daerah.

### 2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.

**Gambar 2.38**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019–2023**



Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Pamekasan, 2024

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Pamekasan dalam dua tahun terakhir terus mengalami penurunan. Nilai indeks pada tahun 2019 sebesar 60,06, kemudian naik menjadi 64,73 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,14 poin dari capaian tahun 2020 menjadi 64,59. Pada tahun 2022 penurunan kembali terjadi sehingga menjadi 64,5. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 menjadi 70,15. Peningkatan ini tentunya hasil dari kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka melayani Masyarakat.

### 2.4.6 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks inovasi daerah. Dari hasil indeks inovasi daerah ini selanjutnya dilakukan pemeringkatan/pengelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu sangat inovatif, inovatif, dan kurang inovatif.

**Tabel 2.197**

**Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2023**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	5346 (Sangat Inovatif)	54.35 (Inovatif)	69.95 (Terinovatif)	83.63 (Sangat Inovatif)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Pamekasan, 2024

### 2.4.7 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Reformasi birokrasi dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE. Di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Tabel 2.198**  
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten**  
**Pamekasan Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Indeks	2.22	3.01	2.12	2.10	2.89

Dari Tabel di atas Indeks SPBE Kabupaten Pamekasan dari tahun 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Namun pada tahun 2019, 2021 dan 2022 Predikat SPBE Kabupaten Pamekasan meraih predikat “Cukup”. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2023 predikat Indeks SPBE Kabupaten Pamekasan meraih kategori Baik.

#### **2.4.8 Standar Pelayanan Minimum**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Berikut tabel ketercapaian nilai SPM Kabupaten Pamekasan tahun 2021-2023:



**Tabel 2.199**  
**Capaian SPM Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023**

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Capaian SPM Bidang Pendidikan	Persen	80.69	97.5	93.09
Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	87.63	91.2	93.68
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	Persen	79.05	91.84	92.26
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	Persen	31.25	12.44	97.29
Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas	Persen	75.45	78.58	97.72
Capaian SPM Bidang Sosial	Persen	63.69	86.72	97.57

## **2.5. EVALUASI HASIL RPJPD KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2005-2025**

### **2.5.1. Evaluasi Indikator Makro.**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 menjadi bagian penting untuk pijakan menyusun arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045. Hasil Evaluasi berdasarkan data capaian indicator makro di Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2005-2025 adalah berikut ini:

**Tabel 2.200**  
**Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Pamekasan dalam Indikator Makro**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan 2023	Pertumbuhan / Penurunan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61,19	70,32	114,92
2	Pertumbuhan ekonomi.	4,48	4,96	110,71
3	Gini Ratio	n.a	0,348	0,348
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,42	1,74	50,87
5	Persentase Penduduk miskin	31,7	13,85	43,69
6	Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	70,15	70,15
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	n.a	84,94	84,94
8	Indeks Modal Sosial	n.a	81,03	81,03
9	Indeks Pembangunan Gender	n.a	86,97	86,97

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan, 2024

Pada indikator kinerja makro pertama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data strategis yang menjadi salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel diatas diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 sebesar 70,32 dengan capaian kinerja awal tahun 2005 sebesar 61,19. Selanjutnya indikator kedua berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 mengalami trend yang cenderung menurun sebesar 13,85 dibandingkan kondisi baseline awal tahun 2005 sebesar 31,7.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15



tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 mencapai 1,74. Hal ini tentu menjadi fokus pemerintah untuk semakin banyak lagi dalam menyediakan lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya pada indikator keempat pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan sebesar 4,96, hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi lebih baik dari capaian awal tahun 2005 sebesar 4,48.

Selanjutnya indikator kinerja makro keenam Capaian indikator pengeluaran per kapita di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 capaian pengeluaran per kapita di Kabupaten Pamekasan sebesar 392.345. Selanjutnya Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Pamekasan tahun 2023 tercapai 0,348.

Evaluasi terhadap RPJPD harus dilakukan secara berkala dan pembaruan RPJPD harus dilakukan bila diperlukan, agar rencana pembangunan daerah dapat terus disesuaikan dengan kondisi daerah yang terus berkembang. RPJPD yang baik adalah RPJPD yang konsisten dengan visi, misi. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah, efektif dalam mencapai target dan sasaran pembangunan, relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah, serta partisipatif masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, RPJPD yang baik juga harus



memperhatikan isu-isu keberlanjutan lingkungan dan aspek-aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Evaluasi RPJPD juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan rencana pembangunan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 2.5.2. Rekomendasi dalam Penyusunan RPJPD 2025-2045.

Salah satu tujuan dari evaluasi RPJPD Kabupaten Pamekasan periode 2005-2025 adalah untuk memberikan informasi yang akurat terkait hasil kinerja RPJPD sesuai pentahapan periode RPJMD yang memuat tingkat ketercapaian dan ketidak tercapaian, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kinerja RPJPD. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar perbaikan kedepan atau *continuous improvement* dalam penyusunan RPJPD kedepan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, maka beberapa rekomendasi tindak lanjut yang disajikan sesuai dengan hasil analisis evaluasi RPJPD periode 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada analisis yang teliti terhadap isu-isu strategis bersifat jangka panjang, kondisi dan potensi unggulan daerah, dengan melibatkan para ahli, birokrat, tokoh-tokoh masyarakat, pihak swasta, unsur ormas dan partisipasi masyarakat sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang visioner, realistis dan efektif.
2. Perumusan visi, misi, dan sasaran pokok serta arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan kedepan harus didasarkan pada analisis isu-isu strategis secara terstruktur, sistematis dan ideal kemudian menetapkan indikator kinerja yang bersifat *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*, dan *Continuously-improved* (SMART-C).
3. Perlu adanya perbaikan pengelolaan/manajemen data kinerja yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi sehingga mudah akses dan cepat ketika dibutuhkan, baik untuk perangkat daerah dan seluruh stakeholders



4. Rencana pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
5. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.
6. Pemerintah daerah harus terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan bila diperlukan.
7. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
8. Rencana pembangunan daerah harus selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah dan perubahan kebijakan nasional apabila diperlukan.
9. Konsisten perumusan RPJMD pada setiap priode pentahapan dalam RPJPD yang mengacu pada sasaran pokok, arah kebijakan dan indikatornya.

## **2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK**

### **2.6.1. Proyeksi Kondisi Demografi Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Penyediaan data Proyeksi Kondisi Demografi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan suatu daerah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa proyeksi demografi menjadi krusial. *Perencanaan Infrastruktur*: Proyeksi penduduk membantu dalam merencanakan penyediaan infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan mengetahui jumlah penduduk berdasarkan umur untuk beberapa tahun mendatang, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. *Bonus Demografi*: Proyeksi demografi memungkinkan kita untuk memahami fase bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia produktif mendominasi struktur umur. Ini



merupakan peluang besar bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Indonesia sendiri mengalami bonus demografi sejak tahun 2015, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035.

*Pengembangan Manusia:* Data hasil Sensus Penduduk dapat digunakan untuk mengukur kesiapan suatu daerah menuju kondisi ideal. Fokus pada pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi bagian penting dari visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas, dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. *Pemerataan Pembangunan:* Proyeksi penduduk membantu mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam pembangunan. Dengan memahami distribusi penduduk, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih merata dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui pemanfaatan proyeksi demografi, suatu daerah dapat mengambil langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pada perencanaan pembangunan jangka panjang, proyeksi kondisi demografi memiliki peran yang sangat penting. Konsep pembangunan berpusat pada rakyat (*people-centered development*) menjadi landasan utama, dimulai dengan pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi fokus perhatian dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Beberapa teori terdahulu telah membentuk pandangan mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Adam Smith, misalnya, berpendapat bahwa ada hubungan harmonis dan alami antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk sebenarnya tergantung pada pertumbuhan ekonomi.



Selain itu, permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) juga memengaruhi jumlah penduduk, dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas lahan. Salah satu tokoh awal yang secara sistematis menggambarkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan adalah Malthus. Pemahaman tentang proyeksi demografi membantu kita merencanakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat. Dalam menyusun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengakui pentingnya proyeksi dan analisis kependudukan. Pendekatan *people-centered development* ditekankan dengan mengutamakan partisipasi aktif rakyat.

Partisipasi tidak hanya melibatkan rakyat sebagai objek pembangunan, tetapi juga memungkinkan mereka berperan dalam menetapkan tujuan, mengelola sumber daya, dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: a) Mengutamakan Kesetaraan: Memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat; b) Mendorong Kemandirian Masyarakat: Memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan; c) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga tanpa terkecuali; d) Optimalisasi Sumber Daya: Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat secara berkelanjutan; e) Mengatasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan dalam aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, proyeksi demografi menjadi landasan penting dalam merencanakan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Isu demografi juga menjadi *concern* dunia internasional, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yang menempatkan Demografi Global dalam Isu Strategis Megatren Dunia



tahun 2045. Megatrend 2045 akan memengaruhi dunia secara signifikan dan menjadi tantangan bagi pembangunan di masa depan. Dalam menghadapi isu-isu ini, inovasi dan kerjasama internasional akan menjadi kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. RPJPN 2025-2045 harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berkaitan dengan megatren dunia pada tahun 2045, meliputi demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, dan perubahan geoekonomi yang sudah mulai terlihat.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan generasi mendatang, pencapaian *sustainable development goals* di tahun 2030 menjadi keharusan. Hal ini mendorong perlunya inovasi pembangunan jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi eksternal selain optimalisasi sumber daya internal. Revolusi industri 4.0 telah membawa pada konsekuensi *Society 5.0*, di mana perkembangan yang ada telah mengubah tatanan dunia secara destruktif.

**Tabel 2.201**

**Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Jumlah Penduduk 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa Ribuan)				
	2025	2030	2035	2040	2045
882,837	893,330	932,010	962,750	986,073	1.003,538

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen ini akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Mengacu pada data di atas, diketahui bahwa dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 882.837 jiwa diprediksi jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan tahun 2025 sebesar 893,330 Ribuan jiwa. Jumlah penduduk diproyeksikan terus mengalami kenaikan tahun 2030 sebesar 4,5% menjadi 932.010 jiwa. Selanjutnya pertumbuhan Kabupaten diprediksi mencapai 986.073 jiwa pada tahun 2040 dan



1.003.538 ribu jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk ini menjadi pijakan dalam perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan jangka panjang.

**Tabel 2.202**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Total	882,837	893,330	932,010	962,750	986,073	1.003,538
Laki-laki	431.891	439,57	459,32	474,69	486,116	494,600
Perempuan	450.946	453,76	472,69	488,06	499,957	508,938
Rasio	95,77	96,87	97,17	97,26	97,23	97,18

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan berdasarkan jenis kelamin dapat dicermati pada tabel di atas. Jumlah penduduk perempuan diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki hingga tahun 2040 dan pada tahun 2045 diproyeksi jumlah laki-laki lebih besar dari perempuan dengan Sex ratio sebesar 97,18. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi diukur menggunakan rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Jika *sex ratio* (SR) lebih besar dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk Perempuan. Jika *sex ratio* (SR) lebih kecil dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk Perempuan. Jika SR = 100, artinya jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk Perempuan. Artinya dengan Sex ratio diprediksi sebesar 97,65 pada tahun 2045, maka pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97,65 penduduk laki-laki. *Sex Ratio* ini sangat berguna untuk mengambil kebijakan terkait dengan kependudukan dalam jangka panjang.



**Tabel 2.203**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Total	882,837	893,33	932,01	962,75	986,073	1.003,538
0-14 Tahun	213,874	204,88	209,93	205,31	195,292	188,998
15-64 Tahun	594,614	615,2	629,86	644,36	656,503	655,922
> 65 Tahun	74,349	73,24	92,23	113,07	134,278	158,618
Angka Ketergantungan	48,47%	45,21%	47,97%	49,41%	50,20%	53,00%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Komposisi penduduk umur 15–64 tahun di Kabupaten Pamekasan diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari 615,2 ribu jiwa di tahun 2025 menjadi sebesar 644,36 ribu jiwa di tahun 2035 serta bertambah lagi menjadi 655,922 ribu jiwa di tahun 2045. Jika diamati dari laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok umur, maka Bonus Demografi Kabupaten Pamekasan telah terjadi pada tahun 2023, dimana kelompok usia produktif (15-64 tahun) prosentasenya lebih besar dari 60%. Pada tahun 2014 prosentasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 71,81%, artinya Bonus Demografi telah terjadi. Persentase kelompok usia produktif (15-64 tahun) diproyeksi mengalami penurunan pada periode RPJPD, dimana tahun 2035 diprediksi sebesar 66,93% dan pada tahun 2045 diprediksi mengalami penurunan menjadi sebesar 65,36%. Hal ini konsisten dengan angka ketergantungan penduduk yang semakin besar dimana tahun 2025 diprediksi sebesar 45,21% dan tahun 2045 diprediksi sebesar 53%. Angka ketergantungan penduduk tahun 2045 sebesar 53%, artinya rata-rata 2 orang penduduk produktif menanggung beban 1 orang non produktif.



### **2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Kebutuhan sarana prasarana sangat penting bagi pembangunan daerah. Sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah. Sarana merupakan sesuatu yang berupa alat yang biasa digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang biasa digunakan sebagai penunjang utama agar pembangunan daerah dapat terselenggara. Pada konteks pembangunan daerah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat berupa jalan, jembatan. Gedung, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dapat dilakukan dengan menggunakan analisis proyeksi penduduk. Proyeksi sarana dan prasarana dapat membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan daerah agar lebih baik dan efektif.

**Tabel 2.204**  
**Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
Jumlah Penduduk Total	882.837	893.330	932.010	962.750	986.073	1.003.538
Proyeksi Kebutuhan Rumah (ribu rumah)	221,32	143,69	233,00	240,69	249,87	259,40

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

\* Data Proyeksi Bappeda Kab. Pamekasan, 2045

Kebutuhan rumah di Kabupaten Pamekasan diproyeksikan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Kebutuhan rumah di Kabupaten Pamekasan akan terus meningkat hingga tahun 2045 seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Terkait asumsi yang



digunakan dalam perhitungan proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal menggunakan:

1. Rumusan Model Perhitungan Backlog Tipe 1 dengan Konsep Unit Rumah Tangga
2. Rumusan Model Perhitungan Backlog Tipe 2 dengan Konsep Unit Kepala Keluarga.

**Tabel 2.205**  
**Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Total (jiwa)	882,837	893,330	932,010	962,750	986,073	1.003,538
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/detik)	134	143.69	175.92	180.29	184.66	189.03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

\* Data Proyeksi Bappeda Kab. Pamekasan, 2045

Standar kebutuhan air minum menurut Permendagri No.23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standart kebutuhan pokok air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari. Hal tersebut juga disebutkan oleh UNESCO pada tahun 2002 yang telah menetapkan hak sadar manusia atas air minum adalah sebesar 60 liter/orang/hari.

Pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Air minum merupakan kebutuhan pokok manusia dan sangat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Jika kebutuhan air minum terabaikan, maka dapat menyebabkan dehidrasi dan penyakit terkait air seperti diare, kolera, dan tifus.



Selain itu kekurangan air minum juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebutuhan air minum terpenuhi dan menjaga kualitas air agar tetap aman untuk dikonsumsi.

Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan air minum untuk masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan air minum termasuk dalam pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal ini dapat memenuhi kewajibannya dengan cara membangun infrastruktur air minum, seperti pipa air dan sumur bor, serta memastikan kualitas air yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan cara pengelolaannya.

**Tabel 2.206**  
**Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	882,837	893,330	932,010	962,750	986,073	1.003,538
Jumlah Rumah (ribu)	221,32	143,69	233,00	240,69	249,87	259,40
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KWh)	514.233.766	520.345.715	542.875.992	560.781.388	582.170.007	604.374.095

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

\* Data Proyeksi Bappeda Kab. Pamekasan, 2045

Selanjutnya proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pamekasan. Prakiraan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pamekasan akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satu prasarana persampahan adalah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) namun seiring adanya kebijakan zero emission maka keberadaan TPA sebagai sumber penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus

dilengkapi dengan kegiatan pengolahan sampah terpadu. Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) diharapkan dapat mengurangi tingginya timbulan sampah.

Kebutuhan TPST di Kabupaten Pamekasan dihitung dengan merujuk pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan diasumsikan setara kebutuhan TPA yang dilengkapi sistem daur ulang skala kota untuk > 480.000 jiwa. Untuk perhitungan jumlah timbulan sampah mengacu pada tier-1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

**Tabel 2.207**  
**Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	882,837	893,330	932,010	962,750	986,073	1.003,538
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	101.156,10	102.358,40	106.790,38	110.312,59	112.984,96	114.986,11
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

\* Data Proyeksi Bappeda Kab. Pamekasan, 2045

Terkait kebutuhan infrastruktur di bidang kesehatan, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

**Tabel 2.208**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2025-2045**

No	Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi				
				2025	2030	2035	2040	2045
<b>1</b>	<b>Proyeksi Fasilitas Kesehatan</b>							
	a. Rumah Sakit	Unit		9	9	10	10	10
	b. Puskesmas	Unit	21	56	58	60	62	65
	c. Puskesmas Pembantu	Unit	589	596	621	642	666	692
	c. Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Ribu Unit		893,33	932,01	962,75	999,47	1037,59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

\* Data Proyeksi Bappeda Kab. Pamekasan, 2045

Proyeksi ini membantu dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Dalam proses menentukan proyeksi, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, Tingkat Kesehatan masyarakat, dan perkembangan teknologi kesehatan.



**Tabel 2.209**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2025-2045**

No	Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	<b>Proyeksi Jumlah Penduduk tahun 2023 (jiwa)</b>	<b>Ribu Jiwa</b>	<b>882,837</b>	<b>893,330</b>	<b>932,010</b>	<b>962,750</b>	<b>986,073</b>	<b>1.003,538</b>
2	<b>Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur</b>							
	0-14 Tahun	Persen (%)	24,23	22.94	22.52	21.33	21,19	21,05
	15-64 Tahun	Persen (%)	67,35	68.87	67.58	66.93	66,92	66,9
	> 65 Tahun	Persen (%)	8,42	8.2	9.9	11.74	11,94	12,13
	Angka Ketergantungan	Persen (%)	48,47	45,21	47,97	49,41	50,20	53,00
3	<b>Proyeksi Fasilitas Pendidikan</b>							
	a. PAUD	Lembaga	993	1003	1018	1028	1038	1048
	b. SD / MI	Lembaga	475	475	475	475	485	495
	c. SMP / MTS	Lembaga	182	182	182	182	192	202

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

\* Data Proyeksi Bappeda Kab. Pamekasan, 2045

Fasilitas Pendidikan yang memadai akan memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu modal pembangunan daerah. Kabupaten Pamekasan memetakan kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan Tingkat pendidikan mulai dari TK/RA hingga SMP/MTS yang menjadi kewenangan kabupaten. Proyeksi kebutuhan disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan yang terus meningkat.



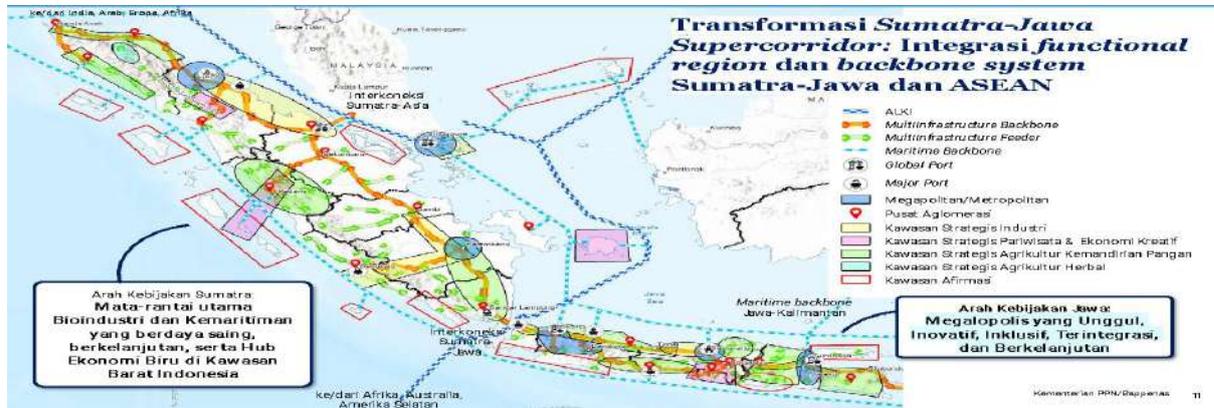
## **2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH**

Arah pengembangan kewilayahan sangat penting dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional. Hak tersebut menjadi pijakan membangun keselarasan dengan bidang pembangunan lain, antara lain kebijakan sektor Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045. Kebijakan mengenai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043. Sebelum dilakukan pemaparan mengenai kebijakan pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Pamekasan, terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap kebijakan kewilayahan Nasional dan provinsi Jawa Timur.

### **2.7.1. Telaah Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah RPJPN.**

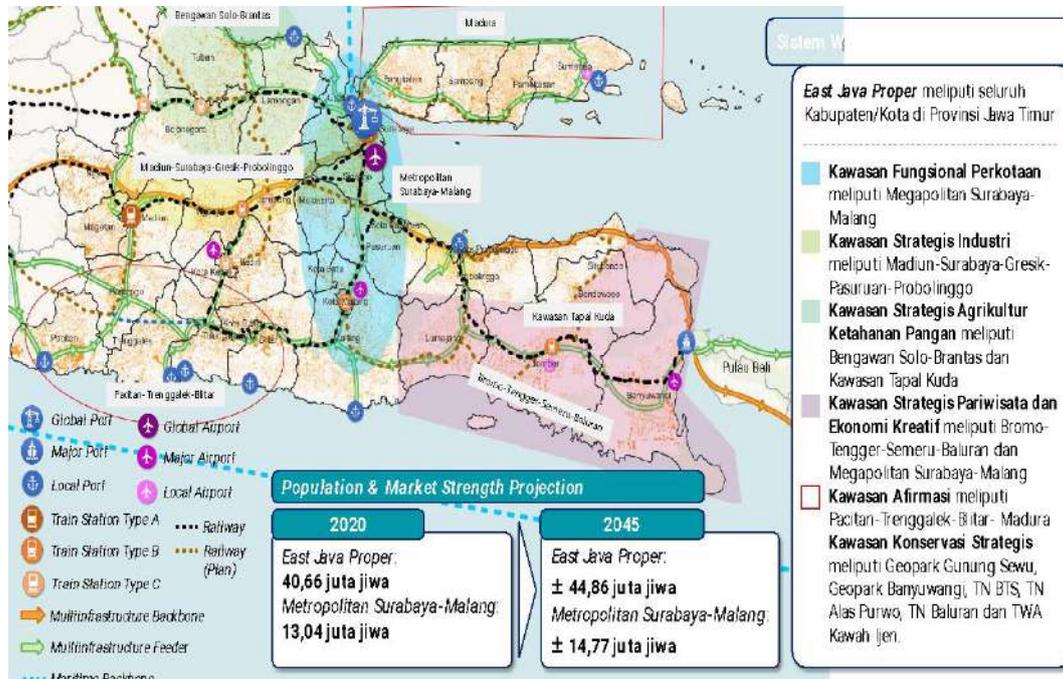
Arah Kebijakan yang terkait dengan Perencanaan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas, berpijak pada kebijakan transformasi kewilayahan. Kebijakan kewilayahan merupakan desain pengembangan wilayah masa depan secara terintegrasi dan terpadu, sehingga setiap wilayah sasaran memiliki tema dan peran kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Peran dan fungsi kewilayahan inilah yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan kewilayahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

**Gambar 2.39**  
**Integrasi *Functional Region* dan *Backbone System* Sumatra-Jawa**



Berdasarkan pada gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan besar kewilayahan untuk Provinsi Jawa Timur adalah ***Transformasi Sumatra-Jawa Supercorridor: Integrasi Fungsional Region dan Bacbone System Sumatra-Jawa serta ASEAN***. Sesuai dengan desain kewilayah di atas, maka Arah Kebijakan Sumatra: **Mata-rantai utama Bioindustri dan Kemaritiman yang berdaya saing, berkelanjutan, serta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia**, sedangkan Arah Kebijakan Jawa adalah **Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan**.

**Gambar 2.40**  
**Kebijakan Pengembangan Wilayah Fungsional Jawa Timur**



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

**East Java Proper** meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi beragam sebagai berikut.

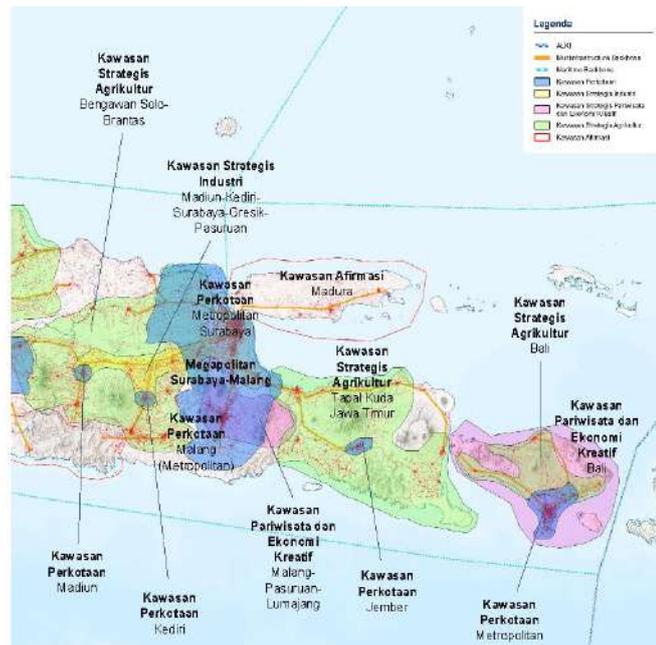
- **Kawasan Fungsional Perkotaan** meliputi Megapolitan Surabaya-Malang
- **Kawasan Strategis Industri** meliputi Madiun-Surabaya-Gresik-Pasuruan-Probolinggo
- **Kawasan Strategis Agrikultur Ketahanan Pangan** meliputi Bengawan Solo-Brantas dan Kawasan Tapal Kuda
- **Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** meliputi Bromo-Tengger-Semeru-Baluran dan Megapolitan Surabaya-Malang
- **Kawasan Afirmasi** meliputi Pacitan-Trenggalek-Blitar- Madura
- **Kawasan Konservasi Strategis** meliputi Geopark Gunung Sewu, Geopark Banyuwangi, TN BTS, TN Alas Purwo, TN Baluran dan TWA Kawah Ijen.

Berdasarkan pada kebijakan strategis di atas, maka diharapkan terjadi integrasi pembangunan dan pembiayaan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur pembangunan kewilayahan.

**Gambar 2.41**  
**Kata Kunci Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur**

**Keywords Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur**

- ❖ **Regional Economy**
  - Agrikultur
  - Agroindustri/Bioindustri
  - Industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (*consumer goods*)
  - Pariwisata dan ekonomi kreatif
  - *Blue economy* (perikanan)
- ❖ **Visi, Aspirasi, Potensi Pengembangan**
  - Megapolitan Surabaya-Malang *towards global city*
  - Pendidikan, riset, inovasi
  - *Green economy* (EBT, *organic agriculture*)



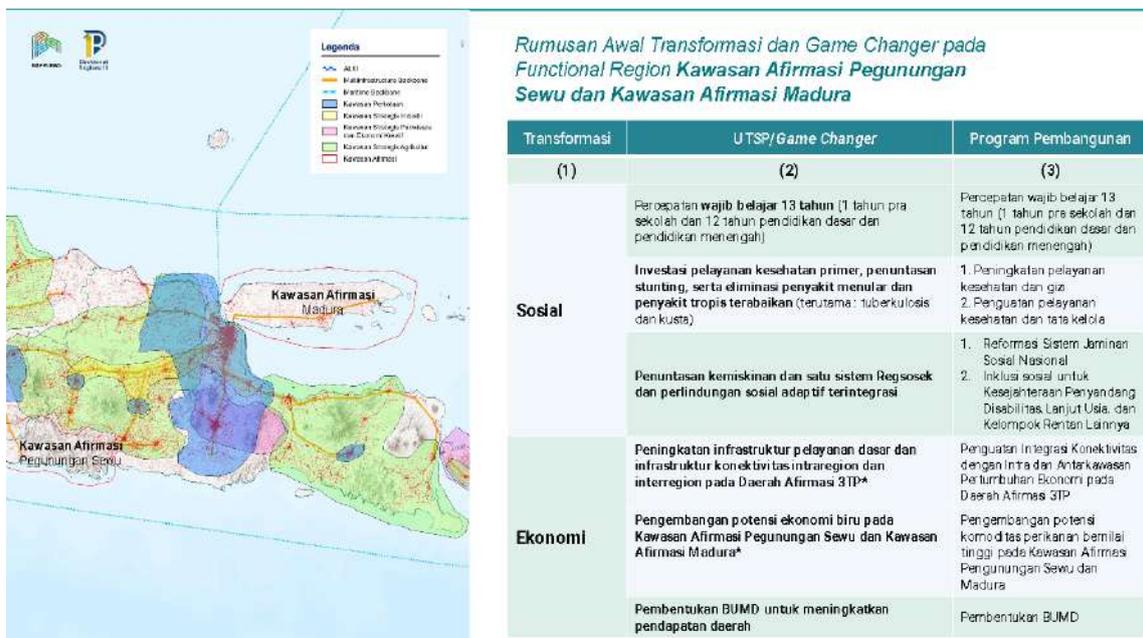
Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Ilustrasi gambar di atas menunjukkan bahwa kata kunci pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur adalah, (1) Agrikultur, (2) Agroindustri/Bioindustri, (3) Industri kimia, industri logam dan bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (*consumer goods*), (4) Pariwisata dan ekonomi kreatif serta *Blue economy* (perikanan). Effort yang harus dilaksanakna oleh pemerintah dalam mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN) di atas adalah (1) Pengembangan Megapolitan Surabaya-Malang *towards global city*, (2) Pendidikan, riset, inovasi, (3) *Green economy* (EBT, *organic agriculture*).

Lebih jauh kebijakan nasional mengenai pengembangan wilayah secara spesifik di Jawa Timur meliputi wilayah Gerbangkertosusila Plus dengan tema :

1. *Integrated Global City Surabaya Metropolitan Project.*
2. Transformasi *Game Changer* pada *Functional Region* Kawasan Strategis Industri Madiun-Kediri-Surabaya-Gresik-Pasuruan
3. Transformasi dan *Game Changer* pada *Functional Region* Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu dan Kawasan Afirmasi Madura
4. *Integrated Blue Economy* Lintas Selatan Wilis
5. *Integrated Agriculture* Tapal Kuda

**Gambar 2.42**  
**Transformasi dan *Game Changer* pada *Functional Region* Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu dan Kawasan Afirmasi Madura**



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Pulau Madura memiliki potensi perikanan yang tinggi. Bulan Januari, April, Mei dan Desember merupakan keempat bulan yang memiliki komposisi klorofil tertinggi. Klorofil merupakan salah satu penanda kesehatan daerah perairan, dan mampu menunjukkan potensi sumber daya perairan. Kebijakan afirmatif pengembangan Madura memiliki arti yang strategis bagi Provinsi Jawa Timur, karena merupakan salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian



khusus. Mengingat Pulau Madura memiliki angka kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan daya beli yang relatif rendah. Melalui sinergi dengan kebijakan nasional ini, diharapkan percepatan pembangunan Madura dapat dilakukan dengan efektif.

## **2.7.2. Telaah Arah Kebijakan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023—2043, Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana diatas maka ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:

- a. Penguatan peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat Permukiman yang nyaman hingga Wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan Kawasan pegunungan (*Smart Valley Development*);
- b. Pengintegrasian antar koridor pertumbuhan Wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar Wilayah dan mengurangi disparitas Wilayah;
- c. Peningkatan keterpaduan dan interkoneksi jaringan infrastruktur dengan sistem Permukiman (*Transit Oriented Development*) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (*backwash effect*) dan meningkatkan pemerataan pengembangan Wilayah (*spread effect*).
- d. Pemantapan penyediaan infrastruktur Wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan Wilayah Sungai, danau dan laut;

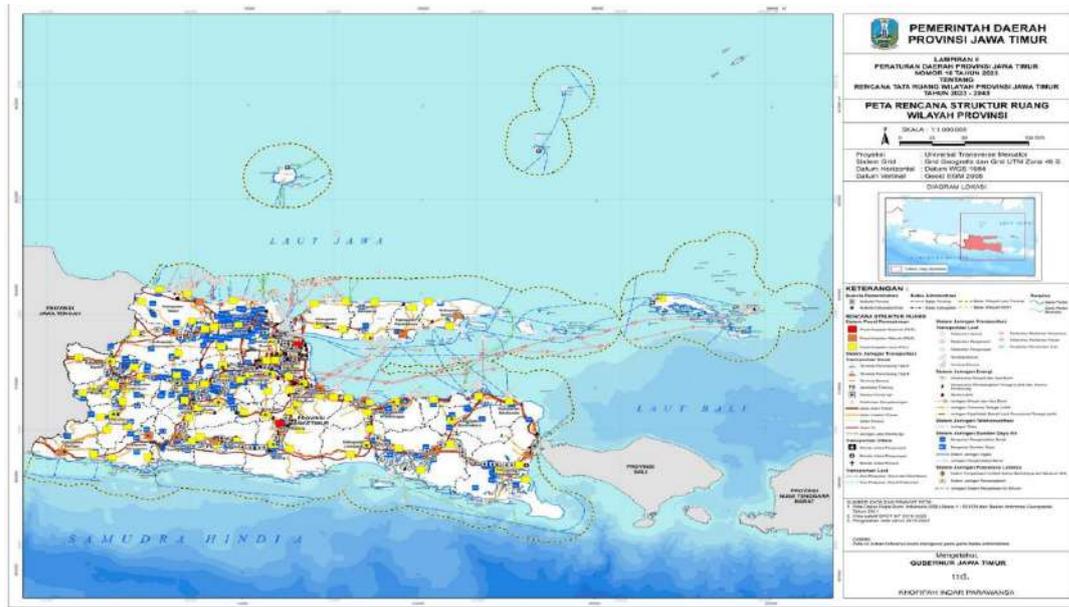


- e. Peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan Lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan;
- f. Optimalisasi Kawasan Budi Daya guna menjadikannya Ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
- g. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
- h. Pemaduserasian Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan terhadap kerawanan bencana dan rencana kontinjensi; dan
- i. Perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Struktur Ruang Wilayah provinsi Jawa Timur terdiri atas (1) Rencana Sistem Pusat Pelayanan, dan (2) Rencana Sistem Prasarana Lainnya. Rencana Sistem Pusat Pelayanan terdiri atas Rencana Sistem Perkotaan, rencana system dan fungsi perwilayahan, dan rencana system perdesaam. Sedangkan Rencana Sistem Prasarana Lainnya terdiri atas; Rencana sistim jaringan transportasi, rencana system prasarana lainnya. Sedangkan Rencana Pola Ruang sebagaimana disajikan dalam gambar 1.2 di bawah, secara umum terdiri atas; (1) Kawasan Lindung, (2) Kawasan Budi Daya, dan (3) Rencana Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Rencana Struktur Ruang Wilayah menggambarkan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikan wilayah provinsi serta melayani kegiatan provinsi yang akan dituju sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2031). Secara detil disajikan dalam gambar di bawah ini.

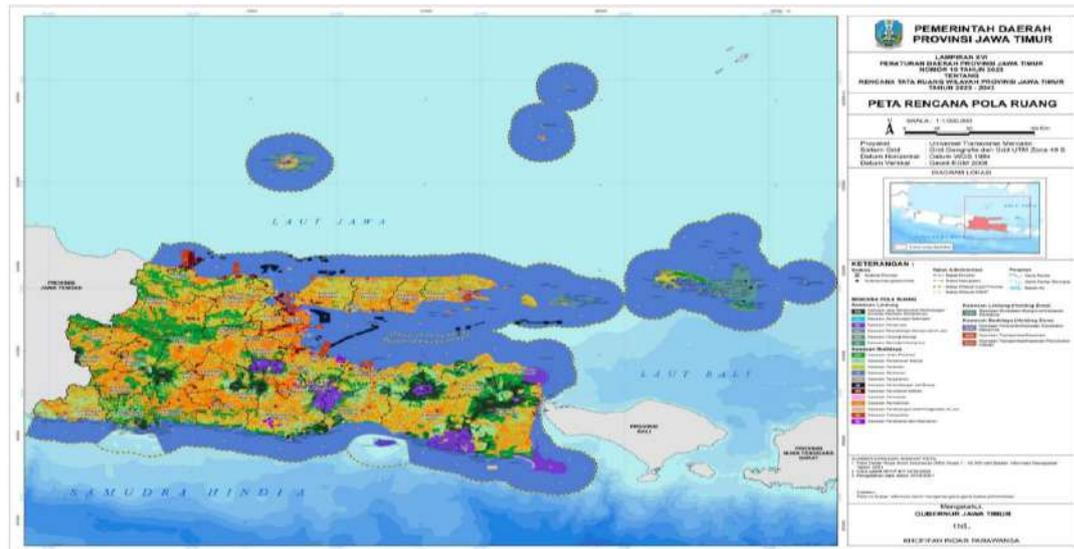
**Gambar 2.43**  
**Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur**



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

Rencana pola ruang Provinsi Jawa Timur secara garis besar diwujudkan dalam rencana kawasan lindung, kawasan budi daya serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pola ruang kawasan ini ditekankan pada kesesuaian fungsi wilayah, mengingat besarnya pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budi daya. Maka diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan budi daya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan yang dikembangkan diarahkan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 2.44**  
**Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur**



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023—2043.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi berfungsi:

1. Sebagai upaya memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;





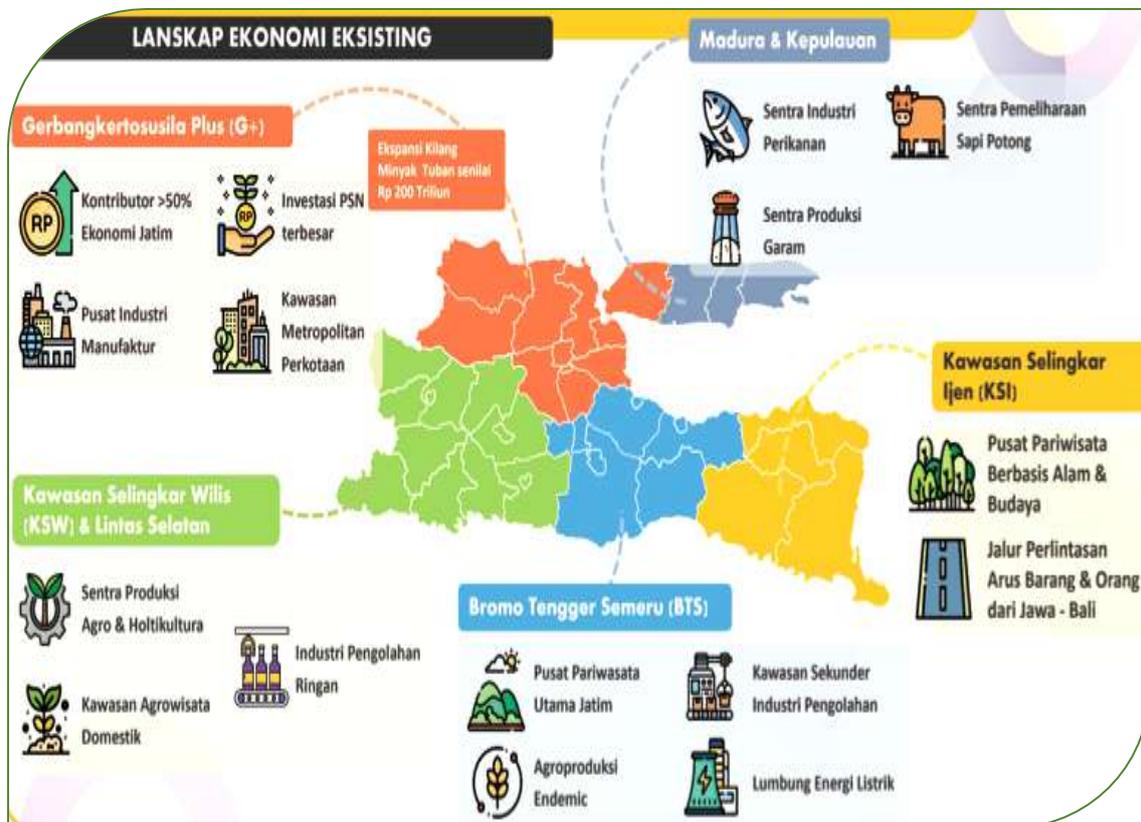
### 2.7.3 Telaah Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Selaras dengan Transformasi Indonesia Emas sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJPN, maka selanjutnya mengacu pada dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045, maka diketahui bahwa transformasi pembangunan jangka Panjang Provinsi Jawa Timur dijabarkan dalam gambar sebagai berikut.

Arah kebijakan **Pembangunan Kewilayahan, penyediaan Sarana Prasarana Berwawasan Lingkungan**. Apabila dikaitkan dengan muatan RPJPD maka arahnya kebijakan pada (1) Pemerataan akses untuk pemerataan pembangunan antara utara dengan selatan Jawa Timur; dan (2) Penguatan integrasi pengembangan wilayah vertical dan horizontal. Sedangkan kebijakan keenam adalah **Pembangunan yang Berkelanjutan**. Pada arah kebijakan ini secara umum akan diarahkan pada (1) Implementasi Infrastruktur Inklusif, (2) Turut terlibat dalam gerakan *Net Zero Carbon*.

Sedangkan Arah Kebijakan pengembangan wilayah Prioritas Jawa Timur dapat disajikan dalam gambar di bawah ini. Mengacu pada gambar tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam zona ***Gerbangkertosusilo Plus (G+)***. Tema pembangunan kewilayahan di zona ini adalah penguatan manufaktur dan pengembangan menjadi pusat Kawasan metropolitan. Posisi ini sangat strategis bagi Kabupaten Sidoarjo, karena berada pada Zona Emas yang memiliki kelebihan berupa penyumbang Produk Domestik Regional Bruto PDRB lebih dari 50% terhadap PDRB Jawa Timur. Selain itu juga merupakan zona dengan nilai investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) terbesar.

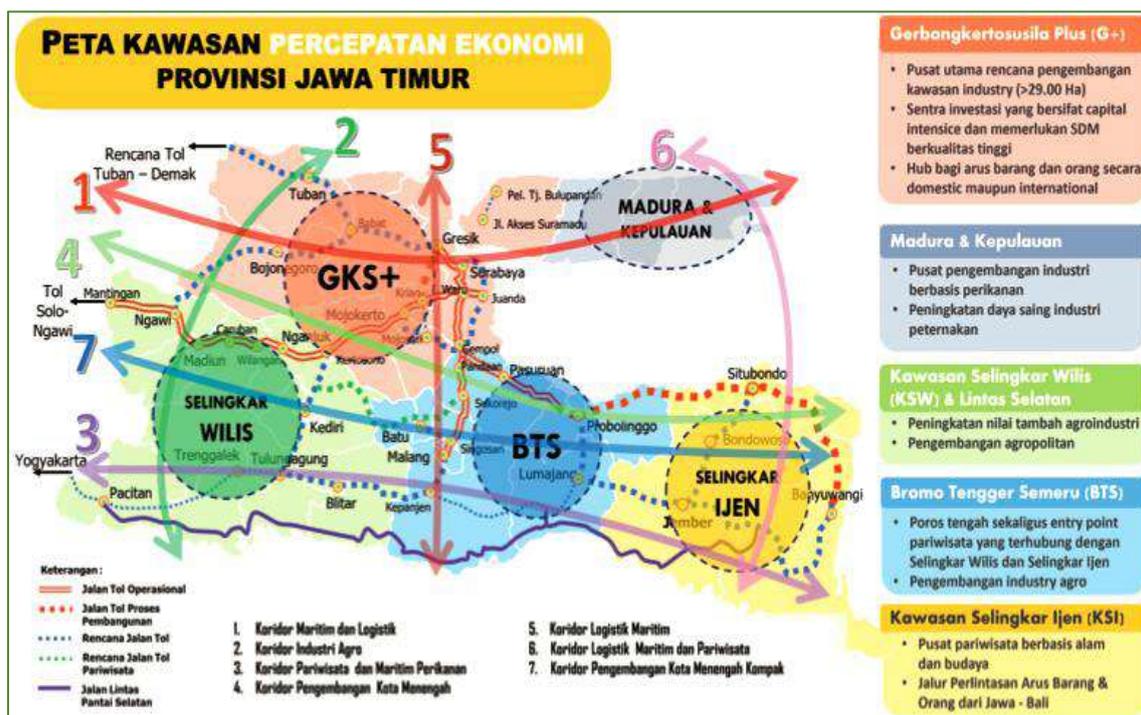
**Gambar 2.46**  
**Tema Pengembangan Wilayah Prioritas Provinsi Jawa Timur**



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023

Mengacu pada gambar di atas, terdapat beberapa delineasi Kawasan percepatan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Lima Kawasan tersebut meliputi wilayah Madura dan kepulauan, Gerbangkertosusila Plus, Selingkar Wilis, Bromo Tengger Semeru (BTS) dan Selingkar Ijen. Pada konteks ini, Sidoarjo tergabung dalam Kawasan tematik Gerbangkertosusila Plus. Wilayah Gerbangkertosusila Plus terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Jombang, Tuban dan Bojonegoro serta 2 (dua) Kota, yaitu Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Wilayah Gerbangkertosusila Plus secara geodemografi memiliki luas kurang lebih 10.845,73 km<sup>2</sup> atau 22,69 % dari luas Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 14,002 juta jiwa lebih atau 33,81 % dari penduduk Jawa Timur.

**Gambar 2.47**  
**Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Prioritas Provinsi Jawa Timur**



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023

Pada pembagian lima kawasan ekonomi strategis di atas, maka Arah Kebijakan Wilayah Jawa Timur dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 adalah;

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, dan peningkatan jaringan prasarana lainnya.



4. Peningkatan jaringan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan pusat-pusat sistem permukiman.
5. Penguatan Peran Kawasan Metropolitan yang terintegrasi dengan Kawasan agropolitan, Kawasan Industri dan gugusan Kawasan pegunungan.
6. Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dan sentra pertumbuhan kelautan sebagai bentuk nilai tambah sinergitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
7. Percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah Utara-Selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
8. Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian bio-diversitas dan pembangunan berkelanjutan.
9. Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung daya tampung lingkungannya.
10. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
11. Perwujudan Kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
12. Pemaduserasian ruang darat, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim.



#### **2.7.4. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Pamekasan**

Ruang lingkup wilayah kabupaten dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 salah satunya diantaranya :

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. Kawasan Strategis Kabupaten.

##### **2.7.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043, Struktur Ruang Wilayah Kabupaten ini adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

Perwujudan sistem prasarana sebagaimana berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

- a. jaringan jalan;
  - b. jaringan jalur kereta api;
  - c. jaringan prasarana angkutan jalan;
  - d. jaringan pelayanan angkutan jalan
  - e. jaringan perhubungan sungai danau dan penyebrangan;
  - f. jaringan terminal barang
  - g. jaringan transportasi laut;
  - h. jaringan prasarana energi;
  - i. jaringan prasarana telekomunikasi;
  - j. jaringan prasarana sumber daya air; dan
  - k. jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.
- (1) Pembangunan jaringan jalan sebagaimana dimaksud mencakup kegiatan:
- a. pengembangan jaringan jalan nasional meliputi ruas Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget;



- b. pengembangan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan nasional meliputi ruas Bangkalan – Tanung Bulu Pandan – Ketapang – Sotabar – Sumenep;
  - c. pengembangan jaringan jalan Provinsi meliputi ruas batas Kabupaten Sampang – Sotabar – Batas Kabupaten Sumenep, Pamekasan – Sotabar, Omben (batas Kabupaten Sampang) – Pamekasan; dan
  - d. pengembangan jaringan jalan kabupaten.
- (2) Pembangunan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud mencakup kegiatan :
- a. peningkatan jalur kereta api dan prasarana pendukungnya termasuk penanganan perlintasan kereta api; dan
  - b. pembangunan sarana stasiun kereta api di Kecamatan Pamekasan.
- (3) Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud, mencakup kegiatan :
- a. pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tlanakan;
  - b. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Waru; dan
  - c. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Batumamar dan Kecamatan Pasean.
- (4) Pembangunan jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud, mencakup kegiatan pengembangan terminal angkutan barang terdapat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan.
- (5) Pengembangan jaringan perhubungan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud mencakup kegiatan pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pasean.
- (6) Pembangunan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud, mencakup kegiatan:



- a. pengembangan pelabuhan pengumpul di Desa Branta di Kecamatan Tlanakan;
  - b. pembangunan pelabuhan lokal yang berfungsi sebagai pengumpan di Kecamatan Larangan;
  - c. pembangunan pelabuhan lokal yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan di Kecamatan Pademawu; dan
  - d. pembangunan pelabuhan pengumpul di Kecamatan Pasean.
- (7) Pembangunan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud, mencakup kegiatan:
- a. pengembangan energi listrik berupa pembangunan industri kelistrikan dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tlanakan;
  - b. pengembangan energi alternative berupa energi biomassa di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
  - c. pengembangan energi alternative berupa energi surya direncanakan diseluruh kecamatan;
  - d. pengembangan area konservasi pada area pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati Kecamatan Pamekasan – Kecamatan Proppo; dan
  - e. pengembangan jaringan listrik dan peningkatan layanan listrik perdesaan yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan.
- (8) Pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud, mencakup kegiatan:
- a. pengembangan prasarana telekomunikasi sistem kabel;
  - b. pengembangan prasarana telekomunikasi seluler; dan
  - c. pengembangan prasarana telekomunikasi satelit.
- (9) Pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud, mencakup kegiatan :
- a. pembangunan dan perbaikan saluran irigasi.



- b. perlindungan terhadap sumber – sumber mata air, daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
  - c. pengembangan pengelolaan air permukaan;
  - d. pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih; dan
  - e. pembangunan prasarana air berupa bak penampungan air.
- (10) Pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud, mencakup kegiatan:
- a. pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan TPST; dan
  - b. pengembangan sistem Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja melalui Instalansi Pengelolaan Limbah Terpadu di Kecamatan Palengaan

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten ini sebagaimana disebutkan pada gambar 2.39 di bawah ini salah satu diantaranya adanya Sistem Pusat Permukiman, yaitu meliputi :

- a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Yang terdapat di Perkotaan Pamekasan Kecamatan Pamekasan. ;
- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Yang terdapat di Perkotaan Waru Kecamatan Waru.; dan
- c. Pusat-pusat lain yaitu meliputi : PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah Pusat Permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah Pusat Permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa,





#### **2.7.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043, Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045 meliputi :

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

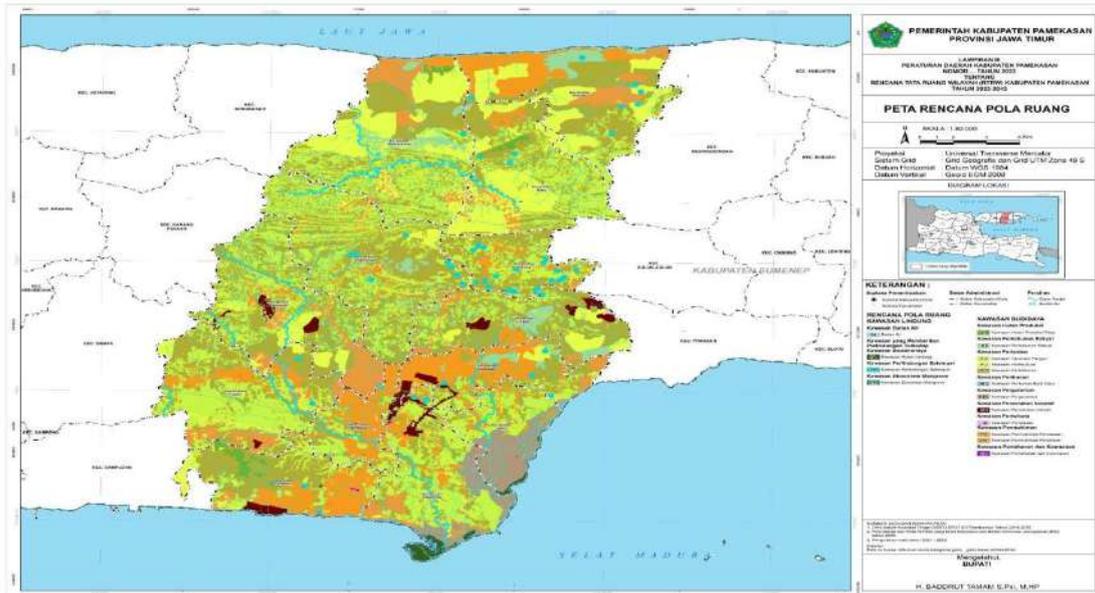
Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, lindung setempat, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi; dan
- b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung.

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

**Gambar 2.50**  
**Peta Rencana Pola Ruang**



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Pamekasan, 2023-2043

### 2.7.4.3. Kawasan Strategis Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043, Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. sebagaimana dimaksud meliputi Kawasan Strategis dari sudut

#### 2.7.4.3.1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri atas :

- a. kawasan agropolitan Rupanandur, meliputi :
  - 1) Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang,



- berupa pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain salak, pisang dan pepaya;
- 2) Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicolorong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang, berupa pengembangan komoditas berbasis durian, kelapa, tembakau dan kambing.
  - 3) Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Hají, dan Desa Plakpak, berupa pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan dan durian; dan
  - 4) Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, berupa pengembangan komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur.
- b. kawasan budidaya perikanan, meliputi :
- 1) tambak garam dengan luas kurang lebih 2.096 (dua ribu sembilan puluh enam) hektar meliputi Desa Branta Tinggi, dan Desa Branta Pesisir di Kecamatan Tlanakan; Desa Baddurih, Desa Pagagan, Desa Majungan, Desa Padelegan, Desa Pademawu Timur, dan Desa Bunder di Kecamatan Pademawu; dan Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan, dan Desa Artodung di Kecamatan Galis.
  - 2) rumput laut tersebar di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar.
- c. kawasan perdagangan, jasa, industri dan pergudangan meliputi Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Tlanakan.



d. kawasan pariwisata meliputi :

- 1) wisata alam yaitu Api Tak Kunjung Padam yang terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, Pantai Jumiang yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Pantai Batu Kerbuy yang terletak di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean, Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan dan Lembah Sembir Kecamatan Batumarmar;
- 2) wisata budaya yaitu obyek wisata budaya kesenian dan upacara seperti Kerapan Sapi dan Semalam di Madura yang berada di Kecamatan Pamekasan, upacara petik laut di Pantai di Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan dan wisata kontes Sapi Sonok di Kecamatan Waru dan Kecamatan Pakong, Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo dan Makam Ronggosukowati (Raja Islam I) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan
- 3) wisata buatan terdapat di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu.

e. kawasan pelabuhan, meliputi :

- 1) kawasan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan dan pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean; dan
- 2) Kawasan pelabuhan pengumpan Talang Siring di Kecamatan Larangan dan peleabuhan pengumpan di Kecamatan Pademawu.

f. Kawasan minapolitan meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan.

#### **2.7.4.3.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri atas :



- a. kawasan cagar budaya;
- b. kawasan makam; dan
- c. kawasan peninggalan sejarah.

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud berupa Makam Syeikh Abdul Mannan di Kecamatan Proppo. Kawasan makam sebagaimana dimaksud meliputi :

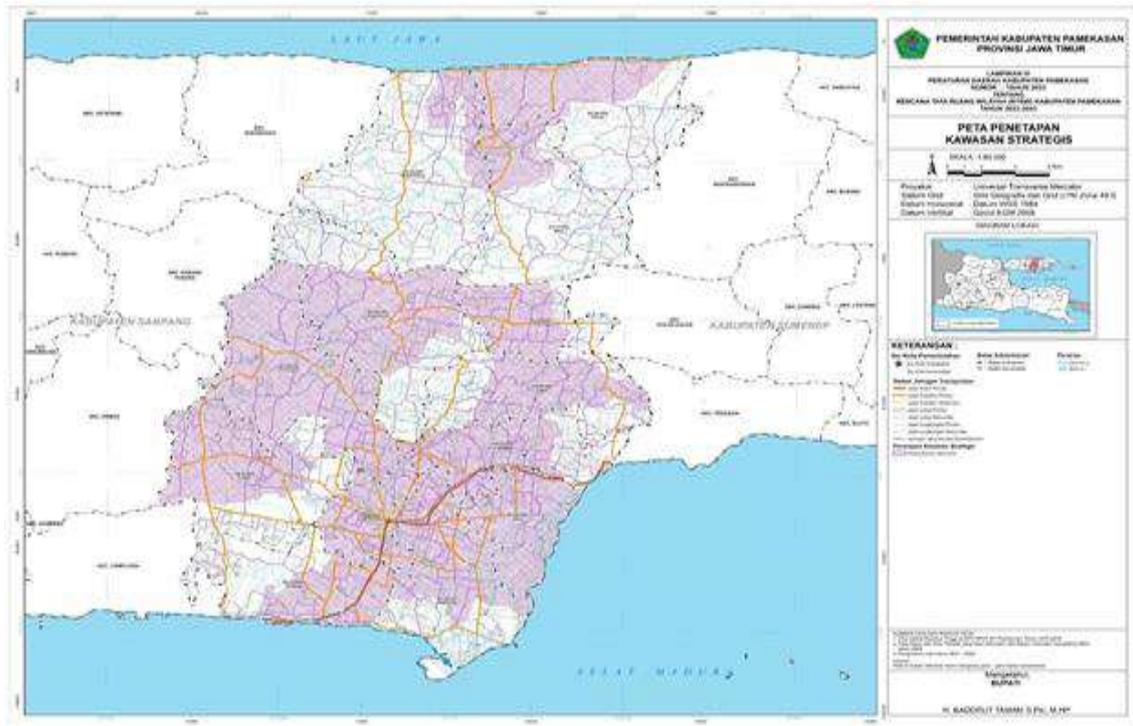
- a. makam Ronggosukowati (Raja Islam I), yang berlokasi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan;
- b. makam Syeikh Gozali, yang berlokasi di Desa Sotabar Kecamatan Pasean;
- c. makam Gung Seppoh-Gatot Kaca, yang berlokasi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan
- d. makam Joko Tarup, yang berlokasi di Desa Montok Kecamatan Larangan.

Sedangkan Kawasan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud berupa kawasan sisa bangunan candi di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo.

### **2.7.4.3.3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu dengan luas kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) hektar.

**Gambar 2.51**  
**Peta Kawasan Strategis Wilayah**



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Pamekasan, 2023-2043

**Tabel 2.210**  
**Pembagian Kawasan Strategis**

No	SUDUT KEPENTINGAN	KSN	KSP	KS KABUPATEN	Kewenangan
1	EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kawasan andalan Kawasan Madura dan Kepulauan meliputi sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan perikanan dan kawasan andalan Laut Madura dan sekitarnya meliputi sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Ekonomi Madura</li> <li>▪ Kawasan Agropolitan Kepulauan Madura</li> <li>▪ Kawasan tertinggal Kepulauan Madura dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Agropolitan meliputi :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Kadur;</li> <li>- Kota Pakong;</li> <li>- Kota Pegantenan; dan</li> <li>- Kota Waru.</li> </ul> </li> <li>▪ Kawasan Minapolitan, meliputi :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Batumarmar;</li> <li>- Kota Pasean;</li> <li>- Kota Galis;</li> <li>- Kota Larangan; dan</li> <li>- Kota Pademawu.</li> </ul> </li> <li>▪ Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh meliputi :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Pamekasan Pusat;</li> <li>- Kota Pamekasan Selatan;</li> <li>- Kota Pamekasan Utara;</li> <li>- Kota Palengaan;</li> <li>- Kota Proppo; dan</li> <li>- Kota Waru.</li> </ul> </li> <li>▪ Kawasan Industri Hasil Tembakau meliputi :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Tlanakan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KSP merupakan kewenangan dari Provinsi</li> <li>- KS Kabupaten merupakan kewenangan dari Kabupaten</li> </ul>
2	SOSIAL BUDAYA			<p>Kawasan cagar budaya berupa Makam Syekh Abdul Mannan di Kecamatan Proppo.</p> <p>Kawasan makam meliputi :</p>	<p>KS Kabupaten merupakan kewenangan dari Kabupaten</p>



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2025-2045

No	SUDUT KEPENTINGAN	KSN	KSP	KS KABUPATEN	Kewenangan
				makam Ronggosukowati (Raja Islam I), yang berlokasi di Kelurahan Kolpojung Kecamatan Pamekasan; makam Syekh Gozali, yang berlokasi di Desa Sotabar Kecamatan Pasean; makam Ghung Seppoh-Gatut Kaca, yang berlokasi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan makam Joko Tole, yang berlokasi di Desa Montok Kecamatan Larangan. Kawasan peninggalan sejarah yaitu berupa kawasan sisa bangunan candi di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo	
3	FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN			kawasan pantai berhutan bakau yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu dengan luas kurang lebih 346 Ha.	KS Kabupaten merupakan kewenangan dari Kabupaten

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Pamekasan, 2023-2043

**2.7.4.4 Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud meliputi :

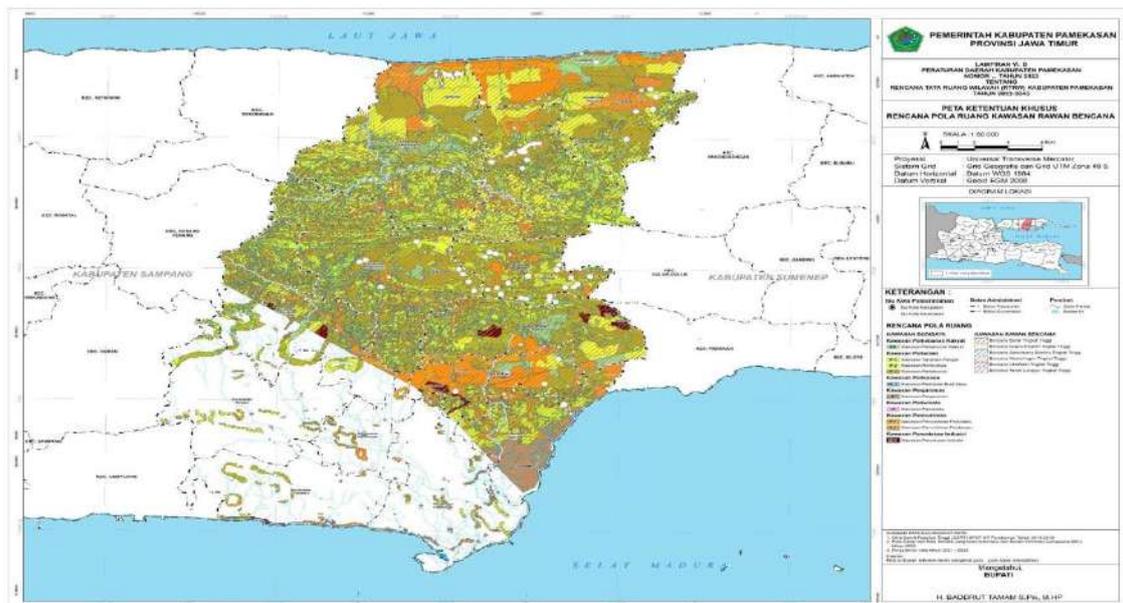
- a. kawasan rawan banjir; dan
- b. kawasan rawan abrasi.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud tersebar hampir di seluruh wilayah Daerah dengan luasan kurang lebih 21.288 (dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar.

Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. bagian utara terdapat di Desa Sotabar, Desa Tlonto Raja, Desa Batukerbuy, dan Desa Bindang Kecamatan Pasean dan Desa Tamberu, Desa Blaban, Desa Kapong, Desa Lesong Daya Kecamatan Batumarmar; dan
- b. bagian selatan terdapat di Desa Montok Kecamatan Larangan, Desa Bandaran, Desa Kramat dan Desa Ambat Kecamatan Tlanakan.

**Gambar 2.52**  
**Peta Rawan Bencana Alam**



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Pamekasan, 2023-2043



## BAB 3

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) merupakan bagian yang penting. Permasalahan pembangunan merupakan gap antara kondisi empirik dengan kondisi yang diharapkan / yang seharusnya terjadi. Terkait dengan hal tersebut, maka permasalahan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus memiliki dimensi waktu penyelesaian yang relevan dengan jangka waktunya. Sedangkan perumusan isu strategis, diharapkan mampu menangkap hal penting saat ini dan kondisi masa depan seakurat mungkin. Semakin akurat dalam memperkirakan kondisi masa depan, maka semakin baik pula perumusan isu strategis. Secara detil sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah.

#### 3.1. Permasalahan

Permasalahan merupakan pernyataan kondisi empirik yang menggambarkan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Perumusan permasalahan jangka panjang Kabupaten Pamekasan didasarkan pada hasil evaluasi RPJPD Kabupten Pamekasan Tahun 2005-2045, penelusuran data dan informasi dan Dokumen KLHS-RPJPD. Berbagai permasalahan pada perencanaan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.

1. Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan Masih Relatif Tinggi.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pamekasan yang diukur dengan prosentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 13,93%. Penduduk miskin Pamekasan berada di atas kemiskinan nasional (9.57%) dan Jawa Timur (10,49%), namun masih berada di bawah daerah sekitar yaitu



Kabupaten Sumenep (206,4 ribu jiwa), Kabupaten Sampang (217,97%), dan Kabupaten Bangkalan (196,11%).

## 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sumberdaya Manusia (SDM yang diindikasikan dengan capaian nilai IPM Kabupaten Pamekasan berada pada posisi kedua di Pulau Madura tahun 2022 dengan capaian sebesar 66,99 dan masih berada di bawah capaian Nasional (72,91), Provinsi Jawa Timur (72,14) dan Kabupaten Sumenep sebesar 67,87. Sebagai upaya mengelola bonus demografi, maka perlu percepatan untuk mendorong kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pamekasan yang lebih unggul dan berkarakter. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kondisi Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan.

## 3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 sebesar 5,31% yang menempatkan posisi ini berada di bawah Jawa Timur (5,34%) dan Nasional (5,31%). Pertumbuhan ekonomi ini masih belum disertai dengan penurunan kemiskinan sehingga perlu dilakukan upaya yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tersebut berkorelasi dengan pemerataan. Sumbangan sector primer pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan masih perlu dioptimalkan. Masih perlu peningkatan dukungan peningkatan SDM Petani, subsidi alsintan dan implementasi teknologi tepat guna di bidang pertanian (*smart farming*) untuk meningkatkan produksi. Menyadari bahwa sector primer adalah penyedia lapangan kerja terbanyak, serta pendukung ketahanan pangan, maka sangat relevan menjadi focus pembangunan jangka panjang ke depan.



#### 4. Belum optimalnya iklim investasi di daerah.

Terbatasnya daya dukung dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik yang terkait dengan regulasi dan sarana-prasarana harus menjadi perhatian dalam rencana pembangunan jangka panjang. Salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian adalah stabilitas sosial dan politik serta dukungan masyarakat terhadap investasi daerah, agar kesejahteraan ekonomi dapat dipacu lebih lebih cepat.

#### 5. Kesenjangan pendapatan masyarakat

Tingkat kesenjangan pendapatan Kabupaten Pamekasan yang diukur dengan capaian Indeks Gini tahun 2022 sebesar 0,305 relative rendah di dibandingkan dengan Provinsi Jatim (0,37) dan Nasional (0,381). Namun dalam jangka panjang perlu diwaspadai jika pertumbuhan sector perdagangan di kawasan perkotaan lebih cepat dari sektor pertanian di perdesaan berpotensi memperlebar jarak antara kelompok kaya dengan kelompok miskin.

#### 6. Pengurangan pengangguran masih belum optimal

Angka pengangguran yang dicerminkan oleh indicator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan tahun 2022 sebesar 3,11 % relative lebih baik dari Jawa Timur (5,49%) dan Nasional (5,86%). Dengan demikian, tingkat pengangguran tetap perlu mendapatkan perhatian yang besar di waktu yang akan datang.

#### 7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan resiko kenaikan emisi gas rumah kaca

Kinerja Pembangunan lingkungan hidup yang diukur dengan indicator IKLH pada tahun 2022 sebesar 64,06. Capaian ini berada di bawah capaian nasional sebesar 72,42 dan Jawa Timur sebesar 69,92. Secara empiric



menunjukkan bahwa permasalahan dalam kualitas lingkungan Kabupaten Pamekasan perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan jangka panjang.

## 8. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar

Pemenuhan infrastruktur inklusif yang berkualitas dan merata masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan sumberdaya pembangunan dan tuntutan ketersediaan infrastruktur jalan, permukiman, drainase, perhubungan, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup masih perlu mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan jangka panjang.

## 9. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan daerah

Peningkatan tatakelola pemerintah yang bersih dan kuat perlu ditingkatkan dalam rangka menghadapi ketidakpastian di masa depan. Pada sisi lain juga diperlukan karakter aparatur yang kompeten, kredibel dan lincah (*agile*) dalam menciptakan inovasi pelayanan public berbasis *Teknologi, Informasi dan Komunikasi* (TIK) sebagai implementasi Transformasi Digital secara massif.

## 10. Tingkat kesetaraan dan keadilan gender belum optimal

Tingkat Kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan. Capaian IPG Kabupaten Pamekasan sebesar 86,83. Pada sisi lain perhatian terhadap kelompok disable, kaum perempuan dan pemuda masa depan sebagai generasi pemegang kepemimpinan perlu mendapatkan perhatian khusus, agar memiliki kesiapan mental, spiritual dan *lifeskill* dalam menyambut pembangunan masa depan.



11. Potensi ancaman terhadap degradasi moral dan menjauhkan dari nilai-nilai luhur agama dan budaya serta ketertiban dan ketentraman umum

Potensi ancaman terhadap degradasi moral dan menjauhkan dari nilai-nilai luhur agama dan budaya serta ketertiban dan ketentraman umum perlu mendapatkan perhatian. Derasnya arus informasi dan komunikasi digital global perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agama dan budaya yang sistematis baik secara formal maupun informal.

### **3.2. Isu Strategis Daerah**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dirumuskan dengan berdasarkan pada permasalahan pembangunan daerah yang telah teridentifikasi serta dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang di tataran global, nasional, maupun regional, dan hasil kajian lingkungan hidup strategis. Isu strategis daerah ini menjadi rujukan dalam merumuskan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

#### **3.2.1. Isu Strategis Global**

Isu strategis global didasarkan pada megatren global yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan isu yang berkembang pada KTT G-20 di Bali.

1. Isu Strategis dan Tantangan Megatren Global penting dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan yang akan merubah paradigma pembangunan global, meliputi:



## 1) Perkembangan Demografi Global

Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh dari 7,6 miliar saat ini menjadi 9,8 miliar pada Tahun 2050 (PBB, 2017). Pertumbuhan ini akan didistribusikan secara tidak merata antarwilayah dan masing-masing negara. Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia karena menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir.

## 2) Geopolitik dan Geoekonomi

Adanya dinamika geopolitik global kedepan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik kedepan dikawasan lainnya. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Pada Tahun 2050, kontribusi ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71%. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

## 3) Perkembangan Teknologi

Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi dan berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi sehingga perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.



#### 4) Peningkatan Urbanisasi Dunia

Menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

#### 5) Konstelasi Perdagangan Global

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan Intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kerja sama kawasan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.



## 6) Tata Kelola Keuangan Global

Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency (CBDC)* dan *FinTech*.

## 7) Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% terhadap populasi dunia.

## 8) Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

## 9) Perubahan Iklim

Dengan adanya krisis peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual (BaU)* menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

## 10) Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*)

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara



diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu utama yang diusung Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 adalah:

1) Transisi Energi Berkelanjutan

Memberikan akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk semua tujuan.

2) Transformasi Digital

Tujuan dari transformasi digital adalah menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3) Arsitektur Kesehatan Global

Tema penguatan arsitektur global itu dibagi lagi ke dalam tiga subtema terdiri dari (1) membangun ketahanan sistem kesehatan global, (2) harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan (3) memperluas manufaktur global serta pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, mitigasi, dan respons. Saat ini akses terhadap solusi medis masih tidak setara, utamanya di negara-negara berkembang, sehingga diperlukan mekanisme permanen untuk mendorong akses setara terhadap solusi medis.

### **3.2.2. Isu Strategis Nasional**

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, antara lain :



1. Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat.

Kondisi produktivitas yang rendah dibandingkan negara-negara yang menuju negara maju lainnya di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah

2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN).

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

3. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah.

Beberapa faktor penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan antara lain adalah karena terjadinya pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Selain itu, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, semakin



berkurangnya daya dukung lahan pertanian, serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum.

#### 4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata.

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.

#### 5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut.

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.

#### 6. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi.

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low-skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.



7. Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas.

Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

8. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Di samping itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.

9. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas.

Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

10. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal.

Ketertinggalan produktivitas terjadi pada tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga



kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

## 11. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif karena proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.

## 12. Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

## 13. Ketimpangan Antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi.

Secara umum dikarenakan masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.



### 3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Berikut adalah identifikasi isu strategis di Jawa Timur dalam rentang waktu pembangunan di Tahun 2025-2045 :

1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.

2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.



### 3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

### 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi serta daya saing pendidikan dan pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi.

Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

### 5. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim.



Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan linkage dan logistik (supply-value chain) dan hub pangan (food hub). Ke depan diperlukan upgrading PIA Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub dengan didukung oleh pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulnya susut dan sisa Pangan/Food Loss and Waste (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW.

Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan/agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen



antisipasi perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing mendunia bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

## 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian

merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi.

Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor



perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau Business As Usual (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

## 7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola



pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik juga menjadi sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial.

Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan kelembagaan dan pembudayaan nilai – nilai pancasila.

### 3.2.4. Isu strategis dalam KLHS RPJPD Kabupaten Pamekasan

Adapun isu strategis dalam KLHS RPJPD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :



#### ASPEK SOSIAL

1. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender.



#### ASPEK EKONOMI

3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan PAD.



#### ASPEK LINGKUNGAN

4. Ketersediaan dan Aksesibilitas Air Bersih;
5. Penurunan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Penurunan Kualitas Lahan dan Daya Dukung Pangan;



#### ASPEK HUKUM DAN TATA KELOLA

7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.

### 3.2.5. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045

Selanjutnya, mengacu pada hasil telaah terhadap Isu Strategis Pembangunan jangka panjang Internasional, Nasional, Provinsi Jawa Timur dan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, maka dapat dirumuskan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini;



## 1. Pengentasan kemiskinan secara terpadu

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, termasuk yang dialami oleh Kabupaten Pamekasan.

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan saat ini telah dilakukan melalui perlindungan sosial yang beragam. Perlindungan sosial merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan. Perlindungan sosial saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Saat ini, tonggak dari sistem perlindungan sosial telah diperkuat melalui lahirnya



Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem perlindungan sosial akan terus mengalami perkembangan untuk menyediakan perlindungan dan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

2. Percepatan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu daerah, karena pada dasarnya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Pembangunan Manusia dengan peta jalan yang jelas dan terukur dan dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kontribusinya terhadap pencapaian Visi Indonesia 2045. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

3. Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, yang diikuti dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan



sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian dapat mengurangi tingkat pengangguran, menyediakan ketersediaan barang/ jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang pada ujungnya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Ketahanan dan kemandirian pangan.

Semakin lama masyarakat mendiami suatu wilayah dalam rangka mencukupi kebutuhan untuk kelangsungan hidup maka dibutuhkanlah sumberdaya-sumberdaya khususnya pangan. Jumlah penduduk yang semakin banyak adalah nilai multiplier bagi sumberdaya pangan yang mengalami surplus maupun defisit bergantung pada pola pangan dan tingkat ketahanan pangan dan kemandirian suatu daerah. Semakin jumlah penduduk memiliki implikasi terhadap tingkat konsumsi pangan dan memiliki pengaruh terhadap luasan produksi pangan.

#### 5. Peningkatan daya dukung iklim investasi (penanaman modal)

Peningkatan daya dukung iklim investasi (penanaman modal) berupa regulasi dan sarana-prasarana yang memadai bagi tumbuh dan berkembangnya perdagangan dan industry yang terintegrasi dengan sector pertanian (dalam arti luas).



6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan resiko bencana, dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Adanya penurunan kualitas lingkungan hidup serta berkurangnya sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang dan apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas

7. Pemenuhan infrastruktur dasar inklusif yang berkualitas dan merata.

Pemenuhan infrastruktur inklusif yang berkualitas dan merata masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan sumberdaya pembangunan dan tuntutan ketersediaan infrastruktur jalan, permukiman, drainase, perhubungan, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup masih perlu mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan jangka panjang

8. Penguatan tata kelola pemerintah yang bersih dan lincah (*agile*), pelayanan public yang inovatif, dan Transformasi Digital secara massif

Penguatan tata Kelola pemerintahan harus memiliki prinsip kesetaraan dan kesamaan di dalam perlakuan terhadap masyarakat pada segala aspek penyelenggaraan dengan mengutamakan kejujuran, efektifitas, efesiensi, transparansi dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan



yang agile adalah yang mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta

## 9. Internalisasi nilai-nilai agama, budaya dan kesetaraan gender

Potensi ancaman terhadap degradasi moral dan menjauhkan dari nilai-nilai luhur agama dan budaya. Derasnya arus informasi dan komunikasi digital global perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agama dan budaya yang sistematis baik secara formal maupun informal.

Perempuan memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengatasi ketimpangan gender dan memberdayakan perempuan adalah langkah penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, kesehatan, kepemimpinan, partisipasi politik, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan, perempuan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan.



## BAB 4

### VISI DAN MISI DAERAH

Proses perumusan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 didasarkan pada permasalahan pembangunan dan isu strategis jangka panjang daerah. Isu Strategis sebagaimana dimaksud terdiri atas telaah terhadap Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dalam upaya untuk menselaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan dengan Visi Misi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan telaah terhadap terhadap cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, dan Misi Jangka Panjang Nasional sebagaimana dituangkan dalam doumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 serta melakukan penelaahan pada dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Penyelarasan muatan sebagaimana diuraikan di atas mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

#### 4.1 Telaah terhadap Visi dan Misi RPJPN 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045: **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**, menjadi titik tolak bagi seluruh Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam penyusunan Misi pembangunan jangka panjangnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pada sub bab

selanjutnya akan dilakuka telaah terhadap Visi dan Misi pembangunan jangka Panjang nasional dan provinsi. Proses penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu *Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur*. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir RPJP Nasional**



Sumber: RPJPN 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045, selanjutnya diwujudkan dalam kondisi kondisi terbaik aspek sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi namun juga terbuka terhadap inovasi yang berkelanjutan.

**Gambar 4.2**  
**Visi Indonesia Emas 2045**



Sumber: RPJPN 2025-2045

***Bersatu***

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem



hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

### ***Berdaulat***

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

**Ketahanan:** Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter. negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.

**Kesatuan:** Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal

Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

**Mandiri:** Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain; karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

**Aman:** Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dalam negeri, lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

### ***Maju***

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum Internasional.

**Beradab:** Indonesia memiliki karakter dan jati diri sebagai bangsa yang besar, memiliki sumber daya manusia yang unggul, berbudaya maju, serta mampu berkontribusi pada peradaban dunia.

**Berdaya:** Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan

dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

**Modern:** Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

**Inovatif:** Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

**Tangguh:** Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.

**Adil:** Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan



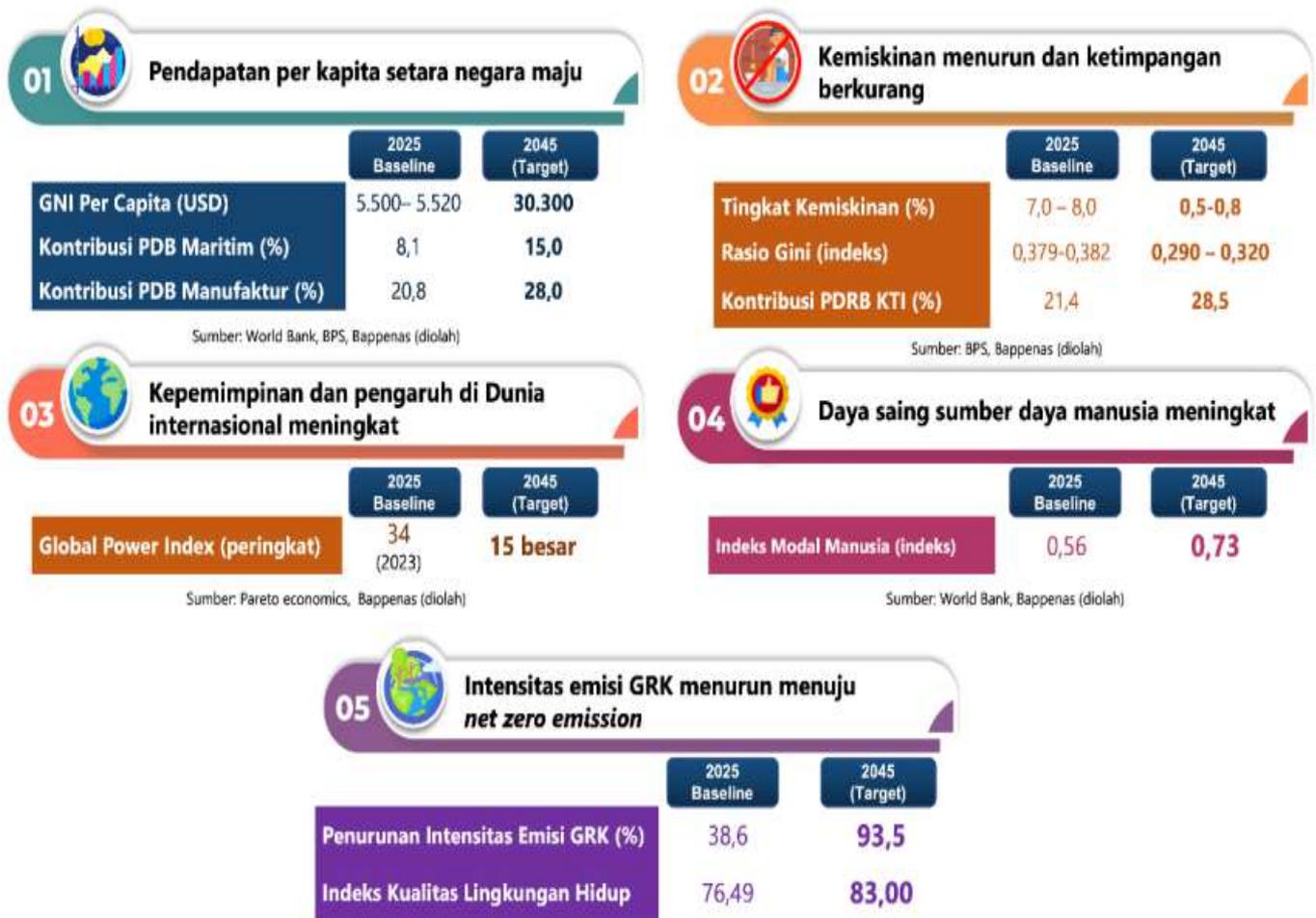
lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

**Berkarakter:** Bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersumber dari jiwa Pancasila sehingga menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dalam berkebudayaan Indonesia.

### ***Berkelanjutan***

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan pernuhunan hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

**Gambar 4.3**  
**Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045**



Sumber: RPJPN 2025-2045

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 4.4**  
**Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Indonesia Emas 2045**



Sumber: RPJPN 2025-2045

Berdasarkan gambar di atas, diketahui terdapat 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan tahun 2045 yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
- 2. Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas, melalui peningkatan inovasi, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau,



transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan;

- 3. Mewujudkan transformasi tatakelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
- 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
- 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
- 6. Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
- 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
- 8. Kestinambungan pembangunan** untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

## **4.2 Telaah Visi dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045**

Sebagai upaya untuk menjamin keselarasan Visi dan Misi daerah, terlebih dahulu perlu ditelaah rumusan Visi dan Misi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

**Gambar 4.5**  
**Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Pada Visi ini memiliki 4 (empat) pokok visi yang memiliki arti dan makna penting dalam menggambarkan cita-cita luhur masyarakat Jawa Timur di tahun 2045. Empat pokok-pokok Visi tersebut adalah.

### **Jawa Timur Berakhlak**

Berakhlak, dalam upaya mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari serta kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

### **Jawa Timur Maju, Mendunia**

Diksi "maju" ini merupakan komitmen sekaligus semangat (*spirit*) yang menegaskan bahwa provinsi Jawa Timur harus mencapai kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan sebagaimana dimaksud meliputi seluruh aspek pembangunan seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pada konteks Jawa Timur, kemajuan ini ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan pokok, pendidikan yang layak, terpenuhi jaminan Kesehatan, jaminan sosial utamanya saat memasuki usia tidak produktif (lansia), rendahnya tingkat kriminalitas, serta tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi. Selain itu, juga ditandai dengan kesempatan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan serta kesehatan. Kondisi tersebut merupakan penggambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur seperti Negeri Saba yang mencapai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur* adalah sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

Mendunia, mengandung pengertian bahwa Jawa Timur dikenal dan diketahui oleh masyarakat dunia, baik dalam hal stabilitas ekonomi makro terutama kinerja industri, perdagangan dan ekonomi syariah yang kuat untuk melakukan ekspansi -109- perdagangan luar negeri dan didukung dengan potensi sumber daya manusia yang unggul, serta sumber daya alam yang melimpah.

### **Jawa Timur Berkelanjutan**

Berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya dengan baik, tidak ada pemborosan dan tidak merusak lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kualitas kehidupan manusia pada masa kini dan pada masa depan. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh.

**Tabel 4.1**  
**Lima Sasaran Utama Visi Jawa Timur 2045**

<b>NO</b>	<b>SASARAN VISI</b>	<b>BASELINE 2025</b>	<b>TARGET 2045</b>
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	78,25 - 78,35	396,86 - 475,84
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	71,63	649,53
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	29,99 - 30,14	36,27 - 36,88
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,40-8,90	3,05 – 2,25
	b. Rasio gini (Indeks)	0,381-0,386	0,319-0,370
	d. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	14,19	12,36
3	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,78 (2023)	4,00



NO	SASARAN VISI	BASELINE 2025	TARGET 2045
4	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat		
	Indeks Modal Manusia	0,61	0,72
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	81,32

Wujud keselarasan antara Sasaran Utama Visi RPJPD Jawa Timur, diwujudkan dengan pencapaian target Sasaran Utama Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur, dimana targetnya telah ditentukan oleh nasional sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Penentuan target oleh nasional di atas sebagai upaya untuk memperkuat dukungan capaian pembangunan daerah terhadap target pembangunan nasional jangka panjang. Pada konteks yang lebih luas diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang berakhlak, berkeadilan, Makmur dan Sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Substansi Visi Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya Saing Global, Sejahtera, Dan Berkelanjutan, selanjutnya dioperasionalkan dalam Misi pembangunan Jangka Panjang. Adapun rumusan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan transformasi sosial**, dicapai dengan cara meningkatkan kualitas Masyarakat Jawa Timur yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, unggul, berakhlak, inovatif dan berdaya saing.
- 2. Mewujudkan transformasi ekonomi**, dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi produktif melalui industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.



- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**, dicapai dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur.
- 4. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi**, dicapai dengan cara mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran melalui kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas. Menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan dan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 5. Pembangunan kewilayahan dan penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan**, dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan pusat-pusat produksi (agropolitan) dan distribusi (metropolitan) serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 6. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan**, dicapai dengan cara Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk generasi saat ini dan yang akan datang guna meningkatkan taraf perekonomian Masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan.

#### **4.3 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

Penetapan Visi jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis tahun 2025-2045. Pada penyusunan Isu Strategis juga diidentifikasi peluang dan tantangan serta berbagai factor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 juga dijadikan sebagai pijakan penting dalam perumusan Visi Pembangunan jangka Panjang. Selanjutnya mengacu pada

rumusan Visi Indonesia Emas tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan visi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, diketahui bahwa diksi visi bersifat besar, komprehensif, kuat dan dinamis serta terbuka terhadap berbagai inovasi masa depan. Visi dua puluh tahun ke depan menghindari pengikatan pada sektor, bidang dan lingkup lain yang justru mempersempit cakupan visi tersebut. Bertolak pada argumentasi tersebut, maka rumusan visi jangka Panjang Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.

**Gambar 4.6**  
**Visi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2025-2045**



Sumber: Bapperida Kabupaten Pamekasan, 2024

Berdasarkan pada ilustrasi Visi dan Pokok-pokok Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 di atas, maka terdapat empat pokok-pokok visi yang merupakan

intisari pembentuk Visi jangka panjang, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Pokok-Pokok Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

<b>VISI:</b> <b>"PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"</b>		
<b>NO</b>	<b>POKOK VISI</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b><i>RELIGIUS</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokok Visi "<b><i>Religius</i></b>" adalah suatu karakter masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Unsur visi ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Pamekasan yang toleransi dan sangat menghargai perbedaan.</li> </ul>
<b>2</b>	<b><i>INOVATIF</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokok Visi "<b><i>inovatif</i></b>" adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan / kreasi baru (kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan berbagai referensi jurnal menjelaskan arti inovatif merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk membuat dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh VUCA yaitu merupakan gabungan situasi, mulai dari <i>volatility</i> (perubahan terus menerus), <i>uncertainty</i> (ketidakpastian), <i>complexity</i> (kompleksitas), dan <i>ambiguity</i> (kerancuan).</li> <li>▪ Dengan demikian konteks Inovatif pada RPJPD adalah semangat dan komitmen Kabupaten Pamekasan untuk senantiasa merumuskan kebijakan yang terus mengikuti perubahan / dinamika yang terjadi sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang.</li> </ul>
<b>3</b>	<b><i>MAJU</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokok Visi "<b><i>Maju</i></b>" merupakan semangat (<i>spirit</i>), komitmen dan perspektif dalam pembangunan yang menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus berdampak pada kemajuan pada seluruh bidang kesejahteraan masyarakat. Menyadari adanya berbagai keterbatasan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh</li> </ul>



VISI: "PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"		
NO	POKOK VISI	PENJELASAN
		Kabupaten Pamekasan, maka semangat maju tersebut memberikan pesan bahwa pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kemajuan sebagaimana dimaksud tentu masih dalam koridor sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Kemajuan tersebut juga mencerminkan tingkat pengelolaan sumberdaya secara optimal menggunakan perpektif pembangunan yang ramah lingkungan (berkelanjutan) serta menjamin tidak ada masyarakat yang terabaikan.
4	<b>SEJAHTERA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pokok Visi "<b>Sejahtera</b>" merupakan unsur visi tertinggi suatu daerah yang memiliki makna yang luas. Secara konseptual, sejahtera merupakan suatu kondisi dimana seseorang manusia atau masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam jumlah dan kualitas yang baik, bebas dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan saling menghargai. Pada sisi lain, kesejahteraan juga di cerminkan dengan adanya keadilan, kesetaraan, dan terpenuhinya hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan politik serta kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.</li></ul>
5	<b>BERKELANJUTAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pokok Visi "<b>Berkelanjutan</b>" merupakan komitmen terhadap gerakan pelestarian lingkungan (<i>Sustainable Development</i>) dunia yang harus diimplementasikan hingga level daerah. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan ini harus menjadi perspektif sekaligus strategi</li></ul>

<b>VISI: "PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"</b>		
<b>NO</b>	<b>POKOK VISI</b>	<b>PENJELASAN</b>
		pembangunan yang selanjutnya dijadikan arus utama ( <i>policy mainstreaming</i> ) pada seluruh bidang pembangunan.

Visi beserta pokok-pokok visi RPJPD Kabupaten Pamekasan di atas diselaraskan dengan Visi rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jawa Timur. Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka Visi, Misi dan Arah Kebijakan harus diselaraskan dengan Provinsi dan Nasional.

Pada pokok visi harus mengandung unsur '*maju*' dan '*berkelanjutan*'. Kesamaan dan keselarasan pokok-pokok visi ini menjadi indikator bahwa arah pembangunan nasional dapat diterjemahkan dalam pembangunan provinsi dan tingkat pembangunan kabupaten dan kota. Secara detil visi sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar 4.7**  
**Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**  
**dengan Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur**

<b>SINKRONISASI VISI RPJPN, RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN PAMEKASAN</b>	
	<b>"NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"</b>
	<b>"JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, MENDUNIA, DAN BERKELANJUTAN"</b>
	<b>"PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"</b>

Keselarasan antara misi pembangunan jangka panjang di atas, dapat disusun berdasarkan hierarki maknanya sehingga membentuk Arsitektur Visi Pembangunan jangka panjang. Arsitektur Visi Pembangunan jangka panjang yang disusun secara tepat akan mempermudah pemahaman bagi seluruh *stakeholder* pembangunan, khususnya pembuat kebijakan daerah (*policy maker*). Arsitektur Visi Pembangunan jangka panjang terdiri atas unsur pokok-pokok visi, antara lain *Religius, Maju, Inovatif, Sejahtera* dan *Berkelanjutan*. Religius adalah karakteristik masyarakat Pamekasan yang merupakan modal social pembangunan, dalam penerapannya sebagai pondasi pembangunan. Keberlanjutan adalah pendekatan sekaligus strategi pembangunan yang dipergunakan. Sedangkan maju merupakan sasaran pembangunan terhadap berbagai capaian pembangunan yang mensyaratkan keunggulan sebagai hasil dari kinerja yang berkualitas. Kemudian kata sejahtera adalah tujuan utama pembangunan, sebagaimana disajikan dalam deskripsi pokok visi diatas. kemudian ditutup dengan kata Berkelanjutan. Diksi kata ini menegaskan tentang semangat pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada ketentuan Inmendagri Nomor 1 tahun 2024, maka terdapat sasaran Visi RPJPD. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan memiliki unsur yang identik dengan rencana jangka panjang nasional (RPJPN), dan rencana jangka panjang provinsi Jawa Timur (RPJPD).

**Tabel 4.3**  
**Keselarasan sasaran utama visi Pembangunan Kabupaten Pamekasan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur**

NO.	SASARAN UTAMA VISI PEMBANGUNAN 2025-2045		
	RPJPN	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJPD KABUPATEN PAMEKASAN
1	Pendapatan per kapita setara dengan negara maju	Peningkatan Pendapatan per Kapita	Peningkatan Pendapatan per Kapita
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing
4	Daya saing sumberdaya manusia meningkat	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>

Adapun target sasaran visi RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Target Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan**

NO	SASARAN VISI	BASELINE 2025**	TARGET 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	20.881,25	54.260,261
	Kontribusi PDRB Sub Kategori Perikanan (%)	10,33	10,43



<b>NO</b>	<b>SASARAN VISI</b>	<b>BASELINE 2025**</b>	<b>TARGET 2045</b>
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	7,57-7,96	9,58-10,23
<b>2</b>	<b>Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan</b>		
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,58-11,42	0,95-0,28
	Rasio gini (Indeks)	0,348	0,177
	Kontribusi/Distribusi PDRB ADHB Pamekasan terhadap total PDRB ADHB Jawa Timur (%)	0,71	0,99
<b>3</b>	<b>Tata kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing</b>		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70,15	93
	Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,75
<b>4</b>	<b>Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia</b>		
	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,32	70,54
<b>5</b>	<b>Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i></b>		
	Penurunan intensitas emisi GRK Kumulatif (%)	0,05	0,44

Sasaran Visi RPJPD sebagaimana disajikan di atas, menjadi pijakan dalam perumusan indikator jangka panjang lainnya. Indikator jangka panjang sebagaimana dimaksud adalah indikator utama pembangunan sebagaimana akan disajikan dalam bab lima dokumen ini.

Mengacu pada penjabaran dari Visi di atas, maka perlu dirumuskan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan. Misi merupakan penjabaran dari pokok-pokok Visi agar lebih operasional sehingga dapat diterjemahkan dalam dokumen perencanaan di bawahnya. Misi RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RPJPD di atas, maka RPJPD Kabupaten / Kota dihimbau untuk merumuskan misi jangka Panjang sesuai dengan substansi 8 (delapan) misi RPJPN.

**Tabel 4.5**  
**Delapan Misi (Agenda) RPJPD Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2025-2045**

URAIAN	MISI (Agenda) PEMBANGUNAN		
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN
Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas	Mewujudkan Transformasi Sosial Berkeadilan.
	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Bertumpu pada Potensi Strategis Daerah.
	Transformasi Tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif.
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penguatan Daya Saing Daerah.
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berkeadilan dan Berbudaya.

URAIAN	MISI (Agenda) PEMBANGUNAN		
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata.
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas.
	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun penjabaran dari masing-masing Misi Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pamekasan di atas adalah sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Transformasi Sosial Berkeadilan**

Transformasi Sosial sesuai dengan arah kebijakan RPJMN meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. Pemerintah berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga tercipta sumber daya manusia (SDM) yang religius dan unggul. SDM yang unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, kreatif dan inovatif, berdaya saing, menguasai imtak dan iptek, serta berwawasan kebangsaan. Sedangkan SDM yang religius adalah gambaran tentang masyarakat kabupaten Pamekasan ke depan yang memiliki pranata social yang santun, toleran, terbuka, ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai

agama dan budaya. Sedangkan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

## **2. *Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Bertumbuh pada Potensi Strategis Daerah***

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang menjadi pemicu dan stimulus bagi meningkatnya aspek-aspek kualitas hidup manusia lainnya. Secara teoritik disampaikan bahwa pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang baik, maka masyarakat akan dapat secara mandiri meningkatkan konsumsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Potensi strategis daerah meliputi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri terus dikelola seoptimal mungkin guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. pengembangan agrobisnis, koperasi, usaha mikro, ekonomi kreatif dan pariwisata.

## **3. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif***

Tatakelola pemerintahan yang bersih merupakan factor penting yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa melalui pemerintahan yang baik, maka akan mendukung pemerintahan yang bersih, kuat, efektif dan



efisien dalam menghadapi tantangan dan hambatan di masa depan. Sebagai upaya mengantisipasi ketidakpastian dalam periode ke depan, maka selain tatakelola pemerintahan yang bersih dan kuat sangat diperlukan. Pada sisi lain juga diperlukan pembangunan aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten, kredibel dan gesit, sehingga dapat mewujudkan pelayanan public inovatif, berkualitas berbasis digital.

#### **4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penguatan Daya Saing Daerah**

Secara komseptual, prasyarat utama pembangunan daerah dapat berlangsung dengan baik adalah terwujudnya kestabilan dalam masyarakat. Misi ini mendorong terciptanya ketentraman, ketertiban umum dalam masyarakat melalui regulasi yang tepat didukung oleh kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap norma serta aturan yang berlaku. Selain itu, stabilitas kondisi ekonomi makro juga menjadi factor pendukung penting stabilitas pembangunan daerah. Karena masyarakat yang sejahtera cenderung lebih tertib dan aman. Sedangkan manifestasi dari kemajuan daerah Adalah meningkatnya daya saing daerah pada berbagai bidang pembangunan. daya saing daerah merupakan suatu capaian yang mengindikasikan bagaimana manajemen pemerintah suatu daerah telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

#### **5. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berkeadilan dan Berbudaya**

Pamekasan merupakan daerah religius dengan karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama. Melalui modal dasar pembangunan tersebut maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang setara dan tentram. Harmoni sosial adalah keselarasan di tengah masyarakat yang beragam. Harmoni sosial dapat timbul apabila ada keserasian di tengah berbagai perbedaan

yang ada. Tiap individu mempunyai perbedaan latar belakang, ras, suku, sampai agama. Perbedaan tersebut tak jarang menimbulkan perpecahan apabila tidak ada nilai toleransi. Harmoni sosial merupakan bentuk ekspresi konkret dari sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila. Harmoni sosial mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang hidup melalui berbagai bentuk kearifan lokal yang multikultur. Spirit dasar inilah yang akan dikembangkan untuk menciptakan suasana pembangunan yang kondusif dalam jangka panjang.

#### **6. *Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata***

Pembangunan kewilayahan dalam RPJPD menjadi kata kunci dalam optimalisasi sumberdaya pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Melalui kebijakan kewilayahan yang tepat, maka potensi agropolitan, pariwisata, industri dan perdagangan dapat menjadi penopang percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Pembangunan wilayah yang merata juga memberikan peluang yang luas bagi berkembangnya koperasi, Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 17 sektor secara lebih massif. Hal ini disebabkan karena akses dan konektivitas yang menstimulus pergerakan orang dan barang akan menggerakkan sektor riil (*Real Sector*) dalam perekonomian. Sektor Riil adalah 'aliran darah' dan konektivitas antar daerah diilustrasikan sebagai 'urat nadi' pembangunan. Sebagaimana tubuh manusia, jika berbagai wilayah mengalami peningkatan dinamika sektor riil ibarat dialiri aliran darah yang akan menyehatkan daerah tersebut yang ditandai dengan eskalasi kegiatan ekonomi yang lebih masif dan produktif.

#### **7. *Memantapkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas***

Upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar menjadi faktor penunjang dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan. Konsep pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan tidak terlepas dari arah pembangunan kewilayahan dan sector sesuai dengan



permasalahan dan Isu Strategis. Secara umum, keberadaan infrastruktur harus dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan sektor strategis.

## **8. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Misi ini sangat relevan dengan isu strategis dunia yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Menyadari bahwa Pamekasan merupakan bagian dari daerah yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, maka kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan menempatkan pembangunan lingkungan hidup sebagai salah satu misi pembangunan jangka panjang.

## **BAB 5**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Rumusan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok memiliki peran penting untuk menjembatani misi pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan dalam 45 (empat puluh lima) indikator pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ tentang penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Indikator pembangunan tersebut mencerminkan tujuan pembangunan pada setiap lima tahun tahapan pembangunan.

#### **5.1. Arah Kebijakan**

Sesuai dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka penyusunan Arah Kebijakan mengacu pada Bab IV dan Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tentang Perencanaan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas. Pada sisi lain, perumusan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan juga mengacu pada Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

Substansi dokumen RPJPN yang mendasari Arah Kebijakan RPJPN meliputi, (1) muatan dalam Bab IV mengenai Transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas, yang dijabarkan dalam Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tatakelola guna mencapai tujuh belas tujuan pembangunan nasional jangka Panjang, (2) Arah Kebijakan tentang

Perencanaan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas. Pada muatan pertama, arah kebijakan transformasi nasional mendasarkan pada kata kunci tahapan sebagai berikut:

**Gambar 5.1**  
**Milestone Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

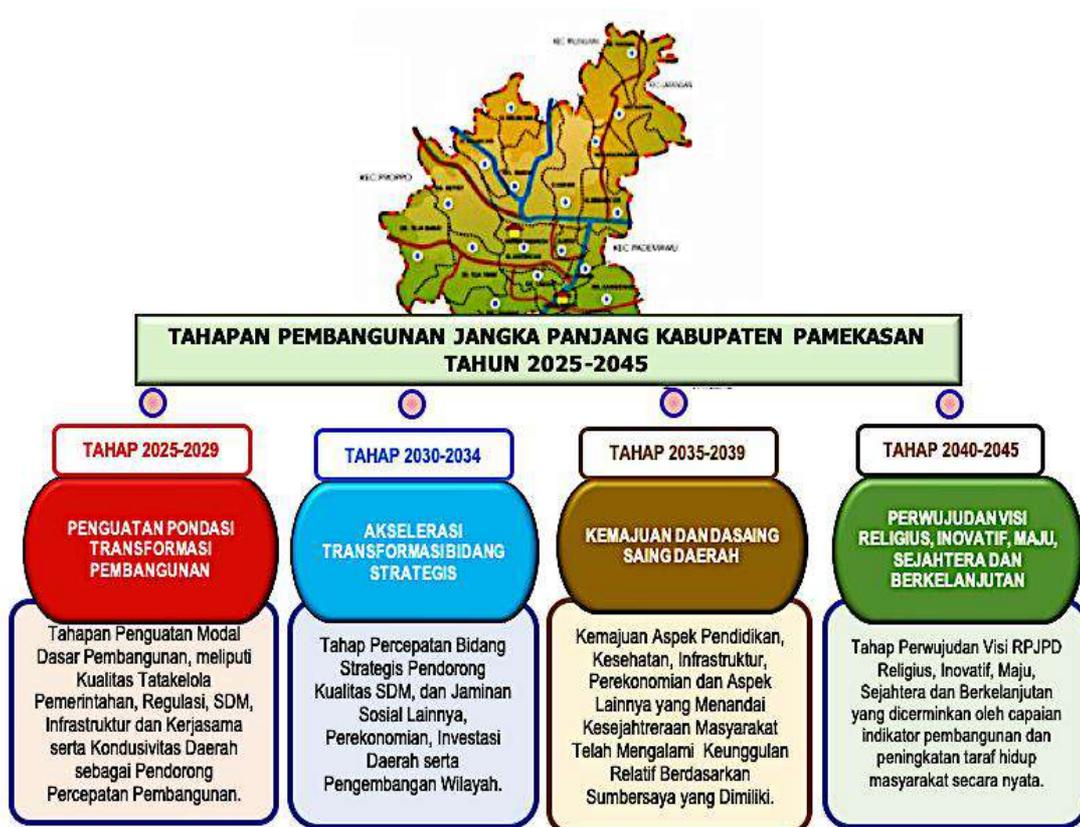


Sumber: Dokumen RPJPN 2025-2045

Berdasarkan pada gambar di atas, maka transformasi menuju Indonesia Emas menjadi acuan dalam penyusunan Arah Kebijakan RPJPD kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045. Dimana tahapan / *milestone* tersebut meliputi bidang *social, ekonomi dan Tatakelola*, yang selanjutnya diterjemahkan pada tahapan (1) *Perkuatan Fondasi Transformasi*, (2) *Akselesari transformasi*, (3) *Ekspansi Global* dan (4) *Perwujudan Indonesia Emas*. Sedangkan Arah Kebijakan yang terkait dengan Perencanaan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas, berpijak pada kebijakan transformasi kewilayahan (*spatial*). Kebijakan kewilayahan merupakan desain pengembangan wilayah masa depan secara terintegrasi dan terpadu, sehingga setiap wilayah sasaran memiliki tema dan peran kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Peran dan fungsi kewilayahan inilah yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan kewilayahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesesuaian kebijakan kewilayahan antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota sangat menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pamekasan dirumuskan dengan mengacu pada isu strategis, telaah terhadap Arah Kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur, maka secara komprehensif disajikan dalam table di bawah ini. Secara umum pentahapan pembangunan Kabupaten Pamekasan dirumuskan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai sumberdaya dan peluang yang dimiliki.

**Gambar 5.2**  
**Tahapan Pembangunan Limatahunan RPJPD Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2025-2045**



Sumber: FPD Kabupaten Pamekasan, 2023

Berdasarkan pada tahapan umum dalam *milestone* pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan di atas, maka tahap selanjutnya adalah menjabarkan dalam Arah Kebijakan sesuai dengan Misi RPJPD kabupaten Pamekasan yang telah ditetapkan dalam bagian sebelumnya. Secara detail rumusan Arah Kebijakan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Arah Kebijakan berdasarkan Misi RPJPD Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2025-2045**

<b>VISI RPJPD KABUPATEN PAMEKASAN</b> <b>"PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"</b>				
<b>MISI RPJPD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>			
	<b>2025-2029</b>	<b>2030-2034</b>	<b>2035-2039</b>	<b>2040-2045</b>
1) Mewujudkan Transformasi Sosial Berkeadilan.	Tahapan penyusunan pondasi pembangunan berupa penguatan kelembagaan (kebijakan inovatif, Sarpras, SDM, dan <i>Supporting System</i> Pendukung Lainnya) dan sumberdaya penyedia layanan Pendidikan-Kesehatan serta Layanan Sosial berkualitas serta merata.	Akselerasi peningkatan capaian Transformasi Sosial melalui penguatan akses Kesehatan, Pendidikan dan Sosial (PPKS) yang Relevan dengan permasalahan di Masyarakat. Upaya percepatan penanganan PPKS dilakukan melalui Integrasi Program Lintas Sektor ( <i>Cross Cutting Program</i> ) secara berkesinambungan (gradual)	Pemantapan Kaulitas SDM, Implementasi Sistem Penguatan Sosial Dasar yang Fokus dan Terencana yang Berdampak langsung Terhadap Peningkatan Derajat dan Kualitas Kehidupan. Selain itu juga pengembangan capaian trasformasi sosial berbasis Riset dan Inovasi.	Tahapan perwujudan SDM Pamekasan yang Religius, dan memiliki Daya Saing Regional dan Nasional, pada tingkat kesejahteraan Sosial yang Berkualitas dan Merata Berbasis nilai-Nilai Kesetaraan dan Keadilan.
2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Bertumpu pada Potensi Strategis Daerah.	Pembangunan pondasi transformasi ekonomi berupa penguatan kelembagaan sektoral, sarpras, dan kerjasama strategis yang berorientasi pada perluasan akses ekonomi wilayah untuk mendorong pengembangan potensi lokal serta regulasi dalam Melindungi Seluruh Pelaku Ekonomi secara adil.	Percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi (Transformasi Ekonomi) Melalui pengembangan Sistim Agrobisnis sebagai Motor Penggerak Perekonomian yang Terintegrasi dengan Perdagangan, Industri dan Jasa.	Tahapan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah (PMA dan PMDN) yang memperluas lapangan kerja. Selanjutnya mendorong Industri dan Perdagangan yang Bersinergi dengan Agrobisnis melalui Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG) dan ramah lingkungan ( <i>green Economy</i> ).	Tahapan Pemantapan Daya Saing Ekonomi hingga memiliki kontribusi Level Regional, Nasional dan Interasional melalui ekspansi produk unggulan daerah secara berkesinambungan.

<b>VISI RPJPD KABUPATEN PAMEKASAN</b>				
<b>"PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"</b>				
<b>MISI RPJPD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>			
	<b>2025-2029</b>	<b>2030-2034</b>	<b>2035-2039</b>	<b>2040-2045</b>
3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif.	Pembangunan pondasi Tatakelola Pemerintahan melalui Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana: Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta regulasi yang tertib. Implementasi Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip - prinsip <i>good governance dan clean government</i>	Percepatan transformasi tatakelola pemerintahan melalui Implementasi Manajemen Perubahan: Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel serta inovasi pelayanan public berbasis elektronik (digital).	Penguatan daya saing bidang tatakelola pemerintahan melalui Akuntabilitas dan Sistem Pengawasan yang berkualitas dan efektif serta efisien. Terciptanya system pengawasan yang efektif merupakan indicator level tata kelola pemerintahan yang lebih baik yang mendorong daya saing investasi / penanaman modal serta tingkat pelayanan publik yang berkualitas dan merata.	Tahapan ini merupakan perwujudan Tatakelola pemerintahan yang bersih serta aparatur yang kuat dan lincah ( <i>agile</i> ) dalam menghadapi eskalasi ketidakpastian yang tinggi (VUCA).
4) Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penguatan Daya Saing Daerah.	Tahapan pembangunan pondasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta daya saing daerah berupa penguatan pola koordinasi dengan lembaga sosial antar umat beragama, antar etnis yang menjamin terciptanya kestabilan daerah dalam mendukung Daya Saing Daerah secara berkala.	Tahapan Akselerasi Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penguatan Daya Saing Daerah melalui implementasi regulasi, kebijakan dan sistim yang menjamin stabilitas, ketertiban " <i>berbasis masyarakat</i> " serta penguatan daya saing daerah di berbagai bidang pembangunan.	Tahapan memajukan dan penguatan daya saing daerah melalui ekspansi pengembangan kerjasama strategis <i>Hexahelix</i> yang tidak mengikat dan saling menguntungkan dalam mendukung stabilitas dan daya saing daerah. Perluasan kerjasama dilakukan multi bidang khususnya yang terkait daya saing daerah.	Tahapan perwujudan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta daya saing daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

<b>VISI RPJPD KABUPATEN PAMEKASAN</b>				
<b>"PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"</b>				
<b>MISI RPJPD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>			
	<b>2025-2029</b>	<b>2030-2034</b>	<b>2035-2039</b>	<b>2040-2045</b>
5) Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berkeadilan dan Berbudaya.	<p>Tahapan pondasi ini dilakukan dengan Penguatan Konsolidasi Kelembagaan Unsur Masyarakat Berbasis Nilai Agama, Sosial dan Budaya sebagai media strategis untuk internalisasi nilai-nilai agama, budaya kepada masyarakat.</p> <p>Pada sisi pembangunan pondasi keadilan dan kesetaraan dilakukan dengan peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan melalui internalisasi nilai-nilai keadilan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>Tahapan Percepatan Internalisasi Nilai-nilai Religius, Inklusifitas dan penguatan implementasi nilai keadilan/kestaraan melalui kemitraan Hexahelix berkesinambungan.</p>	<p>Pencapaian misi ini sebagai unsur pendukung daya saing daerah melalui langkah nyata yang ditunjukkan dengan tindakan, baik unsur pemerintah maupun swasta yang berdampak pada investasi dan kunjungan wisata yang meningkat.</p>	<p>Tahapan ini merupakan perwujudan Kehidupan yang religius berpijak pada Sistem Kelembagaan Sosial yang Kokoh berbasis nilai-nilai agama dan budaya.</p>
6) Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata.	<p>Pembangunan pondasi pemerataan wilayah melalui Penguatan regulasi mengenai kebijakan Tata Ruang Wilayah sebagai Rencana Induk pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang menjamin pemerataan pembangunan, keadilan, kestabilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Tahapan percepatan pembangunan wilayah melalui terbangunnya titik / kawasan pertumbuhan baru (<i>Growth Poles</i>) hingga menyentuh wilayah yang relatif terbelakang agar memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.</p>	<p>Tahapan pemajuan dan peningkatan daya saing pada konteks kewilayahan berupa Integrasi pembangunan kewilayahan yang bersumber dari optimalisasi sumber-sumber pembiayaan non-APBD.</p>	<p>Tahapan mewujudkan titik-titik pertumbuhan wilayah baru (<i>New Growth Poles</i>) yang mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi lokal dalam kerangka sistem kewilayahan yang seimbang dan menjamin kualitas hidup masyarakat secara utuh.</p>

<b>VISI RPJPD KABUPATEN PAMEKASAN</b>				
<b>"PAMEKASAN RELIGIUS, INOVATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"</b>				
<b>MISI RPJPD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>			
	<b>2025-2029</b>	<b>2030-2034</b>	<b>2035-2039</b>	<b>2040-2045</b>
7) Memantapkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas.	Pembangunan pondasi pemantapan infrastruktur melalui Penguatan kelembagaan, regulasi dan kebijakan infrastruktur, sarana dan prasarana khususnya peningkatan daya dukung dan daya tampung wilayah sebagai bagian penting menjaga kualitas kehidupan masyarakat.	Tahapan akselerasi Akselerasi penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, melalui sinergi kemitraan pembiayaan infrastruktur eksternal yang tidak mengikat dan berkesinambungan.	Pemajuan dan peningkatan daya saing bidang infrastruktur berupa pemantapan Peningkatan daya dukung dan daya tampung wilayah melalui Matching program dengan <i>Proyek Strategis Nasional (PSN)</i> dan <i>Kawasan Strategis Nasional (KSN)</i> . Mengingat terdapat program afirmasi bagi pembangunan Madura.	Tahap perwujudan infrastruktur sarana prasarana terpadu lintas sektoral yang merupakan pendorong kekuatan Daya Saing Daerah serta kesejahteraan masyarakat.
8) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	Tahapan pembangunan pondasi bidang lingkungan hidup melalui pemantapan komitmen, regulasi dan dayadukung lainnya sebagai pondasi implementasi strategi pembangunan berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) di segala bidang serta berbagai pihak.	Tahapan Akselerasi pembangunan berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) melalui perluasan cakupan ke seluruh unsur <i>Pentahelix</i> (Pemerintah, Entitas Bisnis, Akademisi, Masyarakat, Media dan NGO) mengenai implementasi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.	Pada tahap ini pembangunan berkelanjutan telah menjadi arus utama pembangunan baik dalam lingkup pemerintah daerah, maupun unsur <i>Hexahelix</i> lainnya secara konsekuen dan bertanggungjawab.	Pada tahapan ini seluruh aspek pembangunan telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian penting dalam upaya untuk menjaga potensi dan kualitas lingkungan yang baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang ( <i>Next Generation</i> )

Arah Kebijakan jangka panjang sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam Arah Kebijakan Transformasi yang merupakan "mandatory" dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

**Tabel 5.2**

**Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Pamekasan**

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1.	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.</li> <li>2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan</li> <li>4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.</li> <li>5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan</li> <li>6. Peningkatan kesejahteraan tenaga Kesehatan</li> <li>7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> <li>8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.</li> <li>9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.</li> <li>10. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting</li> <li>11. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan</li> <li>12. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</li> <li>13. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan usia dini dan Pendidikan dasar</li> <li>14. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</li> <li>15. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</li> <li>16. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan</li> <li>17. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)</li> </ol>

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		18. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		19. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
		20. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		21. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		22. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		23. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
		24. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
		25. Percepatan Pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan
		26. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak)
		27. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
		28. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
		29. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.
		30. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah
		31. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.
		32. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		33. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		34. Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman.
		35. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		36. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
2.	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan &amp; kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian</li> <li>2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</li> <li>3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</li> <li>4. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</li> <li>5. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</li> <li>6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian</li> <li>7. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</li> <li>8. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian</li> <li>9. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah</li> <li>10. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.</li> <li>11. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan dan pembudidaya</li> <li>12. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan pembudidaya</li> </ol>

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		13. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan
		14. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
		15. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif
		16. Modernisasi sarana produksi perikanan.
		17. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
		18. Pengembangan kawasan strategis industry, yang terdiri dari kawasan agropolitan, Kawasan minapolitan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, dan kawasan Industri Hasil Tembakau.
		19. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan
		20. Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
		21. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan berkelanjutan
		22. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		23. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan
		24. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
		25. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau Pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan
		26. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		27. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
		28. Peningkatan layanan mobilitas Masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi mulimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
		29. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan
		30. Pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan ramah lingkungan
		31. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
		32. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
		33. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
		34. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
		35. Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis,
		36. Penguatan kerjasama dengan Kabupaten Sekitar dalam pengembangan potensi perekonomian yang kuat dari segi infrastruktur
		37. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
		38. Pembangunan Jalan Kabupaten terintegrasi dengan pembangunan jalan tol Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumeneh
		39. Transformasi tata Kelola kelembagaan dalam system transformasi public massal
		40. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah
		41. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
		42. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
		43. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>44. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>45. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis</p> <p>46. Peningkatan produktivitas BUMD</p> <p>47. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital</p> <p>48. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah</p>
3	Transformasi Tata Kelola	<p>1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan</p> <p>2. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p> <p>3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah</p> <p>4. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kabupaten Pamekasan, menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>6. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</p> <p>7. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat</p> <p>8. Penguatan integritas partai politik</p>
4		<p>1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas</p>

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
	Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif &amp; kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional</li> <li>3. Penguatan pengendalian inflasi daerah</li> </ol>
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</li> <li>2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan</li> <li>3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis</li> <li>4. Peningkatan upaya perlindungan Lahan Sawah dilindungi dan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</li> <li>6. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</li> <li>7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</li> <li>8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan</li> <li>9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan</li> <li>10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</li> <li>11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</li> <li>12. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat</li> <li>13. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan</li> </ol>

NO.	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
6	Implementasi Transformasi	1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
		2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
		3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pedesaan
		4. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
		5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
		6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria
		7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		9. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
		10. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.
		12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Nasional.
		13. Pemekaran wilayah desa dan kecamatan
		14. Perkuatan pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

## **5.2. Sasaran Pokok**

Sebagaimana dijelaskan dalam Inmendagri Nomor 1 tahun 2024, bahwa Sasaran Pokok merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Pada penentuan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan. Sasaran RPJPD kabupaten Pamekasan, dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis, Sasaran Utama RPJPN dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Timur. Sasaran pokok merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan dan sebagai ukuran untuk menentukan ketercapaian tujuan pembangunan jangka Panjang daerah.

Dengan demikian, tujuan pembangunan jangka panjang daerah dimanifestasikan dengan indicator sasaran pokok. Mengacu pada pedoman umum penyusunan RPJPD, Indikator yang digunakan adalah indikator makro yang menggambarkan kinerja pada level *dampak* sehingga merefleksikan kedalaman perencanaan jangka panjang yang lebih memberikan arahan umum pembangunan. Pada sisi lain, indicator harus merujuk pada 45 (empat puluh lima) indikator Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Empat puluh lima indikator tersebut selanjutnya disesuaikan dengan konteks daerah. Secara detil rumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam table di bawah ini.

**Tabel 5.3**  
**Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045**

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
						2025**	2045
1	Mewujudkan Transformasi Sosial Berkeadilan.						
		1. Terciptanya Pemerataan Akses Kesehatan Berkualitas dan Merata.	IE.1	Kesehatan untuk Semua			
					1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,83	78,89
					2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
					a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	121,49	19,59
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,15	4,50
					3. Penanganan Tuberkulosis:		
					a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment covarage) (%)	61,48	85
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85	90
					4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,90	98,90

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
						2025**	2045
		2. Terwujudnya Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas dan Merata	IE.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			
					5. Hasil Pembelajaran:		
					a) Capaian kabupaten/kota yang pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Literasi Membaca	53,77	65,36
					ii) Numerasi	47,07	57,21
					b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Literasi Membaca (%)	46,41	56,41
					ii) Numerasi (%)	32,60	39,63
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,56	10,36
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,71	13,99
					e) Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	9,73	11,76

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2025-2045

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
							2025**	2045
		3. Terwujudnya Jaminan Kesejahteraan Sosial Merata bagi Seluruh Masyarakat	IE.3	Perlindungan Sosial yang Adaptif				
					6.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,81-8,44	0,62-0,28
		7.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	14,02	72,27			
		8.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2,74	3,33			
		9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,81-1,61	1,10-0,69			
2	<b>Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Bertumpu pada Potensi Strategis Daerah.</b>							
		4. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal berbasis Inovasi (IPTEKS)	IE.4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				
					10.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,57-7,96	9,58-10,23
		11.	Pengembangan Pariwisata					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,67-0,75	0,77-0,85			
			b) Jumlah Kunjungan Wisata	162.875	257.000			
12.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,71	0,73					

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
						2025**	2045
				13.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
					a) Proporsi Jumlah UMKM Kabupaten/kota (%)	99,1	99,6
					b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	2,93	4,00
					c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,35	4,07
					d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,98	1,19
					e) Return on Aset (ROA) BUMD	0,80	2,79
				14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,74	0
				15.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	71,58	78,15
				16.	Tingkat Penguasaan IPTEK:		
					a) Indeks Inovasi Daerah	83,63	86,5-87,5
		5. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Rendah Emisi	IE.5		Penerapan Ekonomi Hijau		
				17.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
					a) Kontribusi/Distribusi Subsektor Pertanian	3,20	3,40

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
						2025**	2045
		6. Terciptanya Literasi Digital Masyarakat.	IE.6	Transformasi Digital			
					18. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Pengguna Teknologi Informasi dalam Tiga Bulan Terakhir		
					a) Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	83,53	91,00
					b) Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll)	50,39	70,00
		7. Menguatnya Kapasitas dan Daya Saing Daerah.	IE.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
					19. Indeks Perkembangan Harga	-6.39 - 8.95	3%
					20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,30-29,13	28,84-30,72
					21. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-13,03	-10,5
					22. ICOR	5,59	5,33
					23. Realisasi Investasi (Rupiah)	0,09	0,11

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
							2025**	2045
3	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata.							
		8. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Berkualitas da serta pengembangan Wilayah Terpadu.	IE.8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
					24.	Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
						a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	62	100
						b) Persentase Desa Mandiri (%)	1,12	8,99
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif							
		9. Mantapnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Inovatif	IE.9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
					25.	Indeks Reformasi Birokrasi	70,15	85,00
					26.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5
					27.	Indeks Pelayanan Publik	3,86	4,5
					28.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	**	81,50

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2025-2045

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
							2025**	2045
5	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penguatan Daya Saing Daerah							
		10. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban Umum dan partisipasi Masyarakat dalam Pemilu / Pilkada.	IE.10	Kebijakan Daerah Berkualitas, Keamanan Daerah, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu				
					29. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	35,41	70	
					30. Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk	152,6 (2022)	135	
					31. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	91,20 (2019)	98,72	
		11. Terwujudnya Ketangguhan Ekonomi dan Keuangan Daerah.	IE.11	Stabilitas Ekonomi Makro				
					32. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	**	0,60	
					33. Indeks Perkembangan Harga	-6,39-8,95	3%	
					34. Kontribusi/Distribusi Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan	1,90	2,3	
		12. Meningkatnya Daya Saing Daerah Level Regional maupun Nasional.	IE.12	Daerah yang Berdaya Saing dan Ketahanan Pangan				
					35. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,75	
					36. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	8,31	0,52	



NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
						2025**	2045
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	95,34	97,08%
					c) Pengelolaan Sampah		
					43. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	68,62	87
					44. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	30	100
<b>8</b>	<b>Memantapkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas</b>						
		16. Pemantapan Ketahanan Energi dan Pangan.	IE.16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
					45. Jumlah pembangkitan tenaga listrik	514.233.766	582.170.007
					46. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	12,63	2,35
					47. Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	127,5 (2021)	220
					48. Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan	88,71	92,71
					49. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	98,33	100

NO.	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE	TARGET AKHIR RPJPD
						2025**	2045
		17. Meningkatnya Resiliensi masyarakat terhadap Bencana	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
					50. Indeks Risiko Bencana (IRB)	106,38 – 105,33	104,83-84,50
					51. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
					a. Kumulatif (%)	0,05	0,44
					b. Tahunan (%)	0,13	1,06

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Pedoman Transisi**

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJPD ini, maka permasalahan pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari RPJPD periode selanjutnya, agar dapat ditanggulangi dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok pada periode selanjutnya.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada masa transisi pada tahun 2045-2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

#### **6.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045. Tujuan penyusunan kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan perencanaan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan Lima-tahunan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.



2. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 harus mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
3. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
4. Sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku, untuk menghadapi perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal.
5. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah beserta regulasi lainnya yang relevan.

### **6.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2045 merupakan evaluasi tahap (kategori) ketiga, yaitu evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD. Sehingga proses pengendalian dan evaluasi secara prinsip mengacu pada ketentuan pasal 297 dan pasal 298. Mengacu pada ketentuan pasal 297 dijelaskan bahwa lingkup pengendalian dan evaluasi hasil RPJPD meliputi;

- a. Realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. Realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah nasional.

Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi RPJPD dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.



Demikian Aturan Peralihan, Kaidah Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pj. BUPATI PAMEKASAN,  
  
MASRUKIN